

ISSN
2442-8094

Terakreditasi SK Nomor:
773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

Sosio Informa

Volume 6, No. 02, Mei - Agustus 2020

- Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial**
Soetji Andari
- Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia**
Johan Arifin
- Terapi Robot Bagi Lanjut Usia yang Mengalami Demensia**
Mu'man Nuryana
- Kekerasan Dalam Pacaran: Faktor Risiko dan Pelindung Serta Implikasinya Terhadap Upaya Pencegahan**
Binahayati Rusyidi, Eva Nuriyah Hidayat
- Transformasi Praktik Pekerjaan Sosial Menuju Masyarakat 5.0**
Meilanny Budiarti Santoso, Maulana Irfan, R. Nunung Nurwati
- Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia**
Atmaezer H. Simanjuntak, Rudy G. Erwinsyah
- Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS) Dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19**
Aris Tristanto

Sosio Informa	Volume 6	Nomor 02	Halaman 92 - 222	Jakarta Agustus 2020
---------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------------



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Sosio Informa

Volume 6, No. 02, Mei - Agustus 2020

ISSN 2442 - 8094

Sosio Informa merupakan nama baru dari majalah **Informasi**. Berdasarkan catatan; tahun 1979 dimulai dengan nama **Media Informatika** sebagai majalah populer; tahun 1995 namanya berubah menjadi **Informasi** sebagai majalah ilmiah yang mendapat akreditasi LIPI. Sesuai dengan catatan LIPI nama majalah perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman dan perlu meningkatkan mutu, maka sudah disepakati mulai tahun 2015 dengan nama **Sosio Informa**.

Frekwensi terbit : tiga kali setahun
(April, Agustus, Desember)

Alamat Redaksi:

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan,
Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III,
Jakarta Timur 13630
Phone : (021) 8017146
Fax. : (021) 8017126
Email : sosioinforma@gmail.com
Website: puslit.kemsos.go.id

PENASEHAT (Advisory Editor)

Prof. Dr. Syahbudin

PENANGGUNG JAWAB (Insured Editor)

Dra. Eva Rahmi Kasim, MSW

MITRA BEBESTARI (Peer Reviewer)

Ilmu Kesejahteraan Sosial:

- Edi Suharto, M.Sc, Ph.D
(Kementerian Sosial)
- Prof. Adi Fahrudin, Ph.D
(Universitas Muhammadiyah Jakarta)
- Binahayati Rusyidi, Ph.D
(Universitas Padjadjaran)
- Dr. Norulhuda Sarnon
(University Kebangsaan Malaysia)

Pengembangan Masyarakat:

Dr. Santoso Tri Raharjo

(Universitas Padjadjaran)

Psikologi:

Prof. Dr. M. Dahlan A. Malek

(Universitas Malaysia Sabah)

Antropologi:

Aoki Takenobu, Ph.D

(Ciba University)

KETUA REDAKSI (Chief Editor)

Drs. Achmadi Jayaputra, M.Si

WAKIL KETUA (Vice Editor)

Mu'man Nuryana, Ph.D

DEWAN REDAKSI (Editorial Board)

Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Dra. Mulia Astuti, M.Si
- Drs. M. Syawie, MS
- Dra. Ayudiah Amalia, M.Kesos

Psikologi

- Drs. Togiaratua Nainggolan, M.Si
- Dra. Alit Kurniasari, MPM

Kesejahteraan Sosial

- Dra. Husmiati, M.Soc.Sc, Ph.D
- Ir. Ruaida Murni

REDAKSI PELAKSANA (Managing Editor):

Johan Arifin, SIP

PEMERIKSA NASKAH (Copy Editor):

Muslim Sabarisman, AKS

EDITOR BAHASA INGGRIS (Transleter)

Samy Sriwulandari, SS

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Volume 6, Nomor 02, Mei - Agustus 2020

ISSN 2442 - 8094 Nomor Akreditasi: 773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

DAFTAR ISI	<i>Halaman</i>
■ PENGANTAR REDAKSI	iii
■ Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial Soetji Andari	92 - 113
■ Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Johan Arifin	114 - 132
■ Terapi Robot Bagi Lanjut Usia yang Mengalami Demensia Mu'man Nuryana	133 - 151
■ Kekerasan Dalam Pacaran: Faktor Risiko dan Pelindung Serta Implikasinya Terhadap Upaya Pencegahan Binahayati Rusyidi, Eva Nuriyah Hidayat	152 - 169
■ Transformasi Praktik Pekerjaan Sosial Menuju Masyarakat 5.0 Meilanny Budiarti Santoso, Maulana Irfan, R. Nunung Nurwati	170- 183
■ Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia Atmaezer H. Simanjuntak, Rudy G. Erwinsyah	184- 204
■ Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS) Dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19 Aris Tristanto	205- 222

PENGANTAR REDAKSI

Sosio Informa Volume 6, Nonor 2 tahun 2020 terbit pada bulan Agustus dengan tujuh artikel dengan membahas berbagai permasalahan kesejahteraan sosial.

Pertama, dengan artikel dengan judul; Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. Kedua dengan dengan judul; Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Ketiga dengan judul artikel; Terapi Robot Bagi Lanjut Usia Yang Mengalami Demensi. Keempat dengan judul artikel; Kekerasan Dalam Pacaran: Faktor Risiko dan Pelindung Serta Implikasinya Terhadap Upaya Pencegahan. Kelima dengan judul artikel; Transformasi Praktik Pekerja Sosial Menuju Masyarakat 5.0. Keenam dengan judul artikel; Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. Ketujuh dengan judul artikel; Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS) Dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19.

Selamat membaca,

Redaksi

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

Soetji Andari (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial/B2P3KS)

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL

SOSIO INFORMATIKA Vol. 6, No.02, Mei 2020, hal: 92-113

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peran profesi pekerja sosial dalam pendampingan sosial. Profesi pekerja sosial di Indonesia masih dianggap suatu pelayanan karitatif yang dapat dilakukan oleh semua orang. Peran pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitas sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung. Peran pekerja sosial sebagai pendamping sosial berupaya mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selain itu pekerja sosial berperan sebagai penghubung, memberikan kemudahan, serta memberikan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Profesi Pekerja Sosial sudah saatnya mendapatkan tempat dan ruang yang lebih besar di dalam penyelesaian permasalahan bangsa dengan meningkatkan keterampilan, nilai-nilai, dan metode yang dimiliki. Pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial sebagai pendamping dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan memerlukan organisasi layanan sosial dan kinerja profesional dilaksanakan secara terpadu dan integratif. Pekerja sosial sebagai sebuah profesi mengarah kepada profesionalisme mempunyai kompetensi yang tersertifikasi memiliki acuan kerja lebih produktif dan efektif berorientasi pada kebutuhan aktual masyarakat.

Kata Kunci: *peran, profesi, pekerja sosial, pendampingan sosial*

Johan Arifin (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

BUDAYA KEMISKINAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

SOSIO INFORMATIKA Vol. 6, No.02, Mei 2020, hal: 114-132

Abstrak

Penanggulangan kemiskinan menjadi sasaran utama program pembangunan sesuai dengan pengarusutamaan agenda MDGs dan SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025). Program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah berhasil menurunkan persentase angka kemiskinan, meskipun secara nominal jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Upaya penanggulangan kemiskinan yang pernah dan sedang dijalankan masih menghadapi berbagai tantangan dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Pada satu sisi pembangunan selama ini belum bisa “membebaskan” si miskin karena faktor budaya yang membelenggu. Pada sisi lain budaya kemiskinan menjadi pelampiasan masyarakat miskin yang tidak berdaya menghadapi cengkraman kapitalisme. Karakter khas kemiskinan masyarakat Indonesia menghendaki pendekatan struktural dan kultural secara seimbang. Nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang mendorong pada perubahan pola pikir menanggulangi kemiskinan perlu diangkat dalam program kebijakan

penanggulangan kemiskinan dengan lebih dulu memaknai ulang nilai-nilai budaya tersebut. Perlu diciptakan “budaya tanding”, yaitu memunculkan sebagian dari populasi suatu masyarakat yang secara kuat menganut atau memeluk satu atau lebih nilai-nilai budaya yang berbeda dengan nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan yang dominan. Kajian ini menjelaskan secara kualitatif deskriptif hambatan kultural dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Analisis didukung oleh data dan informasi sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan.

Kata Kunci: *penanggulangan kemiskinan, pembangunan, budaya kemiskinan, memaknai ulang, budaya tanding.*

Mu'man Nuryana (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

TERAPI ROBOT BAGI LANJUT USIA YANG MENGALAMI DEMENSIA

SOSIO INFORMA Vol. 6, No.02, Mei 2020, hal: 133-151

Abstrak

Sektor kesehatan dan kesejahteraan menghadapi tantangan menarik. Pertama, pesatnya penuaan penduduk diiringi penurunan jumlah pengasuh yang berimplikasi pada pengasuhan lanjut usia. Kedua, munculnya kesadaran baru pada terapi hewan yang berpotensi risiko penularan zoonosis, isu etika dan moral, perspektif budaya dan agama, sejarah dan keraguan. Ketiga, pesatnya perkembangan teknologi robotik dan kecerdasan buatan dalam menyikapi isu pengasuhan. Kondisi ini membawa implikasi pada alokasi sumber daya manusia dan dampaknya terhadap stabilitas pengiriman pengasuhan. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengetahui manfaat sosial, psikologis, fisiologis, dan klinis dari Paro, robot bantuan-sosial paling populer di dunia, dalam pengasuhan lanjut usia. Paro membentuk perilaku hewani dan menanggapi cahaya, suhu, suara, sentuhan dan postur sejalan dengan perputaran waktu. Hasil penelitian yang dilakukan di negara-negara maju menunjukkan bahwa Paro mendorong lanjut usia yang mengalami demensia untuk berkomunikasi di antara mereka dan memperkuat hubungan sosial individual, mempengaruhi hubungan, dan membantu mengatasi kesepian. Selain menurunkan stres dan kecemasan, Paro juga mampu menurunkan penggunaan pengobatan psikoaktif dan sakit medis pada klien demensia, dan efektif dalam intervensi terapeutik. Namun harganya mahal, hanya fasilitas pengasuhan sosial tertentu yang bisa mengaksesnya. Mengingat pengaruh positif, penggunaan Paro dengan menyertakan pengasuh bisa memperluas jangkauan terapeutik. Ada potensi untuk menggunakan Paro sebagai *companion robot* dalam pengasuhan lanjut usia dalam *setting* panti sosial, rumah sakit, keluarga dan komunitas. Nampaknya, intervensi robotik sedang mengalami pergeseran dari terapi bantuan-hewan menuju pengembangan cara-cara inovatif yang menghubungkan robot dengan lanjut usia.

Kata Kunci: *lanjut usia, demensia, terapi robot.*

Binahayati Rusyidi (Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran)

Eva Nuriyah Hidayat (Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran)

KEKERASAN DALAM PACARAN: FAKTOR RISIKO DAN PELINDUNG SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN

SOSIO INFORMA Vol. 6, No.02, Mei 2020, hal: 152-169

Abstrak

Para ahli dan peneliti menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan salah satu isu krusial di tingkat global yang dihadapi para remaja dan dewasa muda. Kekerasan dalam pacaran mencakup perilaku agresi secara fisik, emosional, verbal, sosial, dan seksual yang bertujuan mengendalikan dan menyakiti pasangan. Kekerasan dalam pacaran menimbulkan dampak negatif multidimensi bagi korban dan masyarakat. Namun demikian sebagian besar kajian tentang topik ini didasarkan pada konteks negara Barat atau maju. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan faktor-faktor risiko dan pelindung terhadap kekerasan dalam

pacaran di kelompok remaja serta implikasinya terhadap upaya pencegahannya. Kajian ini didasarkan pada kajian literatur yang dituntun oleh perspektif ekologi sosial yang memandang interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yang dapat diidentifikasi berada pada berbagai level lingkungan yang berbeda. Hasil dari kajian ini menunjukkan faktor-faktor yang meningkatkan potensi menjadi pelaku dan korban kekerasan dalam pacaran mencakup karakteristik individual, struktur dan interaksi dalam keluarga, karakteristik lingkungan teman sebaya serta kondisi komunitas masyarakat. Faktor-faktor pelindung yang mencegah atau mengurangi kemungkinan terlibat sebagai pelaku atau korban kekerasan dalam pacaran juga ditemukan di berbagai tingkatan lingkungan meskipun berbeda komprehensivitasnya dibandingkan faktor risiko. Kajian ini mengaitkan diskusi faktor risiko dan pelindung dengan upaya pencegahan kekerasan dalam pacaran untuk konteks Indonesia.

Kata Kunci: *kekerasan dalam pacaran, faktor pelindung, faktor risiko, upaya pencegahan, remaja.*

Meilanny Budiarti Santoso (Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran)

Maulana Irfan (Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran)

R. Nunung Nurwati (Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran)

TRANSFORMASI PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL MENUJU MASYARAKAT 5.0

SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 02, Mei 2020, hal: 170-183

Abstrak

Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek sosial berupa perubahan pola interaksi sosial sebagai fokus praktik pekerjaan sosial. Hal ini menjadi tantangan bagi profesi pekerjaan sosial, bukan hanya pada bagaimana melakukan intervensi, melainkan juga pada transformasi yang harus dilakukan dalam praktik berbasis teknologi. Namun demikian, situasi ini menciptakan peluang bagi praktik pekerja sosial karena dapat menjangkau lebih luas dan lebih banyak masalah sosial ataupun upaya peningkatan keberfungsian sosial penerima manfaat. Dengan menggunakan metode studi literatur, artikel ini bertujuan mengkaji tantangan dan peluang profesi pekerjaan sosial dalam menyongsong era 5.0 yang menempatkan kebermanfaatannya teknologi terutama bagi kepentingan manusia sebagai prioritasnya. Hasil studi menunjukkan profesi pekerjaan sosial telah melakukan transformasi pelayanan sosial bagi para penerima manfaat, sehingga produk sosial yang diciptakan dapat tersebar lebih luas dan lebih cepat tanpa batasan ruang dan waktu. Hal ini menunjukkan telah terjadi percepatan proses pemberian pelayanan sosial. Namun, jika dibandingkan dengan sektor bisnis, proses adopsi teknologi pada bidang pekerjaan sosial jauh terhambat. Berbagai perubahan yang terjadi menjadi tantangan dan peluang bagi profesi pekerjaan sosial dan entitas pendidikan bidang pekerjaan sosial sebagai institusi pencetak calon pekerja sosial yang berpeluang melakukan rekayasa sosial di tengah masyarakat.

Kata Kunci: *pekerjaan sosial, transformasi profesi pekerjaan sosial, digitalisasi pekerjaan sosial, masyarakat 5.0.*

Atmaezer H. Simanjuntak (Department of Anthropology, Northwestern University Evanston, Illinois, USA)

Rudy G. Erwinsyah (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)
KESEJAHTERAAN PETANI DAN KETAHANAN PANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19: TELAAH KRITIS TERHADAP RENCANA MEGAPROYEK LUMBUNG PANGAN NASIONAL INDONESIA

SOSIO INFORMA Vol. 6, No.02, Mei 2020, hal: 184-204

Abstrak

Pandemi COVID-19 yang melanda negara-negara di dunia memperlihatkan struktur “neokolonialisme” dan kebijakan “penyesuaian struktural” neoliberal berpengaruh buruk terhadap sistem kesehatan masyarakat dan memperparah kondisi krisis ketahanan pangan. Proses ini memperburuk malnutrisi akibat ancaman bencana keikliman global. Dalam rangka mengatasi krisis pangan, beberapa negara Global South memobilisasi petani kecil untuk mengamankan persediaan dan rantai pangan global melalui skema megaproyek kebun pangan skala luas. Ironisnya para petani semakin kesulitan mendapatkan makanan, memenuhi kebutuhan keluarga mereka, dan mengakses fasilitas kesehatan publik. Pada saat yang sama mereka dipaksa bekerja di lahan yang asing bagi mereka. Artikel ini menyoroti rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk membangun lumbung pangan nasional dengan mencetak 2,2 juta hektar sawah dan memindahkan 300.000 petani kecil atas nama ketahanan pangan nasional. Hipotesis dalam hal ini adalah kegagalan pemerintah dalam membangun tiga megaproyek kebun pangan skala luas seperti pada masa lalu. Melalui studi literatur yang dieksplorasi ialah irisan antara marjinalitas ekonomi dan kondisi kesehatan serta gizi. Narasi krisis pangan yang didengungkan oleh pemerintah diperkirakan berhasil menggerakkan lembaga-lembaga negara mengembangkan korporasi agrobisnis sebagai sirkuit baru untuk akumulasi kapital. Namun, proses tersebut menempatkan petani kecil sebagai korban. Pada akhirnya, kesehatan dan kualitas gizi petani kecil tidak membaik, malahan menempatkan mereka dalam lingkaran setan kemiskinan generasional. Mereka terus berada di bawah sistem ekonomi kapitalistik, dengan kemiskinan direproduksi oleh dirinya sendiri yang ditandai kondisi kekurangan gizi.

Kata Kunci: COVID-19, gizi, kebun pangan skala luas, kemiskinan, ketahanan pangan.

Aris Tristanto Program Doktor Studi Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Andalas DUKUNGAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL (DKJPS) DALAM PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

SOSIO INFORMA Vol. 6, No.02, Mei 2020, hal: 205-222

Abstrak

Pandemi COVID-19 berdampak pada aspek fisiologis, psikologis, dan sosial lanjut usia. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) dalam pelayanan sosial lanjut usia pada masa pandemi COVID-19. Analisis dalam artikel ini dilakukan melalui kajian pustaka. Instrumen penulis dalam artikel ini adalah daftar check list, skema penulisan dan format catatan penulisan. Teknik analisis dalam artikel ini adalah metode analisis isi. DKJPS kepada lanjut usia dapat dilakukan melalui pelayanan sosial lanjut usia berbasis institusi (*institutional based*), pelayanan sosial lanjut usia berbasis komunitas (*community based*), dan layanan berbasis rumah tangga (*home-based*). Bentuk DKJPS kepada lanjut usia berbasis institusi adalah pengoptimalan kegiatan bimbingan mental, agama, dan sosial bagi lanjut usia kategori mandiri. Sedangkan untuk lanjut usia yang tidak memiliki kemandirian (*bedridden*), bentuk DKJPS yang dapat diberikan adalah pelayanan yang lebih intensif terutama dalam hal kesehatan. Terkait bentuk DKJPS kepada lanjut usia berbasis komunitas adalah pendamping lanjut usia oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Dalam melakukan pendampingan sosial terkait DKJPS pendamping dapat mengajarkan kepada lanjut usia dan keluarganya tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Bagi lanjut usia yang terlantar karena tinggal sendiri di rumah, pendamping sosial harus mampu menggerakkan kelompok dukungan sosial di lingkungannya. Sedangkan bentuk DKJPS kepada lanjut usia berbasis rumah tangga adalah mengatur aktifitas yang tepat tanpa mengurangi kemandirian dari lanjut usia. Implikasi teoritis dari penulisan artikel ini yaitu lanjut usia dikatakan sehat secara mental bukan hanya terhindar dari gejala gangguan dan penyakit jiwa, tetapi berkaitan dengan penyesuaian diri yang aktif dalam menghadapi dan mengatasi masalah dengan kondisi baru.

Kata Kunci: lanjut usia, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS), COVID-19.

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a paper. These abstracts are allowed to copy without consent from the author/publisher and free of charge.

Soetji Andari (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial/B2P3KS)

THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN SOCIAL ASSISTANCE

SOSIO INFORMATIKA Vol. 6, No. 2, August 2020, page: 92-113

Abstract

This article aims to explain the role of the social profession in social assistance. The social worker profession in Indonesia is still considered a charitable service that can be done by everyone. The role of the social workers is often manifested in the capacity of a companion, not as a healer or direct problem solver. The role of social workers as social assistants seeks to develop, maintain and strengthen the social welfare system, so that it can meet basic human needs. In addition, social workers act as liaisons, provide convenience, and provide encouragement to beneficiaries to be positive, so they can develop their potential. It is time for the Social Worker profession to get a bigger place and space in solving the nation's problems by improving their skills, values and methods. Social workers in carrying out social assistance to improve the social functioning of individuals, families, communities, so as to improve social welfare. Social workers as assistants implemented in the form of empowerment require social service organizations and professional performance to be carried out in an integrated and integrative manner. Social workers as a profession lead to professionalism having certified competencies having a more productive and effective work reference oriented to the actual needs of society.

Keywords: *role, profession, social worker, social assistance.*

Johan Arifin (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

CULTURE OF POVERTY IN POVERTY REDUCTION IN INDONESIA

SOSIO INFORMATIKA Vol. 6, No. 2, August 2020, page: 114-132

Abstract

Poverty reduction is the main target of development programs in accordance with the mainstreaming of the MDGs and SDGs agenda in the National Long-Term Development Plan (RPJPN 2005-2025). The poverty reduction program initiated by the government has succeeded in reducing the percentage of the poverty rate, even though nominally the number of poor people is still quite high. Poverty reduction efforts that have been and are being carried out are still facing various challenges in the cultural values of the Indonesian people. On the one hand, development so far has not been able to "free" the poor because of cultural factors that shackle them. On the other hand, a culture of poverty becomes an outlet for the poor who are powerless to face the grip of capitalism. The characteristic character of poverty in Indonesian society demands a balanced structural and cultural approach. Cultural values in society that lead to a change in mindset to alleviate poverty need to be raised in poverty reduction policy programs by first re-interpreting these cultural values. It is necessary to create a "counter culture", which is to create a part of the population of a society that

strongly adheres to or embraces one or more cultural values that are different from the values that exist in the dominant culture. This study describes qualitatively descriptive cultural barriers in poverty reduction in Indonesia. The analysis is supported by secondary data and information obtained from various relevant literatures.

Keywords: poverty reduction, development, culture of poverty, redefine, counterculture.

Mu'man Nuryana (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

ROBOTIC THERAPY FOR ELDERLY WITH DEMENTIA

SOSIO INFORMATIKA Vol. 6, No. 2, August 2020, page: 133-151

Abstract

Health and welfare sectors face interesting challenges. First, rapid aging of the population accompanied by the decrease in the number of caregivers that has implications for elderly care. Second, the emergence of new awareness on animal therapy that has potential for zoonotic disease risk, ethical and moral issues, cultural and religious perspectives, history and doubt. Third, rapid development of robotic technology and artificial intelligence in addressing care issues. This conditions implicated to the allocation of human resources and its impact on the stability of delivery care. This literature review aims to investigate social, psychological, physiological and clinical benefits of Paro, the world's most popular social robot for elderly care. Paro shapes animal behavior and responds to light, temperature, sound, touch and posture over time. Results of the research conducted in developed countries show Paro encourages elderly with dementia to communicate among themselves and strengthen individual social relationships and help overcome loneliness. Apart from reducing stress and anxiety, Paro reduces the use of psychoactive medications and pain medication in dementia clients, and is effective in therapeutic interventions. However, it is expensive, only certain care facilities can access it. Given its positive effects, the use of Paro can expand therapeutic outreach. There is great potential to use Paro as a companion robot in care facilities for elderly in family, community and nursing home settings. It appears that robotic interventions are shifting from animal-assisted therapies to the development of innovative ways by connecting robots to the elderly.

Keywords: elderly, dementia, robotic therapy.

Binahayati Rusyidi (Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran)

Eva Nuriyah Hidayat (Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran)

DATING VIOLENCE: THE RISK AND PROTECTIVE FACTORS AND ITS IMPLICATIONS FOR PREVENTION EFFORT

SOSIO INFORMATIKA Vol. 6, No. 2, August 2020, page: 152-169

Abstract

Scholars and researchers have shown that dating violence has become one of global challenging issues encountered by adolescent and early adult groups. Dating violence covers physical, emotional, verbal, social and sexual aggressions intended to control and harm the dating partner. Such violence causes multidimensional outcomes that negatively affected victims and society. The understanding about risk and protective factors of dating violence can be helpful to formulate and enforce appropriate prevention of dating violence. However, the existing literature of the topic are based on the context of Western or developed regions. This article discussed risk and protective factors of dating violence using social ecology framework and its implications for prevention efforts in Indonesia. The analysis was conducted through secondary data analysis of relevant

and credible resources. The article pointed out factors related to individual characteristics, family structure and interactions, peer group characteristics and community situations contributed to increase the likelihood for dating violence' perpetration and victimization. The factors that may decrease the odd of being the perpetrator or victim of dating violence were also found at those environment settings but at less intensive level when compared to risk factors. This article linked the discussion of risk and protective factors with the implications for prevention of dating violence in Indonesia.

Keywords: adolescent; dating violence, prevention strategies, protective factors, risk factors.

Meilanny Budiarti Santoso (Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran)

Maulana Irfan (Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran)

R. Nunung Nurwati Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran)

TRANSFORMATION OF SOCIAL WORK PRACTICES TOWARD SOCIETY 5.0

SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 2, August 2020, page: 170-183

Abstract

Technological developments affect various aspects of life, especially in social aspects in the form of changes in social interaction patterns as the focus of social work practice. This is a challenge for the social work profession, not only on how to intervene, but also on the transformation that must be carried out in technology-based practices. However, this situation creates opportunities for social worker practices because it can reach wider and more social problems or efforts to improve the social functioning of the beneficiaries. By using the literature study method, this article aims to examine the challenges and opportunities of the social work profession in facing the 5.0 era, which places the benefits of technology, especially for the benefit of humans, as a priority. The results of the study show that the social work profession has transformed social services for the beneficiaries, so that the social products created can be spread more widely and more quickly without limitation of space and time. This shows that there has been an acceleration in the process of providing social services. However, when compared to the business sector, the process of technology adoption in the social work sector is far from being slow. The various changes that have occurred become challenges and opportunities for the social work profession and educational entities in the field of social work as institutions for creating social worker candidates who have the opportunity to carry out social engineering in the community.

Keywords: social work, social work transformation, social work digitalization, society 5.0.

Atmaezer H. Simanjuntak (Department of Anthropology, Northwestern University Evanston, Illinois, United States of America)

Rudy G. Erwinsyah (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

SMALLHOLDERS WELFARE AND FOOD SECURITY IN TIMES OF COVID-19 PANDEMIC: A CRITICAL REVIEW OF INDONESIA'S MEGA FOOD ESTATES PLAN

SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 2, August 2020, page: 184-204

Abstract

Across the Global South (GS), the COVID-19 pandemic has highlighted how structures of "neocolonialism" and neoliberal "structural adjustment" policies have undermined public health care and are rapidly

exacerbating an on-going food security and nutrition crisis in an age of climate catastrophe. In buffering these compounded crises, several GS countries are mobilizing their smallholders to secure food stocks and keep the global food chain flowing by working on mega Food Estates. Ironically, smallholders are increasingly stripped of the means to procure food, provide intra-household care, and accessing public health facilities while being forced to keep working. Reflecting on the Government of Indonesia's (GoI) recent plan to establish 2.2 million acres of rice fields and displacing 300,000 smallholders in the name of national and global food security and its' accompanying policies; this paper will hypothesize potential long-term health and nutritional issues for the smallholders following large-scale land labor re-arrangement. We will draw upon Indonesia's failures in establishing three Food Estates to solve past food crises and put them in dialogue with literatures that explores the intersection between economic marginality and generational health and nutritional status. We argue that the food crisis narrative echoed by the government successfully mobilized its' state institutions to enable agribusinesses to develop new circuits of capital accumulation while situating smallholders as a necessary sacrifice. Ultimately, smallholders' health and nutritional quality are severed, further entrenching them into a generational cycle of embodied poverty. Under a capitalistic economic system, poverty reproduces itself through conditions of malnutrition.

Keywords: COVID-19, food estates, food security, nutrition, poverty.

Aris Tristanto (Program Doktor Studi Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Andalas)
MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT (MHPSS) IN ELDERLY SOCIAL SERVICES
DURING THE PANDEMIC OF COVID-19

SOSIO INFORMA Vol. 6, No. 2, August 2020, page: 205-222

Abstract

The COVID-19 pandemic has an impact on the physiological, psychological and social aspects of the elderly. This article aims to describe the form of mental and psychosocial health support (MHPSS) in social services for the elderly during the COVID-19 pandemic. The analysis in this article was carried out through a literature review. The writer's instruments in this article are the check-list, writing scheme and writing notes format. The analysis technique in this article is the content analysis method. MHPSS for the elderly can be done through institutional-based elderly social services, community-based elderly social services, and home-based services. The form of MHPSS for the institution-based elderly is the optimization of mental, religious and social guidance activities for the elderly in the independent category. Meanwhile, for the elderly who do not have independence (bedridden), the form of MHPSS that can be provided is more intensive services, especially in terms of health. Related to the form of MHPSS for community-based seniors is elderly companion by the Elderly Social Welfare Institution. In providing social assistance related to MHPSS, the facilitator can teach the elderly and their families about Clean and Healthy Living Behavior. For elderly people who are neglected because they live alone at home, social assistants must be able to mobilize social support groups in their environment. Meanwhile, the household-based form of MHPSS for the elderly is to organize appropriate activities without reducing the independence of the elderly. The theoretical implication of writing this article is that the elderly are said to be mentally healthy, not only avoiding symptoms of mental disorders and illnesses, but related to active adjustment in dealing with and overcoming problems with new conditions..

Keywords: elderly, mental health and psychosocial support (MHPSS), COVID-19.

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL

THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN SOCIAL ASSISTANCE

Soetji Andari

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Jl. Kesejahteraan Sosial Jl. Nitipuran No.1, Sanggrahan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
E-mail: soetjiandari@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peran profesi pekerja sosial dalam pendampingan sosial. Profesi pekerja sosial di Indonesia masih dianggap suatu pelayanan karitatif yang dapat dilakukan oleh semua orang. Peran pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitas sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung. Peran pekerja sosial sebagai pendamping sosial berupaya mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selain itu pekerja sosial berperan sebagai penghubung, memberikan kemudahan, serta memberikan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Profesi Pekerja Sosial sudah saatnya mendapatkan tempat dan ruang yang lebih besar di dalam penyelesaian permasalahan bangsa dengan meningkatkan keterampilan, nilai-nilai, dan metode yang dimiliki. Pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial sebagai pendamping dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan memerlukan organisasi layanan sosial dan kinerja profesional dilaksanakan secara terpadu dan integratif. Pekerja sosial sebagai sebuah profesi mengarah kepada profesionalisme mempunyai kompetensi yang tersertifikasi memiliki acuan kerja lebih produktif dan efektif berorientasi pada kebutuhan aktual masyarakat.

Kata Kunci: peran, profesi, pekerja sosial, pendampingan sosial.

Abstract

This article aims to explain the role of the social profession in social assistance. The social worker profession in Indonesia is still considered a charitable service that can be done by everyone. The role of the social workers is often manifested in the capacity of a companion, not as a healer or direct problem solver. The role of social workers as social assistants seeks to develop, maintain and strengthen the social welfare system, so that it can meet basic human needs. In addition, social workers act as liaisons, provide convenience, and provide encouragement to beneficiaries to be positive, so they can develop their potential. It is time for the Social Worker profession to get a bigger place and space in solving the nation's problems by improving their skills, values and methods. Social workers in carrying out social assistance to improve the social functioning of individuals, families, communities, so as to improve social welfare. Social workers as assistants implemented in the form of empowerment require social service organizations and professional performance to be carried out in an integrated and integrative manner. Social workers as a profession lead to professionalism having certified competencies having a more productive and effective work reference oriented to the actual needs of society.

Keywords: role, profession, social worker, social assistance.

PENDAHULUAN

Perkembangan Profesi Pekerjaan Sosial

Profesi pekerja sosial di Indonesia masih dianggap suatu pelayanan karitatif yang dapat dilakukan oleh semua orang. Profesi pekerja sosial kurang dikenal di masyarakat karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang profesi pekerja sosial sebagai profesi pertolongan terhadap individu, kelompok yang membutuhkan. Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai permasalahan sosial terutama masalah kemiskinan, perdagangan manusia, disabilitas, anak terlantar dan permasalahan sosial lainnya, membutuhkan pekerja sosial untuk menyelesaikan masalah sosial.

Pekerja sosial diperlukan untuk menggunakan keterampilan tingkat mikro dan makro. Mereka harus memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi orang yang mengalami ketidakadilan, hak istimewa, kekuasaan dan aset dalam masyarakat. Dengan kata lain, saat ini adalah waktu bagi pekerja sosial untuk berkomitmen untuk mengambil pendekatan berbasis hak untuk praktik kerja sosial mereka. Keterlibatan pekerja sosial pada sistem klien merasakan masalah yang muncul. Pada fase berikutnya, penilaian, pekerja sosial melihat secara holistik interaksi sistem klien dalam berbagai domain lingkungan. Bersama-sama, sistem klien dan pekerja sosial membuat daftar tujuan dan sasaran dan memutuskan siapa yang akan melakukan apa pada kapan. Pada fase implementasi, intervensi dipandu oleh tujuan dan sasaran yang telah disepakati (Kelan, 2008).

Profesi Pekerja Sosial sudah saatnya mendapatkan tempat dan ruang yang lebih besar di dalam penyelesaian permasalahan bangsa, di mana permasalahan sosial sama pentingnya dengan permasalahan lain yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang lebih ekstra. Pekerja sosial profesional menangani tantangan

terkait kemiskinan, tuna wisma, penyakit mental, penyalahgunaan zat terlarang, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, lanjut usia dan masalah sosial lainnya berhadapan dengan masalah etika. Literatur pekerjaan sosial dengan jelas menunjukkan masalah etika yang berkaitan dengan batasan yang paling bermasalah dan menantang. Masalah batas melibatkan keadaan di mana pekerja sosial menghadapi konflik aktual atau potensial antara tugas profesional seperti; hubungan sosial, seksual, agama, atau bisnis mereka. Pekerja sosial mengelola masalah batas dan risiko yang muncul dalam praktik (Reamer, 2012).

Praktik pekerjaan sosial berbasis HAM muncul sebagai alternatif pendekatan praktik yang sejak pertama kali pembentukan profesi pekerjaan sosial ini mengandalkan pada pemenuhan kebutuhan individu. Praktik pekerjaan sosial berbasis HAM perlu dikaji secara rinci, karena dalam praktik pekerjaan sosial, hak dan kewajiban memiliki implikasi yang signifikan demi tercapainya keadilan sosial bagi setiap individu. Praktik pekerjaan sosial dengan menggunakan pendekatan berbasis hak dilaksanakan berdasarkan tiga generasi hak. Pendekatan berbasis hak bagi pekerja sosial telah mengangkat harkat dan martabat klien sebagai individu dan mendorong setiap individu untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi dan menggunakan potensi yang ada pada dirinya dan lingkungannya untuk menghadapi tantangan yang mereka alami. Praktik pekerjaan sosial berdasarkan hak membantu individu mengatasi tantangan keberfungsian sosial. Mereka memfasilitasi untuk mendapatkan keadilan. Pekerja sosial merupakan kegiatan profesional memperbaiki kemampuan mereka berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan. Siporin mendefinisikan tentang gaya praktisi pekerjaan sosial merupakan faktor yang

sangat berpengaruh terhadap efektivitas terapeutik dan merupakan cara untuk mengekspresikan kesenian kreatif praktisi. Makna dan fungsi gaya diperjelas. Gaya umum praktisi dianalisis sebagai kombinasi elemen gaya pribadi dan profesional, responsif terhadap kinerja tugas-tugas artistik dalam membantu klien. Presentasi kasus menggambarkan gaya khusus pekerja sosial. Pengaruh budaya yang lebih luas dari gaya praktisi juga pantas dikenali (Siporin, 1993).

Gaya praktisi pekerjaan sosial merupakan faktor yang sangat berpengaruh untuk efektivitas terapi dan merupakan cara untuk mengekspresikan seni kreatif praktisi. Makna dan fungsi dari gaya diklarifikasi. gaya umum praktisi dianalisis sebagai kombinasi dari unsur-unsur gaya pribadi dan profesional, responsif terhadap pertunjukan peran-tugas artistik dalam membantu klien. Presentasi kasus menggambarkan gaya khusus pekerja sosial. Pengaruh budaya yang lebih luas dari gaya praktisi juga patut mendapat pengakuan (Siporin, 1993). Model residual umumnya menyatakan bahwa pemerintah harus terlibat dalam kesejahteraan sosial hanya sebagai jaring pengaman terakhir ketika jalan lain gagal. Model kelembagaan mendukung intervensi berkelanjutan sesuai kebutuhan, melihat bantuan pemerintah sebagai kejadian alami dan normal dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan pekerjaan sosial melalui pendekatan pengembangan sosial menekankan peran investasi sosial dalam praktik profesional (Midgley, 2017). Pekerjaan sosial memenuhi kebutuhan material klien dan memfasilitasi integrasi ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pekerja sosial berkembang melalui kepercayaan klien bahwa kekuatan dan kemampuan ditambah dengan sumber daya dan layanan publik mereka dapat hidup produktif dan mampu memenuhi kebutuhan hidup. Praktik kerja sosial pembangunan tidak terbatas pada

organisasi komunitas atau intervensi praktik makro. Perkembangan praktik pekerja sosial dapat diimplementasikan dalam bidang utama seperti kesejahteraan anak, kesehatan mental, penuaan, bantuan sosial dan kerja sosial masyarakat. Mereka menggunakan banyak contoh inovatif dari Amerika Serikat dan negara lain untuk menunjukkan bagaimana ide-ide perkembangan dapat diimplementasikan dalam praktik kerja sosial sehari-hari (Midgley & Conley, 2010).

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung-jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas kehidupan untuk mengatasi kesulitan yang dialami dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilai. Konsep ganda sumber daya dan interaksi dengan lingkungan sosial digunakan untuk menjelaskan tujuan pekerjaan sosial dan aktivitas praktisi. Pekerjaan sosial dapat dipandang sebagai profesi generalis, tetapi istilah “generalis” dan “spesialis” tidak boleh disamakan dengan praktik awal dan lanjutan (Minahan & Pincus, 1977).

Upaya yang dilakukan pekerja sosial adalah mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Fungsi ini dilaksanakan melalui usaha pekerjaan sosial dalam bentuk intervensi sosial seperti melalui pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbaikan, dan memelihara penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial. Peranan pekerja sosial dalam bidang pengembangan kebijakan sosial dan aksi sosial di beberapa negara maju semakin diperluas, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan relasi kelompok minoritas. Pengelolaan pelayanan sosial, dalam tugas pengembangan staf, melatih dan mengelola tenaga yang dibutuhkan didalam

program kesejahteraan sosial. Tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem (Fahrudin, 2012). Bersamaan dengan itu secara terus menerus juga sedang diuji kembali dan dicoba fungsi pekerjaan sosial di bidang perbaikan penghasilan (jaminan sosial).

Pekerjaan sosial melakukan fungsi dalam mewujudkan tugas pokok sistem kesejahteraan sosial dalam suatu masyarakat untuk menjamin standar subsistensi kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai bagi semua warga. Profesi pekerjaan sosial ditandai dengan proses membantu yang dinamis dan keragaman peran, dan fungsi. Tujuan Profesi pekerjaan sosial untuk meningkatkan kondisi masyarakat, individu, keluarga, dan kelompok - dilaksanakan di semua bidang praktik dan diwujudkan melalui berbagai metode dalam berbagai pengaturan. Untuk bekerja di lapangan, penting untuk memperoleh kerangka kerja konseptual yang membantu seseorang memahami kompleksitas praktik kontemporer mencakup (Greene, 2017):

1. Mengembangkan sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar individu maupun keluarga akan perkembangan;
2. Mendistribusikan dan pemeratakan alokasi sumber-sumber sosial maupun ekonomi;
3. Mencegah timbulnya kesengsaraan, dan mengatasi kemelaratan, tekanan-tekanan sosial, serta keterlantaran; melindungi individu-individu maupun keluarga-keluarga dari bahaya-bahaya kehidupan, dan menyantuni mereka yang mengalami kehilangan karena bencana, ketidakmampuan fisik maupun mental, kecatatan, serta karena kematian.

Pekerja sosial berupaya menjadi seorang yang dapat mengoptimalkan fungsi sosial sesuai

aturan. Hal tersebut memungkinkan pekerja sosial berfungsi sebagai *to enable people to function optimally within their social institutional roles and statuses*; Membantu orang agar dapat berfungsi secara optimal di dalam institusi sosial, antara lain:

1. Mengusahakan terwujudnya potensi-potensi ke arah produktivitas dan perwujudan diri, baik pada orang-orang maupun lingkungan sosial mereka, bagi terciptanya bentuk-bentuk keberfungsian sosial baru yang kreatif dan altruistik, serta kehidupan bersama yang akrab;
2. Membantu orang-orang dalam usahanya memperoleh dan mencapai kembali tingkat kehidupan normatif yang lebih tinggi dan lebih memuaskan sebagai anggota masyarakat, dengan jalan memperbaiki kapasitas dan keterampilan yang terhambat atau kurang memadai. Upaya tersebut dengan cara memanfaatkan seoptimal mungkin sumber-sumber pelayanan yang disediakan oleh kelompok-kelompok sosial maupun institusi yang ada; dan dengan jalan mengatasi dan memecahkan kesulitan dan menjalin relasi kehidupan sosial di antara mereka;
3. Bertindak sebagai pengganti (*substitute*) bagi keluarga dan komuniti dalam menyediakan bentuk-bentuk bantuan yang bersifat suportif, substitutif, proktektif, dan preventif kepada individu maupun keluarga;
4. Mengintegrasikan orang-orang satu sama lain, menjadi perantara antara mereka, serta mempertemukan dan mengintegrasikan individu-individu dengan lingkungan sosial mereka, khususnya dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial yang tersedia.

Praktik pekerjaan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang di dalam lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi pekerja sosial selain menopang dan memperbaiki tata tertib, juga

mengendalikan dan mencegah tingkah laku-tingkah laku menyimpang maupun disorganisasi agar memungkinkan terjadinya inovasi perubahan yang konstruktif; menolong orang-orang agar dapat menghindarkan diri atau keluar dari pekerjaan pekerjaan negatif yang menyimpang dan membantu mereka agar dapat mengenali struktur maupun situasi sosial yang disfungsional.

Pekerja sosial profesional menangani tantangan yang terkait dengan kemiskinan, tunawisma, penyakit mental, penyalahgunaan zat, penyalahgunaan dan penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, penuaan, dan masalah sosial lainnya - menghadapi berbagai masalah etika. Masalah etika dalam pekerjaan sosial melibatkan upaya untuk membantu individu, pasangan, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas. Masalah etika mungkin timbul terkait kerahasiaan dan privasi; penentuan nasib sendiri klien dan paternalisme profesional; loyalitas yang terbagi; batas-batas profesional; konflik antara nilai-nilai profesional dan pribadi; mengalokasikan sumber daya yang terbatas; kepatuhan terhadap peraturan dan hukum; perselisihan buruh-manajemen; penggunaan penipuan pekerja sosial; kesalahan kolegal, ketidakmampuan, atau gangguan; dan fenomena *whistle-blowing* (Reamer, 2012).

Salah satu peran seorang pekerja sosial adalah sebagai pendamping masyarakat. Pendamping sosial merupakan tindakan sosial terhadap komunitas untuk mendampingi komunitas agar memiliki perencanaan serta melakukan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Pekerja sosial memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya proses yang dilakukan tidak secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja

sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Sehingga para pekerja sosial berperan sebagai pendamping sosial. Pendamping sosial pada masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya.

Pendamping sosial hadir sebagai agen perubahan sosial yang dapat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti; (1) merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, (2) memobilisasi sumber daya setempat (3) memecahkan masalah sosial, (4) menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan (5) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya pada (Ife & Tesoriero, 2008). Peran pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Mengacu pada keterampilan yang dimiliki pekerja sosial bersifat praktis.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Kriteria Profesi Pekerjaan Sosial

Dalam kepustakaan terdapat berbagai batasan yang memberikan pengertian mengenai apa pekerjaan sosial itu. Beberapa batasan yang akan menjadi acuan dalam makalah ini.

Anderson dalam karangannya: “*Social Work Status and Trends*” menyatakan bahwa: Pekerjaan sosial adalah profesi yang memusatkan perhatiannya pada usaha mempermudah dan memperkokoh relasi sosial yang asasi antara individu-individu, kelompok-kelompok, dan lembaga-lembaga sosial (Anderson, 1960). Jika dibaca dengan seksama maka dalam batasan tersebut terkandung pernyataan yang tersembunyi yang mengakui bahwa di dalam masyarakat terdapat warga yang mengalami kesulitan atau gangguan dalam relasi sosial dan ada pula warga yang tidak mengalami kesulitan berelasi sosial namun sebenarnya lemah. Oleh karena itu yang tersebut belakangan ini perlu mendapat bantuan untuk memperkokoh relasi sosialnya. Dalam masyarakat masih terdapat warga lain yang dalam relasi sosialnya dengan lingkungan masyarakatnya mengalami kegagalan penyesuaian diri ataupun salah penyesuaian diri (*maladjusted*). Golongan masyarakat tersebut yang ditangani oleh pekerjaan sosial.

Batasan berikut memberikan gambaran yang lebih rinci, yang dirumuskan (Boehm, 1958) sebagai berikut:

“Pekerjaan sosial mencoba untuk mempertinggi fungsi sosial individu-individu, sendiri-sendiri dan dalam kelompok, melalui kegiatan-kegiatan yang terpusatkan pada relasi sosial yang membentuk interaksi antara manusia dengan lingkungannya. (Friedlander, 1961).

Dalam batasan kedua ini Boehm menyatakan bahwa ada individu yang mengalami kemunduran dalam fungsi sosialnya dan perlu dibantu untuk ditingkatkan. Kegiatan untuk membantu itu dipusatkan pada interelasi dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Setiap warga sejak kecil sudah mulai mempelajari dan berusaha untuk memahami peranan dan kedudukan sosial melalui suatu proses sosialisasi. Dalam proses tersebut warga masyarakat juga mempelajari

sanksi yang akan dikenakan kepadanya apabila dia tidak menjalankan peranan sesuai dengan kedudukannya. Setiap warga masyarakat juga mempelajari berbagai peranan yang dijalankannya dalam berbagai kelompok sosial. Dalam upaya untuk dapat melaksanakan peranan sosialnya dengan sebaik-baiknya tidak jarang seorang warga menerima teguran atau hukuman jika ia salah atau gagal menjalankan peranannya tersebut. Sebaliknya bila seseorang berhasil melaksanakan peranannya dengan baik maka akan mendapat pujian sebagai imbalan. Dengan demikian seorang warga masyarakat secara bertahap belajar untuk menjalankan berbagai peranan sosialnya sesuai dengan kedudukan dalam tatanan masyarakat. Seseorang dikatakan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik apabila ia selalu dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan berbagai peranan sosialnya dalam beraneka situasi sosial. Batasan pertama menyebutkan bahwa pekerjaan sosial itu suatu profesi walaupun belum ada kejelasan profesi macam apa yang disebut pekerjaan sosial itu. Friedlander menyatakan:

“Pekerjaan sosial adalah sebuah layanan profesional, yang berlandaskan pada pengetahuan ilmiah dan keterampilan dalam hubungan insani, yang membantu individu, sendiri atau dalam kelompok, untuk memperoleh kepuasan sosial dan pribadi serta kemerdekaan (Friedlander, 1961).

Friedlander menyatakan kesejahteraan sosial tersebut antara lain dapat kita peroleh dari batasan berikut: Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari bantuan-bantuan dan lembaga-lembaga sosial, yang diciptakan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan yang penuh dan meningkatkan kesejahteraannya

selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat (Friedlander, 1961).

Pelayanan sosial bermula dari bentuk kegiatan dalam masyarakat yang mendasarkan pada ajaran kemanusiaan, atau keagamaan, atau rasa tanggung jawab terhadap sesama warga masyarakat. Pelayanan tersebut atas dasar kesukarelaan, hingga masyarakat mampu memberikan pelayanan dan bantuan secara perorangan dan kelompok. Layanan sosial tersebut di atas dikaitkan dengan upaya untuk memelihara tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan dalam batasan tersebut diterima sebagai sebuah sistem yang mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan ideal dan operasional. Tujuan ideal profesi pekerja sosial adalah yang berupa usaha mempertinggi tingkatan kesejahteraan sosial manusia, sedangkan tujuan operasional tersebut tertuju kepada anggota masyarakat serta kelompok dalam masyarakat yang karena sesuatu sebab keadaannya di bawah standar. Keadaan di bawah standar ini telah menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dirinya secara penuh. Tujuan operasional pelayanan kesejahteraan sosial harus diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk program, penyediaan sarana serta pengaturan penyalurannya.

Pembangunan nasional selalu menimbulkan dampak perubahan dari keberhasilan pembangunan itu sendiri, dan dari sejarah perkembangan manusia diperoleh gambaran individu sanggup untuk mengadakan penyesuaian diri yang memadai dan secara cepat terhadap perubahan. Demikian pula dengan profesi pekerjaan sosial, yang dikaitkan untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan, maka perlu ikuti perkembangan usaha-usaha di bidang kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial berkembang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial

berkembang dari dua konsep sebagai berikut. Pandangan pertama "*the residual concept*" bahwa lembaga-lembaga kesejahteraan sosial seharusnya berperan dalam penyediaan kebutuhan sosial keluarga, dan lingkungan yang mengalami kegagalan (*The first holds that social welfare institutions should come into play only when the normal structure of supply, the family and the market break down*). Hal ini berarti bahwa bantuan baru diberikan sewaktu ada seseorang yang mengalami kegagalan untuk mencukupi kebutuhannya. Penerima bantuan itu menerima sesuatu layanan (bantuan) bukan karena dia dinyatakan berhak untuk menerimanya, tetapi menurut lingkungannya dianggap pantas untuk dibantu. Pandangan kedua, sebaliknya menganggap bahwa usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah "fungsi pertama" yang wajar dari masyarakat industrial modern (*The second, in contrast, sees the welfare services as normal 'first line' functions of modern industrial society*) (Willensky and Lebaux, 1966). Pendapat kedua ini mengandung arti bahwa negara bertanggung jawab mengenai kesejahteraan warganya dan karena itu melalui pengaturan resmi (perundang-undangan) negara menyediakan berbagai jenis layanan sosial dari sumber-sumber yang dimilikinya atau dari sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat negara tersebut. Pandangan kedua ini menjadi asas dasar dari pembentukan negara yang mengutamakan kesejahteraan warganya (*a welfare state*). Indonesia berupaya untuk menuju ke sana, karena belum semua masyarakat menikmati pelayanan dari negara di bidang kesehatan dengan program asuransi kesehatan, sekolah gratis, sampai sekolah lanjutan dan orang menganggur menjadi tanggungan negara.

Dalam hal ini Greenwood menyatakan bahwa yang dimaksud profesi yaitu yang berkaitan dengan pekerjaan, dapat menyaring beberapa kriteria yang dapat diacu, yaitu: Sebuah profesi memiliki: (1) serumpun teori

yang sistematis, yaitu sejumlah pengetahuan yang telah diorganisasikan menjadi sebuah sistem, yang secara internal konsisten. Sistem ini menjadi dasar pelaksanaan dari profesi tersebut dalam situasi yang konkrit. Berbagai situasi kerja dalam profesi tersebut tidak mengubah tatanan penanganan pekerjaan yang harus diselesaikan menurut bidangnya; (2) terdapat kewenangan profesional, yang diperoleh melalui pendidikan. Kewenangan tersebut akan membedakan seorang tenaga profesional ini memiliki kewenangan untuk menyampaikan gagasan dan pendapat profesional di mana diperlukan; (3) Persetujuan (*sanctions*) dari masyarakat yang berupa pengakuan terhadap profesi ini, baik dinyatakan secara resmi atau pun tidak resmi, yang memberikan kesempatan bagi tenaga profesional untuk melakukan tugasnya, serta memperoleh hak dan kewenangan profesionalnya; (4) kode etik yang mengatur perilaku etik dari warga profesi tersebut, serta pelaksanaan pekerjaannya; (5) kebudayaan profesional yang menjadi ciri dari ikatan profesi tersebut. Kebudayaan profesi ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan lambang profesi tersebut (Kidneigh, 1966).

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang menggunakan ilmu terapan yang bersumber pada berbagai ilmu-ilmu sosial yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam lingkungan sosial dan alamnya. Demokrasi yang tumbuh di dalam masyarakat ikut mewarnai praktik pekerjaan sosial sebagai profesi. Pekerjaan sosial semakin menjadi sadar akan penerapan prinsip-prinsip demokratis dengan semakin tambah memahami perilaku manusia dan mengenai proses sosial yang dialami setiap warga masyarakat.

Pekerjaan sosial merupakan institusionalisasi dari berbagai kegiatan kemanusiaan yang tumbuh dalam masyarakat. Nilai adalah unsur kebudayaan yang dihayati

bersama oleh warga masyarakat. Menurut Compton dan Beulah ada dua nilai utama yang mendasari profesi pekerjaan sosial, yaitu: (1) kepercayaan terhadap keunikan dan martabat yang melekat pada seorang individu, dan (2) kepercayaan terhadap hak untuk menentukan sendiri bagi diri klien sendiri (*self-determination*). Kedua jenis nilai itu perlu ditelaah secara mendalam sebelum dijabarkan secara operasional (Compton dan Galawy, 1979).

Pendampingan Sosial Merupakan Tuntutan Profesionalitas Pekerja Sosial

Berkembangnya pembangunan sosial sebagai pembangunan alternatif telah menjadi peluang semakin dibutuhkannya profesi pekerjaan sosial. Profesi ini tidak terbatas sebagai suatu profesi pelayanan kemanusiaan. Tetapi menjadi profesi yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pelayanan sosial sebagai dasar utama dalam menghadapi perkembangan pembangunan dan permasalahan sosial yang semakin kompleks. Sasaran pelayanannya pun tidak terbatas pada individu, kelompok atau masyarakat yang bermasalah, tetapi akan mengarah kepada perubahan secara berencana pada struktur sosial masyarakat secara menyeluruh. Artinya, yang menerima pelayanan pekerjaan sosial bukan hanya penyandang masalah, tetapi semua orang. Oleh sebab itu pendampingan sosial merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial yaitu “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”.

Pemberdayaan masyarakat dibutuhkan partisipasi publik yang kuat. Dalam konteks tersebut, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukannya sebagai penyembuh atau pemecahan masalah (*problem solver*) membangun serta memberdayakan

masyarakat melibatkan suatu proses dan tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan juga tindakan kolektif guna memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Proses tersebut tidak akan muncul secara otomatis, namun tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat atau pihak luar, atau pekerja sosial baik itu yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Oleh sebab itu pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi yang dinamis antara kelompok penyandang masalah sosial dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti:

1. Merancang perbaikan kehidupan sosial ekonomi;
2. Memobilisasi sumber daya setempat;
3. Memecahkan masalah sosial;
4. Menciptakan dan membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Penyandang masalah sosial dan lingkungannya merupakan sistem sosial yang aktif dan tidak pasif, mereka memiliki kekuatan positif dan bermanfaat untuk meningkatkan keberfungsian sosial serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. (Suharto, 2004). Pada kenyataannya terdapat kerancuan pemahaman masyarakat akan tugas fungsi pekerja sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang diartikan sebagai tugas kemasyarakatan (*Social Task*) yang ditandai oleh doktrin pemberian pertolongan karitatif. Kerancuan pemahaman seperti ini terbukti pada program pemberian nasi bungkus kepada masyarakat miskin yang terkena PHK. Program tersebut mencerminkan suatu kegiatan bakti.

Dinamika pekerjaan sosial terus berkembang terutama dalam turut mengambil bagian penting dalam pembangunan sosial menuju kesejahteraan sosial. Dubois dan Miley (1992) menyebut beberapa tujuan pekerjaan sosial yang dengan tegas telah menyiratkan dinamika itu sendiri, yaitu: (1) Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya agar lebih mampu melaksanakan fungsi-fungsi dirinya secara efektif; (2) Menghubungkan orang yang dilayani dengan berbagai sumber yang dibutuhkan; (3) Memperbaiki jaringan-jaringan wadah pelayanan sosial; serta (4) Meningkatkan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial (Dubois dan Milley, 1992).

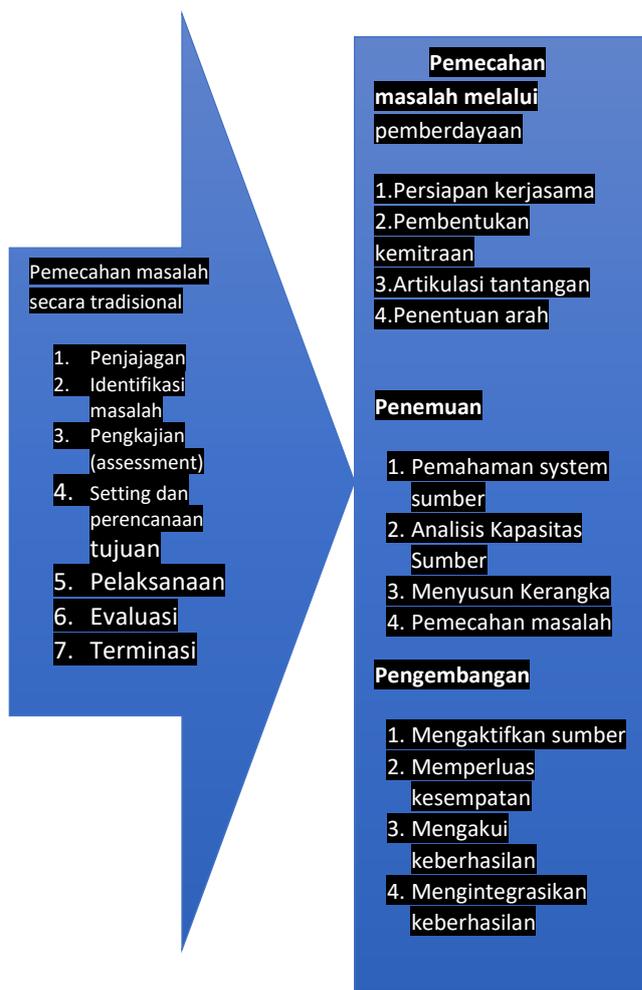
Pekerjaan sosial profesional dewasa ini sudah jauh dari konsep cikal bakalnya, walaupun dalam konsep pekerjaan sosial modern kemauan dan kemampuan merasakan penderitaan orang lain masih merupakan faktor yang mendasari. Konsep Pekerjaan sosial modern mencakup tiga komponen yaitu: (1) pengetahuan, (2) keterampilan, (3) sikap atau nilai profesional, yang ketiganya perlu ditumbuh kembangkan melalui proses pendidikan profesional formal. Pekerjaan sosial modern dewasa ini lebih mendasarkan kepada konsep-konsep dan teori keilmuan khususnya ilmu tentang manusia dan lingkungannya. Dari segi pendekatannya pekerjaan sosial telah bergeser pendekatannya sebagai berikut:

1. Dari pendekatan kasus kepada pendekatan administratif (perencanaan dan kebijakan sosial);
2. Dari pendekatan mikro (perseorangan, keluarga, kelompok kecil) kepada pendekatan makro (*intervensi pada policy decision*);
3. Dari pendekatan kuratif rehabilitatif kepada pendekatan pencegahan dan pengembangan;
4. Dari pendekatan spesifik kepada pendekatan generalistik.

Profesi pekerjaan sosial sebagai profesi penyangga usaha-usaha kesejahteraan sosial baik metoda maupun pendekatannya telah mengalami pergeseran merespon kebutuhan dan tantangan pergeseran serta kemajuan konsep praktik usaha kesejahteraan sosial. Sebagaimana disinggung di atas, pengertian pekerjaan sosial mengalami perluasan atau ekspansi dari “tradisional“ menuju “kontemporer“. Pola-pola pelayanan tradisional selama ini lebih dominan karena ilmu pekerjaan sosial belum berkembang, lapangan pelayannya lebih terfokus pada individu dan kelompok residual dengan nuansa remedial. Kelemahan dari pola tradisional ini adalah kurang mampu mengakses populasi yang besar dan biayanya relatif mahal. Sebagai ilmu atau profesi yang dinamis pekerjaan sosial terbukti mampu mengembangkan pola-pola pelayannya hingga profesi ini menjadi eksis dalam pelayanan masyarakat (*Community development*).

Pelayanan kontemporer melalui strategi pemberdayaan menjadi kata kunci yang mewarnai hampir semua metoda pelayanan pekerjaan sosial. Namun demikian pendekatan tradisional bukan berarti ditinggalkan, sebab pendekatan tradisional masih tetap bermanfaat dan efisien dalam konteks pelayanan individu yang berbasis lembaga. Ekspansi pelayanan dari tradisional ke kontemporer digambarkan oleh Dubois dan Miley (1992) pada Gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. Perkembangan Strategi Pemecahan Masalah Tradisional Menuju Pemberdayaan



Gambaran ekspansi pelayanan dari tradisional ke kontemporer oleh Dubois dan Miley (2005).

Pemberdayaan berarti menampilkan peran aktif dan kerjasama bagi klien atau penerima pelayanan dan mitranya. Secara paradoks “memberdayakan sistem lain“ atau secara paternalistik melimpahkan kekuatan kepada orang lain berarti pula sebagai upaya pemberdayaan. Menurut (Payne, 1997) pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan

merupakan aktivitas reflektif, suatu proses yang dapat dimulai dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri, sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan sumber dan alat yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik. (Maluccio N. & Libassi F., 1984) praktik pekerjaan sosial memandang penerima pelayanan sebagai mitra kolaboratif, sebagai orang yang memiliki segala aset dan potensi. Kebutuhan pedoman praktik yang membantu pekerja sosial menggunakan penilaian sebagai sarana untuk menyoroti kekuatan aktual atau potensial dalam klien dan lingkungan mereka. Pedoman tersebut disarankan melalui klarifikasi kompetensi, proses mengidentifikasi dan memahami kapasitas seseorang untuk menghadapi tantangan di lingkungannya. Klarifikasi kompetensi pekerja sosial melalui upaya positif berbagai potensi manusia dan mempertinggi kesadaran pekerja akan gaya coping yang unik serta peran yang dimainkan lingkungan dalam fungsi sosial. Mereka mengharapkan pekerja sosial sebagai seorang profesional yang memberikan informasi penting untuk klien dalam mencapai tujuan-tujuannya, serta menjajaki proses pengembangan dan melaksanakan tugas-tugas adaptifnya. Prinsip-prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial adalah:

1. Setiap masalah dipandang sebagai tantangan bersama yang harus dihadapi;
2. Orientasi terhadap masalah simultan dengan orientasi terhadap sumber kekuatan;
3. Semua proses ditujukan untuk menghasilkan yang terbaik di masa depan;
4. Bentuk relasi antar aktor bersifat kolaboratif;
5. Posisi antar aktor berupa kemitraan.

Pemberdayaan tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi kepada komunitas secara kolektif, dan semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolok ukur normatif.

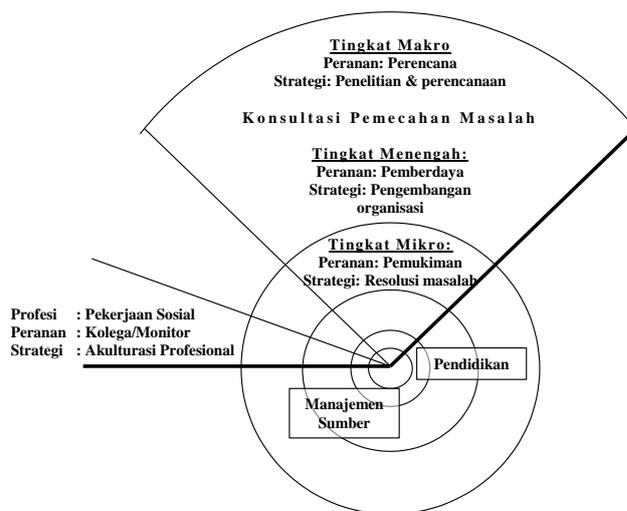
Profesi pekerja sosial saat ini belum mendapat apresiasi dari masyarakat luas secara proporsional. Hal ini boleh jadi karena keberadaan profesi ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Banyak anggota masyarakat bahkan para pejabat tinggi negara tidak mengetahui apa sebenarnya yang ditangani oleh pekerja sosial. Saat ini terjadi perkembangan yang sangat besar dalam perjalanan profesi ini, yaitu munculnya pendekatan *generalis-generalist social work* (Wells, 1989). Pendekatan ini tidak lagi memandang suatu persoalan secara dikotomis, juga tidak menerapkan suatu pendekatan secara terkotak misalnya bimbingan sosial perorangan. Pekerjaan sosial *generalist* ini muncul sebagai respon terhadap permasalahan sosial yang semakin sistemik, sehingga penanganannya pun harus komprehensif. Dalam setiap penanganan suatu masalah atau dalam pelaksanaan program pemberdayaan, pekerja sosial akan selalu memperhatikan keterkaitan beberapa unsur yaitu manusia, organisasi, komunitas, sumber, serta kebijakan sosial yang ada. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan pekerjaan sosial kontemporer bukan lagi cenderung bersifat penyembuhan dan rehabilitatif sebagaimana citra yang melekat selama ini. Metode penyembuhan kasus yang bertumpu kepada konsep psikoterapi dan psikiatrik (intervensi mikro) telah bergeser kepada metode pengembangan masyarakat, peranan kebijakan sosial (intervensi makro) yang bertumpu pada konsep-konsep ilmu sosial, administrasi dan manajemen.

Zastrow menyatakan bahwa pelayanan sosial akan lebih berhasil dan efektif dengan model pendekatan ekologis, pada hakekatnya sasaran pelayanan pekerjaan sosial tidak hanya mengarah pada permasalahan individu, kelompok, atau masyarakat, tetapi menjangkau luas kepada sistem keluarga, sistem politik, sistem ketenagakerjaan, sistem keagamaan, sistem pendidikan dan sistem sosial lainnya (Zastrow, 1978). Penanganan masalah sosial melalui pelaksanaan program-program pemberdayaan, pekerja sosial harus memperhatikan keterkaitan beberapa unsur yaitu manusia, organisasi, komunitas sumber, serta kebijakan sosial.

Praktik pekerjaan sosial menurut Gray dan Bernstein (1996) menawarkan ringkasan singkat tentang konsep level pekerjaan sosial yang berbeda. Praktik kerja sosial dilaksanakan berbagai tingkat, pekerja sosial bekerja dengan individu, pekerja sosial bekerja dengan keluarga dapat bersifat terapi atau klinis, dan pekerja sosial bekerja dengan masyarakat (melalui kelompok orang atau melakukan advokasi atas nama kepentingan kelompok). Pada tingkat kebijakan untuk mengubah kebijakan dan praktik yang tidak adil agar mencapai distribusi sumber daya yang lebih adil dan merata, ada tiga tingkat praktik kerja sosial yang diakui secara luas: mikro, mezzo (meso), dan pekerjaan sosial makro. Meskipun level ini sering dibicarakan seolah-olah mereka berbeda, penting untuk mengenali bahwa “level yang berbeda” terjadi bersamaan dan secara konstan memengaruhi level lain.

Pekerjaan sosial merupakan profesi berkaitan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosial agar mereka mampu melaksanakan tugas kehidupan, serta mewujudkan aspirasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu strategi pekerjaan sosial, menurut (Dubois & Miley, 2005) dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Strategi Pekerjaan Sosial dalam Pemecahan Masalah



Gambar 2. Contoh fungsi konsultasi pemecahan masalah (Sumber: Du Bois and Milley (2005))

Dari Gambar 2 dapat dikatakan bahwa ada tiga skala pelayanan pekerja sosial yaitu skala mikro yaitu pelayanan pada individu dan keluarga, seorang pekerja sosial harus mampu menampilkan peranan sebagai pendamping yang bersama-sama dengan keluarga dan individu penyandang masalah berupaya menemukan masalah, kebutuhan serta pilihan-pilihan untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian pada skala menengah dalam hal ini kelompok dan organisasi sosial, maka pekerja sosial harus berperan sebagai mediator yang mampu menyusun jaringan kemitraan dengan berbagai pihak. Bertugas menjembatani antara masyarakat lokal dengan berbagai sumber yang ada. Dalam kegiatan tersebut pekerja sosial berperan memfasilitasi masyarakat, menjangkau sistem sumber di satu pihak dan juga menjalin jaringan kerja dengan sistem sumber tersebut. Dengan cara ini akan terjadi keterkaitan sinergis antara kebutuhan dengan sumber yang tersedia. Selanjutnya pada skala makro, yang menjadi penerima pelayanan adalah komunitas dan masyarakat maka pekerja sosial akan bekerja menyusun jaringan sosial, untuk mengadakan

perubahan sosial untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ia akan melakukan berbagai rumusan kebijakan, dan instrumen yang dapat membuka kunci keadilan sosial, alokasi sumber secara merata, program-program yang memungkinkan terciptanya perlindungan dan jaminan sosial). Pada tingkat menengah berperan sebagai fasilitator dengan upaya mengembangkan jaringan sumber yaitu organisasi-organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memecahkan masalah. (Dubois and Milley, 1996).

Fungsi Dan Peranan Pendamping Sosial Dalam Profesi Pekerjaan Sosial

Fungsi Pendamping Sosial

Secara umum fungsi dan peranan pekerja sosial dalam pendekatan *generalist* yang sangat digemari akhir-akhir ini adalah sebagai pendamping sosial dalam melaksanakan pemberdayaan (*empowerment*). Adapun bidang tugasnya dan fungsinya meliputi:

Fungsi Pemungkinan (*Enabling*) atau Fasilitasi. Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan pemberian kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini adalah melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber. Program penanganan masalah sosial pada umumnya diberikan pada anggota masyarakat yang tidak mampu mengakses sistem sumber yang sulit dijangkau, karena alasan ekonomi ataupun birokrasi. Seorang pendamping sosial harus mampu memobilisasi serta mengkoordinasikan sistem sumber agar potensi sistem sumber tersebut dapat dijangkau oleh klien. Adapun yang dimaksud sistem sumber adalah: (1) Sistem sumber personal meliputi: pengetahuan, motivasi, pengalaman hidup dari penyandang masalah; (2) Sumber interpersonal meliputi sistem pendukung yang lahir dari jaringan

pertolongan, maupun sebagai proses interaksi formal dengan orang lain; (3) Sistem sumber sosial meliputi respon kelembagaan yang mendukung kesejahteraan klien maupun masyarakat di lingkungannya. Selain fungsi dan peran di atas seorang pendamping sosial harus mampu melaksanakan manajemen pelayanan sosial, dalam pengertian Pelaksanaan pengkoordinasian, pensistemasan, pengintegrasian, bukan pengawasan dan penunjukkan. Namun lebih mengarah pada pembimbingan, kepemimpinan, kolaborasi dengan pengguna atau penerima program pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Sebagai Pemberi Penguatan. Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas masyarakat (*Capacity Building*). Pendamping seharusnya berperan aktif sebagai agen yang mampu memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, juga bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat didampinginya. Pendamping sosial harus mampu membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan pada masyarakat adalah beberapa tugas dan fungsi pendamping sosial sebagai penguat. Pendidikan sangat terkait dengan pencegahan berbagai kondisi yang menghambat kepercayaan diri individu, serta kapasitas individu. Proses pembelajaran pemberdayaan merupakan proses saling ketergantungan serta saling membutuhkan satu sama lain.

Fungsi Sebagai Pemberi Perlindungan. Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal demi untuk masyarakat yang didampinginya. Pendamping sosial sebagai pekerja sosial bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, serta membangun

jaringan kerja. Fungsi pemberi perlindungan juga menyangkut tugas pendamping sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam pemecahan masalah. Konsultasi pemecahan masalah tidak hanya berupa pemberian dan penerimaan saran, namun merupakan proses yang ditujukan untuk pemahaman yang lebih baik serta pilihan penanganan. Konsultasi dilakukan merupakan bentuk kerjasama yang saling melengkapi dalam proses pemecahan masalah. Dalam proses pemecahan masalah, maka pendampingan sosial dalam praktik pekerjaan sosial melalui tahapan antara lain:

1. Pemahaman kebutuhan klien;
2. Perencanaan dan penyeleksian program;
3. Penerapan program;
4. Evaluasi dan pengakhiran.

Fungsi Sebagai Pemberi Pendukung. Berdasarkan aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang mendukung terjadinya program positif dari masyarakat. Maka seorang pendamping sosial dituntut, tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, tetapi juga mampu melaksanakan tugas teknis sesuai dengan keterampilan dasar, antara lain:

1. Analisis sosial;
2. Mengelola dinamika kelompok;
3. Menjalin relasi;
4. Bernegosiasi dan komunikasi;
5. Mencari serta mengatur sumber dana.

Dengan fungsi tersebut di atas maka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak memperhitungkan kehadiran pekerja sosial dalam pembangunan. Berdasarkan pengertian tersebut menjadi jelas bahwa pekerja sosial tidak seharusnya menjadi profesi yang hanya dimonopoli oleh lembaga instansi pemerintah, tetapi juga bisa ditekuni oleh lembaga-lembaga atau institusi-institusi lain yang memiliki fungsi memperkokoh relasi sosial, termasuk di

dalamnya lembaga non pemerintah seperti halnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi sosial).

Pada hakikatnya menurut teori yang dikemukakan Zastrow tersebut di atas masalah kesejahteraan sosial akan lebih efektif apabila berupa usaha suatu tim yang terpadu dan mengedepankan sifat holistik. Terlebih-lebih di masa krisis multidimensional saat ini, di mana diperlukan usaha pemecahan masalah secara terintegrasi atau terpadu dengan pemahaman secara mendalam. Oleh sebab itu berbagai kelompok profesional seperti halnya psikiater, psikolog, perawat, pengacara, guru, dokter dan perencana sosial, ahli terapi rekreasi, dan ekonom merupakan salah satu bentuk tim kerja tercapainya pembangunan kesejahteraan sosial secara efektif. Hal ini mudah dipahami karena pekerja sosial sebagai pendamping sosial, menurut Zastrow, memegang tujuh peranan, yaitu: (1) sebagai *enabler* yang membantu masyarakat mengartikulasikan kebutuhan masyarakat, (2) sebagai *broker* yang menghubungkan individu dan kelompok yang membutuhkan pelayanan, (3) sebagai pengacara yang mengorganisasikan masyarakat/kelompok yang memerlukan bantuan dalam arti advokasi, (4) sebagai aktivis yang mencoba menstimulasikan kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged group*), (5) sebagai ahli/pakar yang memberikan usulan bagaimana struktur organisasi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat dan kelompok, (6) sebagai pendidik masyarakat, dan (7) sebagai perencana sosial (*sosial planner*) yang mengumpulkan dan menganalisis data dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional (Zastrow, 1989).

Peran Pendamping Sosial

Selanjutnya menurut Parsons pendamping sosial harus mampu melaksanakan lima peran, seorang pekerja sosial yang berperan sebagai berikut (Parsons, Ruth J., 1994).

Peran Pendamping Sosial Sebagai Fasilitator. Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (*enabler*). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu sama lain (Barker, 2017) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987). Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa “setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati memberikan kerangka acuan mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial (Parsons, Ruth J., 1994):

1. Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Mendefinisikan tujuan keterlibatan;
3. Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan;
4. Memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem: menemukan kesamaan dan perbedaan;
5. Memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan;
6. Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif;

7. Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan;
8. Memfasilitasi penetapan tujuan;
9. Merancang berbagai solusi alternatif;
10. Mendorong pelaksanaan tugas;
11. Memelihara relasi system;
12. Memecahkan konflik.

Peran Pendamping Sosial Sebagai Broker. Dalam pengertian umum, seorang broker membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa broker tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari.

Dalam konteks pendampingan sosial, peran pekerja sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, terdapat klien atau konsumen. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh “keuntungan” maksimal.

Dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker:

1. Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat;
2. Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten;
3. Mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

Peranan sebagai broker mencakup “menghubungkan” klien dengan barang-barang dan pelayanan dan mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan peran sebagai broker, pendamping sosial harus mampu menghubungkan (*linking*), barang-barang dan pelayanan (*goods and services*) dan pengontrolan kualitas (*quality control*) (Parsons, Ruth J., 1994).

1. *Linking* adalah proses menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. *Linking* juga tidak sebatas hanya memberi petunjuk kepada orang mengenai sumber-sumber yang ada. Lebih dari itu, ia juga meliputi memperkenalkan klien dan sumber referal, tindak lanjut, pendistribusian sumber dan menjamin pelayanan sosial yang akuntabel.
2. *Goods* adalah barang-barang yang nyata, seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan. Sedangkan *services* mencakup keluaran pelayanan lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup klien, semisal perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling, pengasuhan anak.
3. *Quality Control* adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan monitoring yang terus-menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan..

Dalam melaksanakan peran sebagai broker, ada dua pengetahuan dan kerampilan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial:

1. Pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat (*community needs assessment*), yang meliputi:
 - a. Jenis kebutuhan.
 - b. Distribusi kebutuhan;
 - c. Kebutuhan akan pelayanan;

- d. Pola-pola penggunaan pelayanan;
 - e. Hambatan dalam menjangkau pelayanan.
2. Pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk:
 - a. Memperjelas kebijakan-kebijakan setiap lembaga;
 - b. Mendefinisikan peranan lembaga-lembaga;
 - c. Mendefinisikan potensi dan hambatan setiap lembaga;
 - d. Memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan masalah sosial masyarakat;
 - e. Mengembangkan prosedur guna menghindari duplikasi pelayanan;
 - f. Mengembangkan prosedur guna mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan pelayanan sosial.

Peran Pendamping Sosial Sebagai Mediator. Pendamping sosial harus melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Lee dan Swenson (1986) memberikan contoh bahwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.. Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela di mana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri.

Compton dan Galaway (1989) memberikan beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator:

1. Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Membantu setiap pihak

- agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain;
2. Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama;
 3. Menghindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah;
 4. Melokalisir konflik ke dalam isu, waktu dan tempat yang spesifik;
 5. Membagi konflik ke dalam beberapa isu;
 6. Membantu pihak-pihak yang bertikai, menganjurkan agar mereka yang bertikai lebih memiliki manfaat. Apabila dapat melanjutkan sebuah hubungan dari pada terlibat terus dalam konflik;
 7. Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka, agar bersepakat satu sama lain, menyelesaikan masalah yang dihadapinya;
 8. Melakukan prosedur-prosedur persuasi.

Peran Pendamping Sosial Sebagai Pembela. Seringkali pekerja sosial harus berhadapan sistem politik, agar dapat menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan, guna mencapai tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memainkan peranan sebagai pembela (advokat). Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktik pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*) (Parsons, Ruth J., 1994). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

Rothblatt (1978) memberikan beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela dalam pendampingan sosial:

1. Keterbukaan: membiarkan berbagai pandangan untuk didengar;
2. Perwakilan luas: mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan;
3. Keadilan: memperjuangkan sebuah sistem kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan;
4. Pengurangan permusuhan: mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan;
5. Informasi: menyajikan masing-masing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen dan analisis;
6. Pendukung: mendukung partisipasi secara luas;
7. Kepekaan: mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain.

Peran pendamping Sosial sebagai Pelindung. Tanggung jawab pendamping sosial sebagai pekerja sosial terhadap masyarakat, didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pendamping sosial untuk menjadi pelindung (*protector*) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (*guardian role*), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (1) kekuasaan, (2) pengaruh, (3) otoritas, dan (3) pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi:

1. Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama;
2. Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan;
3. Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan

tanggung jawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

Peran profesi pekerja sosial yang sangat luas tidak harus dikembangkan hanya melalui Kementerian Sosial akan tetapi melalui insitusi lainnya seperti halnya lembaga kepolisian, kesehatan, hukum, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah maupun lembaga non pemerintah lainnya. Bagaimana menghidupkan semangat dan eksistensi profesi pekerja sosial dan aplikasi metode pekerjaan sosial di segala institusi, diharapkan keberadaan profesi pekerja sosial tersebut berada pada segmen institusi baik swasta maupun pemerintah, profesi pekerja sosial akan mendapat pengakuan keberadaanya apabila dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu kebutuhan. Menghadapi era otonomi daerah, keberadaan profesi pekerja sosial di setiap segmen akan memungkinkan tercapainya efektivitas dan efisiensi pembangunan kesejahteraan sosial serta terlepasnya egosentrisme instansi yang selama ini terjadi.

Strategi dan Program Kerja Pendamping Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pendampingan Sosial Seringkali dilakukan atau melibatkan dua strategi utama, yakni: (1) Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya juga meningkatkan keterampilan keluarga dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya; dan (2) Advokasi adalah bentuk keberpihakan pekerja sosial terhadap kehidupan masyarakat yang diekspresikan melalui serangkaian tindakan politis yang dilakukan secara terorganisir. Tujuan advokasi adalah untuk mencapai perubahan kebijakan tertentu yang bermanfaat. Terdapat lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan

sosial, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat.

1. Motivasi. Masyarakat didorong agar dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Misalnya, keluarga-keluarga miskin didorong untuk membentuk kelompok;
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat, dicapai melalui pendidikan dasar pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional dikembangkan melalui cara-cara partisipasi;
3. Manajemen diri. Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri;
4. Mobilisasi sumber. Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tanggungan reguler dan sumbangan sukarela bertujuan menciptakan modal sosial;
5. Pembangunan dan pengembangan jaringan. Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Pengembangan Masyarakat (PM) adalah proses membantu orang-orang biasa agar dapat memperbaiki masyarakatnya melalui tindakan-tindakan kolektif (Twelvetrees, 1992). Secara akademis, PM dikenal sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip

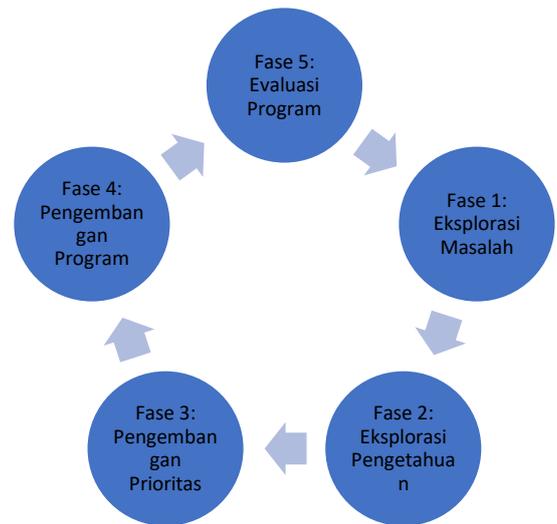
partisipasi sosial (Suharto, 2010) Penerima Manfaat merupakan spesialisasi atau setting praktek pekerjaan sosial yang bersifat makro (*macro practice*).

Pengembangan masyarakat secara umum meliputi perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan. Sebagai suatu kegiatan kolektif, PM melibatkan beberapa aktor, seperti Pekerja Sosial, masyarakat setempat, lembaga donor serta instansi terkait, yang saling berkerjasama mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program atau proyek tersebut (Suharto, 2014). Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”, PM sangat memperhatikan pentingnya partisipasi sosial dan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, dan bahkan dalam hampir semua praktik pekerjaan sosial, peranan seorang *community worker* seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (*problem solver*) secara langsung. Dalam konteks PM, pendampingan sosial berpusat pada tiga visi praktek pekerjaan sosial, yang dapat diringkas sebagai 3P, yaitu: pemungkin (*enabling*) pendukung (*supporting*), dan pelindung (*protecting*). Merujuk pada Payne, prinsip utama pendampingan sosial adalah “making the best of the client’s resources” (Payne, 1991). Dalam pendampingan sosial, klien dan lingkungannya tidak dipandang sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa.

Salah satu kerangka kerja pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan dalam proses pendampingan sosial adalah Teknik PPM (*Programme Planning Model*) yang juga dikenal dengan sebutan Proses Kelompok Nominal (PKN). Perencanaan sangat memperhatikan proses dan situasi di mana berbagai kelompok

yang terbagi berdasarkan keahlian, kepentingan, maupun konsep retorik dan ideologis dilibatkan bersama dalam merancang sebuah program atau perubahan sosial. Secara ringkas, proses PPM sebagai berikut:

Gambar 3.
Proses Pendampingan sosial Teknik PPM
(*Programme Planning Model*)



1. Fase 1: Eksplorasi Masalah
 - a. Pelibatan kelompok-kelompok klien atau konsumen.
 - b. Pelibatan pendamping sebagai supervisor garis depan.
2. Fase 2: Eksplorasi Pengetahuan
 - a. Pelibatan ilmuwan luar (bukan dari masyarakat setempat)
 - b. Pelibatan ahli organisasi dalam dan luar.
 - c. Pelibatan pendamping sebagai penghubung antara pihak luar dan masyarakat setempat.
3. Fase 3: Pengembangan Prioritas
 - a. Pelibatan para pengawas sumber.
 - b. Pelibatan administrator kunci.
 - c. Pelibatan pendamping sebagai pemberi masukan terhadap keputusan.
4. Fase 4: Pengembangan Program
 - a. Pelibatan administrator-administrator lini.
 - b. Pelibatan ahli teknis.

- c. Pelibatan pendamping sebagai pemberi masukan.
5. Fase 5: Evaluasi Program
- a. Pelibatan kelompok-kelompok klien atau konsumen.
 - b. Pelibatan staf dan petugas administrasi.
 - c. Pelibatan pendamping sebagai pemberi masukan. (Suharto, 2007)

Kerangka ini dapat pula diterapkan secara khusus dalam konteks Pengembangan masyarakat. Pendampingan sosial berpijak pada paradigma generalis (Dubois & Miley, 2005) memfokuskan pada konsultasi pemecahan masalah, manajemen sumber dan pendidikan. Sementara itu, peranan pekerja sosial sebagai pendamping akan dikontekstualkan sebagai fasilitator atau pemungkin, broker, mediator, pembela, dan pelindung.

Strategi dan peranan pekerja sosial sebagai pendamping sosial dalam menjalankan fungsi, peran dan strategi, dapat dilihat sebagai berikut: Fungsi Konsultasi dalam pemecahan masalah berperan sebagai fasilitator, pembela. Strategi pelindung melalui penelitian dan perencanaan. Peranan pekerja sosial dalam penanganan masalah serta pendampingan sosial berfungsi sebagai konsultan dalam pemecahan masalah, tidak hanya dilakukan dengan profesi lain (dokter, guru), melainkan dengan sistem klien. Konsultasi dapat berupa pemberian dan penerimaan saran, melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengidentifikasi prosedur bagi tindakan yang diperlukan.

Konsultasi yang dilakukan oleh pekerja sosial sebagai bagian dari kerjasama yang saling melengkapi antara sistem klien dan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah. Pekerja sosial membagi secara formal pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, sedangkan klien membagi pengalaman personal, organisasi atau

kemasyarakatan yang pernah diperoleh semasa hidupnya. Dalam proses pemecahan masalah, pendampingan sosial dapat dilakukan melalui serangkaian tahapan yang biasa dilakukan dalam praktik pekerjaan sosial pada umumnya, yaitu: pemahaman kebutuhan, perencanaan dan penyeleksian program, penerapan program, evaluasi dan pengakhiran.

Strategi Profesi Pekerja Sosial dalam Pendampingan Sosial

Peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok agar memecahkan masalah. Semakin berkembangnya permasalahan sosial seiring dengan perubahan sosial global tentu akan semakin membutuhkan kehadiran pekerja sosial profesional sebagai seorang pendamping. Karena itu strategi pendekatan pekerjaan sosial harus semakin sistemik, holistik, dan komprehensif. Strategi pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui memotivasi masyarakat terlibat dalam kegiatan kelompok. Pekerja sosial mendampingi dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki (potensi) dan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Pekerja sosial berupaya untuk meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi dan pemberian keterampilan, pendidikan dan latihan dengan cara partisipatif. Pekerja sosial menciptakan suasana kondusif agar mereka mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka sendiri. Peran pekerja sosial sebagai pendamping dengan memobilisasi sumber dan potensi kesejahteraan sosial, termasuk pendampingan berorganisasi dengan melibatkan seluruh masyarakat. Pekerja sosial sebagai pendamping akan lebih dikenal jika sungguh-sungguh menguasai tiga kerangka dasar profesi tersebut yaitu kerangka keilmuan (*body of knowledge*), kerangka nilai (*body of value*), dan kerangka praktek (*body of skill*)

(Trevithick, 2008). Pendamping sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial dilakukan dengan pendekatan metoda pekerjaan sosial yang paling tepat yaitu metoda pengembangan masyarakat (*community development*), metoda bekerja dengan perorangan (*case work*) dan metoda kebijakan sosial (*social policy*). Pendampingan masyarakat yang dilakukan pekerja sosial dapat dilaksanakan berskala lokal baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga swadaya masyarakat. Strategi pendampingan pekerja sosial melalui strategi pendekatan masyarakat untuk meningkatkan standar hidup berskala lokal. Strategi pendampingan untuk menggali kesadaran masyarakat melakukan aksi sosial, mengelola lingkungan; serta meningkatkan motivasi masyarakat untuk mencari solusi terhadap pemenuhan kebutuhan sosial. Profesi pekerja sosial mengarah kepada profesionalisme menjadi tuntutan dan sebagai pendamping harus memiliki kompetensi yang tersertifikasi oleh lembaga profesi pekerja sosial yang telah dibentuk pemerintah.

PENUTUP

Peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan mengarahkan pembangunan kesejahteraan sosial, dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Strategi pendampingan pekerja sosial melalui strategi pendekatan masyarakat untuk meningkatkan standar hidup berskala lokal. Strategi pendampingan untuk menggali kesadaran masyarakat melakukan aksi sosial, mengelola lingkungan; serta meningkatkan motivasi masyarakat untuk mencari solusi terhadap pemenuhan kebutuhan sosial. Profesi pekerja sosial mengarah kepada profesionalisme menjadi tuntutan dan sebagai pendamping harus memiliki kompetensi yang tersertifikasi oleh lembaga profesi pekerja sosial yang telah dibentuk pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Elly Kumari Tjahya Putri, dari lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan masukan mengenai peran pendamping bagi profesi pekerja sosial, sehingga naskah ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, R. L. (2017). The social work dictionary 6th edition. In *Social Work Research*.
<https://doi.org/10.1093/swr/svx002>
- Boehm, W. W. (1958). The nature of social work. *Social Work (United States)*.
<https://doi.org/10.1093/sw/3.2.10>
- Dubois, B. L., & Miley, K. K. (2005). Social Work :An Empowering Profession. *Social Work: An Empowering Profession (Th Edition)*.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Friedlander, W. . (1961). *Introduction to Sosial Welfare*,. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs,.
- Greene, R. R. (2017). Human behavior theory and social work practice. In *Human Behavior Theory and Social Work Practice*.
<https://doi.org/10.4324/9781351327404>
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Kelan, E. K. (2008). Emotions in a rational profession: The gendering of skills in ICT work. *Gender, Work and Organization*.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2007.00355.x>
- Maluccio N., A., & Libassi F., M. (1984). Competence clarification in social work

- practice. *Social Thought*.
- Midgley, J. (2017). Social Development: Theory and Practice. In *Social Development: Theory and Practice*. <https://doi.org/10.4135/9781446294987>
- Midgley, J., & Conley, A. (2010). Social Work and Social Development: Theories and Skills for Developmental Social Work. In *Social Work and Social Development: Theories and Skills for Developmental Social Work*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199732326.001.0001>
- Minahan, A., & Pincus, A. (1977). Conceptual framework for social work practice. *Social Work (United States)*. <https://doi.org/10.1093/sw/22.5.347>
- Parsons, Ruth J., J. D. J. dan S. H. H. (1994). *The Integration of Sosial Work Practice*, : Brooks/ColePayne, Malcolm (1986), Sosial care in The Community, London: MacMillan.
- Payne, M. (1991). Modern Social Work Theory. In *Modern Social Work Theory*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-21161-6>
- Reamer, F. G. (2012). Social Work. In *Encyclopedia of Applied Ethics*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373932-2.00415-4>
- Siporin, M. (1993). The social worker's style. *Clinical Social Work Journal*. <https://doi.org/10.1007/BF00756370>
- Suharto, E. (2010). Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan. In *refika editama*.
- Suharto, E. (2014). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*.
- Trevithick, P. (2008). Revisiting the knowledge base of social work: A framework for practice. *British Journal of Social Work*. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcm026>
- Twelvetrees, J. (1992). Book Reviews : Sandra Butler and Claire Wintram (1991) *Feminist Group Work*. London: Sage. 200 pp. £10.95 paperback, £30.00 hardback. *International Social Work*. <https://doi.org/10.1177/002087289203500312>
- Zastrow, C. H. (1978). Introduction to social welfare institutions: Social problems, services, and current issues. *Social Work (United States)*. <https://doi.org/10.1093/sw/23.3.258-a>

BUDAYA KEMISKINAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

CULTURE OF POVERTY IN POVERTY REDUCTION IN INDONESIA

Johan Arifin

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Gd. Cawang Kencana Lt. 2, Jl. Mayjen Sutoyo, Kav. 22 Cawang, Jakarta Timur, Indonesia
E-mail: masjohan81@gmail.com

Abstrak

Penanggulangan kemiskinan menjadi sasaran utama program pembangunan sesuai dengan pengarusutamaan agenda MDGs dan SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025). Program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah berhasil menurunkan persentase angka kemiskinan, meskipun secara nominal jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Upaya penanggulangan kemiskinan yang pernah dan sedang dijalankan masih menghadapi berbagai tantangan dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Pada satu sisi pembangunan selama ini belum bisa “membebaskan” si miskin karena faktor budaya yang membelenggu. Pada sisi lain budaya kemiskinan menjadi pelampiasan masyarakat miskin yang tidak berdaya menghadapi cengkraman kapitalisme. Karakter khas kemiskinan masyarakat Indonesia menghendaki pendekatan struktural dan kultural secara seimbang. Nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang mendorong pada perubahan pola pikir menanggulangi kemiskinan perlu diangkat dalam program kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan lebih dulu memaknai ulang nilai-nilai budaya tersebut. Perlu diciptakan “budaya tanding”, yaitu memunculkan sebagian dari populasi suatu masyarakat yang secara kuat menganut atau memeluk satu atau lebih nilai-nilai budaya yang berbeda dengan nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan yang dominan. Kajian ini menjelaskan secara kualitatif deskriptif hambatan kultural dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Analisis didukung oleh data dan informasi sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan.

Kata Kunci: penanggulangan kemiskinan, pembangunan, budaya kemiskinan, memaknai ulang, budaya tanding.

Abstract

Poverty reduction is the main target of development programs in accordance with the mainstreaming of the MDGs and SDGs agenda in the National Long-Term Development Plan (RPJPN 2005-2025). The poverty reduction program initiated by the government has succeeded in reducing the percentage of the poverty rate, even though nominally the number of poor people is still quite high. Poverty reduction efforts that have been and are being carried out are still facing various challenges in the cultural values of the Indonesian people. On the one hand, development so far has not been able to "free" the poor because of cultural factors that shackle them. On the other hand, a culture of poverty becomes an outlet for the poor who are powerless to face the grip of capitalism. The characteristic character of poverty in Indonesian society demands a balanced structural and cultural approach. Cultural values in society that lead to a change in mindset to alleviate poverty need to be raised in poverty reduction policy programs by first re-interpreting these cultural values. It is necessary to create a "counter culture", which is to create a part of the population of a society that strongly adheres to or embraces one or more cultural values that are different from the values that exist in the dominant culture. This study describes qualitatively descriptive cultural barriers in poverty reduction in Indonesia. The analysis is supported by secondary data and information obtained from various relevant literatures.

Keywords: *poverty reduction, development, culture of poverty, redefine, counterculture.*

PENDAHULUAN

Menurunkan angka kemiskinan adalah agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025). Hal ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Milenium, deklarasi yang diadopsi 189 negara, lahir dari kesepakatan 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium di New York, September 2000. Deklarasi ini diberi tajuk “Tujuan Pembangunan Millenium” (*Millenium Development Goals – MDGs*), yang terdiri dari 8 tujuan: (1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan ekstrim; (2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (4) Menurunkan angka kematian anak; (5) Meningkatkan kesehatan ibu hamil; (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; (7) Memastikan kelestarian lingkungan; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Delapan tujuan itu diukur dengan target kualitatif dan kuantitatif, dengan rentang waktu perhitungan mulai tahun 1990 dan diharapkan tercapai pada tahun 2015 (BPS dan UNICEF, 2009).

Secara keseluruhan, hingga tahun 2015 pencapaian MDGs di Indonesia adalah 71 persen, di mana dari total 72 indikator, 51 indikator berhasil tercapai. Tujuan MDGs ketiga dan keempat semua indikatornya berhasil dicapai, dengan masing-masing sebanyak tujuh dan empat indikator. Sementara sasaran MDGs yang indikatornya paling banyak belum tercapai adalah kesatu dan ketujuh yakni masing-masing sebanyak tujuh dan enam indikator (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018).

Pada 21 Oktober 2015 dideklarasikan *SDG's (Sustainable Development Goals)* sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030. Disepakati dan diadopsi oleh 193

negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *SDGs* melanjutkan agenda *MDGs*, disertai pengembangan menjadi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Perluasan cakupan agenda ini diharapkan mampu untuk lebih tanggap atas penyebab utama kemiskinan serta kebutuhan universal. Tujuan *SDGs* mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan. Pendekatan *SDGs* ini memperkuat pencapaian sasaran agenda *MDGs*, tertuju pada sasaran akhir mengentaskan kemiskinan di tahun 2030 dengan semangat “*no one left behind*” (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018).

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dinilai cukup berhasil menurunkan persentase penduduk miskin hingga berada pada angka 9 - 11 persen. Angka kemiskinan tercatat 10,12 persen pada September 2017, pada periode yang sama turun menjadi 9,82 persen pada 2018, kembali turun menjadi 9,41 persen pada 2019, namun mengalami lonjakan ke angka 9,78 persen pada Maret 2020 (BPS, 2020). Periode Semester 1 2020 menjadi semacam anomali, ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia yang mengakibatkan lonjakan angka kemiskinan, di mana banyak penduduk pada posisi rentan miskin yang kembali jatuh miskin. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga 1-2 tahun mendatang karena resesi ekonomi telah memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga menambah beban pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Selama tiga tahun terakhir dalam kondisi sebelum pandemi, jika dicermati lebih jauh, jumlah penduduk miskin secara nominal tidak jauh mengalami penurunan. Menurunnya tingkat kemiskinan pada September 2019 sebesar 0,19 persen dibandingkan dengan Maret

2019 dan menurun 0,44 persen terhadap September 2018 belum menggambarkan kesuksesan penanggulangan kemiskinan. Menurut ekonom senior INDEF, Enny Sri Hartati, penurunan ini hanya mencerminkan turunnya kemiskinan absolut. Penurunan itu belum sebanding dengan anggaran program penanggulangan kemiskinan yang lebih dari Rp100 triliun (ekonomi.bisnis.com, 2020).

Diperlukan kajian lebih mendalam, bahwa meskipun telah banyak program dan kebijakan digulirkan (strategi struktural) dengan dukungan anggaran yang tidak sedikit, penanggulangan kemiskinan masih belum berjalan dengan hasil yang optimal. Wajah kemiskinan yang dipengaruhi oleh banyak faktor (multidimensional), sangat dimungkinkan karena sebab-sebab kultural (strategi budaya) masih menjadi salah satu bagian dari hambatan penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan selama ini berpijak pada konsep kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi “penduduk miskin” adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2020). Dari konsep ini maka konsekuensinya adalah penanggulangan kemiskinan dominan menggunakan skema peningkatan pendapatan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Dengan demikian, ukuran-ukuran dimensi ekonomi adalah prioritas utama dan tujuan penanggulangan kemiskinan itu sendiri, dibandingkan dimensi lain, misalnya faktor budaya.

Pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan selama ini dinilai masih banyak kekurangan, diantaranya: pertama, masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek lain kemiskinan multidimensional; kedua, lebih bernuansa karitatif (bantuan sosial) daripada produktivitas; ketiga, lebih memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek daripada subyek; keempat, pemerintah masih sebagai penguasa (program terpusat yang seragam, *top-down*) daripada fasilitator. Wajah kemiskinan yang multidimensional memerlukan pendekatan yang seimbang antara ekonomi dan non ekonomi. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun perlu juga mengatasi kemiskinan dari faktor non-ekonomi. Strategi pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada mengikis nilai-nilai budaya yang negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, merasa tidak berdaya, dan lain-lain (Huraerah, 2005).

Penanggulangan kemiskinan memerlukan kajian yang mendalam dan akurat untuk merumuskan strategi terbaik, yang diawali dengan mengenali secara mendalam karakter dasar masyarakat dan penyebab kemiskinan itu sendiri. Penyamaan persepsi yang tepat tentang konsep, indikator serta target prioritas penanggulangan kemiskinan, menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Kajian-kajian tentang penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan, di antaranya banyak menjelaskan sebab-sebab kemiskinan dari sudut pandang struktural. Pembangunan ekonomi yang tidak adil membawa dampak pada kemiskinan dan kesenjangan yang parah, di mana kebijakan pemerintah tidak berpihak pada si miskin (Syawie, 2011). Hal ini erat kaitannya dengan sebagian besar program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang tidak begitu berhasil karena terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dari rencana mereka (Prawoto, 2009). Sementara pemberdayaan

masyarakat miskin dirasakan belum berjalan dengan baik untuk mengentaskan masyarakat miskin karena desain program yang kurang tajam (Sutikno et al, 2015).

Kajian-kajian yang membahas tentang hambatan-hambatan budaya dalam penanggulangan kemiskinan belum banyak dilakukan. Padahal, faktor kultural (budaya) memiliki andil yang relatif seimbang dengan faktor struktural sebagai penyebab kemiskinan di Indonesia. Kajian tentang budaya kemiskinan menjadi penting dilakukan mengingat program anti kemiskinan akan lebih efektif digulirkan jika sejalan dengan budaya yang eksis di masyarakat melalui pendayagunaan potensi, sumberdaya dan budaya lokal (Royat, 2007).

Budaya secara umum bisa dilihat sebagai ciptaan manusia yang berkembang dan dimiliki suatu kelompok masyarakat, kemudian dikembangkan menjadi suatu kebiasaan aktifitas turun-temurun. Kebudayaan dimaknai sebagai suatu sistem simbolik atau sistem perlambangan (Kaplan, 2012). Sutrisno (2005) menguraikan budaya dalam berbagai sudut, yaitu: (1) secara deskriptif adalah totalitas komprehensif yang menyusun keseluruhan hidup manusia; (2) secara historis adalah warisan yang turun-temurun; (3) secara normatif adalah aturan hidup dan gugus nilai; (4) secara psikologis adalah piranti pemecahan masalah yang membuat orang bisa hidup dan berinteraksi; (5) secara struktural adalah abstraksi yang berbeda dari perilaku konkret; dan (6) budaya lahir dari interaksi antar manusia dan terwariskan kepada generasi berikutnya.

Sementara menurut Daoed Joesoef budaya adalah sistem nilai yang dihayati, dan segala sesuatu yang mencirikan budaya adalah kebudayaan. Nilai itu meliputi: (1) sesuatu yang berbentuk atau berwujud dan dapat disentuh seperti bangunan, karya seni, dan lain-lain; (2) sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak dapat

disentuh seperti adat-istiadat, tradisi, kebiasaan normatif, moral, etika, gagasan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain (Joesoef, 1996).

Warisan kebudayaan secara turun-temurun dijadikan oleh kelompok masyarakat sebagai pegangan hidup dan kebiasaan kelompok masyarakat. Demikian halnya yang dirumuskan Oscar Lewis dengan mengamati perilaku masyarakat miskin dan budayanya. Budaya kemiskinan dalam pandangan Oscar Lewis mencakup apa yang diyakini (nilai-nilai), respons dalam tindakan (sikap), dan abstraksi-abstraksi dari kelakuan (pola-pola kelakuan) yang berlangsung terus-menerus. Lewis mengidentifikasi budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis berciri kapitalistik, yang kemungkinan besar dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berstrata rendah dan mengalami perubahan sosial yang drastis (Lewis, 1959). Perilaku yang mencirikan budaya kemiskinan ini dijalankan secara turun-temurun antar generasi, sehingga menghambat suatu kelompok dalam masyarakat tertentu untuk keluar dari garis kemiskinan.

Wujud budaya kemiskinan misalnya terdapat pada masyarakat pemulung di kawasan perkotaan. Terdapat wujud budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi di perkampungan kumuh, antara lain ketergantungan dengan tengkulak/pengepul, singkatnya masa anak-anak, rendahnya partisipasi dan integrasi pada pranata masyarakat (Wahyudi dan Handoyo, 2014).

Tulisan ini merupakan kajian dengan pendekatan deskriptif kualitatif tentang budaya kemiskinan. Teori Oscar Lewis tentang *Culture of Poverty* ditampilkan sebagai konsep awal untuk melihat eksistensi budaya kemiskinan di Indonesia. Lewis memahami budaya

kemiskinan sebagai suatu sub-kebudayaan yang diwarisi dari generasi ke generasi. Menurut Lewis (1959) kemiskinan bukan hanya masalah kelumpuhan ekonomi, disorganisasi atau kelangkaan sumber daya. Budaya kemiskinan dalam beberapa hal bersifat positif karena memberikan jalan keluar bagi kaum miskin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya.

Kajian ini bertujuan untuk mendiskripsikan beberapa nilai-nilai budaya dalam masyarakat perkotaan yang menjadi tantangan penanggulangan kemiskinan. Data dan informasi yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari hasil penelusuran literatur dan dokumentasi sumber-sumber lain yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Pada metode penelusuran literatur, penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian tapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan itu untuk memperoleh data penelitian (Zed, 2014). Data dan informasi tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Kemiskinan: Beberapa Konsep Kunci

Kemiskinan telah menjadi kajian menarik seiring perkembangan ilmu-ilmu sosial. Laju industrialisasi dan berkembangnya berbagai konsep pembangunan ekonomi mendorong berbagai kajian sosial utamanya tentang dampaknya terhadap bertambahnya penduduk miskin. Studi tentang kemiskinan di Indonesia mendapatkan momentum terbaiknya dengan gencarnya pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan di segala bidang termasuk di dalamnya upaya penanggulangan kemiskinan.

Beberapa ahli ilmu sosial di Indonesia mengemukakan tentang konsep kemiskinan.

Suparlan (1984) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan kekurangan harta atau benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang. Akibat dari kekurangan harta atau benda tersebut maka seseorang atau sekelompok orang itu merasa kurang mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan layak. Ketidakmampuan tersebut bisa jadi hanya pada tingkat kebutuhan-kebutuhan budaya (adat, upacara-upacara, moral dan etika), atau pada tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial (pendidikan, berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama) atau pada tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (makan-minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan). Dengan demikian, kemiskinan merupakan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang menjadi syarat kesejahteraan individu.

Pandangan lain tentang kemiskinan disampaikan oleh Gunawan Sumodiningrat yang merumuskan tentang profil kemiskinan (Sumodiningrat et al., 1999). Ia menggarisbawahi bahwa timbulnya kemiskinan bukan saja masalah kesejahteraan (*welfare*), akan tetapi memuat berbagai sisi bahasan, yaitu: pertama, masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan (*vulnerability*). Misalnya adalah pembangunan bidang pertanian yang telah mampu meningkatkan pendapatan petani cukup signifikan, meskipun seandainya jika terjadi musim kering berturut-turut dalam beberapa tahun, maka tingkat kesejahteraan petani akan anjlok sampai titik yang terendah. Faktor alam dalam contoh ini menjadi penyumbang kerentanan nasib petani.

Kedua, kemiskinan berarti tertutupnya akses pada kesempatan-kesempatan kerja. Hal ini akibat dari hubungan produksi dalam masyarakat yang tidak memberikan kesempatan akses untuk berpartisipasi dalam aktivitas produksi, atau sekalipun mereka bekerja tetapi mereka terjebak dalam hubungan produksi yang

eksploitatif, yang menuntut kerja keras dalam jam kerja yang panjang dengan imbalan yang rendah dan tidak layak.

Ketiga, kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para birokrat dalam menentukan keputusan yang menyangkut dirinya tanpa memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan ketidakberdayaan menghadapi penyakit, kematian, kekumuhan, dan kekotoran.

Keempat, kemiskinan berarti menghabiskan semua atau sebagian besar penghasilan golongan miskin untuk konsumsi pangan dengan kuantitas dan kualitas yang terbatas, sehingga konsumsi gizi mereka amat rendah yang mengakibatkan produktifitas dan etos kerja mereka rendah pula. Di samping itu juga akan menghasilkan ketahanan fisik yang juga rendah.

Kelima, kemiskinan ditandai oleh tingginya rasio ketergantungan, karena banyaknya anggota keluarga dan beberapa diantaranya masih balita atau bahkan lansia. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya konsumsi yang akan mengganggu tingkat kecerdasan mereka, sehingga dalam kompetisi merebut peluang dan kesempatan di masyarakat, anak-anak kaum miskin akan berada pada pihak yang lemah.

Keenam, kemiskinan terefleksikan dalam budaya kemiskinan, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penghapusan *physical poverty* (kemiskinan yang kasat mata: sandang, pangan, papan, sarana dan pra-sarana lingkungan, dan lain-lain) tidak secara otomatis akan menghapuskan *culture of poverty* (budaya kemiskinan: sikap mental, etos kerja, tingkat pendidikan, dan lain-lain). Budaya kemiskinan yang terwariskan secara turun temurun antar generasi ini cenderung menghambat motivasi untuk melakukan mobilitas ke atas. Itu berarti

menghambat kemajuan dan harapan-harapan mereka di masa depan.

Mubyarto (1995) memberikan definisi kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dalam bentuk rendahnya pendapatan dan disebabkan oleh rendahnya ketrampilan, produktivitas, lemahnya nilai tukar produksi dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Rendahnya pendapatan penduduk miskin menyebabkan rendahnya produktivitas dan meningkatkan beban ketergantungan bagi masyarakat.

Menurut Sajogyo (dalam Suyanto, 2013), kemiskinan bisa diukur dengan membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan, yakni: (1) Perkotaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram per tahunnya; (2) Perdesaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras 320 kilogram per tahun, miskin sekali 240 kilogram per tahun dan paling miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 180 kilogram per tahunnya. Pengeluaran makanan merupakan fungsi dari Pendapatan, dimana Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan dalam standar ukuran kemiskinan secara global, yakni kemiskinan merupakan perihal keadaan kekurangan dengan pendapatan minimum US\$1 per orang per hari (Albornoz, 2007).

Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan definisi kemiskinan untuk standar di Indonesia sebagai keadaan atau kondisi kurang sejahtera yang dihitung dalam Rupiah per kapita per bulan. Di sisi yang lain, Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) sebagai tolok ukur definisi kemiskinan diterjemahkan sebagai kondisi kekurangan kebutuhan hidup (makanan, minuman, pakaian, rumah) selama satu bulan berdasarkan jumlah kalori, protein, vitamin dan bahan mineral lainnya yang diperlukan untuk hidup layak seorang pekerja. Kebutuhan

konsumsi harus memenuhi 2100 kalori per hari (kelompok makanan) ditambah dengan kebutuhan (bukan makanan) minimal lainnya yang mencakup perumahan, pakaian, kesehatan dan pendidikan (BPS, 2008).

Kemiskinan dan Pembangunan

Pembangunan ekonomi di samping sebagai salah satu upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, juga dianggap sebagai salah satu yang membawa ekses negatif yakni munculnya kemiskinan. Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam buku “Kemiskinan di Indonesia” menghimpun sejumlah hasil penelitian kependudukan dan masalah kemiskinan (Jakti, 1986). Ia melihat masalah kemiskinan muncul sebagai dampak dari kebijakan pembangunan khususnya pembangunan desa-kota yang tidak seimbang, sehingga berdampak pada berkembangnya fenomena kemiskinan. Pembangunan perkotaan yang didukung oleh industrialisasi yang masif telah melahirkan sebuah dorongan masyarakat desa untuk berurbanisasi dan beralih profesi menjadi buruh-buruh di sektor industri perkotaan. Pada sisi lain sektor pertanian di desa yang kekurangan tenaga kerja membawa dampak negatif pada menurunnya ketahanan pangan yang secara alami ditopang oleh produksi di pedesaan.

Fenomena semacam ini menjadi karakter khas dari negara-negara dunia ketiga yang mengalami periode transisi modernisasi yang ditandai dengan munculnya pusat-pusat industri baru. Namun, hadirnya industri justru merusak akar fundamental ekonomi utamanya di pedesaan yang berkarakter agraris beralih menjadi berorientasi kerja sebagai buruh pada pabrik-pabrik di perkotaan karena dianggap lebih menjanjikan dan bercitarasa modern.

Pembangunan yang justru menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan menjadi sebuah kritik tajam pada dekade 1970-an.

Mahbub ul Haq dalam bukunya *Poverty Curtain*, 1976 (alih bahasa: “Tirai Kemiskinan, Tantangan Pembangunan untuk Dunia Ketiga”: 1983), menyajikan gambaran kondisi ini dalam bukunya dengan serangkaian kalimat:

“Tirai kemiskinan telah turun di muka bumi, membelahnya, dari segi kebendaan dan pandangan hidup, menjadi dunia berbeda, dua planet terpisah, dua kelompok manusia tidak sederajat, yang satu teramat kaya, yang lain sangat melarat. Batas yang tidak terlihat oleh pandangan mata ini, kita jumpai dalam Negara dan antar Negara”.

Kemiskinan sebagai ekses negatif dari pembangunan selama ini adalah karena ulah para perencana pembangunan dunia itu sendiri. Pembangunan di berbagai negara menyebabkan terbangunnya tirai kemiskinan, membuat para perencana pembangunan menjadi seperti dewa moral dunia yang memberi arah pada dunia baru. Tata dunia baru internasional hasil pembangunan mengandaikan pola hubungan interaksi antar negara dalam melakukan pemenuhan hajat hidup masing-masing berlangsung dengan penuh keadilan (ul Haq, 1976).

Jalannya pembangunan yang membawa ekses pada ketimpangan ini memerlukan revisi yang mendasar secara konseptual. Mahbub ul Haq mengemukakan pandangan baru dengan mengajukan delapan ide mendasar terhadap pola pembangunan utamanya untuk mengangkat derajat si miskin, yakni: *Pertama*, pembangunan dengan berfokus pada pertumbuhan *Gross National Product* (GDP) seringkali tidak sampai ke masyarakat bawah. Yang lebih dibutuhkan adalah penanganan langsung atas kemiskinan dan orang miskin itu sendiri. *Kedua*, mekanisme pasar seringkali mengalami kesenjangan akibat pembagian pendapatan dan kekayaan yang berlaku secara tidak adil, padahal pasar bukanlah pemberi arah yang dapat diandalkan untuk menentukan tujuan-tujuan nasional suatu bangsa. *Ketiga*, model pembangunan harus lebih

manusiawi, sehingga bukan manusia yang semata-mata menjadi obyek pembangunan tetapi pembangunanlah yang harus diarahkan untuk melibatkan dan mensejahterakan sebanyak mungkin manusia di dalamnya. *Keempat*, perubahan kelembagaan lebih menentukan daripada sekedar perubahan standar harga kebutuhan pokok manusia untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih tepat. *Kelima*, model baru pembangunan harus berpijak pada tujuan memuaskan kebutuhan pokok manusia dan bukan mengutamakan permintaan pasar semata. *Keenam*, kebijakan tentang pembagian dan penyediaan lapangan kerja harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap rencana produksi, bukan mendahulukan produksi terlebih dahulu kemudian baru membaginya. *Ketujuh*, menaikkan produktivitas orang-orang miskin dengan mengarahkan penanaman modal ke sektor-sektor pro-miskin dalam masyarakat. *Kedelapan*, hubungan kekuasaan politik dan ekonomi umumnya harus dirombak dan disusun kembali agar pembangunan dapat lebih tersebar luas di masyarakat (ul Haq, 1976).

Lontaran pemikiran Mahbub ul Hag empat dekade silam ini ternyata masih relevan hingga saat ini, yaitu pentingnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan dewasa ini diarahkan untuk “membangun manusia seutuhnya” selaras dengan tujuan utama *Millennium Development Goals (MDGs)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yakni mengentaskan sebanyak mungkin masyarakat miskin dari jurang kemiskinan ekstrim.

Kritik ul Haq tersebut sejalan dengan Amartya Sen memberikan pandangan bahwa pembangunan semestinya berfokus pada memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan manusia. Peningkatan pendapatan (*income*) sebagai salah satu parameter, hanya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

peningkatan kesejahteraan dan kebebasan. Pertumbuhan ekonomi dengan demikian tidaklah menjadi dasar yang kuat untuk mengukur tingkat kemajuan suatu negara. Karena bagaimanapun pembangunan merupakan upaya perluasan kemampuan rakyat (*expansion of people's capability*) dan lebih jauh lagi pembangunan merupakan pembebasan (*development as freedom*) (Sen, 1999).

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bersifat instrumental (*instrumental freedoms*) meliputi: (1) Kebebasan Politik (*Political Freedoms*); (2) Fasilitas Ekonomi (*Economic Facilities*); (3) Peluang Sosial (*Social Opportunities*); (4) Jaminan Transparansi (*Transparency Guarantees*); (5) Keamanan Protektif (*Protective Security*).

Rumusan Sen mengarah pada pentingnya mengutamakan pencapaian peningkatan kesejahteraan sosial dan penghormatan atas hak asasi manusia dalam praktik-praktik pembangunan. Rumusan ini memberikan kontribusi mendasar dalam konsep “*welfare economics*” dan mengembangkan pemikiran keberpihakan pada sisi kemanusiaan dalam mengatasi problem-problem ekonomi untuk memajukan kesejahteraan sosial. Pengingkaran atas hak asasi manusia menjadi kendala dalam pembangunan manusia, karena sebetulnya jaminan akan hak asasi manusia dapat mengurangi resiko bencana sosial ekonomi. Hal ini dapat berjalan dengan baik manakala masyarakat memiliki sarana atau akses untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh kesempatan yang luas untuk mendapatkan informasi dan pengajaran sehingga bisa membuka wawasan dan kesadaran akan hak-hak mereka.

Kemiskinan: Antara Penyebab Struktural dan Kultural

Kemiskinan dilihat dari penyebabnya, secara umum dibedakan menjadi dua yakni kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Keduanya bisa ditemui dan menemukan porsi yang seimbang dalam kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Pada awal era Orde Baru yang memfokuskan agenda pada pembangunan ekonomi, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIS), 13-17 November 1979 di Malang, melakukan sebuah kajian ilmiah melalui sebuah seminar mengusung tema besar pembangunan sosial ekonomi. Hasil kajian ini disebut-sebut menjadi salah satu rumusan penting tentang “Kemiskinan Struktural”.

Hasil kajian tentang kemiskinan struktural tersebut selaras dengan rumusan Sosiolog terkemuka Indonesia, Selo Soemardjan yang berpendapat bahwa kemiskinan struktural terjadi pada individu miskin bukan karena malas bekerja atau tidak berpenghasilan, tetapi lebih disebabkan struktur sosial masyarakat yang ada membatasi hak-hak mereka untuk mengakses sumber-sumber ekonomi yang tersedia untuk mereka (Soemardjan, 1980). Kelompok masyarakat pada kondisi seperti itu umumnya sadar bahwa nasibnya berbeda dengan golongan masyarakat lain. Menurut Soemardjan, masuk dalam golongan ini para petani yang tidak punya lahan atau lahan garapannya terlalu kecil, sehingga seberapa giatpun mereka bekerja, penghasilannya tidak akan mencukupi. Termasuk juga dalam golongan ini para pekerja yang tidak terdidik dan terlatih (*unskilled labores*) yang menghambat mereka memasuki pasar kerja. Pengusaha bermodal kecil dan tanpa fasilitas dari pemerintah (sering disebut kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah –

UMKM) sebagian di antaranya juga masuk golongan ini.

Patut diakui perjalanan penanggulangan kemiskinan masih menghadapi banyak tantangan baik struktural maupun kultural. Di satu sisi struktur masyarakat dan pola penguasaan sumber-sumber ekonomi yang tidak merata menjadi hambatan struktural sehingga memicu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Pada sisi lain kemiskinan kultural menjadi kenyataan yang masih berkembang dan tanpa disadari melembaga dalam masyarakat Indonesia.

Masalah kemiskinan dalam sudut pandang kultural (budaya) bukan hanya terkait dengan masalah kelangkaan sumber-sumber ekonomi, ketidakadilan distribusi sarana produksi, atau dominasi akses modal finansial oleh golongan tertentu saja. Di samping kendala struktural, masalah kemiskinan menyangkut sikap mental, pola perilaku, dan pilihan sikap yang berasal dari *state of mind* (pola pikir dan sikap mental) yang tak mampu berjalan beriringan dengan semangat perubahan, kemajuan, dan peningkatan status serta kualitas kehidupan. Kajian antropologi pembangunan memunculkan sebuah ungkapan: “*poverty is a state of willingness rather than scarcity*” (kemiskinan lebih pada masalah kemauan daripada kelangkaan sumber daya).

Salah satu tantangan paling berat dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah mengubah budaya masyarakat yang lekat dengan kemiskinan, atau Oscar Lewis menyebutnya sebagai *Culture of Poverty* (budaya kemiskinan). Lewis memberi penegasan tentang budaya kemiskinan (Suparlan, 1984): “*Lebih mudah menghapuskan kemiskinan daripada budaya kemiskinan.*”

Menurut Lewis, *Culture of Poverty* bisa dimaknai sebagai suatu sub-kebudayaan hasil adaptasi dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dimana

kebudayaan tersebut cenderung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi. Kebudayaan tersebut mencerminkan upaya mengatasi keputusan dari keinginan untuk sukses di dalam kehidupan sesuai dengan nilai dan tujuan masyarakat yang lebih luas. Ia berpandangan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah kelumpuhan ekonomi, disorganisasi atau kelangkaan sumber daya, melainkan muncul sebagai sikap mental yang kurang mampu mengikuti perubahan.

Kebudayaan ini terdapat pada mereka yang berasal dari strata sosial paling rendah, sedang mengalami perubahan pesat dan yang telah terasing dari masyarakat tersebut. Adapun ciri-ciri budaya ini (Lewis, 1959) adalah: (1) Kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga utama masyarakat. Mereka umumnya berprestasi rendah namun mengakui nilai-nilai kelas menengah ada pada diri mereka. Mereka sangat sensitif terhadap perbedaan-perbedaan status namun tidak memiliki kesadaran kelas; (2) Di tingkat komunitas, dapat ditemui rumah-rumah bobrok, penuh sesak, bergerombol dan rendahnya tingkat organisasi di luar keluarga inti; (3) Di tingkat keluarga, ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan kurang pengasuhan oleh orang tua, cepat dewasa, hidup bersama/ kawin bersyarat, tingginya jumlah perpisahan antara ibu dan anaknya, cenderung matrilineal dan otoritarianisme, kurangnya hak-hak pribadi, solidaritas semu; (4) Di tingkat individu, ditandai dengan kuatnya perasaan tak berharga, tak berdaya, ketergantungan dan rendah diri (*fatalisme*).

Meskipun demikian, dalam beberapa hal budaya kemiskinan justru bisa bersifat positif karena menjadi jalan keluar bagi kaum miskin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Budaya kemiskinan merupakan adaptasi atau penyesuaian dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan

marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistik, dan berciri kapitalistik. Sebagian masyarakat yang tergolong miskin konsisten pada nilai-nilai tradisional dan menolak modernisasi untuk melindungi komunitasnya dari penetrasi kapitalisme.

Beberapa suku tradisional di Indonesia bisa menjadi contoh, misalnya Suku Badui Dalam di Banten, komunitas Samin di Jawa Tengah bagian utara, dan Suku Anak Dalam di Sumatera. Konsistensi beberapa komunitas ini untuk tetap hidup secara *subsisten* (hanya memenuhi kebutuhan sendiri) dan menolak industrialisasi merupakan suatu pilihan sikap secara sadar. Mempertahankan adat istiadat dan kelestarian lingkungan sementara ini masih menjadi alasan yang paling kuat. Pilihan tindakan semacam ini di satu sisi merupakan pilihan paling rasional di tengah keterbatasan pengetahuan dan sumberdaya manusia pada masa lalu. Namun di sisi lain, perkembangan zaman tidaklah mungkin dibendung dan pilihan berikutnya adalah menyesuaikan diri atau tergilas oleh laju zaman itu sendiri.

Masyarakat modern kerap kali menyebut tindakan ini sebagai wujud budaya kemiskinan karena penolakan terhadap modernisasi dan memilih untuk tetap “miskin”. Perspektif manusia modern mensyaratkan masyarakat yang maju haruslah mengadopsi teknologi mutakhir yang tercermin dari pola mekanisasi industri barang dan jasa. Dalam konteks ini kebudayaan kemiskinan bisa dimaknai sebagai: (1) Penolakan terhadap kapitalisme; Budaya kemiskinan sebagai bentuk ketidakberdayaan menghadapi kekuatan ekonomi kapitalisme yang telah mengeksploitasi kehidupan sekelompok orang; (2) Sebagai proses adaptasi; Kemiskinan sebagai proses adaptasi keluarga miskin karena perubahan sistem ekonomi dari tradisional ke kapitalisme dalam memenuhi kebutuhannya; (3) Sebagai sub budaya sendiri;

Kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor dari dalam diri individu sendiri dan kelompok miskin, misalnya; malas, fatalisme, rendah diri, ketergantungan dan lainnya (Lewis, 1959).

Lewis menambahkan, wujud *Culture of Poverty* dapat ditemukan dalam beberapa karakter kondisi masyarakat seperti: sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi berorientasi keuntungan (*profit oriented*); tingkat pengangguran dan setengah pengangguran tinggi; upah buruh rendah yang tak lebih sekedar cukup untuk bertahan hidup; tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah mendayagunakan organisasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah; sistem keluarga bilateral yang lebih menonjol; kuatnya seperangkat nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan kekayaan disertai anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi (kemalasan).

Pemaknaan atas budaya kemiskinan di Indonesia pada era sekarang ini berkaitan erat dengan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Pemberian berbagai program bantuan sosial yang bersifat *charity* sesungguhnya benar-benar ditujukan bagi orang miskin agar terpenuhi hak-hak dasarnya dan menjadi lebih berdaya lepas dari budaya kemiskinan yang membelenggu mereka. Namun, pilihan kebijakan penanggulangan kemiskinan semacam ini ternyata memunculkan fenomena baru tentang budaya kemiskinan. Sugeng Harianto (2015) dalam sebuah penelitian di Jawa Timur menemukan fakta menarik tentang budaya kemiskinan. Program-program anti kemiskinan selama ini selain tidak efektif menurunkan jumlah orang miskin, justru memunculkan kemiskinan baru dengan adanya fenomena kalangan tertentu yang “memiskinkan diri”. Sebagian kalangan masyarakat seolah-olah berpura-pura miskin agar mendapatkan

bantuan pemerintah. Kebiasaan ini membudaya dan menjadi suatu bentuk pilihan adaptasi yang rasional dalam upaya mengatasi kemiskinan. Namun, sesungguhnya di balik itu, sikap ini merupakan bentuk kecemburuan sosial ketika merespon program-program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah yang bersifat karitatif dan langsung. Bahkan respon ini juga dikaitkan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Harianto, 2015).

Pendapat lain tentang budaya kemiskinan dikemukakan oleh Mudjahirin Thohir bahwa budaya kemiskinan terkait dengan pemahaman keagamaan yang keliru, yaitu cara pandang *jabariyah*, di mana keberadaan nasib diri seseorang (jatuh miskin) dimaknai sebagai takdir Tuhan, bukan disebabkan oleh usaha yang kurang optimal dalam mengusahakan penghidupan sehari-hari (Thohir, 2005). Dari sisi sosial, orang dengan pemahaman seperti ini menjustifikasi dirinya sebagai orang yang memang digariskan dengan rejeki yang hanya sebesar itu. Dalam ungkapan budaya Jawa dikenal dengan istilah “*trah wadahe cilik*” (keturunan dengan penghasilan kecil). Dari sisi budaya, mereka cenderung menikmati kemiskinannya itu, sehingga muncul ungkapan “*luwih becik mikul dawet kanthi rengeng-rengeng, tinimbang numpak Mercy nanging mbrebes mili*” (lebih baik membawa minuman cendol sambil berdendang daripada naik mobil Mercy tapi sambil menangis). Dengan justifikasi keagamaan kalangan abangan di Jawa menyatakan dengan istilah “*donya kuwi nerakane wong Islam, surgane wong kafir*” (dunia itu nerakanya orang islam, surganya orang kafir), sebuah ungkapan yang tak lebih sebagai penghibur diri dan wujud kepasrahan atas kekalahan (fatalistik).

Karakteristik budaya kemiskinan seperti di atas yang lebih cenderung pada sikap pasrah dan kurang produktif ini tidak sejalan dengan karakter manusia modern. Alex Inkeles dan

David Smith dalam *Becoming Modern*, menggambarkan ciri-ciri manusia modern yaitu terbuka terhadap pengalaman dan ide baru, punya kesanggupan merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam mengutamakan kerja keras, memiliki dorongan untuk maju, mengejar pencapaian prestasi, dan berorientasi pada masa sekarang dan juga masa depan (Inkeles dan Smith, 1974). Inkeles menemukan bahwa pendidikan tiga kali lebih kuat untuk mengubah manusia dibandingkan yang lainnya. Karakter-karakter tersebut mempertegas kesimpulan bahwa faktor internal yakni mentalitas orang miskin turut memiliki andil sangat penting dalam masalah kemiskinan sebanding dengan faktor eksternal atau masalah struktural.

Pemahaman keagamaan yang cenderung “pasrah pada takdir” ini tentu berbeda dengan upaya peningkatan taraf hidup melalui pelipatgandaan keuntungan yang menjadi tujuan utama kapitalisme. Perkembangan kapitalisme didorong oleh pemahaman agama yaitu ajaran Protestan di Eropa. Dalam karya fenomenalnya “*The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*”, Max Weber menunjukkan dengan baik keterkaitan doktrin agama dengan semangat kapitalisme (Weber, 1958). Etika Protestan memunculkan ajaran yang menyatakan seseorang pada intinya sudah ditakdirkan untuk masuk surga atau neraka. Untuk mengetahui apakah ia masuk surga atau neraka dapat diukur melalui keberhasilan kerjanya di dunia. Jika seseorang berhasil dalam kerjanya (sukses) maka hampir dapat dipastikan bahwa ia ditakdirkan menjadi penghuni surga, namun jika sebaliknya kalau di dunia ini selalu mengalami kegagalan maka dapat diperkirakan seorang itu ditakdirkan untuk masuk neraka. Pemaknaan atas ajaran Protestan ini terwujud dalam etos kerja untuk memperoleh kesejahteraan dengan memajukan industri yang berbasis kapitalisme pada masyarakat Barat. Hal inilah yang diakui

sebagai pendorong berkembang pesatnya kapitalisme modern.

Pemahaman nilai keagamaan semacam ini tentunya punya pengaruh positif mendorong kemajuan atau dengan kata lain mendorong masyarakat untuk menjadi tidak miskin. Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia perlu menemukan nilai-nilai dasar di dalamnya seperti contoh ungkapan “*beribadallah seperti engkau akan mati esok hari, namun bekerjalah seperti engkau akan hidup selamanya*”.

Budaya Kemiskinan dan Tantangan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Penyebab kemiskinan di Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari satu faktor saja, akan tetapi harus mempertimbangkan berbagai segi (multi dimensional). Baik faktor struktural maupun kultural punya kontribusi yang hampir seimbang. Kemiskinan di Indonesia terlihat dengan adanya budaya miskin yang seolah terpelihara dalam masyarakat, seperti kurangnya semangat untuk memperbesar penghasilan, sekalipun hal ini pastilah masih bisa diperdebatkan. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia belum mampu membuat seluruh lapisan masyarakat terlibat secara setara dalam pemenuhan hak-hak dasarnya. Salah satu akibatnya penduduk miskin kesulitan mengakses sumber-sumber modal untuk dapat memperbesar pendapatan.

Mengatasi hambatan struktural selama ini lebih dominan menjadi *concern* para penyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan. Bagaimana pemangku kebijakan hendaknya menyusun program anti kemiskinan, digambarkan dengan baik oleh Edi Suharto. Suharto (2005) memberikan pandangan bahwa penanggulangan kemiskinan dapat dianalogikan dengan ikan dan kail. Banyak pihak mengatakan bahwa memberi ikan kepada orang miskin tidak dapat menyelesaikan masalah karena hanya

akan menjadikan ketergantungan bagi orang miskin itu. Kemudian, banyak orang percaya memberi kail akan lebih baik karena menimbulkan jiwa kemandirian. Analogi ini perlu diperluas, bahwa memberi kail saja ternyata tidak cukup dan harus diikuti dengan kemampuan untuk memperoleh ikan itu. Pendidikan, dalam hal ini pemberian keterampilan (*capacity building*), kemudian menjadi kata kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin. Suharto melanjutkan, setelah orang punya kail dan memiliki ketrampilan mengail, tidak dengan serta merta ia dapat mengumpulkan ikan, jikalau lautan, sungai dan kolam dikuasai kelompok “elit”. Harus dipastikan bahwa kolam yang terdapat ikan di dalamnya itu masih ada dan bisa diakses secara adil. Karenanya, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan struktural dan makro kelembagaan.

Lebih lanjut penanggulangan kemiskinan harus menyentuh pula pada perubahan struktur ekonomi yang diharapkan lebih berpihak pada rakyat kecil, mendukung produktivitas dan mendekatkan pada akses pemasaran. Salah satu ide yang dikedepankan adalah bagaimana membuka sebanyak mungkin akses modal untuk menggerakkan ekonomi pengusaha kecil melalui kredit mikro (*microfinance*). *Microfinance* diposisikan sebagai sebuah sarana penanggulangan kemiskinan yang kental dengan nuansa ‘sosial-ekonomi’ dan *market friendly*. *Microfinance* diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan pada sisi yang lain terdapat lonjakan pengetahuan, ketrampilan dan modal sosial dari para anggotanya (Aryo, 2012). *Microfinance* dimaksudkan untuk merubah “lingkaran setan” kemiskinan “*low income, no savings, no investment, lower income*”, menjadi spiral kesejahteraan yaitu “*an expanding system of low income, access to credit, investment, higher income, small savings, and still more credit lending to even higher income*”

(Mohiuddin, 2005; Kasim, 2005; Yunus 1998, dalam Aryo, 2012).

Strategi struktural sebagaimana dicontohkan diatas, perlu diimbangi dengan strategi berbasis kultural (budaya). Strategi pengentasan kemiskinan dengan mengatasi hambatan budaya memberi peluang keterlibatan masyarakat awam dalam ikut serta menyusun strategi-strategi kebudayaan dengan memaknai ulang nilai-nilai budaya yang telah dan masih eksis di masyarakat. Budaya yang berkembang harus mampu menjadi semangat kolektif dengan melakukan reproduksi atas modal sosial yang menjadi kekayaan kultural masyarakat.

Kajian untuk menemukenali nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia telah banyak dilakukan. Salah satunya dilakukan Mochtar Lubis (2012). Pada pidatonya tahun 1977, Lubis mengemukakan karakter dasar masyarakat Indonesia dilihat dari sisi budaya, ditandai dengan beberapa ciri-cirinya yaitu: (1) *Hipokrit atau munafik*. Berpura-pura, lain di muka, lain di belakang. Hal ini dikarenakan adanya kekuatan-kekuatan dari luar yang memaksa menyembunyikan apa yang sesungguhnya dirasakan atau dipikirkan. Sebab, jika berterus terang, takut dikenai sanksi atau dianggap membawa bencana. (2) *Segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, keputusannya, kelakuannya, pikirannya, dan sebagainya*. Atasan yang bersalah, lebih suka menjawab “bukan saya” sambil melimpahkan kesalahan kepada bawahan, sementara bawahan berdalih “Saya hanya melaksanakan perintah dari atasan”. (3) *Jiwa feodal*. Di masyarakat kita lebih dikenal dengan istilah *asal bapak senang* (ABS). ABS ini melahirkan, “yang berkuasa sangat tidak suka mendengar kritik, dan orang lain amat segan untuk melontarkan kritik terhadap atasan”. (4) *Masih percaya takhayul*. Takhayul direproduksi di era modern dengan istilah-istilah “sakti”, seperti: Nekolim, Vivere Pericoloso, Berdikari, Tritura, Ampera, Orde

Baru, *the rule of law*, insan pembangunan, dan sebagainya. Tidak jarang konsep dan istilah tertentu sengaja diciptakan penguasa tanpa operasionalisasi yang jelas sehingga cenderung sekedar jargon kosong. (5) *Manusia Indonesia itu artistik*. Ciri ini menjadi yang paling menarik dan mempesonakan serta merupakan sumber dan tumpuan harapan bagi hari depan manusia Indonesia. (6) *Manusia Indonesia memiliki karakter yang lemah*. Ciri ini masih dapat kita temui sampai sekarang. Manusia Indonesia kurang kuat mempertahankan dan memperjuangkan keyakinannya. Karenanya di kalangan terpelajar muncul istilah “pelacuran intelektual”.

Karakter negatif manusia Indonesia yang hipokrit menurut Mochtar Lubis tersebut, relevan dengan respon sebagian masyarakat atas program-program bantuan sosial pemerintah seperti temuan Sugeng Harianto pada bagian sebelumnya. Saat-saat tertentu menjelang bantuan akan digulirkan, sering ditandai dengan munculnya fenomena “naiknya” angka kemiskinan. Pendataan penerima bantuan selain menambah penerima baru juga melanjutkan penerima sebelumnya dan hampir bisa dipastikan jumlah penerima akan bertambah. Menjadi sulit bagi pemerintah untuk mengurangi jumlah penerima bantuan karena sebetulnya ada sebagian masyarakat itu tidak lagi berhak menerima bantuan. Padahal, paradigma pemberian bantuan untuk memberdayakan masyarakat miskin seharusnya hanyalah stimulus agar tumbuh kemampuan untuk menanggung beban hidup mereka sendiri. Lebih memprihatinkan lagi manakala penambahan jumlah penerima bantuan dianggap menjadi salah satu “prestasi” aparat pemerintah setempat untuk kepentingan politik sesaat.

Fenomena semacam ini semestinya tidak perlu terjadi jika masyarakat menjauhkan diri dari sikap hipokrit atau munafik yang jelas-jelas jauh dari nilai-nilai keadilan. Pada satu sisi

masyarakat harus dibudayakan untuk bersikap jujur sehingga pemerintah dapat mengukur pencapaian program-program anti-kemiskinan secara akurat. Sementara pada sisi lain para teknokrat diharapkan berani mengambil sikap tegas atas kualitas pencapaian dengan menjunjung tinggi kaidah-kaidah keilmuan sehingga tidak sekedar mengafirmasi keberlangsungan program-program tersebut dengan dalih perluasan akses untuk masyarakat miskin.

Meskipun demikian selain ciri-ciri di atas, Mochtar Lubis menyampaikan juga beberapa kelebihan manusia Indonesia yang bisa dijadikan sebagai modal utama bagi kemajuan bangsa ini, antara lain: kasih bapak kepada anak-anaknya (paternalistik), pada dasarnya berhati lembut dan suka damai; punya selera humor yang cukup baik; cepat belajar dan otaknya cukup encer. Sifat-sifat itu, menurutnya bisa menjadi modal manusia Indonesia untuk berkembang.

Kajian lain terhadap pengaruh nilai-nilai budaya terhadap kemiskinan diantaranya dilakukan oleh antropolog terkemuka Indonesia, Koentjaraningrat. Ia menyebut beberapa budaya kemiskinan sebagai mentalitas yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat yang pasrah dengan keadaannya (*nrimo ing pandum*) dan menganggap bahwa mereka miskin karena faktor keturunan, yang tidak bisa diubah (takdir). Beberapa mentalitas dominan bangsa Indonesia menurut Koentjaraningrat, yaitu: (1) Meremehkan waktu; (2) Suka menerabas; (3) Tidak percaya diri; (4) Tidak disiplin; (5) Suka mengorbankan tanggung jawab (Koentjaraningrat, 1983).

Beberapa karakter nilai budaya yang diungkapkan para ilmuwan sosial tersebut perlu dimaknai ulang dalam era modern sekarang ini. Mengatasi budaya yang dominan itu, perlu

diciptakan “budaya tanding”, yaitu memunculkan sebagian dari populasi suatu masyarakat yang secara kuat menganut atau memeluk satu atau lebih nilai-nilai budaya yang berbeda dengan nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan yang dominan (Sujono, 2013). Budaya tanding dalam konteks nilai-nilai budaya kemiskinan, bisa dimunculkan beberapa di antaranya: (1) Budaya hipokrit dilawan dengan budaya jujur dan lugas; (2) Budaya feodal dilawan dengan budaya egaliter; (3) Budaya meremehkan waktu dilawan dengan budaya menghargai waktu (*time is money*); (4) Budaya suka menerabas dilawan dengan budaya antri; (5) Budaya ceroboh dilawan dengan budaya disiplin. Beberapa nilai budaya ini bisa menjadi bekal awal pemahaman akan potensi nilai-nilai budaya yang lebih progresif mendorong kemajuan.

Setelah satu generasi berlalu sejak Mochtar Lubis menyampaikan pidatonya di 1977 itu, ciri-ciri manusia Indonesia masih sama bahkan berkembang dalam format lain. Kejujuran merupakan hal yang langka dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang hipokrit, padahal salah satu nilai utama profetik adalah kejujuran (Ekawati dan Katrini, 2018). Kesimpulan ini menjadi menjadi satu keprihatinan di tengah upaya kita melakukan perubahan perilaku kearah kemajuan.

Upaya penanggulangan kemiskinan lebih bernilai strategis dengan melibatkan keluarga miskin dan komunitasnya untuk secara mandiri mengatasi masalah berangkat dari potensi wilayah dan budaya lokal yang mereka miliki. Pemaknaan ulang atas nilai-nilai budaya dalam masyarakat bisa dimulai dari identifikasi atas potensi lokal yang selaras dengan semangat pemberdayaan masyarakat. Input dari luar yang masuk dalam proses pemberdayaan harus mengacu pada kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh keluarga miskin itu sendiri bersama komunitasnya. Proses ini dilakukan melalui

dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks potensi wilayah dan budaya lokal masyarakat setempat.

Maka dalam hal ini, pihak dari luar diri masyarakat miskin diletakkan pada posisi fasilitator pemberdayaan, bukan lagi aktor utama pengusung program yang bersifat *top-down*. Masyarakat miskin perlu diberi kesempatan lebih luas dan bahkan didorong untuk mengorganisasi diri agar bisa menemukannya potensi diri dan kemudian menyusun rencana aksi untuk pemberdayaan diri mereka sendiri.

Perlunya kesadaran berorganisasi ini sejalan dengan saran Lewis bahwa untuk menghilangkan budaya kemiskinan orang-orang miskin perlu bersatu dalam suatu organisasi. Lewis (1966) menulis dalam buku *The Study of Slum Culture - Backgrounds for La Vida* seperti berikut:

“Any movement - be it religious, pacifist, or revolutionary - that organizes and gives hope to the poor and effectively promotes solidarity and a sense of identification with larger groups, destroys the psychological and social core of the culture of poverty”.

(Setiap gerakan baik itu gerakan bersifat religius, pasifis, ataupun revolusioner yang mengorganisasikan dan memberikan harapan bagi si miskin dan secara efektif mempromosikan solidaritas dan perasaan identitas yang sama dengan kelompok masyarakat yang lebih luas, akan menghancurkan (masalah) psikologis dan sosial utama (yang merupakan ciri) dari budaya kemiskinan).

PENUTUP

Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia muncul mengiringi kompleksitas perkembangan struktur masyarakat kita. Kebijakan penanggulangan kemiskinan selain dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan orang miskin, harus pula menyertakan nilai-nilai

budaya menjadi modal dasar semangat pengentasan kemiskinan itu sendiri. Tantangan utamanya adalah bagaimana membuat masyarakat bisa menyadari bahwa mereka miskin karena sebab-sebab budaya yang mempengaruhi pola pikir dan menghambat kemajuan (adanya kemiskinan kultural). Perilaku yang tidak produktif bisa dikaitkan dengan adanya perilaku boros, atau perilaku mengedepankan gengsi dalam masyarakat. Ritual-ritual adat yang berlebihan dan memerlukan biaya besar misalnya, bisa menjadi titik masuk untuk dimaknai ulang menjadi budaya positif yang mendorong kemajuan. Di sinilah dituntut peran lebih besar para pemuka agama dan tokoh-tokoh adat untuk memaknai ulang pemahaman masyarakat atas nilai-nilai dasar itu.

Menyimpulkan dari pemaparan di atas, ada beberapa sifat-sifat manusia Indonesia yang berkembang menjadi nilai-nilai budaya kemiskinan dalam masyarakat yang masih berlangsung hingga sekarang dengan segala modifikasinya. Sifat hipokrit terlihat dari sebagian masyarakat kita yang sangat pragmatis, di mana mereka memilih “menjadi miskin” agar bisa menerima program bantuan sosial dengan dalih ikut menikmati “uang negara”. Kebiasaan suka menerabas mengambil jalan pintas mewujud dalam penggunaan jalur tidak resmi pada birokrasi layanan publik yang berkembang menjadi perilaku koruptif dalam berbagai segi kehidupan. Warisan nilai feodal “asal bapak senang” membuat pelaksanaan program-program pemerintah tidak mencapai hasil optimal sesuai harapan. Lemahnya dorongan berkompetisi (*nrimo*) untuk melakukan ekspansi usaha menjadi salah satu sebab kurangnya keberhasilan program-program pemberdayaan ekonomi. Hal-hal tersebut menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran untuk dapat ditindaklanjuti dalam kajian-kajian berikutnya. Pemaknaan ulang atas nilai-nilai budaya yang telah eksis dan upaya memunculkan budaya baru yang sesuai semangat zaman perlu menjadi kajian lebih lanjut para ilmuwan sosial. Penelitian tentang budaya kemiskinan di Indonesia bisa bertolak dari konsep Oscar Lewis untuk melihat sejauh mana budaya menjadi faktor penghambat atau sebaliknya pendorong kemajuan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin kompleks dengan pola industrialisasi kapitalistik menemukan relevansinya dengan kondisi masyarakat di Amerika Latin, tempat di mana teori ini bermula. Karakter khas masyarakat Indonesia memberikan warna tersendiri sehingga pemahaman akan budaya kemiskinan akan mengalami penyempurnaan secara empiris.

Upaya penanggulangan kemiskinan hendaknya lebih memperhitungkan potensi wilayah dan budaya lokal sehingga meminimalkan resistensi terhadap nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Penulis mengajukan satu rumusan dasar pelibatan beberapa potensi masyarakat yang di antaranya bisa dimulai dengan: pertama, meningkatkan kapasitas institusi agama dan adat untuk berperan aktif dalam menemukenali nilai-nilai budaya yang mendorong kemajuan; kedua, menata kembali sistem sosial dan budaya masyarakat, dan merevitalisasi sistem nilai lokal yang memungkinkan diadopsi dalam program-program penanggulangan kemiskinan; ketiga, memberi kesempatan lebih luas bahkan mendorong orang-orang miskin mengorganisasi diri agar mampu mengenali potensi kulturalnya untuk mengentaskan diri dari kemiskinan; keempat, menjadikan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari gerakan kultural melalui institusi-institusi lokal yang telah eksis; kelima, menyeimbangkan antara pendekatan kultural dengan pendekatan ekonomi dalam

desain program-program penanggulangan kemiskinan untuk memberikan penghargaan lebih pada nilai-nilai kemanusiaan.

Patut diakui, menghilangkan kemiskinan fisik semata tidaklah cukup jika tidak diiringi perubahan *mindset* tentang nilai-nilai budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan. Pada sisi lain, tindakan-tindakan yang bersifat struktural perlu terus didorong agar penguasaan atas sumber-sumber ekonomi dan faktor-faktor produksi lainnya lebih merata. Peningkatan taraf hidup si miskin diarahkan agar mereka “naik kelas” ke dalam golongan masyarakat kelas menengah dengan kemampuan untuk mandiri, berpikiran maju dan lepas dari hambatan-hambatan kultural yang menghambat kemajuan. Tidak kalah penting upaya terstruktur perlu ditingkatkan untuk mengorganisasi dan memberdayakan kaum miskin agar membuat mereka mempunyai perasaan bahwa mereka memiliki kekuatan dan kepemimpinan untuk lepas dari belenggu kemiskinan, karena pada hakekatnya “Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri”.

DAFTAR PUSTAKA

- Alborno, M.A. et al. (2007). *Menuju Kesejahteraan dalam Masyarakat Hutan: Buku Panduan untuk Pemerintah Daerah*. Bogor: Cifor
- Alisjahbana, A.S. & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press
- Aryo, B. (2012). *Is it the Magic Bullet? Micro-finance untuk Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Makalah Seminar
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019, Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>. Diakses 20 Agustus 2020
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. Diakses 22 September 2020.
- BPS dan UNICEF. (2009). *Membumikan Millennium Development Goals (MDGs) di Siantara Nusantara*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Ekawati, M. & Katrini Y.E. 2018. *Merefleksi Sifat Manusia Indonesia Menurut Mohctar Lubis Pada Era Revolusi Industry 4.0*. Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia (PIBSI) XL ekonomi.bisnis.com. (2020). *Penurunan Angka Kemiskinan Belum Pantas Dibanggakan*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200116/9/1190803/penurunan-angka-kemiskinan-belum-pantas-dibanggakan>. Diakses 22 September 2020.
- Harianto, S. (2015). *Relasi Orang Miskin dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Bali: Makalah Seminar Nasional Riset Inovatif (SENARI) III.
- Huraerah, A. (2005). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Paradigma Polistaat Universitas Pasundan Bandung. Vol. 6 No. 2 Tahun 2005.
- Inkeles, A. & Smith. D.H. (1974). *Becoming Modern*. Cambridge: Harvard University Press.
- Joesoef, D. (1996). *Era Kebudayaan: Pemberdayaan Manusia dalam Perkembangan Zaman*. Tulisan dalam buku *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Onny S, Prijono, et

- all. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Kaplan, D. & Manners, A.A. (2012). *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koentjaraningrat. 1983. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia
- Kuntjoro Jakti, D. (1986). *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lewis, O. (1959). *Five Families; Mexican Case Studies in the Culture of Poverty*. (alih bahasa: Lewis, Oscar. 2016. *Kisah Lima Keluarga; Telaah-Telaah Kasus Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lewis, O. (1959). *A Study of Slum Culture: Backgrounds for La Vida*. New York: Random House
- Lubis, M. (2012). *Manusia Indonesia (sebuah pertanggung jawaban jawab)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mubyarto. (1995). *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media
- Mubyarto. (1996). *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Prawoto, N. (2009). *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 9 No. 01 Tahun 2009.
- Royat, S. (2007). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Materi Assisten Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Dalam Penanggulangan Kemiskinan, tanggal 21 Agustus 2007 di Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York : Alfred Knof.
- Sujono, M. Herdyanto. (2013). *Budaya Tanding dan Orang Muda*.
<https://www.kompasiana.com/dendisujono/552bfa006ea83441098b4578/budaya-tanding-dan-orang-muda>
Diakses 11 September 2020.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Konsep Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: Agenda Strategi DEPSOS RI
- Sumodiningrat, G, Santoso, B., Maiwan, M. (1999). *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: IMPAC.
- Suparlan, Parsudi. et al. (1984). *Kemiskinan di Perkotaan, Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutrisno, M. dan Putranto, H. (2005). *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suyanto, B. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Penerbit Intrans Publishing.
- Syawie, M. (2011). *Kemiskinan dan Kesenjangan*, Jurnal Informasi Kementerian Sosial. Vol. 16 No. 03 Tahun 2011.
- Sutikno, S., Soejono, E., Rumiati, A. (2015). *Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Sistem*. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 11 No.3 Tahun 2015

- Thohir, M. (2005). *Makalah Advokasi Anggaran yang Pro Poor*. Semarang
- ul Haq, M. (1976). *Poverty Curtain*. (alih bahasa: ul Haq, Mahbub. 1983. *Tirai Kemiskinan, Tantangan Pembangunan untuk Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Weber, M. (1958). *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Wahyudi, S.F. & Handoyo, P. (2014). *Budaya Kemiskinan Masyarakat Pemulung*. Jurnal Paradigma. Volume 02 Nomor 02 Tahun 2014
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

TERAPI ROBOT BAGI LANJUT USIA YANG MENGALAMI DEMENSIA

ROBOTIC THERAPY FOR ELDERLY WITH DEMENTIA

Mu'man Nuryana

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Gd. Cawang Kencana Lt. 2, Jl. Mayjen Sutoyo, Kav. 22 Cawang, Jakarta Timur, Indonesia
E-mail: nuryanamuman@gmail.com

Abstrak

Sektor kesehatan dan kesejahteraan menghadapi tantangan menarik. Pertama, pesatnya penuaan penduduk diiringi penurunan jumlah pengasuh yang berimplikasi pada pengasuhan lanjut usia. Kedua, munculnya kesadaran baru pada terapi hewan yang berpotensi risiko penularan zoonosis, isu etika dan moral, perspektif budaya dan agama, sejarah dan keraguan. Ketiga, pesatnya perkembangan teknologi robotik dan kecerdasan buatan dalam menyikapi isu pengasuhan. Kondisi ini membawa implikasi pada alokasi sumber daya manusia dan dampaknya terhadap stabilitas pengiriman pengasuhan. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengetahui manfaat sosial, psikologis, fisiologis, dan klinis dari Paro, robot bantuan-sosial paling populer di dunia, dalam pengasuhan lanjut usia. Paro membentuk perilaku hewani dan menanggapi cahaya, suhu, suara, sentuhan dan postur sejalan dengan perputaran waktu. Hasil penelitian yang dilakukan di negara-negara maju menunjukkan bahwa Paro mendorong lanjut usia yang mengalami demensia untuk berkomunikasi di antara mereka dan memperkuat hubungan sosial individual, mempengaruhi hubungan, dan membantu mengatasi kesepian. Selain menurunkan stres dan kecemasan, Paro juga mampu menurunkan penggunaan pengobatan psikoaktif dan sakit medis pada klien demensia, dan efektif dalam intervensi terapeutik. Namun harganya mahal, hanya fasilitas pengasuhan sosial tertentu yang bisa mengaksesnya. Mengingat pengaruh positif, penggunaan Paro dengan menyertakan pengasuh bisa memperluas jangkauan terapeutik. Ada potensi untuk menggunakan Paro sebagai *companion robot* dalam pengasuhan lanjut usia dalam *setting* panti sosial, rumah sakit, keluarga dan komunitas. Nampaknya, intervensi robotik sedang mengalami pergeseran dari terapi bantuan-hewan menuju pengembangan cara-cara inovatif yang menghubungkan robot dengan lanjut usia.

Kata Kunci: lanjut usia, demensia, terapi robot.

Abstract

Health and welfare sectors face interesting challenges. First, rapid aging of the population accompanied by the decrease in the number of caregivers that has implications for elderly care. Second, the emergence of new awareness on animal therapy that has potential for zoonotic disease risk, ethical and moral issues, cultural and religious perspectives, history and doubt. Third, rapid development of robotic technology and artificial intelligence in addressing care issues. This conditions implicated to the allocation of human resources and its impact on the stability of delivery care. This literature review aims to investigate social, psychological, physiological and clinical benefits of Paro, the world's most popular social robot for elderly care. Paro shapes animal behavior and responds to light, temperature, sound, touch and posture over time. Results of the research conducted in developed countries show Paro encourages elderly with dementia to communicate among themselves and strengthen individual social relationships and help overcome loneliness. Apart from reducing stress and anxiety, Paro reduces the use of psychoactive medications and pain medication in dementia clients, and is effective in therapeutic interventions. However, it is expensive, only certain care facilities can access it. Given its positive effects, the use of Paro can expand therapeutic outreach. There is great potential to use Paro as a companion robot in care facilities for elderly in family,

community and nursing home settings. It appears that robotic interventions are shifting from animal-assisted therapies to the development of innovative ways by connecting robots to the elderly.

Keywords: *elderly, dementia, robotic therapy.*

PENDAHULUAN

Sektor kesehatan dan kesejahteraan menghadapi tantangan menarik. Tantangan pertama, pesatnya penuaan penduduk yang diiringi dengan penurunan jumlah pengasuh yang berimplikasi pada pengasuhan lanjut usia. Tantangan kedua, munculnya kesadaran baru terhadap terapi hewan di mana intervensi bantuan-hewan diduga memiliki potensi risiko penularan penyakit zoonosis, isu etika (Taylor, 2014), dan ikatan manusia-hewan dipersepsikan secara berbeda dari perspektif budaya dan agama (Jegatheesan, 2015), keraguan atas intervensi terapi hewan-bantuan (Wycoff, 2014), meskipun diakui ada pengaruh positif pada lanjut usia (Machová et al, 2019; Koukourikos et al, 2019; Morrison, 2007; Heerema, 2020), perspektif sejarah tentang hewan pendamping (Serpell, 2010), dan terkait isu moral (Zamir, 2006). Di sisi lain, ada perkembangan lain di mana *animal-assisted therapy* diyakini dapat membantu lanjut usia yang mengalami demensia dengan menyediakan sahabat dan dukungan untuk aktivitas sehari-hari dan ini dapat mengarah pada peningkatan kesehatan fisik dan mental, termasuk suasana hati lebih baik dan perilaku bermasalah lebih sedikit.

Tantangan berikutnya adalah pesatnya perkembangan teknologi robotik dan kecerdasan buatan dalam menyikapi isu pengasuhan yang mendorong manajer fasilitas pengasuhan melakukan rasionalisasi, mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengasuhan dengan menggunakan bantuan robot sosial. Muncul perhatian lebih besar pada bantuan robot sosial dalam memediasi komunikasi dan interaksi robot-manusia

(Hersh, 2015). Perkembangan ini sangat menggembirakan karena menyoroti potensi bantuan robot sosial dalam mendukung protokol terapeutik nonfarmakologis (Scales et al. 2018) dalam pengasuhan lanjut usia yang mengalami demensia. Upaya menciptakan robot yang mampu memperlihatkan perilaku sosial dalam interkasinya dengan manusia semakin populer di mana mesin otonom bergerak dirancang untuk berinteraksi dengan manusia dan memperlihatkan perilaku sosial seperti mengakui, mengikuti, membimbing pemiliknya dan terlibat dalam percakapan (KPMG, 2016).

Penduduk dunia mengalami pertambahan cepat dengan bertambahnya usia harapan hidup manusia, sementara pengasuh generasi *baby boomer* sudah memasuki masa pensiun masal. Bahkan pengasuhan orang dengan demensia menimbulkan banyak tantangan bagi keluarga dan pengasuh. Sebagai gambaran, tahun 2019 terdapat 16 juta pengasuh tidak dibayar karena berasal dari anggota keluarga di AS yang melayani pengasuhan orang dengan penyakit Alzheimer atau demensia lainnya (Alzheimer's Association, 2019). Pada tahun 2018, pengasuh untuk orang dengan Alzheimer atau demensia lainnya diperkirakan menghabiskan 18,5 milyar jam asistensi informal, suatu kontribusi secara nasional senilai \$233,9 milyar. Ini mencapai 46 persen dari nilai bersih dari total penerimaan Walmart tahun 2018 (\$500,3 milyar) dan 10 kali dari total penerimaan McDonald's tahun 2017 (\$22,8 milyar). Total biaya sepanjang hidup untuk pengasuhan seseorang dengan demensia diperkirakan mencapai \$350,174. Ini menunjukkan bahwa beban pengasuhan lanjut usia merupakan masalah serius di negara maju

mengingat dampak finansial yang begitu besar. Meskipun bukan rahasia lagi bahwa pengasuhan bisa menimbulkan beban emosional, finansial, dan fisik, tidak banyak kemajuan dicapai dalam meringankan beban pengasuhan (Sauer, 2018).

Kondisi ini berimplikasi pada alokasi sumber daya manusia yang berdampak pada stabilitas pengiriman pengasuhan. Inti persoalannya adalah penduduk dunia sedang menua dan pengasuhan lanjut usia berkaitan erat dengan pasokan pengasuh untuk lanjut usia yang mengalami pelemahan kemampuan dan kemandirian karena proses degeneratif. Belum lagi masalah kesepian yang dialami lanjut usia sebagai konsekuensi dari faktor sosial, psikologis, keluarga, individu, dan lingkungan. Keadaan ini diperburuk oleh realitas bahwa pengasuhan sosial adalah industri padat karya yang rentan terhadap penyusutan jumlah pengasuh.

Situasi yang lebih memperhatikan dialami oleh Jepang sebagai *super aging society* di mana pengasuh sudah memasuki pensiun masal, sedangkan generasi muda kurang berminat bekerja di sektor ini. Namun di tengah perkembangan penuaan yang dibarengi dengan penyusutan pengasuh, dunia dipapar pada revolusi robot di sektor industri manufaktur (Gittlen, 2012; Brand, 2017) yang sudah memasuki sektor kesehatan dan kesejahteraan. Revolusi robot ini sangat menggembirakan untuk mengatasi kekurangan pengasuh karena robot mampu menghadirkan model pengasuhan artifisial untuk membantu pengasuh manusia; Jepang unggul dalam menciptakan robot terapeutik: *Paro robotic baby harp seal*.

Dalam pada itu, eksistensi terapi bantuan-hewan tetap diakui karena terapi hewan dapat membantu seseorang pulih dari/atau mengatasi masalah kesehatan dan gangguan mental

(Giorgi, 2013). Terlepas dari kenyataan bahwa terapi hewan banyak digunakan, tidak sedikit pengaturan pengasuhan lanjut usia yang tidak menerima kehadiran hewan meskipun diakui manfaat positif dari terapi dan aktivitas yang melibatkannya (Petersen et al. 2017). Keperihatinan masyarakat atas terapi bantuan-hewan adalah efek negatif, seperti penularan virus, alergi, keselamatan, agresif, kotoran dan urine, serta serangan (Watt, 2018), infeksi, gigitan, cakaran, pemeliharaan, bahkan ketakutan pada hewan itu walaupun hal itu bisa dikurangi jika hewan peliharaan mendapat pelatihan dan sertifikasi. Beberapa risiko terbesar dari terapi hewan peliharaan terkait dengan keselamatan dan sanitasi bagi pengguna. Orang yang alergi terhadap bulu binatang bisa mengalami reaksi selama terapi bantuan-hewan (Giorgi, 2013). Hewan peliharaan dalam program terapi bantuan-hewan biasanya diperiksa perilaku dan kesehatannya untuk menjamin keselamatan dan sanitasi. Bahkan pemilik atau manajemen terapi bantuan-hewan mengikuti pelatihan dan evaluasi agar berpengalaman positif. Tetapi itu tidak bisa menjamin keselamatan dan sanitasi dari hewan itu karena pemeliharaan hewan tidak bisa mengandalkan klien.

Banyak laporan deskriptif tentang terapi bantuan-hewan menekankan pengaruh positif berdasarkan bukti hasil studi terkontrol tentang efektivitasnya, namun ada kebutuhan informasi mendalam tentang terapi ini termasuk mengumpulkan data untuk mengungkap pengaruh negatifnya (Velde et al., 2005). Di samping terapi bantuan-hewan mendapatkan popularitas sebagai bagian dari kegiatan terapeutik untuk lanjut usia di fasilitas pengasuhan jangka-panjang, banyak kekhawatiran tentang alergi dari hewan itu, selain isu penyakit dan sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk merawatnya, menyebabkan banyak fasilitas pengasuhan

melarang jenis terapi hewan. Oleh karena itu, ada situasi di mana sahabat tiruan seperti *robotic pet* dapat berfungsi sebagai alternatif yang lebih baik (Sung et al., 2015).

Konsekuensi dari itu semua adalah terapi robot hewan dipandang sebagai pengganti yang layak, dan memiliki peluang untuk berkembang. Dalam konteks ini, Paro (singkatan bahasa Jepang dari *'personal robot'*) merupakan pilihan tepat di mana banyak negara maju telah menggunakannya. Perangkat ini, dirancang seperti seekor bayi anjing laut di mana kebanyakan orang di dunia tidak mengenalnya karena binatang ini hidup di daerah Kutub. Keunggulan ini membuat orang mudah terlibat dan akrab dengan Paro tanpa prakonsepsi. Diselimuti oleh bulu-bulu halus tiruan yang tebal, Paro memiliki skeleton yang kuat untuk melindungi dua prosesor yang dipasang di dalamnya sehingga Paro membentuk perilaku hewani yang bisa menanggapi cahaya, suhu, suara, sentuhan dan postur, sejalan dengan perputaran waktu siang dan malam. Karena kemampuan kecerdasan buatan ini, Paro bisa mengembangkan karakter sendiri. Paro mempromosikan hasil terapi psikologis, fisiologis, dan upaya sosial dari orang yang berinteraksi dengannya, mengurangi stres dan kecemasan, dan memperbaiki depresi.

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengetahui manfaat klinis, fisiologis, psikologis dan sosial dari Paro sebagai salah satu bentuk robot bantuan-sosial; itu sebabnya robot ini dipilih sebagai objek studi pustaka. Secara khusus tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan diterapkannya Paro pada fasilitas perawatan kesehatan dan pengasuhan sosial lanjut usia di negara-negara berkembang yang berminat untuk menerapkannya. Adapun informasi yang disajikan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pemangku kepentingan

ketika merencanakan penggunaan Paro dalam pengasuhan lanjut usia.

Perlu pemahaman lebih baik atas Paro tentang kemampuannya dalam menyediakan pengasuhan terpadu dengan pangasuh manusia (pekerja sosial dan pengasuh), baik secara sosial maupun fisiologis, yang memberikan indikasi tentang peran masa depan robot ini dalam masyarakat. Hasil studi pustaka ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perumus kebijakan kesehatan dan kesejahteraan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.

Strategi penelusuran literatur yang digunakan dalam studi pustaka ini adalah *content analysis* (CA), yakni sebuah metodologi penelitian untuk memahami *content* (muatan) dari pesan yang seringkali tidak terstruktur, baik teks, gambar, simbol, atau data audio (Niels & Jacobs, 2017). CA adalah metode penyelidikan ilmiah untuk memeriksa informasi dari sumber komunikasi seperti program televisi, kolom surat kabar, buku, foto, dan internet (Lac, 2016). Oleh karena itu, definisi CA yang dipakai di sini adalah “sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari teks (atau materi bermakna lainnya) kepada konteks penggunaannya” (Krippendorff, 2004).

Dalam melakukan penelusuran literatur dengan CA, diterapkan langkah-langkah sebagaimana disarankan Lac (2016). Pertama, menyangkut keputusan topik dan *content medium*, di mana *website* menargetkan pada muatan dalam “*Pilot study on Paro therapeutic robot and elderly with dementia living in welfare facilities*”. Setelah mengisolasi topik yang menarik, pertanyaan atau hipotesis yang relevan dibuat. Kedua, mengembangkan rencana pengambilan sampel untuk mendapatkan ukuran yang tepat dari topik dalam *website*. Kemudian mensensus semua

unit sampel dengan ukuran cukup dapat dikelola. Misalnya, jika yang diambil adalah hanya 65 topik dimaksud, mengevaluasi semua unit sampel tidak akan menjadi tugas menakutkan (Lac, 2016). Namun, setelah dilakukan uji petik penelusuran sampel tersebut, ditemukan 236 topik. Sesuai dengan teknik yang disarankan Lac (2016), digunakan *convenience sampling* di mana sampel yang paling mudah diakses atau tersedia maka itu dijadikan sampel, kemudian dikombinasikan dengan *purposive sampling approach* Lac (2016). Hanya *website* tentang “*Pilot study on Paro therapeutic robot and elderly with dementia living in welfare facilities*” yang ditampilkan di bagian atas dari hasil *search engine* yang dipilih. Alasannya adalah situs yang paling sering dikunjungi, karena kemungkinan besar memiliki khalayak lebih besar. Rute ini sesuai karena topik bisa diperoleh dengan menganggap *content* yang ada di dalamnya menghasilkan wawasan berharga yang mewakili domain ini. Dengan menggunakan kedua teknik tersebut, ditentukan 20 persen dari 236 sampel, sehingga jumlah sampel yang dipakai sekitar 50 topik sebagai referensi yang relevan dan mendukung. Nampaknya, sebagian besar penelitian CA bersifat kualitatif dan deskriptif, dengan studi yang relatif lebih sedikit yang mengejar statistik inferensial atau analisis statistik lanjutan untuk memperkirakan hubungan multivariat (Lac, 2016).

Studi pustaka ini mempertimbangkan landasan teori dalam menganalisis hubungan antara lanjut usia dengan robot terapeutik Paro. Pilihan teori jatuh pada *human-robot interaction* (HRI), yang diperkenalkan oleh Terrence Fong, Charles Thorpe and Charles Baur, pada 10th *International Symposium of Robotics Research, November 2001, Lorne, Victoria, Australia*. HRI didefinisikan sebagai “studi tentang manusia, robot, dan cara mereka

saling mempengaruhi” (Fong et al., 2001). Digunakan juga klasifikasi yang diperkenalkan Takeda et al. (1997) tentang hubungan manusia-robot dengan tiga kategori: *intimate human-robot interaction, loose human-robot interaction, cooperative human-robot interaction*. Berdasarkan klasifikasi ini, interaksi lanjut usia dengan robot terapeutik Paro dikategorikan sebagai *cooperative human-robot interaction*, di mana beberapa interaksi diperluas dengan memasukan agen-agen yang dibutuhkan untuk melengkapi kegunaannya, seperti interaksi yang harus ditunjukkan secara kooperatif oleh lebih dari dua agen.

Itu saja tidak cukup untuk memahami hubungan manusia-robot, maka dipilih *theory of mind* (ToM) yang dikembangkan oleh Robert Seyfarth (2013). ToM yang mengacu pada kemampuan untuk menghubungkan keadaan mental, pikiran (komponen kognitif) atau perasaan (komponen afektif) kepada orang lain. ToM adalah kemampuan untuk menghubungkan keadaan mental, keyakinan, niat, keinginan, emosi, dan pengetahuan dengan diri sendiri dan orang lain (Ruhl, 2020). ToM merujuk pada kapasitas untuk memahami emosi seseorang yang lain tentang keadaan mentalnya. Oleh karena itu ToM dipisahkan ke dalam dua sistem: komponen afektif dan komponen kognitif (Heitz et al., 2016). Dengan dasar ToM memungkinkan orang memahami orang lainnya yang memiliki keyakinan dan keinginan unik yang berbeda, sehingga memungkinkan orang untuk terlibat dalam interaksi sosial sehari-hari pada saat menafsirkan keadaan mental dan menyimpulkan perilaku orang-orang di sekitarnya. Dengan ini, landasan ToM memudahkan dalam analisis hubungan segitiga antara lanjut usia, pengasuh, dan robot terapeutik Paro. Hal ini pula yang mungkin landasan pemikiran para peneliti maupun pencipta robot terapeutik Paro.

PEMBAHASAN

Karakteristik Robot Terapeutik Paro

Paro dikembangkan oleh Takanori Shibata, peneliti di *Intelligent Systems Research Institute (ISRI)*, *Japan's National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)*, Tokyo, Japan, dan diproduksi oleh *Intelligent System Co., Ltd.* Paro diperkenalkan ke publik tahun 2003 dan mulai memasuki pasar komersial setahun kemudian. Paro dikembangkan berdasarkan pengalaman terapi bantuan-hewan, yakni pelibatan hewan peliharaan sebagai bagian fundamental dari pengasuhan manusia dan sebagai terapi maupun agen sosial untuk meningkatkan kesejahteraan (Pope et al., 2016). Paro diprogram untuk berperilaku seperti bayi anjing laut, dan untuk itu sensor sentuh di

permukaan tubuhnya, sensor infra merah, stereoskopik penglihatan dan pendengaran, aktuator kelopak mata, motor tubuh bagian atas, motor kaki depan dan anggota tubuh bagian belakang, dipasang di dalamnya. Seperti Furby, rancangan fisik Paro dimaksudkan senyata mungkin untuk memperkuat ilusi bahwa Paro adalah makhluk hidup (Bettey, 2016). Rancangan tubuhnya memberi kesan hidup, lucu dan menarik, dengan kepala besar dan mata hitam lebar, dimaksudkan untuk memperkuat ilusi bahwa Paro adalah bayi anjing laut yang dapat menarik perhatian orang secara emosional (lihat Gambar). Pilihan model Paro pada bayi hewan ini dimaksudkan agar memiliki pengaruh menenangkan dan stimulasi perasaan bagi orang lanjut usia dengan demensia, dan mereka merasakan seperti memeluk hewan sesungguhnya.



Paro Robot (Sumber: <https://www.technotification.com/2014/08/paro-therapeutic-robot.html>)

Paro memiliki sensor taktil yang menggerakkan sirip dan ekor, dan membukakan matanya ketika berinteraksi sosial dengan pengguna. Sensor taktil ini dipasang pada skeleton, sedangkan permukaan tubuh dilapisi

bulu-bulu halus tebal untuk menimbulkan nuansa lembut sehingga memungkinkan pengukuran kontak manusia dengan Paro. Kecerdasan buatan dipasang pada tubuhnya untuk mengubah perilaku robot berdasarkan

sensor tadi, yang bisa menanggapi suara, belajar namanya dan belajar menanggapi -kata yang sering dipakai pengguna. Paro bisa menunjukkan sikap emosional seperti kejutan, senang, marah, dan menangis jika tidak mendapat perhatian atau disakiti. Paro bisa mengeluarkan suara, aktif di siang hari dan tidur di malam hari. Paro diasumsikan sebagai hewan netral karena kebanyakan orang tidak mengenalnya dan tidak memiliki pengalaman negatif dengannya karena hewan ini hidup di daerah Kutub. Rancangan tubuhnya disesuaikan dengan perasaan menyayangi terhadap bayi anjing laut. Ini adalah stimulasi, eksplorasi dan interaksi sosial antara pengguna dengan robot. Paro dirancang untuk memiliki pengalaman taktil mengesankan, sebagai sumber rangsangan dan informasi selama interaksi sosial. Robot ini dilengkapi dengan empat rasa primer: penglihatan (sensor cahaya), pendengaran (penentuan arah sumber suara dan pengenalan pembicaraan), keseimbangan, dan perasaan taktil. Bagian yang bergerak terjadi pada gerakan leher menegak dan mendatar, gerak mendayung ke depan dan ke belakang, gerakan independen dari masing-masing kelopak mata untuk menciptakan ekspresi wajahnya. Untuk menggerakkan Paro, aliran listrik harus dialirkan melalui mulutnya sehingga terkesan sedang menyusui ketika sedang disetrum.

Dengan kombinasi ciri-ciri tersebut memungkinkan Paro bereaksi terhadap rangsangan eksternal, sehingga bisa mendengar suara, memalingkan muka dan melihat ke arah datangnya suara. Paro memiliki sistem generasi perilaku-proaktif yang terdiri dari dua lapisan: lapisan perencanaan-perilaku dan lapisan generasi-perilaku. Lapisan perencanaan-perilaku terdiri dari jaringan status transisi didasarkan pada status internal dan keinginannya yang dihasilkan oleh ritme internal. Paro memiliki status internal yang dapat menyebutkan dengan kata-kata (dalam hal ini

suara binatang) sederhana yang menunjukkan emosi. Setiap status ini memiliki tingkat numerikal yang diubah oleh stimulasi. Interaksi yang mengubah status internal inilah yang menciptakan karakter Paro. Lapisan perencanaan-perilaku kemudian mengirimkan pola perilaku dasar ini kepada lapisan generasi-perilaku.

Perilaku Paro terlihat masih primitif, tetapi ciri proaktif robot ini hampir mirip dengan bayi anjing laut. Lapisan generasi-perilaku menghasilkan referensi kendali untuk setiap aktuator dalam memperlihatkan perilaku tertentu. Referensi kendali ini tergantung pada magnitudo status internal beserta variasinya, seperti parameter yang dapat mengubah kecepatan gerakan dan jumlah perilaku yang sama. Jumlah pola perilaku dasarnya nampak sangat terbatas, namun jumlah yang muncul tidak terbatas disebabkan oleh variasi parameter. Parameter inilah yang membuat Paro berperilaku seperti bayi anjing laut. Fungsi ini memberikan kontribusi pada perilaku situasional sehingga membuat pengguna sukar memprediksi tindakan Paro. Lapisan generasi perilaku menyesuaikan parameter prioritas perilaku reaktif dan perilaku proaktif berdasarkan magnitudo status internal, sehingga perilakunya kontekstual dan mampu menghasilkan alternatif reaksi terhadap stimulus eksternal serta melahirkan perilaku yang menarik perhatian orang.

Paro juga memiliki perilaku fisiologis berdasarkan ritme diurnal untuk memenuhi sejumlah kebutuhan dadakan, seperti tidur dan bangun (status internal). Untuk menyimpan jejak interaksi sebelumnya dan menunjukkan perilaku koheren, Paro dilengkapi dengan fungsi penguatan pembelajaran yang memiliki nilai positif pada stimulasi yang disenangi, seperti dibelai dan dimanja, serta memiliki nilai negatif pada stimulasi yang tidak disenanginya, seperti dipukul dan dibentak. Paro memberikan

nilai pada hubungan stimulasi-perilaku ini. Paro dapat disetel untuk perilaku lain yang disenangi, dan fitur teknis inilah yang memungkinkannya melakukan interaksi sosial dengan cara menyadari informasi kontekstual.

Paro dan Pengasuhan Demensia

Berbagai penelitian tentang robot terapeutik Paro dilakukan di negeri asalnya atas penggunaan dan manfaatnya. Salah satunya adalah penelitian Kawaguchi and Shibata (2010), dengan hasil bahwa robot ini mendorong subjek untuk berkomunikasi di antara mereka dan memperkuat hubungan sosial individual. Robot terapeutik berteknologi tinggi ini bereaksi terhadap individu yang memperlakukannya. Hasil penelitian Birks et al. (2016) membuktikan bahwa Paro mempengaruhi hubungan dengan lanjut usia secara sosial dan kognitif atau emosional terisolasi, dan membantu mengatasi kesepian. Temuan penelitian Moyle et al. (2016) di Australia secara sebagian mendukung efektivitas Paro, tetapi menyarankan ketika ada keterbatasan sumber daya maka mainan hewan lembut ini memungkinkan untuk digunakan secara efektif bagi lanjut usia yang mengalami demensia. Temuan ini memberikan konfirmasi bahwa robot ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengasuh manusia sepanjang sesi pengasuhan. Sementara itu, Paro juga hanya dipakai selama periode kosong ketika staf dan pengasuh melakukan tugas lainnya, atau ketika klien mereka sedang bercengkerama dengan sesama klien. Meskipun lebih efektif dibandingkan pengasuhan biasa dalam meningkatkan suasana hati dan kecemasan, Paro hanya lebih efektif daripada mainan mewah dalam mendorong keterlibatan. Hasil studi mereka membuktikan bahwa robot ini sangat berpengaruh dan cukup efektif dalam pengasuhan demensia. Karena efektivitasnya itu, Paro disertifikasi sebagai salah satu jenis alat terapeutik neurologis oleh *Food and Drug*

Administration (FDA) di Amerika Serikat, dengan menyertakan buku *manual* bagi pengasuh yang menggunakan robot ini untuk mencapai efektivitasnya (Haims & De Mesa, 2016).

Hasil studi Petersen et al. (2017) terhadap 61 klien demensia di *Signature Senior Living, Dallas, Texas*, dan *Legend Senior Living, Wichita, Kansas, AS*, menunjukkan perlakuan dengan Paro menurunkan stres dan kecemasan pada kelompok perlakuan dan menurunkan penggunaan pengobatan psikoaktif serta pengobatan rasa nyeri pada klien demensia. Dari 61 klien tersebut, 77 persen perempuan, rata-rata berusia 83,4 tahun, diacak ke dalam kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Dari laporan studi mereka, dibandingkan dengan kelompok kontrol, RAID (*Rating for Anxiety in Dementia*), CSDD (*Cornell Scale for Depression in Dementia*), GSR (*Galvanic Skin Response*), dan oksimetri denyut nadi ditingkatkan dalam kelompok perlakuan, sedangkan penggunaan denyut nadi, pengobatan nyeri, dan pengobatan psikoaktif berhasil diturunkan. Perubahan dalam GSR, oksimetri nadi, dan denyut nadi sepanjang studi dipasang pada kedua kelompok tersebut. Perbedaan antara kelompok konsisten sepanjang 12 minggu studi mereka untuk oksimetri nadi dan denyut nadi, sedangkan GSR memiliki beberapa minggu ketika perubahan sama antara kelompok. Hal ini mengindikasikan bahwa perlakuan dengan robot ini menurunkan stres dan kecemasan pada kelompok perlakuan dan mengurangi penggunaan pengobatan psikoaktif dan pengobatan rasa nyeri pada klien lanjut usia yang mengalami demensia.

Bemelmans et al. (2015) melakukan studi terhadap 14 peserta laki-laki (20 persen) dan 57 peserta perempuan (80 persen) dengan demensia di Belanda, dengan hasil sebagai berikut. Paro sangat efektif dalam intervensi

untuk tujuan pengaruh terapeutik. Untuk masing-masing peserta studi, sebuah intervensi berbasis-pengguna didefinisikan dengan peran sebagai klien peserta dan pengasuh. Untuk intervensi dengan tujuan dukungan pengasuhan, menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan. Tetapi studi mereka merekomendasikan bahwa organisasi pengasuhan dapat menggunakan robot ini dalam pengaturan pengasuhan harian. Dalam studinya, Paro dipandang sebagai alat bantu, tidak untuk menggantikan pengasuh manusia, di mana keberhasilan implementasinya dalam praktek pengasuhan psikogeriatik intramural harian dapat meningkatkan kualitas pengasuhan dan kualitas kehidupan lanjut usia. Keberhasilan intervensi terapeutik ini diharapkan memberikan kontribusi kepada intervensi yang berpusat pada pengguna. Berdasarkan penelitian tersebut, Paro dapat memberikan nilai-tambah signifikan apabila diterapkan dalam intervensi individual. Di sisi lain, pelatihan staf pengasuhan sebelum menggunakan Paro memberikan kontribusi pada pengaruhnya. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa pengasuh profesional yang semula sangat kritis pada awal studi, tetapi berubah menjadi penggemar Paro. Mereka akhirnya meyakinkan organisasi pengasuhan untuk lebih berinvestasi dengan pengadaan 20 Paro untuk keperluan selanjutnya, di mana robot ini tersedia pada setiap wilayah psikogeriatik di Belanda.

Robinson et al. (2013) melakukan studi terhadap 40 klien residen (13 laki-laki berusia 55-100 tahun). Sebanyak 20 klien residen secara acak dikelompokkan sebagai kelompok kontrol (sanatorium 11 orang, rumah sakit 9 orang) dan 20 residen lainnya sebagai kelompok Paro (sanatorium 7 orang, rumah sakit 13 orang) dengan menggunakan daftar acak generator. Studi ini dilakukan di *Selwyn Heights retirement home, Hillsborough, Auckland, New Zealand*, di rumah sakit dan

sanatorium yang menyediakan pelayanan 24/7. Hasilnya menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kelompok kontrol, klien residen yang berinteraksi dengan Paro memiliki penurunan signifikan dalam hal kesepian sepanjang sesi, sedangkan *'resident dog'* dan *'seal robot'* berdampak pada lingkungan sosial dalam perbandingan ketika keduanya tidak ada. Residen (penghuni) lebih banyak berbicara dan menyentuh Paro secara signifikan ketimbang terhadap *resident dog*. Sebagian besar residen terlibat diskusi mengenai robot ini dibandingkan mengenai *resident dog*, dan perbincangan mengenai Paro terjadi lebih banyak. Dengan ini diartikan bahwa Paro adalah tambahan positif bagi lingkungan dan memiliki manfaat bagi lanjut usia dalam pengaturan tersebut, selain dapat mengatasi kebutuhan lanjut usia yang tidak terpenuhi oleh hewan residen, terutama yang berkaitan dengan masalah kesepian.

Selanjutnya, studi yang dilakukan Liang et al. (2017) pada pusat pengasuhan demensia, Auckland, Selandia Baru, menunjukkan bahwa Paro secara signifikan meningkatkan ekspresi wajah dan komunikasi dengan staf dari klien demensia. Sementara subanalisisnya menunjukkan bahwa klien dengan gangguan kognitif rendah secara signifikan menanggapi lebih baik terhadap Paro. Namun tidak ada perbedaan signifikan pada klien dengan gejala demensia maupun langkah-langkah fisiologis antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Hal ini berarti bahwa Paro sangat menjanjikan dalam meningkatkan *outcome* sosial yang efektif bagi lanjut usia yang mengalami demensia dalam konteks komunitas. Sementara itu, percobaan acak terkontrol lebih besar dalam pengaturan komunitas, dengan kerangka waktu lebih panjang, dibutuhkan untuk spesifikasi lebih lanjut dalam konteks dan karakteristik di mana Paro paling bermanfaat.

Hasil penelitian Joranson et al. (2015) menunjukkan bahwa terjadi pengurangan gejala kecemasan dan depresi pada akhir intervensi, di mana hal ini disebabkan oleh pengaruh tanggapan penurunan stres pada klien peserta studi disebabkan interaksi dengan Paro, dan sebagai hasil interaksi sosial robot dalam pengaturan kelompok. Interaksi perorangan dengan robot mempengaruhi hasil penelitian ini. Hasil signifikan yang diukur pada tindak lanjut memiliki penyebab yang tidak pasti, tetapi bisa jadi disebabkan oleh perubahan dalam lingkungan psikososial. Hal ini termasuk peningkatan perhatian staf dan pengasuh pada kebutuhan klien residen berdasarkan pengalaman mereka dengan perilaku dan kemampuan peserta melalui kegiatan robot. Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh jangka-panjang pada depresi dan kecemasan di antara lanjut usia yang mengalami demensia. Robot ini merupakan sebuah perlakuan nonfarmakologis yang sesuai untuk gejala neuropsikiatrik bagi orang yang tertarik dan bersedia berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dengan Paro. Oleh karena itu, Paro dapat dianggap sebagai alat yang berguna dalam praktek pekerjaan sosial klinis. Bahkan sebuah studi pustaka yang dilakukan oleh Murdoch et al. (2013) melaporkan bahwa proyek 'Danish Be Safe' yang menginkluskasikan 12 unit Paro dalam sebuah fasilitas pengasuhan, penggunaan robot sebagai alat untuk terapi demensia sangat direkomendasikan. Sementara di Kanada, beberapa studi pilot dilakukan dengan menyoroti potensi penggunaan Paro bagi orang dan keluarga yang tinggal dengan lanjut usia yang mengalami demensia.

Meskipun temuan di atas menunjukkan Paro dapat meningkatkan kesejahteraan lanjut usia pada dan yang demensia khususnya sebagai rekan terapeutik, biaya untuk membeli satu unit Paro perlu menjadi pertimbangan sebelum memutuskan untuk menggunakan

robot terapeutik ini dalam fasilitas pengasuhan atau untuk tujuan penelitian sekalipun. Paro harganya ¥400,000 (Foster, 2018), sekitar Rp48 juta, dan masih harus didatangkan dari Jepang, demikian juga apabila ada perbaikan. Di sisi lain, jumlah lanjut usia yang mengalami demensia terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia harapan hidup penduduk.

Menurut laporan *World Health Organization* (2020), di seluruh dunia sekitar 50 juta orang menderita demensia, dengan hampir 60 persen tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Setiap tahun, ada hampir 10 juta kasus baru. Estimasi proporsi penduduk yang berusia 60 tahun ke atas dengan demensia pada waktu tertentu diperkirakan antara 5-8 persen. Jumlah lanjut usia yang mengalami demensia diproyeksikan mencapai 82 juta pada tahun 2030 dan 152 juta tahun 2050. Sebagian besar peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah lanjut usia yang mengalami demensia yang tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sementara itu, *Alzheimer's Disease International* (2019) memperkirakan bahwa terdapat lebih dari 50 juta lanjut usia yang mengalami demensia secara global, peningkatan menjadi 152 juta tahun 2050. Seseorang berkembang menjadi demensia setiap tiga detik dan ongkos pengasuhan lanjut usia yang mengalami demensia diperkirakan mencapai \$1 juta setahun (sekitar Rp15 milyar), suatu gambaran dua kali lipat pada tahun 2030 (*Alzheimer's Disease International, 2019*).

Lanjut usia yang mengalami demensia memiliki stimulasi terbatas sehingga mengurangi kualitas hidup dan meningkatkan kesepian, depresi, dan perilaku terkait demensia. Oleh karena itu sangat dimaklumi bahwa pengasuhan untuk orang-orang yang menunjukkan perilaku seperti itu sangat rumit, dan menimbulkan tantangan bagi staf dan pengasuh serta pekerja sosial, akhirnya

mengarahkan pilihan pada penggunaan pengobatan farmakologis yang tidak murah biayanya. Pengasuhan semacam ini meningkatkan disfungsi fisik sebagai efek dari obat penenang, dan gejala ekstra piramidal yang bisa berakibat pada kemungkinan jatuh, yang akan menambah beban pengasuhan. Ada kebutuhan untuk mengembangkan dan mengevaluasi intervensi yang secara khusus fokus pada peluang untuk meningkatkan stimulasi, keterlibatan dan suasana hati, serta menurunkan perilaku gelisah. Hasil studi pustaka ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dari masing-masing area tersebut sehingga memberikan kontribusi pada efektivitas Paro sesuai dengan harganya.

Penuaan penduduk dunia, terutama di Jepang dan Eropa, kurangnya tenaga kesehatan dan kesejahteraan, dan preferensi publik terhadap ‘tinggal di rumah’ bagi lanjut usia dengan demensia, telah memicu minat atas kemungkinan ditawarkannya terapi robot untuk meningkatkan kualitas hidup (Kolling, 2013). Selain itu, dalam praktek klinis, tanggapan paling umum terhadap gangguan perilaku adalah umumnya pilihan jatuh pada intervensi farmakologis. Namun akhir-akhir ini banyak penelitian mendukung gagasan bahwa gangguan perilaku pada orang dengan demensia terkait dengan kebutuhannya yang tidak terpenuhi itu ternyata dapat diatasi dengan intervensi nonfarmakologis, dan salah satunya adalah dengan robot sosial (Cohen-Mansfield, 2013), seperti robot terapeutik Paro yang menjadi sentral dalam studi pustaka ini. Orang dengan demensia memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi seperti rasa sakit dan ketidaknyamanan, kebutuhan kontak (sentuhan) dan dukungan sosial, serta kebutuhan rangsangan untuk mengurangi rasa jenuh.

Tetapi situasi fasilitas pengasuhan di negara maju jauh berbeda dengan di Indonesia, di mana keberadaan panti sosial sebagai

platform pengasuhan tidak menunjukkan perkebangan yang menggembirakan, bahkan semakin menurun perannya setelah otonomi daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya politik kesejahteraan sosial yang menekankan penanganan masalah kesejahteraan sosial kepada keluarga dan komunitas. Di sisi lain, profesi pekerjaan sosial yang belum mendapatkan tempatnya di masyarakat sehingga membuat pengasuhan lanjut usia berbasis panti sosial semakin melemah, walaupun ada peningkatan jumlah perguruan tinggi yang membuka program studi atau jurusan pekerjaan/kesejahteraan sosial yang dimotori oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (d/h STKS Bandung), sekolah kedinasan tertua di Indonesia di bawah manajemen Kementerian Sosial. Pada jurusan tersebut juga tidak ada laboratorium untuk mengembangkan teknologi robot komitmen sosial sekalipun kurikulum kesejahteraan sosial lanjut usia menjadi salah andalannya. Kecuali Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Prof. Dr. Soeharso, Surakarta, sebuah unit kerja eselon 2 Kementerian Sosial, telah lama mengembangkan alat bantu jalan. Kapitalisasi sektor kesejahteraan sosial sangat lamban karena paradigma kebijakan sosial seperti itu. Namun, meningkatkan kualitas hidup lanjut usia adalah keniscayaan karena diamanakna oleh UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan UU No. 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial. Oleh karena itu, robot terapeutik Paro relevan untuk segera diperkenalkan, untuk memajukan dan meningkatkan motivasi dan kinerja staf panti sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pekerjaan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pertimbangan lainnya, mengingat kemungkinan terbatas saat ini untuk perlakuan farmakologis, pendekatan yang menjanjikan

dalam menanggapi krisis akibat penyakit Alzheimer dan demensia lainnya, adalah merancang dan mengembangkan *Intelligent Assistive Technology* yang memberikan kompensasi (pampasan) atas defisit fisik, kognitif dan perilaku tertentu pada orang dengan demensia, di samping untuk mengurangi beban pengasuh terkait dengan pengasuhan dan institusionalisasi jangka-panjang (Ienca et al. 2016). Studi pustaka ini telah menunjukkan bahwa penggunaan *artificial intelligent* untuk bantuan kognitif, fisik dan perilaku serta untuk memantau dan memfasilitasi pengiriman pengasuhan dapat membantu pasien/klien demensia untuk hidup mandiri di rumah atau mempertahankan kemandirian di fasilitas pengasuhan. Namun ada tantangan yang dihadapi dalam penerapan robot terapeutik Paro di panti sosial di Indonesia: sosial, budaya, etika, nilai dan norma. Hal positif yang dimiliki Indonesia adalah masih relatif kuatnya *social capital* yang masih mengandalkan pada peran keluarga dan komunitas dalam pengasuhan lanjut usia, walaupun dalam realitasnya kesepian dan isolasi sosial terjadi secara tersembunyi.

Perspektif Paro tentang Etika dan Teknologi

Hubungan emosional antar-klien dengan Paro merupakan pengungkit bagi terapis untuk membuka saluran komunikasi dengan klien lanjut usia yang mengalami demensia. Robot ini nampaknya mampu mendukung proses dialogis antara klien dengan terapis. Penggunaannya dalam fasilitas pengasuhan (panti sosial), rumah sakit, sanatorium, keluarga dan komunitas, mendukung gagasan bahwa Paro dapat menjadi bantuan terapeutik yang dapat mengurangi stres, menginduksi perasaan positif dan memungkinkan komitmen emosional. Kemampuan Paro sebagai katalisator emosi adalah kunci dari kemampuan terapeutiknya. Jika periode observasi lebih panjang dalam penelitian mereka, terapis bisa

menggunakan robot ini dalam pengasuhan jangka-panjang dalam rangka untuk mengurangi gangguan perilaku klien tidak hanya dalam manifestasi episodik. Dalam konteks aktivitas terapeutik, interaksi manusia-robot merupakan elemen penting yang menjembatani pemaknaan antara hubungan klien-terapis.

Proses konstruksi makna ini tidak hanya tergantung pada ciri fisik dan fungsional Paro, tetapi pada konteks spesifik dari interaksi sosial, riwayat pribadi subjek, dan persepsi saling keterjangkauan yang berasal dari stimulus yang diberikan dengan menyentuh, mendengar, melihat, dan menggerakkan dari orang lain dalam proses psikologis yang memediasi tanggapan empatik. Untuk itu, penelitian tentang Paro tidak hanya fokus pada tantangan teknologi untuk mengembangkan robot yang mirip kehidupan dan berperilaku sebagai agen hidup. Paro mungkin bisa dikembangkan berdasarkan pengalaman estetika, perseptif dan emosional dalam berinteraksi dengan manusia di masing-masing negara dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda. Paro juga menawarkan peluang untuk terhubung dengan individu yang tidak terjangkau oleh pengiriman pengasuhan berbasis institusional atau residensial seperti panti sosial dalam kasus Indonesia. Ketika terapi hewan diindikasikan tetapi penggunaan hewan aktual tidak tepat karena isu alergi, logistik, situasi hidup, atau ketidakmampuan seseorang untuk merawatnya, maka Paro menyediakan alternatif dengan risiko rendah. Meskipun bukan tanpa tantangan, namun tidak terlihat alasan untuk menolak penggunaan alat seperti Paro (Calo et al., 2011).

Karena harga Paro mahal, penggunaannya terbatas pada fasilitas pengasuhan geriatrik tertentu di mana satu unit robot dapat berbagi dalam penggunaannya oleh banyak klien demensia. Sebagaimana diuraikan

di atas bahwa harga Paro cukup mahal bila diukur secara finansial terutama bagi negara berkembang sehingga penggunaannya terbatas fasilitas pengasuhan geriatrik tertentu dimana penggunaannya 'berbagi' dengan sejumlah klien demensia. Karena Paro sering digunakan secara individu atau dalam kelompok kecil, biaya awal pembelian unit dianggap sebagai penghalang untuk digunakan dalam pengaturan pengasuhan (Hung, 2019). Meskipun ada dukungan pemerintah di beberapa negara seperti AS dan Jepang, sebagian besar organisasi perawatan kesehatan di negara lain harus membeli sendiri (Hung, et al., 2019). Meskipun beberapa robot bisa dibeli melalui anggaran pemerintah, dana sosial, dana CSR perusahaan, seberapa ekstensif robot ini dapat digunakan dengan klien geriatri bergantung pada anggaran yang tersedia. Konsekuensinya, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bisa tertinggal jauh oleh negara-negara maju dalam penggunaan Paro untuk kesejahteraan sosial lanjut usia. Dalam konteks Indonesia, panti sosial mungkin dapat menggunakan Dana Hibah Dalam Negeri atau PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang ada di Kementerian Sosial, atau dana CSR perusahaan. Kecuali panti sosial swasta berbayar di mana klien adalah lanjut usia dari keluarga menengah ke atas, mungkin dapat melakukan pengadaan Paro dengan anggaran mandiri.

Peningkatan jumlah klien demensia terus bertambah dan ini membawa konsekuensi pada peningkatan program pelayanan kesejahteraan sosial. Diperkirakan ada 46,8 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan demensia pada tahun 2015 dan jumlah ini diyakini mendekati 50 juta orang pada tahun 2017. Jumlah ini akan meningkat hampir dua kali lipat setiap 20 tahun sehingga bisa mencapai 75 juta pada tahun 2030 dan 131,5 juta pada tahun 2050. Sebagian besar dari peningkatan akan

terjadi di negara berkembang. Sudah 58 persen orang dengan demensia tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah, tetapi pada tahun 2050 angka ini akan meningkat menjadi 68 persen. Pertumbuhan tercepat penduduk lanjut usia terjadi di China, India, dan Asia Selatan dan Pasifik Barat (Alzheimer's Disease International, 2020). Apakah robot dapat membantu lanjut usia yang mengalami demensia dalam meningkatkan keberfungsian sosial dengan lebih baik dan mempertahankan martabat lanjut usia dalam masa waktu panjangnya? Seberapa baik penanganan masalah sosial ke depan, tergantung pada apakah pemangku kepentingan bersedia menerima kehadiran teknologi baru ini sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dalam peningkatan jumlah pekerja sosial dan pengasuh.

Walaupun dengan segala kecanggihan robot terapeutik Paro sehingga seolah-olah tidak memiliki cela, tetapi banyak profesional dalam area kesehatan dan kesejahteraan khawatir Paro dapat digunakan sebagai substitusi pengasuhan, dukungan, dan robot sahabat yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Demikian pula tidak sedikit ahli yang berpendapat bahwa peran robot harus lebih bermanfaat dan membantu aktivitas kehidupan sehari-hari. Paro ibarat ajudan yang tampaknya dapat mengangkat semangat lanjut usia dengan demensia dan kondisi lainnya. Paro bukanlah substitusi untuk pengasuhan manusia. Paro hanya semacam pemecah kebekuan sosial di mana hasil penelitian mendukung nilai terapeutiknya dalam kapasitas ini. Harga Paro yang tinggi bisa membuatnya tidak bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Mungkin Paro tidak akan pernah terlihat dipajang di etalase toko maupun pasar modern dan mall. Meskipun demikian, Paro bisa menjadi sebuah investasi sosial untuk fasilitas pengasuhan jangka panjang. Bahkan IFA (*International Federation*

on Ageing), Ontario, Kanada, sudah lama menyediakan fasilitas *loan* dengan masa percobaan selama 6 minggu bagi masyarakat yang tertarik dengan Paro (IFA, 2020).

Isu Robotik dan Etika

Ada potensi besar di mana *information and communication Technology* (ICT) dapat menggeser dan meningkatkan praktek pekerjaan sosial dalam beberapa dekade ke depan. Memadukan ICT ke dalam pekerjaan sosial dan menciptakan inovasi praktek, memungkinkan terjadinya perubahan sosial transformatif. Pemaduan teknologi ini juga bisa menciptakan praktek yang lebih fleksibel, sesuai permintaan, pribadi, dan ditempatkan secara individual. Potensi pemaduan robot terapeutik Paro memiliki potensi untuk memperkaya praktek pekerjaan sosial. Selain itu, ada peluang bagi profesi ini untuk siap menanggapi dan memanfaatkan teknologi apapun yang tersedia asal berada di bawah kontrolnya.

Namun demikian, ada tantangan etika bagi budaya lain apabila mempertimbangkan penggunaan robot Paro pada fasilitas pengasuhan lanjut usia. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan apakah robot yang dirancang dan diuji dalam satu sistem perawatan kesehatan dan pengasuhan sosial akan berperilaku etis pada sistem lain. Karena reaksi pengguna terhadap robot bisa berbeda dari satu kelompok ke kelompok berikutnya, prinsip etika yang terbukti cocok untuk satu populasi pengguna mungkin tidak efektif untuk populasi yang lain. Inilah faktor nonteknis yang harus menjadi pertimbangan.

Prinsip inti dari etika kedokteran telah menjadi dasar dalam perdebatan mengenai isu etika oleh teknologi robot bantuan sosial seperti yang berkembang dewasa ini. Dalam pada itu, kerangka etika tentang robot dikonstruksi

berdasarkan kebijakan etika Amerika Serikat, dan objek dalam penelitian berasal dari Amerika Utara dan Jepang, di mana ada kemungkinan bahwa tantangan etika yang berbeda atau tambahan muncul untuk budaya lain (Feil-Seifer & Matarić, 2011). Oleh karena itu, diperlukan eksplorasi lebih lanjut untuk menentukan apakah robot yang dirancang dan diuji dalam satu sistem perawatan kesehatan dan pengasuhan sosial akan berperilaku etis dalam sistem lain.

Sektor pekerjaan sosial, apabila dibandingkan dengan dengan sektor bisnis, lambat mengadopsi teknologi (Berzin et al. 2015). Keterbatasan sumber daya, isu etika dan hukum, kurangnya pelatihan, dan ketergantungan pekerjaan sosial pada komunikasi tatap-muka, memperlambat penerapan teknologi kesejahteraan. Tetapi ini bukan hanya dialami oleh pekerjaan sosial Indonesia, di negara maju sekalipun, penerapan ICT awalnya lambat, tetapi sekarang teknologi ini telah memasuki struktur pekerjaan sosial karena didorong oleh keterbatasan pengasuh. Pekerjaan sosial sebenarnya memiliki peran penting untuk tidak hanya memanfaatkan potensi ITC untuk meningkatkan praktek, tetapi dalam memastikan bahwa ICT dikembangkan untuk mendukung *social good* (Social Change Central, 2020). Dalam kaitan ini pekerjaan sosial di Indonesia juga dapat memanfaatkan bantuan robot terapeutik Paro dalam mengirimkan pelayanan profesional kepada lanjut usia yang mengalami demensia dalam berbagai pengaturan.

PENUTUP

Berdasarkan studi pustaka ini menunjukkan adanya dampak positif dari kegunaan robot terapeutik Paro secara klinis, fisiologis, psikologis dan sosial dalam pengasuhan lanjut usia yang mengalami demensia. Namun, diperlukan pemahaman

lebih baik tentang Paro atas kemampuannya dalam menyediakan pengasuhan terpadu dengan pangasuh manusia. Apabila hal ini dipenuhi, maka peran robot ini dapat ditingkatkan.

Robot terapeutik ini bisa segera diperkenalkan di Indonesia, dengan terlebih dahulu diarahkan pada panti sosial percontohan milik pemerintah dan swasta, yang memiliki sumber daya yang memadai. Pembelajaran penting dari tinjauan pustaka ini: apabila prioritas kebijakan sosial adalah peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, isu finansial bukan lagi kendala berarti karena dukungan anggaran tersedia untuk panti sosial pemerintah maupun swasta tersedia melalui mekanisme APBN, PNBP, Dana Hibah Dalam Negeri, dan dana CSR untuk panti sosial swasta.

Jika Paro diperkenalkan ke dalam pengaturan panti sosial, sangat direkomendasikan kepada pemangku kepengantingan yang terlibat dalam penggunaannya untuk memahami dulu potensi robot ini agar fungsinya maksimal sesuai dengan harga. Pengenalan Paro secara bertahap ke dalam pengaturan pekerjaan sosial klinis dengan meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas, mungkin dapat memaksimalkan potensi kecanggihannya. Manfaat robot ini terletak pada cara penggunaannya secara terampil. Oleh karena itu pengasuh perlu mendapat pelatihan sebelum dikerahkan ke dalam berbagai pengaturan. Mengingat pengaruh positif Paro, maka penyebarluasan dalam penggunaannya dengan menyertakan pengasuh dapat memperluas jangkauan terapeutik.

Memastikan lingkungan terapeutik yang aman bagi lanjut usia adalah keniscayaan bagi siapapun yang bekerja dalam pengaturan pengasuhan. Saat ini, pekerja sosial dan pengasuh bekerja dengan sumber daya yang

sangat terbatas dalam mengelola kebutuhan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang kompleks dari lanjut usia yang mengalami demensia. Penggunaan robot ini di fasilitas pengasuhan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pekerja sosial dan pengasuh. Meskipun tidak pihak terkait dengan Paro melihat manfaatnya, bukti menunjukkan bahwa robot ini memiliki dampak positif untuk menjamin eksplorasi lebih lanjut. Manfaat potensial robot ini dapat membantu membenaran investasi sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk menggunakan Paro sebagai robot sahabat dari dimensi klinis, fisiologis, psikologis, dan sosial dalam pengasuhan lanjut usia dalam pengaturan fasilitas pengasuhan, rumah sakit, komunitas dan keluarga. Telah teridentifikasi bahwa intervensi robotik sedang mengalami pergeseran dari terapi bantuan-hewan menuju pengembangan cara-cara yang lebih inovatif dengan menghubungkan robot ini dengan lanjut usia.

Teknologi kesejahteraan sosial tidak buruk, mengancam atau berbahaya, yang ada adalah membantu pengasuh dan meningkatkan kualitas pengasuhan dalam berbagai pengaturan. Tetapi cara penggunaan dan pengorganisasian robot ini sangat menentukan. Perkembangan teknologi kesejahteraan sosial perlu didukung secara terkendali. Pengembangan dan pengujian robot terapeutik untuk melihat apa, bagaimana dan di mana teknologi maju bisa memperkaya kehidupan dan kualitas hidup lanjut usia, akan mendukung kemandirian dan mengurangi beban kerja pekerja sosial dan pengasuh yang jumlahnya terbatas, sedangkan minat orang untuk melibatkan diri ke dalam sektor kesejahteraan masih sangat rendah. Mungkin generasi milenial lebih suka mengelola pengasuhan mandiri, hidup tanpa pengasuhan yang

dikirimkan kepada anggota keluarga mereka, orang-orang yang tidak mereka kenal, atau mereka tidak memilih berdasarkan pilihannya. Mungkin generasi mendatang, dengan dibantu oleh teknologi robotik, bisa tinggal lebih lama di fasilitas pengasuhan (panti sosial) dan tetap berhubungan dengan orang-orang yang mereka cintai, kapanpun dan di manapun mereka berada. Tidak perlu ada kekhawatiran terhadap skenario dan fakta bahwa teknologi tidak etis. Kolaborasi antara robot dengan pengasuh dalam pelayanan lanjut usia yang mengalami demensia akan semakin kuat apabila harga robot terapeutik Paro terjangkau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini dapat disusun atas dukungan dan bantuan dari banyak pihak, terutama teman-teman peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Sehubungan dengan itu, kami menyampaikan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi et al. (2018). The Use of Socially Assistive Robot Technology in Elderly Care. *BMJ Open*.
- Alzheimer's Disease International (2019). *World Alzheimer Report 2019: Attitudes to Dementia*. Published by Alzheimer's Disease International (ADI), London.
- Alissa, S. (2018, November 21). Study Identifies Biggest Alzheimer's Caregiver Challenges. *Alzheimer's Newsletter*. 6330 Sprint Parkway, Suite 450, Overland Park, KS 66211.
- Alzheimer's Disease International (2020). *Statistics. The Global Voice on Dementia*. <https://www.alz.co.uk/global-solutions>.
- Alzheimer's Association. (2019). *The Alzheimer's Disease Fact and Figures*.
- Alzheimers Dement 2019; 15(3):321-87.
- Alzheimer's Association Public Policy Office 1212 New York Ave., N.W., Suite 800 Washington, DC 20005-6105
- Battey, T. (2016). Case Study: PARO. *Design Journal*, 8th November. <http://tombattey.com/design/case-study-paro/>.
- Berzin et al. (2015). Practice Innovation through Technology in the Digital Age: A Grand Challenge for Social Work. *American Academy of Social Work and Social Welfare*, Working Paper No. 12 October.
- Bontek, A.M. (2018). Combatting the Epidemic of Loneliness in Seniors. *SENIOR HEALTH*.
- Banks & Banks (2002). The Effects of Animal-Assisted Therapy on Loneliness in an Elderly Population in Long-Term Care Facilities. *The Journal of Gerontology: Series A*, Volume 57, Issue 7, I, M428-M432.
- Birks et al. (2016). Robotic Seals as Therapeutic Tools in an Aged Care Facility: A Qualitative Study. *Journal of Aging Research*, November 20, 1-7.
- Bemelmans et al. (2015). Effectiveness of Robot Paro in Intramural Psychogeriatric Care: A Multicenter Quasi-Experimental Study. *JAMDA xxx (2015)*, 1-5.
- Berzin et al. (2015). Practice Innovation through Technology in the Digital Age: A Grand Challenge for Social Work. *American Academy of Social Work and Social Welfare*, Working Paper No. 12, October.
- Brand S. (2017). The New Industrial Revolution: Advanced Robotic Manufacturing. *CMTC Manufacturing Bog*.
- Calo, et al. (2011). Ethical Implications of Using the Paro Robot Human-Robot

- Interaction in Elder Care. *Papers from the 2011 AAAI Workshop (WS-11-12)*.
- Cherniack & Cherniack (2014). The Benefit of Pets and Animal-Assisted Therapy to the
- Cohen-Mansfield, J. (2013). Nonpharmacologic Treatment of Behavioral Disorders in Dementia. *DEMENTIA*, 18 October.
- Feil-Seifer & Matarić (2011). Ethical Principles for Socially Assistive Robotics. Ethical Principles For Socially Assistive Robotics, In *IEEE Robotics and Automation Magazine*, 18(1), March, 24-31.
- Fong et al. (2001) Collaboration, Dialogue, and Human-Robot Interaction. *10th International Symposium of Robotics Research, November 2001, Lorne, Victoria, Australia*.
- Foster, M. (2018). Robots making inroads in Japan's elder care facilities, but costs still high. *Japan Times, March 30, 2018*.
- Haims & De Mesa (2016). *Summer House Residential Memory Care Communities Introduce PARO Robot Therapy*. Front Porch Center for Innovation and Wellbeing. 800 N. Brand Blvd., 19th Fl., Glendale, CA 91203.
- Health of Older Individuals. *National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information Epub 2014 Nov. 16*.
- Heitz et al, (2016). Cognitive and affective theory of mind in dementia with Lewy bodies and Alzheimer's disease. *Alzheimer's Research Therapy: Research Open Access*, 1-10.] Giorgi, A. (2013). Pet Therapy. *Healthline*. <https://www.healthline.com/health/pet-therapy#benefits>.
- Gittlen, S. (2012). *Industrial Robot Revolution, Network*. <https://www.networkworld.com/article/2185843/the-industrial-robotrevolution.html>.
- Halpern, N. (2017, July 22). Potential Risks from Pet Therapy Programs. *Animal Law Update*. <https://animallaw.foxrothschild.com/tag/pet-therapy-programs/>.
- Heereman, E. (2020). How Does Pet Therapy Benefit People With Dementia? *Verywell Health, Updated on February 07, 2020*.
- Hersh, M. (2015). Overcoming Barriers and Increasing Independence—Service Robots for Elderly and Disabled People. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 12, 1-33.
- Hung, et al. (2019). The benefits of and barriers to using a social robot PARO in care settings: a scoping review. *BMC Geriatrics, Volume 19, Article number: 232(2019)*, 1-10.
- Ienca et al. (2016). Social and Assistive Robotics in Dementia Care: Ethical Recommendations for Research and Practice. *International Journal of Social Robotics, June: Researcgate*.
- International Federation on Ageing (2020). *Paro Therapeutic Robot*. Bridgepoint Drive, Suite G.238. Toronto, Ontario, Canada, M4M 2B5.
- Jegatheesan, B. (2015). Influence of Cultural and Religious Factors on Attitudes toward Animals. In A.H. Fine. *Handbook on Animal-Assisted Therapy*. Foundations and Guidelines for Animal-Assisted Interventions, Fourth Edition, Department of Education California State Polytechnic University, Pomona, CA, USA.
- Joranson et al. (2015). Effects on Symptoms of Agitation and Depression in Persons With Dementia Participating in Robot-Assisted Activity: A Cluster-Randomized Controlled Trial. *Journal of the American Medical Directors Association 16(10)*, June 2015.

- Kawaguchi et al. (2010). The effects of robot therapy in the elderly facilities. *Alzheimer's and Dementia*, 6(4, Supplement), S133.
- Kolling et al. (2013). Evidence and Deployment-Based Research into Care for the Elderly Using Emotional Robots: Psychological, Methodological and Cross-Cultural Facets. *GeroPsych*, 26, 83-88.
- Koukourikos et al. (2019). Benefits of Animal Assisted Therapy in Mental Health. *International Journal of Caring Sciences*, September-December 2019, Volume 12, Issue 3 Issue, 1898-1905.
- KPMG (2016). *Social Robots: 2016's new breed of social robots is ready to enter your world*. KPMG Advisory NV, The Netherlands.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Second Edition. Sage Publications, Thousand Oaks, California 91320.
- Lac, (2016). Content Analysis. In R. J. R. Levesque (Ed.). *Encyclopedia of Adolescence (2nd ed., 1-5)*. Switzerland: Springer International.
- Liang et al. (2017). A Pilot Randomized Trial of a Companion Robot for People With Dementia Living in the Community. *JAMDA xxx*. 1-8.
- Machová et al. (2019). Effect of Animal-Assisted Therapy on Patients in the Department of Long-Term Care: A Pilot Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2019, 16(8), 1-10.
- Mordoch et al. (2013). Use of social commitment robots in the care of elderly people with dementia: A literature review. *Maturitas* 74, 14-20.
- Morrison, M.L. (2007). Health Benefits of Animal-Assisted Interventions. *Complementary Health Practice Review*, Vol. 12 No. 1, January, 51-62.
- Moyle et al. (2013). Exploring the Effect of Companion Robots on Emotional Expression in A Pilot Randomized Controlled Trial. *Journal of Gerontological Nursing*, Vol. 39, No. 5, 46-54.
- Gheyle & Jacobs (2017). *Content Analysis: A Short Overview*. Centre for EU Studies, Ghent University.
- Taylor et al. (2016). Social Work, Animal-Assisted Therapies and Ethical Considerations: A Programme Example from Central Queensland, Australia. *The British Journal of Social Work*, Volume 46, Issue 1, January, 135-152.
- Petersen et al. (20017). The Utilization of Robotic Pets in Dementia Care. *Journal of Alzheimer's Disease*, 55, 569-574.
- Robinson et al (2013). The Psychosocial Effects of a Companion Robot: A Randomized Controlled Trial. *JAMDA xxx*, 1-7.
- Petersen et al. (2017). The Utilization of Robotic Pets in Dementia Care. *Journal of Alzheimer's Disease*, 55(2), 569-574.
- Serpell, J.A. (2010). Animal-Assisted Interventions in Historical Perspective. In A.H. *Handbook on Animal Therapy: Theoretical Foundation and Guidelines for Practice*, A.H. Fine (Ed.), Second Edition. San Diego, California, USA.
- Pope et al. (2016). Animal assisted therapy for elderly residents of a skilled nursing facility. *Journal of Nursing Education and Practice*, Vol. 6, No. 9, 56-62.
- Ruhl, C. (2020). Theory of Mind. *Simply Psychology*, 2020, August 7, <https://www>.

- simplypsychology.org/theory-of-mind.html.
- Seyfarth & Cheney (2013). Affiliation, empathy, and the origins of theory of mind. *PNAS*, June 18, 2013, Vol. 110, Suppl. 2, 10349–10356.
- Scales et al. (2018). Evidence-Based Non Pharmacological Practices to Address Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. *The Gerontologist*, Vol. 58, No. S1, S88-S102.
- Social Change Central (2020). *What is Social Good?* <https://www.socialchangecentral.com/wp-content/uploads/2016/02/SCC-Media-Kit.pdf>. Downloaded 23.10.2020 at 07:00AM.
- Sung et al. (2015). Robot-assisted therapy for improving social interactions and activity participation among institutionalized older adults: a pilot study. *Asia-Pacific Psychiatry*, Volume 7 Issue 1, 1-6.
- Takeda, et al. (1998). The Knowledgeable Environment: an Knowledge-level Approach for Human-machine Co-existing Space. *AAAI Technical Report SS-98-02. Compilation Copyright*. Graduate School of Information Science, Nara Institute of Science and Technology, Nara, Japan. <http://www-kasm.nii.ac.jp/papers/takeda/97/takeda98sss.pdf>.
- Taylor, N. (2014). Social Work, Animal-Assisted Therapies and Ethical Considerations: A Programme Example from Central Queensland, Australia. *British Journal of Social Work*, October, 1-14.
- Velde et al. (2005). Resident and therapist views of animal-assisted therapy: Implications for occupational therapy practice. *Australian Occupational Therapy Journal*, Volume 52, Issue 1, 43-50.
- Watt, A. (2018, August 20). Animal-Assisted Therapy for Depression. *Healthline*. <https://www.healthline.com/health/depression/animal-assisted-therapy>.
- World Health Organization (2020, September 21). *Dementia*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>.
- Wycoff, K. (2014). Ethical Considerations in Animal Assisted Therapy. *Free Articles at Suzanneclothier Relationship Centered Training, Elemental Animal Inc.* PO Box 105, St. Johnsville, NY, 13452.
- Zamir, T. (2016). The Moral Basis of Animal-Assisted Therapy. *Society & Animals* 14, 179-199.

**KEKERASAN DALAM PACARAN: FAKTOR RISIKO DAN PELINDUNG SERTA
IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN**

***DATING VIOLENCE: THE RISK AND PROTECTIVE FACTORS AND ITS IMPLICATIONS FOR
PREVENTION EFFORT***

Binahayati Rusyidi

Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

Email: binahayati@unpad.ac.id

Eva Nuriyah Hidayat

Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

Email: eva.nuriyah@unpad.ac.id

Abstrak

Para ahli dan peneliti menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan salah satu isu krusial di tingkat global yang dihadapi para remaja dan dewasa muda. Kekerasan dalam pacaran mencakup perilaku agresi secara fisik, emosional, verbal, sosial, dan seksual yang bertujuan mengendalikan dan menyakiti pasangan. Kekerasan dalam pacaran menimbulkan dampak negatif multidimensi bagi korban dan masyarakat. Namun demikian sebagian besar kajian tentang topik ini didasarkan pada konteks negara Barat atau maju. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan faktor-faktor risiko dan pelindung terhadap kekerasan dalam pacaran di kelompok remaja serta implikasinya terhadap upaya pencegahannya. Kajian ini didasarkan pada kajian literatur yang dituntun oleh perspektif ekologi sosial yang memandang interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yang dapat diidentifikasi berada pada berbagai level lingkungan yang berbeda. Hasil dari kajian ini menunjukkan faktor-faktor yang meningkatkan potensi menjadi pelaku dan korban kekerasan dalam pacaran mencakup karakteristik individual, struktur dan interaksi dalam keluarga, karakteristik lingkungan teman sebaya serta kondisi komunitas masyarakat. Faktor-faktor pelindung yang mencegah atau mengurangi kemungkinan terlibat sebagai pelaku atau korban kekerasan dalam pacaran juga ditemukan di berbagai tingkatan lingkungan meskipun berbeda komprehensivitasnya dibandingkan faktor risiko. Kajian ini mengaitkan diskusi faktor risiko dan pelindung dengan upaya pencegahan kekerasan dalam pacaran untuk konteks Indonesia.

Kata Kunci: kekerasan dalam pacaran, faktor pelindung, faktor risiko, upaya pencegahan, remaja.

Abstract

Scholars and researchers have shown that dating violence has become one of global challenging issues encountered by adolescent and early adult groups. Dating violence covers physical, emotional, verbal, social and sexual aggressions intended to control and harm the dating partner. Such violence causes multidimensional outcomes that negatively affected victims and society. The understanding about risk and protective factors of dating violence can be helpful to formulate and enforce appropriate prevention of dating violence. However, the existing literature of the topic are based on the context of Western or developed regions. This article discussed risk and protective factors of dating violence using social ecology framework and its implications for prevention efforts in Indonesia. The analysis was conducted through secondary data analysis of relevant and credible resources. The article pointed out factors related to individual characteristics, family structure and interactions, peer group characteristics and community situations

contributed to increase the likelihood for dating violence' perpetration and victimization. The factors that may decrease the odd of being the perpetrator or victim of dating violence were also found at those environment settings but at less intensive level when compared to risk factors. This article linked the discussion of risk and protective factors with the implications for prevention of dating violence in Indonesia.

Keywords: *adolescent; dating violence, prevention strategies, protective factors, risk factors.*

PENDAHULUAN

Masa remaja awal dan akhir merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia yang dicirikan dengan terbangunnya kecenderungan seseorang memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Salah satu tugas perkembangan remaja, khususnya remaja akhir adalah membangun hubungan romantik dengan lawan jenis dalam rangka mempersiapkan diri mereka untuk menemukan pasangan hidup melalui pacaran (*dating*). Berdasarkan kajian literatur atas berbagai definisi para ahli, Johnson (1999) merumuskan bahwa *dating* memiliki dimensi umum yang mencakup adanya interaksi sosial antara dua individu berbeda jenis kelamin di mana keduanya mengalokasikan waktu dan energi melalui kegiatan bersama untuk membangun hubungan romantis yang bersifat intim untuk tujuan saling mengenal, mendapatkan rasa aman serta perasaan berharga yang mungkin berakhir tanpa atau dengan terbangunnya komitmen melalui pertunangan atau perkawinan.

Norma dan perilaku terkait pacaran berbeda-beda tergantung karakteristik era/masa, konteks sosial dan budaya, status sosial dan ekonomi. Menurut Barter (2009), dalam tahap awal perkembangannya di era 1990, penelitian mengenai kekerasan dalam pacaran umumnya menyoar kelompok usia remaja akhir, khususnya kalangan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di universitas. Selanjutnya sasaran penelitian diperluas mencakup kalangan remaja yang umumnya masih menempuh pendidikan menengah. Hal ini tampaknya berkaitan dengan bergesernya

praktik pacaran ke kelompok yang berusia lebih muda dan kerentanan mereka mengalami kekerasan. Pada berbagai budaya, *dating* di kalangan remaja dipraktikkan secara luas dan dianggap normal oleh masyarakat sementara di budaya yang lain *dating* belum diterima sebagai suatu kebiasaan umum.

Meskipun mereka yang terlibat dalam hubungan interpersonal tersebut memiliki harapan untuk saling mendapatkan cinta, persahabatan dan kebahagiaan, dinamika interaksi yang terjadi di dalam hubungan pacaran tidak bebas dari konflik yang dapat berdampak pada terjadinya tindak agresi atau kekerasan oleh seseorang terhadap pasangannya. Offenhauer dan Buchalter (2011) menggarisbawahi bahwa kekerasan dalam pacaran menimbulkan dampak yang serius terhadap kondisi kesehatan mental, perilaku dan kualitas hidup korban. Karenanya di berbagai negara, misalnya Amerika Serikat, kekerasan dalam pacaran telah dideklarasikan sebagai masalah kesehatan masyarakat nasional yang menuntut penanganan serius dari berbagai pihak mengingat luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas hidup dan aspek kesehatan masyarakat Berbagai studi terhadap korban kekerasan dalam pacaran; khususnya perempuan, menunjukkan korban berisiko mengalami luka fisik (Amar & Gennaro, 2005), mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi dan *post traumatic stress disorder* (Taft et al., 2010), terpapar infeksi HIV/AIDS, mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (Silverman, et al., 2004), serta mengalami gangguan-gangguan perilaku seperti upaya

bunuh diri (Chan et al., 2008), penggunaan NAPZA (Temple et al., 2013), dan kegagalan akademik (Banyard & Cross, 2008). Penelitian terhadap 101 perempuan dewasa muda Indonesia yang mengalami kekerasan dalam pacaran menunjukkan kekerasan berkorelasi dengan menurunnya rasa penghargaan diri korban (Putri, 2012).

Selain itu kekerasan dalam pacaran juga diyakini menimbulkan dampak kesehatan dan sosial jangka panjang bagi korban dan masyarakat, bahkan kematian. Misalnya, di Amerika Serikat, 2188 anak usia 11-18 tahun yang meninggal karena pembunuhan dalam rentang waktu 2003-2016. Sebanyak 7 persen di antaranya merupakan korban kekerasan dalam pacaran. Sedangkan dari 5860 kasus pembunuhan dengan korban kelompok usia dewasa awal 19-24 tahun, sebanyak 15 persen digolongkan sebagai korban kekerasan dalam pacaran (Adhia et al., 2018). Dalam kajian literturnya, Teten et al. (2000) juga menunjukkan perempuan yang mengalami kekerasan dalam pacaran di masa remaja, pada masa dewasa awal mengalami masalah kesehatan fisik dan mental yang lebih serius dibandingkan dengan yang bukan korban. Termasuk di dalamnya penyakit jantung, asma, gangguan pencernaan, konsumsi alkohol yang berlebihan atau menjadi perokok berat. Menurut Teten et al. (2000), para ahli juga menyuarakan keprihatinannya terhadap fenomena *transmission of violence* berdasarkan hasil berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam pacaran berisiko tinggi mengalami reviktimisasi sedangkan pelaku sangat mungkin mengulang tindak kekerasan dalam hubungan interpersonal di masa dewasanya. Lewis dan Fremouw (2005) menggarisbawahi bahwa jika pasangan tersebut menikah maka pelaku sangat mungkin melakukan kekerasan dalam rumah tangga

dalam bentuk yang lebih serius dan frekuensi yang meningkat.

Hingga saat ini belum ada survei yang sistematis mengenai prevalensi kekerasan dalam pacaran di Indonesia. Namun demikian, catatan tahunan yang dilaporkan oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan setiap tahun memberikan gambaran yang memperhatikan tentang kekerasan dalam pacaran di Indonesia. Misalnya, angka kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2015 sebanyak 2734 kasus, naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2012 dengan jumlah kasus 1085. Kasus kekerasan dalam pacaran mencakup 25 persen dari total kekerasan terhadap perempuan di wilayah privat yang terjadi di tahun 2015. Dua laporan Komnas Perempuan menunjukkan kecenderungan bahwa perempuan dan kelompok dewasa muda berusia 19-23 tahun berisiko tinggi untuk menjadi korban kekerasan dalam pacaran (Komnas Perempuan 2013; 2016). Berbagai publikasi di media cetak dan elektronik mengungkap berbagai kasus kekerasan dalam pacaran yang menyebabkan kematian korban, khususnya perempuan. Kasus-kasus kekerasan dalam pacaran yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki juga diberitakan, termasuk yang menyebabkan korban menempuh tindak aborsi yang tidak aman dan berakibat pada kerusakan organ reproduksi atau kematian calon ibu.

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan faktor-faktor risiko dan pelindung terhadap kekerasan dalam pacaran di kelompok remaja serta implikasinya terhadap upaya pencegahannya. Kajian ini didasarkan pada kajian literatur yang dituntun oleh perspektif ekologi sosial yang memandang interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yang dapat diidentifikasi berada pada berbagai level lingkungan yang berbeda. Literatur yang dirujuk oleh peneliti berasal dari

sumber-sumber terpercaya termasuk artikel dari jurnal internasional bereputasi, laporan dan data yang dipublikasikan oleh lembaga nasional dan internasional yang relevan serta kajian-kajian terkait yang dilakukan oleh para peneliti Indonesia. Penulis menyadari bahwa literatur yang dikaji didominasi oleh kajian yang dalam konteks negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris dan Kanada mengingat masih minimnya publikasi atau pembahasan kekerasan dalam pacaran dalam konteks wilayah non-Western, termasuk Indonesia. Dengan demikian kajian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mendorong meningkatnya perhatian dan kajian terkait kekerasan dalam pacaran di Indonesia serta menjadi bahan masukan bagi pihak berkepentingan untuk mengembangkan upaya pencegahannya.

Pembahasan dalam artikel dimulai dengan mendiskusikan definisi dan karakteristik serta prevalensi kekerasan dalam pacaran. Selanjutnya diskusi dipusatkan pada pembahasan faktor risiko dan pelindung kekerasan dalam pacaran dalam tingkat individu, keluarga, teman sebaya, dan komunitas/masyarakat. Pembahasan ditutup dengan mendiskusikan implikasi pemahaman tentang faktor risiko dan pelindung untuk upaya pencegahan masalah kekerasan dalam pacaran dalam konteks Indonesia.

PEMBAHASAN

Definisi dan Karakteristik Kekerasan dalam Pacaran

Para ahli belum sepakat mengenai definisi kekerasan dalam pacaran sehingga menimbulkan tantangan tersendiri untuk mengukur prevalensinya di dalam masyarakat (Teten et al., 2000). Pada tahap awal perkembangan penelitiannya di era 1980-an, kekerasan dalam pacaran lebih umum dikonseptualisasi sebagai satu dimensi perilaku,

khususnya kekerasan fisik. Kemudian konseptualisasi kekerasan terus berkembang hingga mencakup aspek fisik, mental/emosional/verbal dan seksual walaupun dalam penelitian pengukuran kekerasan tidak selalu mencakup semua dimensi tersebut di atas (Jackson, 1999; Offenhauer & Buchalter, 2011). Ringkasan penjelasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran yang bersifat multi-dimensi dapat dilihat dari gambar 1 di bawah ini.

Para ahli sepakat bahwa pada intinya kekerasan dalam pacaran mengandung dimensi tekanan dan pemaksaan kekuasaan yang bertujuan yang terefleksikan dalam tindakan-tindakan yang bersifat mengekang, mendominasi, dan menyakiti yang menyebabkan kerugian bagi korban. Misalnya, Lavoie et al. (2000) mendefinisikan kekerasan dalam pacaran sebagai “[...] *any behavior that is prejudicial to the partner's development or health by compromising his or her physical, psychological, or sexual integrity*” atau menurut Wekerle dan Wolfe (1999) merupakan perilaku yang ditujukan untuk “[...] *control or dominate another person physically, sexually, or psychologically, causing some level of harm*”.

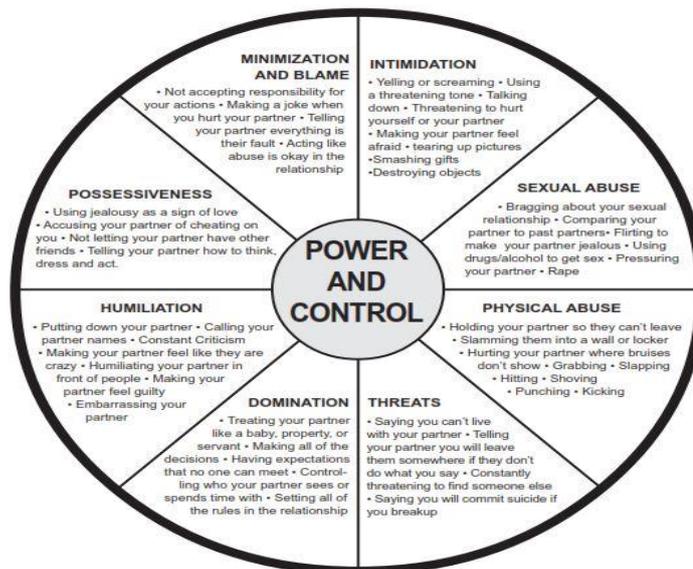
Kekerasan fisik mencakup berbagai bentuk tindakan serangan fisik yang dapat menimbulkan potensi kerugian atau bahaya yang aktual bagi korban. Foshee et al. (2007) menunjukkan bahwa tingkat keseriusan serangan fisik tersebut dikategorikan dalam tiga tingkatan yang berbeda: ringan, menengah dan berat tergantung dari seberapa besar bahaya yang mungkin ditimbulkannya. Kekerasan fisik dalam pacaran dapat berupa tindakan mencakar, menampeleng, mendorong, membenturkan atau menekan seseorang pada dinding, menggigit, mencekik, membakar, memukul dengan menggunakan tangan atau alat dan kekerasan fisik yang menggunakan senjata tajam/senjata api. Sementara itu beberapa kajian literatur sistematis menyimpulkan bahwa kekerasan

seksual merujuk pada upaya-upaya yang bertujuan melibatkan pasangan dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki dengan cara-cara memaksa, mengancam atau menekan. Termasuk di dalamnya adalah pemaksaan aktivitas seksual seperti memeluk, mencium, menyentuh, percobaan perkosaan, perkosaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara-cara yang dianggap memalukan (Barter, 2007; Offenhauer & Buchalter (2011).

Kekerasan psikologis atau emosional merupakan perilaku kekerasan non-fisik yang secara sengaja dilakukan untuk melukai atau mengontrol orang lain secara emosional atau psikologis (Barter, 2009). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan emosional atau psikologis merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi dalam hubungan pacaran.

Termasuk di dalamnya tindakan-tindakan yang bertujuan melukai hati, mengejek, merendahkan, mempermalukan pasangan di hadapan orang lain atau tindakan mengancam merusak nama baik pasangan, melukai atau merusak barang milik pasangan. Selain itu, kekerasan dapat berupa tindakan manipulasi emosional seperti mengancam memutuskan hubungan, melakukan upaya-upaya untuk menjauhkan pasangan dari keluarga, teman atau sumber dukungan sosial lainnya, mengancam bunuh diri serta tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk merusak hubungan melalui berbagai cara seperti menyebarkan berita atau gosip yang tidak benar atau mengungkapkan informasi atau gambar kepada publik yang dapat mencederai harga diri pasangan (Offenhauer & Buchalter, 2011).

Gambar 1. *Power and Control Dating Violence*



Sumber: *Kansas Coalition Against Sexual Abuse and Domestic Violence, 2011*

Para ahli meyakini bahwa kekerasan dalam pacaran melibatkan kelompok laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, korban, atau keduanya. Hal ini didukung dengan penelitian-penelitian yang menunjukkan angka kekerasan dalam pacaran yang

relatif sama antara laki-laki dan perempuan (Lewis & Fremouw, 2000). Namun demikian para peneliti juga menyadari bahwa pola kekerasan ditentukan oleh gender. Remaja perempuan umumnya melakukan kekerasan yang dampaknya dinilai tidak

terlalu membahayakan atau dengan tujuan perlawanan untuk membela diri. Sementara itu laki-laki umumnya merupakan pelaku utama kekerasan, melakukan kekerasan dengan tingkat keseriusan yang tinggi dan bertujuan untuk mendapatkan kontrol atas pasangannya (Foshee et al., 2007; Wubsi et al., 2009). Perempuan umumnya mengalami bentuk kekerasan yang lebih serius atau berbahaya, melaporkan ketakutan dan trauma yang lebih mendalam serta mengalami dampak yang lebih merugikan dari kekerasan yang dialaminya dibandingkan dengan laki-laki (O'Keefe, 2005; Barter 2009; Offenhauer & Buchalter, 2011; Adhia et al., 2018). Beberapa ahli juga menduga bahwa perempuan lebih berisiko menjadi korban dan laki-laki menjadi pelaku kekerasan dalam pacaran. Mereka umumnya menduga adanya isu *social desirability* atau *selection bias* yang menjadi titik lemah dari berbagai pengukuran yang ada sehingga berpotensi menyebabkan responden laki-laki cenderung tidak melaporkan tindak kekerasan yang sebenarnya mereka lakukan atau memilih tidak berpartisipasi dalam survey/penelitian mengenai kekerasan dalam pacaran (Lewis & Fremouw, 2000).

Prevalensi Kekerasan dalam Pacaran

Organisasi Kesehatan Dunia (2013) mengklasifikasikan kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) sebagai salah satu bentuk *intimate partner violence* yang termasuk kekerasan di ranah personal. Karena kajian *intimate partner violence* umumnya difokuskan pada kelompok dewasa yang sudah menikah atau terikat dalam komitmen hidup bersama, pembahasan mengenai kekerasan dalam pacaran di kelompok yang lebih muda menjadi kurang menonjol.

Meskipun kajian global khusus mengenai kekerasan dalam pacaran belum tersedia, studi lintas negara menunjukkan bahwa tingkat kekerasan dalam pacaran menunjukkan angka yang memprihatinkan sehingga perlu mendapat perhatian untuk ditangani. Misalnya, *International Study on Dating Violence* yang dilakukan terhadap 8.666 mahasiswa perguruan tinggi di 31 universitas yang tersebar di 16 negara Asia, Timur Tengah, Australia, Selandia Baru, Amerika Selatan, Eropa dan Amerika Utara menunjukkan 17 sampai dengan 45 persen responden pernah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap pacarnya dalam 12 bulan terakhir (Straus, 2005). Pada tahun 2004-2005 sebuah studi di Tanzania dan Afrika Selatan yang menggali prevalensi kekerasan fisik, seksual dan emosional terhadap hampir 7000 pelajar sekolah berusia 10-18 tahun yang pernah atau sedang berpacaran menunjukkan bahwa 10,2-37 persen responden menjadi korban kekerasan dalam hubungan pacaran di mana 3,1-21,8 persen melaporkan sebagai pelaku kekerasan dan 8,6-42,8 persen sebagai pelaku dan korban (Wubs et al., 2009). Dari 976 remaja di Taiwan, Cina dan Hong Kong (rata-rata usia 16 tahun) yang disurvei mengenai pengalaman kekerasan fisik, seksual dan emosional dalam pacaran, 39 persen melaporkan menjadi korban dan 27,3 persen menjadi pelaku (Shen et al., 2012). *National Survey of Teen Relationships and Intimate Violence* tahun 2016 yang menyasar lebih dari 2.300 pasang anak laki-laki dan perempuan berusia 12-18 tahun dan orang tua di Amerika Serikat menemukan bahwa hampir 70 persen dari responden melaporkan pernah mengalami kekerasan dalam pacaran dan 63 persen pernah melakukan tindak kekerasan dalam pacaran (Mumford et al., 2016).

Pada berbagai wilayah, publik menghadapi tantangan mendapatkan data yang akurat mengenai tingkat kekerasan dalam pacaran di kalangan remaja atau dewasa awal. Minimnya ketersediaan data, terutama di negara-negara berkembang atau *non-Western* menyebabkan isu kekerasan dalam pacaran kurang mendapatkan perhatian dan penanganan. Korban pada umumnya enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena rendahnya pemahaman dan kesadaran mengenai kekerasan dalam pacaran. Sebagian korban misalnya memandang tindak kekerasan yang dilakukan pasangannya sebagai manifestasi perhatian atau cinta sehingga cenderung menafikan kekerasan yang dialaminya. Sebagian lainnya tidak mau melaporkan karena tekanan dan kontrol pasangan mengisolasi korban dari sumber pertolongan. Berbagai studi yang lain menunjukkan keengganan melaporkan akibat kekhawatiran tidak terlindunginya kerahasiaan laporan, ketakutan menghadapi balas dendam dari pelaku, atau ketakutan mendapatkan stigma sosial dari masyarakat (Barter, 2007; Wong et al., 2019).

Selain faktor personal dan kontekstual di atas, kurangnya dukungan lingkungan juga menjadi penghambat untuk melaporkan atau mendapatkan bantuan. Seperti di Cina, pacaran termasuk topik yang tabu untuk dibahas di dalam keluarga. Norma budaya serta sistem sosial yang ada menghambat korban untuk mengungkapkan kekerasan dalam pacaran kepada pihak lain karena kekhawatiran mendapatkan stigma sosial (Wong et al., 2019). Menurut Komnas Perempuan (2016) kurang memadainya payung hukum yang dapat memberikan jaminan keadilan bagi korban kekerasan serta sikap menyalahkan korban merupakan salah satu tantangan struktural yang terjadi di Indonesia yang

berimplikasi pada keraguan korban untuk melaporkan kasusnya. Selain itu sistem pelaporan dan pencatatan yang belum memadai dan terintegrasi menyebabkan kesulitan untuk mendata dan menangani kasus-kasus secara komprehensif.

Faktor Risiko dan Pelindung Kekerasan dalam Pacaran

Faktor risiko merupakan faktor-faktor yang berasosiasi meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam pacaran sedangkan faktor pelindung terkait dengan faktor-faktor yang berasosiasi menurunkan atau menghambat kemungkinan terjadinya kekerasan dalam pacaran. Faktor-faktor tersebut dapat berupa atribut, karakteristik maupun konteks yang spesifik (Offenhauer & Buchalter, 2011). Beberapa kajian literatur (Lewis & Fremouw, 2001; O'Keefe, 2005) mengingatkan bahwa faktor risiko adalah faktor-faktor yang berkorelasi dengan kekerasan dalam pacaran dan tidak selalu berarti menjadi faktor penyebab. Menurut Vagi et al. (2013) upaya membangun *evidence* yang lebih ajeg tentang faktor risiko dan pelindung kekerasan dalam pacaran masih menghadapi tantangan karena keterbatasan penelitian yang bersifat jangka panjang, terbatasnya penelitian mengenai faktor pelindung (*protective factor*), dan terbatasnya studi mengenai factor risiko di level komunitas dan masyarakat. Vagi et al. (2013) melanjutkan bahwa pemahaman mengenai faktor risiko dan pelindung dipandang sangat penting dalam memberikan arahan dan pertimbangan dalam mendesain upaya-upaya pencegahan yang efektif.

Faktor-faktor Individual

Faktor risiko kekerasan dalam pacaran yang bersumber dari dimensi individual termasuk yang

paling banyak mendapat perhatian peneliti. Salah satu yang mendapat perhatian terbesar adalah perilaku *maladaptive* atau berisiko yang berasosiasi dengan meningkatnya peluang seorang remaja terlibat dengan kekerasan dalam pacaran. Kajian literatur sistematis yang dilakukan oleh Offenhauer dan Buchakter (2011) mengkonfirmasi bahwa perilaku-perilaku berisiko seperti konsumsi alkohol, penggunaan obat-obat terlarang, atau perilaku seksual yang bebas meningkatkan risiko seorang remaja menjadi korban atau pelaku kekerasan dalam pacaran. Penelitian *longitudinal* yang dilakukan East dan Hokoda (2015) terhadap 236 remaja laki-laki dan perempuan dengan latar belakang ras *Latino* dan *African American* di Amerika Serikat menunjukkan keterlibatan dalam perilaku berisiko pada masa remaja awal berasosiasi dengan meningkatnya kemungkinan menjadi korban kekerasan dalam pacaran pada masa remaja akhir. Menurut kedua peneliti tersebut perilaku berisiko menghambat kemampuan seseorang untuk dapat melakukan asesmen dan penilaian terhadap suatu kondisi yang berpotensi mengancam atau berbahaya, menghambat kemampuan fisik untuk menghindari dari serangan fisik yang mengancam, membuka kesempatan bagi individu untuk berinteraksi dengan pelaku potensial.

Faktor risiko lainnya di tingkat individu terkait dengan kognisi sosial, kepribadian dan kesehatan mental yang dialami remaja. Kajian literatur Lewis dan Fremouw (2001) menunjukkan bahwa sikap yang mendukung kekerasan dalam pacaran dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam pacaran. Mereka yang memandang kekerasan sebagai taktik yang dapat diterima sebagai bentuk pemecahan konflik lebih berisiko menjadi pelaku kekerasan terhadap pasangannya. Kajian yang dilakukan oleh

Offenhauer dan Buchakter (2011) menunjukkan berbagai penelitian yang mengkonfirmasi bahwa penghargaan diri yang rendah meningkatkan risiko remaja perempuan menjadi korban kekerasan dan sebaliknya di kalangan remaja laki-laki sebagai pelaku kekerasan terhadap pasangannya. Studi O'Keefe (2005) menunjukkan bahwa remaja yang memiliki keterampilan rendah dalam pemecahan masalah, memiliki keterbatasan dalam mengkomunikasikan perasaan dan menghadapi kesulitan mengelola kemarahan juga lebih berisiko untuk menjadi pelaku kekerasan dalam pacaran dibandingkan dengan remaja yang memiliki karakteristik sebaliknya. Berbagai penelitian juga menunjukkan gejala depresi seperti perasaan sedih, kehilangan harapan, dan keinginan bunuh diri berasosiasi dengan risiko menjadi korban kekerasan dalam pacaran bagi remaja laki-laki dan perempuan meskipun para peneliti masih terus mengkaji peran aspek penghargaan diri dan depresi dalam pacaran merupakan faktor risiko, dampak atau mungkin sebagai variabel ketiga yang mempengaruhi asosiasi (O'Keefe, 2005; Offenhauer dan Buchakter, 2011). Sebuah studi di Indonesia yang melibatkan 400 remaja di Kupang menunjukkan bahwa semakin tinggi orientasi dominasi yang dimiliki remaja maka akan semakin tinggi risikonya untuk melakukan kekerasan dalam pacaran dan sebaliknya (Dubu et al., 2020).

Meskipun tidak sebanyak faktor risiko, beberapa kajian memfokuskan pada analisa mengenai faktor pelindung di tingkat individu. Dalam kajian literturnya Vagi et al. (2013) menunjukkan berbagai penelitian yang menemukan karakteristik kognisi, afeksi dan akademik remaja sebagai faktor yang menurunkan risiko kekerasan

dalam pacaran. Termasuk di dalamnya adanya keyakinan dan kesadaran bahwa melakukan kekerasan terhadap pasangan sebagai perilaku yang salah, rasa empati yang tinggi terhadap sesama, capaian akademik yang baik dan kemampuan mengkomunikasikan perasaan.

Faktor-faktor Keluarga

Keluarga dapat menjadi faktor risiko sekaligus pelindung keterlibatan remaja dalam *dating violence*. Faktor di tingkat keluarga juga menjadi salah satu kajian yang mendapat perhatian luas para peneliti. Penelitian lintas budaya menunjukkan pola interaksi negatif dengan orang tua, pengalaman traumatik seperti kekerasan dalam keluarga, serta interaksi dengan anggota keluarga yang memiliki perilaku berisiko dapat menjadi faktor risiko kekerasan dalam pacaran. Dalam penelitian jangka panjang terhadap 1218 remaja awal Foshee et al. (2005) menemukan pengalaman perlakuan salah dalam keluarga seperti mengalami pola pendisiplinan fisik yang sangat ketat dalam keluarga, menjadi korban kekerasan oleh orang tua dan menyaksikan kekerasan di antara orang tua merupakan prediktor signifikan yang berasosiasi dengan menjadi pelaku kekerasan. Penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Han dan Margolin (2015) terhadap 125 remaja usia 13 sampai dengan 19 tahun di Amerika Serikat juga menemukan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak berasosiasi signifikan dengan risiko menjadi korban kekerasan dalam pacaran, khususnya di kalangan anak perempuan.

Senada dengan penelitian di atas, Bruijn et al. (2006) melalui penelitiannya terhadap 1700 remaja di Belanda juga menunjukkan bahwa hubungan yang buruk antara orang tua dan anak serta kekerasan

dalam keluarga meningkatkan risiko anak menjadi korban kekerasan seksual dalam pacaran. Selain terkait dengan relasi anak dan orang tua, penelitian yang dilakukan oleh East dan Hokoda (2015) juga menemukan bahwa interaksi yang dekat dengan saudara yang lebih tua berperan dalam meningkatkan potensi remaja menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Remaja yang memiliki saudara perempuan lebih tua yang memiliki perilaku berisiko (misalnya mengkonsumsi ganja atau menjalani pola seks bebas) memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan dalam pacaran dibandingkan dengan remaja yang memiliki karakteristik sebaliknya.

Asosiasi antara perlakuan salah dan keberadaan anggota keluarga yang berperilaku berisiko dengan kemungkinan seseorang terlibat dalam kekerasan dalam pacaran umumnya dijelaskan oleh Teori Belajar Sosial. Interaksi dengan orang tua atau pengasuh membentuk pemahaman seorang anak tentang hubungan intim, memberikan kesempatan untuk mempelajari kemampuan penyelesaian konflik dan membentuk pemahaman tentang kekerasan. Pengalaman kekerasan di dalam keluarga membentuk keyakinan pada anak bahwa kekerasan merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik sehingga mereka cenderung untuk mentoleransi kekerasan yang dialami dalam hubungan romantik (Bandura, 1971). Para peneliti juga menyimpulkan bahwa interaksi yang intensif dengan saudara yang berperilaku berisiko berpotensi mendorong remaja untuk mentoleransi atau meniru sehingga meningkatkan risiko mereka untuk berinteraksi dengan orang yang potensial melakukan kekerasan.

Selain menjadi faktor risiko, faktor keluarga seperti pola hubungan dengan keluarga dapat berperan melindungi atau mencegah remaja terkait dengan kekerasan dalam pacaran. Hubungan yang dekat antara orang tua dan anak serta supervisi orang tua yang memadai terhadap anak ditemukan sebagai faktor yang mengurangi risiko anak menjadi korban atau pelaku kekerasan dalam pacaran (Offenhauer dan Buchakter, 2011; Vagi et al., 2013). Penelitian jangka panjang yang dilakukan East dan Hokoda (2015) terhadap 236 remaja laki-laki dan perempuan kelompok minoritas dari kalangan sosial ekonomi rendah di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengawasan ketat yang diterapkan ibu terhadap anak sejak berusia muda dan sikap ibu yang konservatif terhadap hubungan seksual berasosiasi dengan menurunnya risiko anak terlibat dalam kekerasan dalam pacaran. Merujuk pada Teori Kontrol Sosial, kedua peneliti tersebut menyimpulkan bahwa pengawasan orang tua yang memadai dan pengasuhan yang bersifat atentif merupakan mekanisme perlindungan yang menjauhkan remaja dari pelaku kekerasan dan menghalangi kesempatan anak untuk terlibat dalam perilaku berisiko/maladaptif yang dapat membuat mereka rentan untuk menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Dalam dimensi yang sama, hubungan dekat orang tua membangun rasa percaya dan keinginan anak untuk mengungkapkan aktivitas dan keberadaan mereka kepada orang tua sehingga memudahkan pengawasan.

Faktor Teman Sebaya

Masa remaja merupakan masa transisi di mana salah satu tujuannya adalah mendorong individu untuk membangun hubungan yang mandiri di luar konteks keluarganya. Karenanya kelompok sebaya

merupakan lingkungan sosial yang sangat penting dan memberikan pengaruh yang besar bagi remaja. Mengingat pentingnya peran kelompok sebaya dalam tumbuh kembang remaja maka tidak heran jika sangat banyak peneliti yang mengkaji pengaruhnya terhadap kekerasan dalam pacaran.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa lingkungan teman sebaya dapat menjadi faktor pelindung atau faktor risiko bagi keterlibatan remaja pada perilaku berisiko. Penelitian Prinstein et al. (2001) terhadap 527 pelajar sekolah menengah atas misalnya menunjukkan bahwa remaja yang sering terlibat dalam perkelahian atau tindakan agresif, menggunakan zat terlarang, atau menggunakan senjata tajam secara signifikan memiliki lebih banyak teman yang berperilaku menyimpang dibandingkan teman yang berperilaku positif. Meta analisa terhadap 87 studi yang dilakukan oleh Hebert et al. (2017) menunjukkan bahwa pengalaman menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya dan afiliasi dengan teman sebaya yang berperilaku menyimpang merupakan faktor yang substansial meningkatkan risiko remaja untuk menjadi korban dan pelaku kekerasan dalam pacaran. Penelitian de Bruijn et al. (2006) di kalangan remaja Belanda juga menunjukkan bahwa remaja yang terlibat dalam perilaku menyimpang atau memiliki teman berperilaku menyimpang akan lebih berisiko menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual.

Sebaliknya, keterlibatan dengan kelompok teman sebaya yang berperilaku positif mengurangi risiko remaja menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Meta analisa yang dilakukan oleh Hebert et al. (2017) menunjukkan bahwa afiliasi dengan teman sebaya yang bersikap mendukung dan cenderung

untuk berperilaku sesuai norma sosial dan hukum mengurangi peluang remaja untuk menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Dalam penelitian jangka panjang terhadap 125 remaja berusia antara 13 sampai dengan 19 tahun di Amerika Serikat, Han dan Margolin (2015) menemukan bahwa memiliki lebih banyak teman yang berperilaku positif seperti memiliki prestasi akademik baik, aktif terlibat dalam kegiatan komunitas, dekat dengan guru, dan sebagainya melindungi remaja dari kekerasan dalam pacaran.

Temuan-temuan di atas dipandang mengkonfirmasi teori belajar sosial mengenai *behaviour reinforcement* atau *observational learning* di mana individu yang memiliki perilaku menyimpang berpotensi menjadi pelaku kekerasan dan berinteraksi dengan kelompok yang berperilaku menyimpang menjadi pendorong bagi seseorang untuk ikut melakukan hal yang sama. Sebaliknya, interaksi dengan teman sebaya yang berperilaku positif atau sejalan dengan norma sosial dan hukum menjadi penguat bagi remaja untuk menerapkan perilaku positif.

Faktor-faktor Komunitas dan Masyarakat Luas

Para ahli meyakini bahwa faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan makro berperan dalam mencegah atau meningkatkan risiko keterlibatan remaja dalam perilaku menyimpang walaupun pengujiannya secara empirik belum terlalu banyak dibandingkan dengan faktor-faktor di tingkatan lainnya sehingga memerlukan kajian yang lebih intensif (Rothman et al., 2011). Penelitian mengenai faktor komunitas/masyarakat umumnya menggunakan landasan teori yang bersifat struktural seperti Teori Disorganisasi dan Perspektif Feminis.

Teori Disorganisasi Sosial memandang kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan lemahnya kontrol sosial. Kelekatan dengan institusi sosial lainnya termasuk sekolah. Sementara itu perspektif feminis menyoroti ideologi dan struktur patriarkis di dalam masyarakat menjadi landasan normatif dalam hubungan interpersonal yang bersifat intim menyebabkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan oleh pasangannya.

Penelitian umumnya menemukan hubungan antara karakter sosial dan kondisi struktural suatu masyarakat dengan kekerasan dalam pacaran. Studi oleh Rothman et al., (2011) terhadap pelajar sekolah menengah di 38 komunitas perkotaan metropolitan di Amerika Serikat misalnya menemukan risiko melakukan kekerasan dalam pacaran secara signifikan lebih tinggi di kalangan remaja yang tinggal di komunitas dengan kohesi sosial dan kontrol sosial yang rendah atau komunitas yang memiliki angka kriminalitas tinggi. Pengaruh faktor komunitas juga dilaporkan dalam penelitian. Banyard et al. (2006) yang menemukan bahwa pengalaman menjadi pelaku kekerasan seksual dalam pacaran lebih banyak dilaporkan oleh remaja yang mempersepsi rendahnya pengawasan komunitas terhadap perilaku anggotanya dan yang memiliki kelekatan yang rendah dengan lembaga pendidikan di lingkungannya.

Sebaliknya, sebuah studi *longitudinal* terhadap 633 remaja berusia 13-19 tahun yang dilakukan Jain et al. (2013) menunjukkan bahwa remaja yang tinggal di lingkungan yang kohesif dan memiliki sistem kontrol informal yang baik akan berisiko lebih rendah untuk mengalami kekerasan dalam pacaran dibandingkan remaja yang tinggal di wilayah dengan karakter sebaliknya. Menurut Jain et

al., temuan ini sejalan dengan Teori Disorganisasi Sosial yang meyakini bahwa komunitas yang memiliki kohesivitas sosial tinggi di satu sisi dapat mencegah anggotanya menjadi korban kekerasan dan di lain sisi mencegah anggotanya melakukan tindak kekerasan.

Norma sosial mengenai peran gender, termasuk dalam relasi seksual yang diyakini dalam satu masyarakat juga diyakini berperan sebagai faktor pelindung atau risiko terkait kekerasan dalam pacaran. Para pendukung teori feminis memandang bahwa ideologi patriarki yang mendasari norma-norma sosial tentang peran gender dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai kelompok subordinat dapat menciptakan kondisi untuk berkembangnya kekerasan dalam pacaran (Dobash & Dobash, 1990). Di dalam hubungan interpersonal, laki-laki dituntut dan dipandang pantas untuk menunjukkan kelaki-lakiannya dengan bersikap pro-aktif, agresif, dan dominan secara fisik maupun seksual sedangkan di lain sisi perempuan lebih pantas untuk menunjukkan perilaku yang sebaliknya; pasif dan patuh. Ketidaksetaraan relasi kuasa ini menciptakan peluang untuk menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan (Barter, 2007).

Berbagai penelitian lintas budaya menunjukkan bahwa sikap dan keyakinan yang bersifat patriarkis dan seksis menjadi faktor risiko untuk menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam pacaran. Dalam sebuah survey terhadap remaja di Cina, Taiwan dan Hongkong (Sen et al., 2012) menemukan bahwa di kalangan remaja laki-laki, risiko menjadi pelaku kekerasan seksual atau fisik dalam pacaran berasosiasi dengan sikap mereka yang mendukung subordinasi perempuan dalam masyarakat, sikap yang menjustifikasi kekerasan

anak laki-laki terhadap anak perempuan dan sikap yang mendukung kekerasan anak perempuan terhadap anak laki-laki berasosiasi dengan melakukan kekerasan seksual terhadap pasangannya. Penelitian de Bruijn et al. (2006) juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dalam pacaran umumnya lebih memiliki keyakinan peran gender yang tradisional/segregatif dibandingkan non-pelaku. Sebaliknya, penelitian Foshee et al. (2004) dan Lacasse & Mendelson (2007) menunjukkan dukungan terhadap stereotip peran gender tradisional atau sikap yang seksis berasosiasi dengan risiko remaja perempuan untuk menjadi korban kekerasan seksual.

Implikasi Terhadap Pencegahan Kekerasan dalam Pacaran

Tak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar faktor-faktor yang ditemukan merupakan hasil penelitian yang dilakukan di luar Indonesia, khususnya negara Barat sehingga tidak dapat sepenuhnya relevan dengan kondisi Indonesia. Namun demikian untuk upaya pencegahan di Indonesia kita dapat mempertimbangkan faktor-faktor risiko dan pelindung yang telah teruji untuk mencegah kekerasan dalam pacaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Pada aspek lain sisi, fakta ini menunjukkan tingginya kebutuhan penelitian mengenai kekerasan dalam pacaran di Indonesia untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan yang ada.

Ada beberapa kondisi dalam masyarakat Indonesia yang dianggap berisiko untuk berkembangnya kekerasan dalam pacaran. Kondisi pertama terkait dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai kekerasan dalam pacaran di

kalangan remaja, keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat yang merupakan kerentanan yang harus diatasi sebagai upaya pencegahan. Kondisi di atas mungkin terkait dengan beberapa penyebab. Pertama, secara legal, konsep kekerasan dalam pacaran tidak dibahas dan diatur dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberi dasar bagi masyarakat untuk memahami perlakuan salah terhadap anak atau kekerasan terhadap perempuan beserta sanksi atas pelanggarannya. Sebaliknya sebagian besar masyarakat masih sangat awam dengan istilah kekerasan dalam pacaran karena tidak ada pengaturan secara khusus. Salah satu konsekuensinya, masyarakat cenderung tidak memiliki kesadaran yang memadai mengenai fakta tersebut dan sebaliknya memandang kekerasan dalam pacaran bukan merupakan fakta sosial atau tidak menganggapnya sebagai perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Kedua, topik tentang pacaran atau hubungan interpersonal lawan jenis masih dianggap tabu untuk dibicarakan di lingkungan keluarga maupun sekolah. Hal ini mungkin terkait dengan pandangan mayoritas masyarakat Indonesia yang masih menganggap pacaran sebagai perilaku yang berisiko melanggar norma-norma agama dan sosial. Padahal praktik pacaran cukup umum terjadi di kalangan remaja di Indonesia saat ini. Sebagai konsekuensinya, kemungkinan besar remaja tidak mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai hubungan interpersonal yang sehat dalam hubungan pacaran,

tidak sadar mengenai bentuk perilaku kekerasan, dan tidak mampu mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku atau korban kekerasan.

Kondisi kedua terkait dengan tingginya kerentanan di lingkungan keluarga, sekolah dan teman sebaya yang berkorelasi dengan faktor yang meningkatkan risiko kekerasan dalam pacaran. Pada lingkungan keluarga, perlakuan salah terhadap anak merupakan permasalahan yang serius dan krusial untuk ditangani. Hasil Survei Kekerasan Terhadap Anak tahun 2012 yang dilakukan di 25 provinsi menunjukkan bahwa orang tua dan kerabat merupakan pelaku utama kekerasan fisik atau emosional terhadap anak. Sementara itu, teman sekolah atau teman sebaya merupakan pelaku utama kekerasan fisik atau emosional di luar lingkungan keluarga (Kemensos, KPPA, Bappenas, BPS, dan Unicef, 2013). Hal ini sejalan dengan Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak Indonesia tahun 2018 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menunjukkan sebagian besar pelaku kekerasan fisik, emosional dan seksual terhadap remaja adalah teman atau sebayanya. Beberapa survei yang dilakukan di kalangan remaja Indonesia di berbagai wilayah juga menunjukkan bahwa antara 45 hingga 67 persen remaja melaporkan pernah mengalami *bullying* yang dilakukan oleh teman sebaya (Kurniasari et al., 2017). Berbagai bukti empirik dalam diskusi sebelumnya menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan dalam keluarga dan kecenderungan melakukan tindak kekerasan/agresif meningkatkan risiko remaja terlibat pada kekerasan dalam pacaran baik sebagai pelaku maupun korban kekerasan dalam pacaran.

Kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah meluasnya penggunaan *gadget* dan media sosial oleh remaja di Indonesia yang juga dapat meningkatkan faktor-faktor risiko bagi remaja. Para ahli menggarisbawahi bahwa tanpa monitoring dan pengawasan yang memadai maka penggunaan *gadget* dan media sosial dapat meningkatkan risiko anak melakukan atau mengalami *cyber* atau *online dating violence*. Di Indonesia, perilaku berisiko yang berkembang di kalangan remaja seperti agresi fisik, kekerasan seksual, penggunaan zat terlarang, perilaku seks bebas dan sebagainya terkait dengan keterpaparan remaja dengan dunia virtual dan media sosial. Perilaku-perilaku berisiko tersebut berkorelasi dengan faktor risiko kekerasan dalam pacaran. Selain itu, menurut Offenauer dan Buchalter (2011), seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pelaku dapat menggunakan telepon genggam, *short message service* dan media sosial untuk melakukan berbagai kekerasan yang bersifat mengontrol seperti selalu memonitor apa yang dilakukan pasangan, di mana dan dengan siapa melakukan aktivitas sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Media massa di Indonesia cukup sering mewartakan berbagai kasus penyebaran foto-foto dan informasi yang bersifat pribadi menggunakan media sosial yang berakibat pada rusaknya nama baik korban dan dampak psikologis yang ditimbulkannya. Kasus-kasus *online dating* yang berakibat pada penculikan dan pembunuhan di kalangan remaja juga menjadi keprihatinan di Indonesia.

Beranjak dari kondisi-kondisi tersebut, bagaimana sebaiknya bentuk kebijakan dan program pencegahan kekerasan dalam pacaran untuk konteks Indonesia? Menurut Shoerey et al. (2012)

konseptualisasi pencegahan kekerasan dalam pacaran umumnya terbagi atas tiga dimensi: pencegahan primer (*primary prevention*), pencegahan sekunder (*secondary prevention*) dan pencegahan universal. Pencegahan primer menargetkan kelompok yang belum pernah melakukan kekerasan namun memiliki aspek-aspek yang dipandang berkorelasi dengan risiko melakukan kekerasan dalam pacaran. Termasuk di dalamnya remaja yang memiliki ketidakmampuan mengontrol emosi, terlibat dalam aksi kekerasan atau kriminalitas secara umum, atau mengonsumsi alkohol. Pencegahan sekunder mencakup upaya-upaya yang menargetkan mereka yang sudah pernah melakukan tindak kekerasan dalam pacaran dengan harapan dapat mengurangi peluang berulang atau berkelanjutnya tindak kekerasan. Sementara itu pencegahan universal menasar semua orang tanpa memandang apakah mereka pernah atau tidak pernah terlibat dalam kekerasan.

Pencegahan yang bersifat universal dan menyeluruh perlu mendapatkan perhatian yang serius di Indonesia. Namun demikian hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur atau mendorong lembaga pendidikan untuk mengembangkan upaya pencegahan kekerasan dalam pacaran secara sistematis. Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu didorong untuk menginisiasi terbentuknya peraturan yang mendorong lembaga pendidikan menengah dan tinggi untuk mengembangkan kebijakan pencegahan kekerasan anak dan kekerasan perempuan yang khususnya menasar komunitas sekolah/ perguruan tinggi dan umumnya masyarakat luas. Sosialisasi, edukasi, kampanye dan atau pelatihan yang

meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai kekerasan dalam pacaran serta dampaknya, hubungan interpersonal yang sehat (hubungan yang saling menghargai dan setara antara laki-laki dan perempuan), mengembangkan norma-norma kesetaraan gender serta membangun kesadaran untuk mengembangkan sikap anti kekerasan perlu disebarluaskan dan dilatihkan di kalangan remaja serta orang tua, termasuk kepedulian untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam pacaran di lingkungan teman sebaya (misal: melaporkan ke guru). Penguatan kapasitas keluarga/orang tua mengenai pola hubungan dan komunikasi yang sehat antara anak dan keluarga juga dapat didorong melalui berbagai kegiatan non-kurikuler di lingkungan sekolah. Selain itu, penilaian akreditasi lembaga pendidikan perlu diarahkan untuk mengases sejauh mana kesiapan lembaga pendidikan mengantisipasi dan merespon berbagai tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik, termasuk kekerasan dalam pacaran.

Pencegahan sekunder juga perlu dikembangkan dengan menyoal kelompok-kelompok remaja dan keluarga yang dipandang mengalami atau menghadapi kondisi-kondisi rentan yang dapat memicu berkembangnya faktor risiko seperti anak dengan perilaku berisiko, anak yang menjadi korban perlakuan salah dalam keluarga, anak yang menjadi pelaku kriminal, anak dari keluarga yang minim pengawasan orang tua, dan sebagainya. Kementerian Sosial dan Dinas Sosial diharapkan dapat mengefektifkan jejaring kerja di daerah dan masyarakat agar anak-anak yang berperilaku berisiko (anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, anak terlantar, dan lain-lain) mendapatkan rehabilitasi

sosial yang memadai untuk dapat membangun kompetensi personal dan interpersonal yang dapat mengurangi risiko mereka terlibat dalam tindak kekerasan dalam pacaran. Upaya-upaya yang dapat dilakukan mencakup konseling psikososial, intervensi klinis perilaku bermasalah/traumatis, pengembangan keterampilan berkomunikasi, pemecahan masalah, pengembangan rasa percaya diri, dan sebagainya.

Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sarana dan prasarana yang dapat mendorong anak dan remaja terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif melalui sanggar kerja atau gelanggang remaja. Pengembangan sarana dan prasarana tersebut perlu dikembangkan di komunitas yang berisiko, misal: rawan kriminal, minim akses layanan yang memperluas akses anak dan remaja memanfaatkan waktu luang secara efektif dan positif serta memperluas jejaring dukungan sosial yang dapat memperkuat ketahanan mereka dari pengaruh negatif lingkungan sekitar.

PENUTUP

Secara singkat, kerangka ekologi sosial membantu peneliti dan praktisi memahami faktor pendukung dan penghambat kekerasan dalam pacaran secara komprehensif. Berdasarkan kerangka tersebut, peluang terjadinya atau terhambatnya kekerasan dalam pacaran tergantung dari interaksi faktor-faktor individual, keluarga, pertemanan, dan komunitas. Semakin banyak interaksi yang terjadi maka faktor-faktor tersebut akan semakin kuat atau lemah untuk menyebabkan seseorang melakukan atau menjadi korban kekerasan oleh pasangannya. Dengan demikian, upaya pencegahan kekerasan dalam pacaran perlu mempertimbangkan upaya

untuk mengurangi kerentanan atau risiko pada berbagai tingkatan.

Kasus kekerasan dalam pacaran cukup banyak dan kondisi-kondisi sosial yang berisiko meningkatkan terjadinya kekerasan pacaran juga cukup kompleks. Namun demikian upaya pencegahan dan penanganannya masih sangat minimal. Upaya pencegahan primer perlu dituangkan dalam kebijakan yang mendorong kelembagaan masyarakat untuk membangun dan menerapkan upaya-upaya untuk meningkatkan faktor-faktor pelindung dan sebaliknya mengurangi faktor-faktor risiko. Strategi pencegahan sekunder dapat dikembangkan melalui kebijakan yang menyoal kelompok-kelompok remaja berisiko melalui proses rehabilitasi dan pengembangan sistem dukungan sosial untuk mencegah mereka terlibat pada kekerasan dalam pacaran, baik sebagai pelaku maupun korban. Para peneliti dan praktisi di Indonesia perlu bekerja bersama untuk mengumpulkan data serta informasi relevan yang diperlukan untuk memahami fenomena kekerasan dalam pacaran di Indonesia, mengkaji faktor-faktor risiko yang bersifat umum maupun unik, serta merancang upaya pencegahan yang efektif dan sesuai dengan konteks Indonesia. Dukungan dari pemerintah berupa kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan kekerasan serta pelayanan yang dapat diberikan terhadap korban merupakan salah satu upaya pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, A.F & Gennaro, S. (2005). Dating Violence in College Women: Associated Physical Injury, Healthcare Usage, and Mental Health Symptoms. *Nursing Research* 54 (4).
- Adhia, A., Kernic, M.A., Hemenway, D., Vavilak, N, & Rivara, F.P. (2019). Intimate Partner Homicide of Adolescents” *JAMA Pediatric*, 173 (6), 571-577.
- Bandura, A. (1971). *Social Learning Theory*. New York: General Learning Press
- Barter, C. (2009). In the Name of Love: Partner Abuse and Violence in Teenage Relationships. *British Journal of Social Work*, 39 (2), 211-233.
- Banyard, V., Cross, C. & Modecki, L. (2006). Interpersonal Violence in Adolescence Ecological Correlates of Self-Reported Perpetration. *Journal Interpersonal Violence* 21 (10).
- Chan, K.L.C., Straus, M.A., Brownridge, D.A., Tiwari, A., & Leung, W.C. (2008). Prevalence of Dating Partner Violence and Suicidal Ideation among Male and Female University Students Worldwide. *Journal of Midwifery & Women Health*, 53 (6).
- De Bruijn, P., Burrie, I, & Wel, F. (2006). A Risky Boundary: Unwanted Sexual Behaviour Among Youth. *Journal of Sexual Aggression*, 12, 81-96.
- Dubu, R.V.I. Leric, D., Wijaya, R.P., & Ruliati, P. (2020). Orientasi Dominasi Sosial dengan Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja. *Journal of Health and Behavioral Science*, 2 (2).
- East, P. L. & Hokoda, A. (2016). Risk and Protective Factors for Sexual and Dating Violence Victimization: A Longitudinal, Prospective Study of Latino and African American Adolescents. *Journal Youth Adolescent*, 44 (6).
- Foshee, V.A., Ennett, S.T., Bauman, K.E., Benefield, T. & Suchindran, C. (2005).

- The Association between Family Violence and Adolescent Dating Violence Onset Does it Vary by Race, Socioeconomic Status, and Family Structure?. *The Journal of Early Adolescence* 25 (3).
- Han, S. C. & Margolin, G. (2016). Intergenerational Links in Victimization: Prosocial Friends as a Buffer. *Journal of Child & Adolescent Trauma*, 9(2).
- Hebert, M., Daspe, M.E., Lapierre, A., Godbout, N., Blais, M., Fernet, M. & Lavoie, F. (2017). A Meta-Analysis of Risk and Protective Factors for Dating Violence Victimization: The Role of Family and Peer Interpersonal Context. *Trauma Violence and Abuse* 20 (4).
- Jackson, S.M. (1999). Issues in the dating violence of research: A Review of the literature. *Aggression and Violent Behavior*, 4(2), 233-247.
- Jain, S., Buka, S.L., Subramanian, S.V., & Molnar, B. (2010). Neighborhood Predictors of Dating Violence Victimization and Perpetration in Young Adulthood: A Multilevel Study. *Journal Public Health*, 100(9), 1737-1744.
- Johnson, R.M., Parker, R.M., Rinehart, J., Nail, J., & Rothman, E.F. (2015). Neighborhood Facts and dating violence among youth: A systematic review. *Journal Prev Medicine*, 49 (3), 458-466.
- Kementrian Sosial, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik PS, & Unicef Indonesia. *Ringkasan Hasil Survey Kekerasan Terhadap Anak Indonesia Tahun 2013*. Diunduh pada 1 Juni 2020 melalui puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/4fb404d806e55b69e7fa7d4106344914.pdf
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2013*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2016*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kurniasari, A., Widodo, N., Yusuf, H., Susantyo, B., Wismayanti, Y.F. & Irmayani, N.R. (2017). Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia. *Sosio Konsepsia*, 6(3).
- Lacasse, A. & Mendelson, M.J. (2007). Sexual Coercion among Adolescents: Victims and Perpetrators. *Journal Interpersonal Violence*, 22 (4).
- Lavoie, F., Robitaille, L. & Hébert, M. (2000). Dating Relationships and Aggression: An Exploratory Study. *Violence Against Women* 6(1):6-36.
- Lewis, S.F. & Fremouw, W. (2001). Dating Violence: A Critical Review of the Literature. *Clinical Psychological Review*, 21(1), 105-127.
- Mumford, E.A., Liu, W & Taylor, B. (2016). Parenting Profiles and Adolescent Dating Relationship Abuse: Attitudes and Experiences. *Journal Youth Adolescent*, 45(5).
- Offenhauer, P. & Buchalter, A. (2011). *Teen Dating Violence: A Literature Review and Annotated Bibliography*. NCJSR.
- O'Keefe, M. (2005). *Teen Dating Violence: A Review of Risk Factors and Prevention Efforts*. VAWnet The Online Resource Center on Violence Against Women, National Resource Center on Domestic Violence (NRC DV).
- Prinstein, M.J., Boergers, P. & Spirito, A. (2001). Adolescents' and their friends' health risk behaviour. *Journal of Pediatric Psychology*, 26 (5), 287-298.

- Putri, Y.Z. (2012). Hubungan Antara Kekerasan Dalam Pacaran dan *Self-Esteem* Pada Perempuan Dewasa Muda.” *Skripsi*. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Rothman, E.F, Johnson RM, Young R, Weinberg J, Azrael D, Molnar BE. 2011. “Neighborhood factors and physical aggression towards adolescent dating partners: Results of a representative survey conducted in Boston, MA.” *Journal of Urban Health*. 2011; 88(2).
- Shen, A.C., Chiu, M., & Gao, J. (2012). Predictors of Dating Violence among Chinese Adolescents: The Role of Gender-Role Beliefs and Justification of Violence. *Journal of Interpersonal Violence*, 27 (6).
- Shorey, R., Zucosky, h., Brasfield, H., Febres, K., Cornelius, T.L., Sage, C., & Stuart, G.L. (2012). Dating Violence Prevention Programming: Directions for Future Interventions. *Agression & Violent Behaviour*, 17 (4), 289-296.
- Silverman, J. G, Raj, A., & Clements, K. (2004). Dating Violence and Associated Sexual Risk and Pregnancy Among Adolescent Girls in the United States. *Pediatrics* 114 (2).
- Straus, M. (2004). Prevalence of Violence Against Dating Partners by Male and Female. *Journal Violence Against Women* 10 (7).
- Taft, C.T. , Schumm, J., Orazem, R.J., Meis, L., & Pinto, L.A. (2010). Examining the Link Between Posttraumatic Stress Disorder Symptoms and Dating Aggression Perpetration. *Journal Violence Victim* 25(4).
- Temple, J.R., Shorey, R.C., Fite, P., Stuart, G.L., & Le, V.D. (2013). Substance Use as a Longitudinal Predictor of the Perpetration of Teen Dating Violence. *Journal Youth Adolescent* Apr 24 (4).
- Teten, A.L., Ball, B., Valle, L.A., Noonan, R., & Rosenbluth, B. (2009). Considerations for the Definition, Measurement, Consequences, and Prevention of Dating Violence Victimization among Adolescent Girls. *Journal Womens Health*, 18(7).
- Vagi, K.J., Rothman, E.F., Latzman, N.E., Tharp, A.T., Hall, D.M., & Breiding, M.J. (2013). Beyond Correlates: A Review of Risk and Protective Factors for Adolescent Dating Violence Perpetration. *Journal Youth Adolescent*, 24 (4).
- Wekerle, C. & Wolfe, D.A. (1999). Dating violence in mid-adolescence: Theory, significance, and emerging prevention initiatives. *Clinical Psychological Review*, 19 (4).
- Wong, J., Tang, N.R., Yau, J., Choi, A., & Fong, D. (2019). Dating CAFE Ambassador Programme: Chinese College Students to Help Peers in Dating Violence. *Journal Health Education Behaviour*, 46 (6).
- World Health Organization. (2012). *Understanding and addressing violence against women: Intimate partner violence*. Retrieved from http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf

TRANSFORMASI PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL MENUJU MASYARAKAT 5.0

TRANSFORMATION OF SOCIAL WORK PRACTICES TOWARD SOCIETY 5.0

Meilanny Budiarti Santoso

Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,
Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang Km.21, Indonesia

E-mail: meilanny.budiarti@unpad.ac.id

Maulana Irfan

Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,
Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang Km.21, Indonesia

E-mail: maulana.irfan@unpad.ac.id

R. Nunung Nurwati

Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,
Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang Km.21, Indonesia

E-mail: nunung.nurwati@unpad.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek sosial berupa perubahan pola interaksi sosial sebagai fokus praktik pekerjaan sosial. Hal ini menjadi tantangan bagi profesi pekerjaan sosial, bukan hanya pada bagaimana melakukan intervensi, melainkan juga pada transformasi yang harus dilakukan dalam praktik berbasis teknologi. Namun demikian, situasi ini menciptakan peluang bagi praktik pekerja sosial karena dapat menjangkau lebih luas dan lebih banyak masalah sosial ataupun upaya peningkatan keberfungsian sosial penerima manfaat. Dengan menggunakan metode studi literatur, artikel ini bertujuan mengkaji tantangan dan peluang profesi pekerjaan sosial dalam menyongsong era 5.0 yang menempatkan kebermanfaat teknologi terutama bagi kepentingan manusia sebagai prioritasnya. Hasil studi menunjukkan profesi pekerjaan sosial telah melakukan transformasi pelayanan sosial bagi para penerima manfaat, sehingga produk sosial yang diciptakan dapat tersebar lebih luas dan lebih cepat tanpa batasan ruang dan waktu. Hal ini menunjukkan telah terjadi percepatan proses pemberian pelayanan sosial. Namun, jika dibandingkan dengan sektor bisnis, proses adopsi teknologi pada bidang pekerjaan sosial jauh terhitung lambat. Berbagai perubahan yang terjadi menjadi tantangan dan peluang bagi profesi pekerjaan sosial dan entitas pendidikan bidang pekerjaan sosial sebagai institusi pencetak calon pekerja sosial yang berpotensi melakukan rekayasa sosial di tengah masyarakat.

Kata Kunci: pekerjaan sosial, transformasi profesi pekerjaan sosial, digitalisasi pekerjaan sosial, masyarakat 5.0.

Abstract

Technological developments affect various aspects of life, especially in social aspects in the form of changes in social interaction patterns as the focus of social work practice. This is a challenge for the social work profession, not only on how to intervene, but also on the transformation that must be carried out in technology-based practices. However, this situation creates opportunities for social worker practices because it can reach wider and more social problems or efforts to improve the social functioning of the beneficiaries. By using the literature study method, this article aims to examine the challenges and opportunities of the social work profession in facing the 5.0 era, which places the benefits of technology, especially for the benefit of humans, as a priority. The results of the study show that the social work profession has transformed social services for the beneficiaries, so that the social products created can be spread more

widely and more quickly without limitation of space and time. This shows that there has been an acceleration in the process of providing social services. However, when compared to the business sector, the process of technology adoption in the social work sector is far from being slow. The various changes that have occurred become challenges and opportunities for the social work profession and educational entities in the field of social work as institutions for creating social worker candidates who have the opportunity to carry out social engineering in the community.

Keywords: social work, social work transformation, social work digitalization, society 5.0.

PENDAHULUAN

Perubahan adalah sebuah keniscayaan, sekaligus menjadi tantangan dan peluang bagi setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang seiring dinamika perubahan yang terjadi. Dalam era digital dewasa ini, penggunaan peralatan berteknologi canggih menjadi sebuah kebutuhan dan tidak dapat dielakkan dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan fenomena tersebut, Tjandrawinata (2016) menyatakan bahwa otomatisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan manusia, teknologi dan pendekatan baru berupaya menggabungkan dunia fisik, teknologi digital, dan aspek biologi, secara fundamental, sehingga akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia. Yahya (2018) menyatakan bahwa interaksi di tingkat mikro yaitu antara individu hingga tingkat makro antar komunitas dan antar bangsa terjadi dengan sangat cepat.

Kasali (2019) menyatakan bahwa dalam perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. ditandai dengan enam pilar teknologi, yaitu: *Internet of Thing (IoT)*, *Cloud Computing*, *Big Data Analytics*, *Artificial Intelligence*, *Super Apps*, dan *Broadband Infrastructure*. Interkoneksi perkembangan teknologi, yang disebut oleh Kasali sebagai era *Hipperconnected*, membawa pada sebuah pendekatan baru dalam membangun relasi sosial antar individu melalui proses teknologi informasi dan komunikasi yang berjejaring secara meluas, karena sama-sama terhubung dengan manusia dari seluruh belahan dunia.

Menurut Zhou et al. (2015) secara umum terdapat lima tantangan besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat secara global di tengah era 4.0 yaitu aspek pengetahuan, teknologi, ekonomi, social, dan politik. Dengan demikian, setiap orang akan mengalami ketidakpastian (*uncertainty*). Era 4.0 merupakan situasi dunia di mana revolusi digital gencar terjadi, sehingga dikenal dengan istilah era disrupsi yang bermakna tercabut dari akarnya.

Era disrupsi ditandai oleh perubahan yang mendasar karena terjadi perubahan yang masif pada masyarakat di bidang teknologi dan berdampak pada setiap aspek kehidupan, yaitu *disruptive regulation*, *disruptive culture*, *disruptive mindset*, dan *disruptive marketing* (Kasali, 2018). Berdasarkan berbagai kajian dan pandangan tersebut mengindikasikan dalam revolusi industri 4.0 terjadi *technology disruption*, sehingga menimbulkan *new culture*.

Ciri-ciri era disrupsi dapat dijelaskan melalui VUCA yaitu perubahan yang masif, cepat, dengan pola yang sulit ditebak (*volatility*), perubahan yang cepat menyebabkan ketidakpastian (*uncertainty*), terjadinya kompleksitas hubungan antar faktor penyebab perubahan (*complexity*), kekurangjelasan arah perubahan yang menyebabkan ambiguitas (*ambiguity*) (Ristekdikti, 2018).

Salah satu tantangan yang lekat dengan kehidupan sehari-hari dan bersentuhan langsung dengan berbagai kalangan masyarakat adalah tantangan di bidang sosial, yaitu seperti yang

dikemukakan oleh Hecklau et al. (2016) sebagai berikut:

1. Perubahan demografi dan nilai sosial, meliputi: kemampuan mentransfer pengetahuan, penerimaan rotasi tugas kerja dan perubahan pekerjaan yang terkait (toleransi ambiguitas), fleksibilitas waktu dan tempat, serta keterampilan memimpin.
2. Peningkatan kerja virtual, meliputi: fleksibilitas waktu dan tempat, keterampilan teknologi, keterampilan media dan pemahaman keamanan teknologi informasi.
3. Pertumbuhan kompleksitas proses, meliputi: keterampilan teknis, pemahaman proses, motivasi belajar, toleransi ambiguitas, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, keterampilan analisis.

Untuk menjawab berbagai tantangan di era 4.0 diperlukan usaha yang sungguh-sungguh, terencana dan strategis serta melibatkan semua pihak terkait di dalamnya, baik pihak regulator (pemerintah), swasta, kalangan akademisi, para praktisi hingga masyarakat sipil, sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang (Yahya, 2018).

Jika kembali menelisik perkembangan masyarakat 4.0 yang berkarakter masyarakat informasi (*information society*) dan ditandai dengan perkembangan komputer serta internet dalam teknologi informasi dan komunikasinya, maka saat ini dunia sedang menyongsong era masyarakat 5.0. Pada era masyarakat 5.0 peradaban manusia dalam hubungannya dengan teknologi, mencoba membawa kembali peradaban sesungguhnya dalam perkembangan teknologi yang berpusat pada manusia (*Human Centered Technology Based*), seperti yang dituturkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada *World Economic Forum* (WEF) yang diselenggarakan di Davos, Swiss pada 23 Januari 2019 (Raditya, 2019).

Menurut Zorn et al, (2011) dan Berzin et al., (2015) sebagai pembanding pada sektor bisnis, bidang pekerjaan sosial masih terhambat dalam mengadopsi perkembangan teknologinya. Profesi pekerjaan sosial memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi yaitu tidak hanya dalam rangka memanfaatkan kekuatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan praktik saja, melainkan hal yang paling penting adalah memastikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan untuk mendukung produk-produk sosial. Faktanya, saat ini kebermanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak memberi dampak sosial yang baik dengan skala yang lebih besar.

Voshel & Wesala (2015) mengungkap ketika perkembangan teknologi internet telah digunakan dalam berbagai sendi kehidupan, maka kemajuan teknologi telah mengancam keamanan ekonomi dan kehidupan pribadi. Kemajuan ini pun telah mengubah wajah komunikasi untuk selamanya.

Perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah cara pandang, perilaku, sifat dan karakteristik pola pelayanan sosial dengan mengadopsi perubahan teknologi itu sendiri. Ketika teknologi informasi dan komunikasi digunakan dengan bijaksana dan efektif, maka hal ini dapat meningkatkan berbagai metode praktik pekerjaan sosial, yaitu pemberian pelayanan, pendidikan, dan penelitian (Perron et al, 2010).

Pelayanan sosial merupakan aktivitas yang sangat lekat dengan profesi pekerja sosial dan tentunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah proses transformasional yang tidak dapat dihindari dan membawa konsekuensi untuk memikirkan kembali tantangan dan peluang bagi profesi pekerjaan sosial (Berzin et al, 2015).

Dengan menggunakan metode studi pustaka, artikel ini bertujuan mengungkap tantangan dan peluang yang muncul di akhir era 4.0 menuju era 5.0 bagi profesi pekerjaan sosial. Hal ini penting untuk dilakukan agar menjadi perhatian bagi para praktisi, akademisi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam bidang pekerjaan sosial untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan teknologi praktik bagi profesi pekerjaan sosial, yaitu seiring dengan dinamika perkembangan peradaban yang terjadi di tingkat dunia. Studi pustaka dilakukan terhadap berbagai literatur perubahan sosial, literatur bidang praktik pekerjaan sosial dan berbagai literatur terkait perkembangan tantangan dan peluang dalam praktik pekerjaan sosial era 4.0 di Indonesia.

PEMBAHASAN

Akhir Era 4.0 Menuju Era 5.0: Bagaimana dengan Profesi Pekerjaan Sosial?

Di tengah perubahan sosial pada era 4.0 ini, pendidikan profesi pekerjaan sosial ditantang oleh situasi dan kondisi saat ini untuk maju sebagai *leader* dalam menciptakan perubahan sosial, karena gejala-gejala yang muncul sebagai akibat dari perubahan sosial memiliki ciri-ciri antara lain seperti yang diungkapkan oleh Martono (2012); Santoso, et al., (2018), yaitu:

1. Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik lambat maupun cepat.
2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya.
3. Perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri.

4. Perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat.

Seiring perkembangan paradigma perkembangan teknologi di tingkat dunia, saat ini era 4.0 sudah memasuki babak akhir dan mulai menuju era 5.0. Hendarsyah (2019) mengungkap tujuan dari Society 5.0 yaitu dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berpusat pada manusia untuk menikmati hidup sepenuhnya. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kemakmuran segelintir orang. Kerangka kerja dan teknologi yang dikembangkan akan berkontribusi untuk menyelesaikan tantangan masyarakat di seluruh dunia, karena berfokus pada manusia, maka perkembangan teknologi mengadopsi kebutuhan manusia dalam membangun relasi antar manusia, sehingga peluang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan praktik profesi pekerjaan sosial dalam melakukan relasi antar individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Namun demikian, perjalanan peradaban manusia menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Tidak dapat dipungkiri, bahwa seiring semakin canggihnya teknologi yang digunakan manusia, interaksi dan sosialisasi manusia secara langsung mulai ditinggalkan karena beralih dan lebih memilih berinteraksi dengan menggunakan peralatan berteknologi canggih, pola interaksi secara langsung pun berubah menjadi pola interaksi secara virtual (Santoso et al., 2018).

Situasi ini menimbulkan permasalahan mendasar pada manusia sebagai makhluk sosial. Bachtiar (2012) menyatakan kecanggihan teknologi yang diciptakan semula diperuntukkan bagi kemudahan manusia, tanpa disadari telah memunculkan “kesepian” dan rasa keterasingan

baru seiring berubahnya bentuk interaksi manusia. Hal ini disebabkan oleh semakin sedikitnya waktu yang dihabiskan bersama secara fisik, semakin lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahmi di antara sesama manusia. Penemuan televisi, komputer, internet, dan handphone telah mengakibatkan manusia terlena dengan dunia layarnya (*screen*) masing-masing (Bachtiar, 2012).

Salah satu profesi yang bertujuan untuk memberikan pertolongan pada kehidupan manusia adalah profesi pekerjaan sosial. Zastrow (2004) dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare* menjelaskan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu profesi memiliki fungsi dan tugas pokok untuk memberikan pelayanan dalam rangka mencapai keberfungsian sosial orang melalui proses interaksi sosial.

Pemahaman demikian dilandasi oleh pandangan Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (*National Association of Social Workers*) yang merumuskan makna dari profesi pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

“Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consists of the professional application of social work values, principles, and techniques to one or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes (NASW, 2013).

Pandangan ini menunjukkan bahwa pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan atau memulihkan kemampuan manusia untuk dapat berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan tersebut.

Suatu permasalahan atau persoalan sosial yang akan ditangani pada umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui suatu tahapan tertentu. Wibhawa, Raharjo & Santoso (2015) menjelaskan bahwa bagi pekerja sosial, terdapat kerangka pikir yang harus dipegang dalam memahami dan mencari solusi dari suatu permasalahan sosial, sehingga pekerja sosial dituntut untuk dapat memetakan dan meletakkan setiap komponen unsur-unsur dari permasalahan yang terjadi pada posisinya masing-masing sebagai sebuah tahapan, yaitu pertama permasalahan atau hal-hal yang dapat dikelompokkan menjadi komponen penyebab, kedua komponen permasalahan sosial itu sendiri dan ketiga komponen akibat dari permasalahan sosial yang terjadi.

Suatu masalah sosial timbul beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya dan tidak pernah terjadi secara sederhana dan bersifat tunggal (*single problem*), melainkan bersifat kompleks, saling terkait dengan berbagai permasalahan lainnya secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga dalam menangani permasalahan dan akibat yang ditimbulkannya pun harus dipahami secara sistemik. Profesi pekerjaan sosial memegang peranan penting dalam hal ini, yaitu bukan hanya sebagai profesi yang bersifat menangani permasalahan sosial saja, melainkan juga sebagai profesi yang dapat menciptakan rekayasa sosial melalui perubahan sosial yang terencana.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan *the International Federation of Social Workers (IFSW)* pada tahun 2010 dan diterima oleh *International Association of Schools of Social Work (IASSW)* dan *International Council on Social Welfare (ICSW)* yang merilis definisi global mengenai pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

“The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and

liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work". (IFSW, 2000)

Definisi IFSW tersebut menyatakan bahwa profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka di tengah kehidupan masyarakat yang serba modern dan tidak dapat dipisahkan dengan teknologi dan media canggih, kehadiran pekerja sosial menjadi amat penting dan menjadi profesi terdepan untuk dapat membantu masyarakat agar dapat kembali memperbaiki interaksi sosial dan keberfungsian sosial mereka yang kian terancam keberadaannya dengan semakin tergantikannya interaksi sosial secara langsung yang memberikan kehangatan dan kedekatan, berganti dengan interaksi sosial secara *virtual* melalui berbagai media berteknologi canggih. Semisal masalah sosial yang dihadapi para klien, Peláez & Marcuello-Servós (2018) berbagi pengalamannya dengan mengungkap:

"Digital technologies have changed the way we interact with others, giving rise to new areas of specialisation, such as online interventions or diagnoses based on the analysis of user behaviour in social networks. The ability to access, adapt and create new knowledge and new social intervention methods using ICTs is a crucial challenge for the social work profession."

Berdasar pengalaman tersebut, nampak dunia digital yang identik dengan segala

kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan dalam praktik pekerjaan sosial, sehingga tugas pekerja sosial bukan hanya semata melakukan kegiatan intervensi, namun juga mampu melaksanakan tugas dengan menggunakan segala kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam situasi yang dihadapkan pada tuntutan *skills transformation*, *job transformation* dan *society transformation* di era digitalisasi, pekerja sosial dapat menjadi *agent of change* dengan melakukan upaya-upaya transformasi sosial dengan menciptakan perubahan sosial ke arah yang diharapkan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia, hal ini sejalan dengan paradigma pemanfaatan teknologi di era 5.0.

Transformasi adalah perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi keadaan baru dan lebih baik (Daryanto, 1997). Memperkuat keberadaan pekerjaan sosial dalam situasi perubahan yang serba cepat terjadi, Kondrat (2002) mengusung unsur-unsur konsep seperti "*human agency*", "*freedom*", "*power and empowerment*", dan "*social transformation*" untuk aktivitas penting pekerjaan sosial di dalam lingkungan sosial.

Tantangan dan Peluang Bagi Profesi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi yang bertujuan untuk memberikan pertolongan pada kehidupan manusia sekaligus melakukan peningkatan keberfungsian sosial dalam masyarakat dapat berperan dan menjadi bagian penting dalam dinamika perubahan yang begitu cepat terjadi dan bahkan dapat menjadi pemain utama dalam menciptakan perubahan sosial secara terencana.

Reamer (2013) menyatakan dukungan perlunya pekerja sosial untuk mengikuti perkembangan teknologi, yaitu bahwa sebuah

kesalahan jika pekerja sosial menghindari praktik nontradisional dan intervensi yang melibatkan perangkat digital dan alat elektronik. Inovasi kreatif dan bermanfaat dalam profesi pekerjaan sosial membutuhkan para praktisi yang mampu mendorong batas-batas praktik tradisional dalam upaya konstruktif untuk membuat, menerapkan, dan mengevaluasi cara baru, namun efektif untuk membantu individu, kelompok hingga komunitas.

Dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berimplikasi pada perkembangan pelayanan sosial, baik dari sisi manajemen organisasi maupun manajemen pelayanan sosial. Implikasi ini membawa konsekuensi pada perubahan pola konvensional dalam berbagai aspek keorganisasian sosial menuju pada pola kontemporer.

Jika melihat dari sebuah perjalanan perkembangan sejarah organisasi nirlaba, Kotler & Andreasen (1995) mencatatnya dalam penjelasan evolusi organisasi nirlaba, yang terbagi atas empat tahapan. Tahap ke empat disebut dengan tahap *competitive/market*, karena pada tahap ini organisasi nirlaba menyadari bahwa mereka tidak dapat terus menerus bergantung pada sumber-sumber pendukung tradisional saja dan mereka sekarang harus benar-benar *independent* atau tidak tergantung. Hal ini berakibat pada meningkatnya perhatian terhadap prinsip-prinsip manajemen profesional, sehingga organisasi menghasilkan pendapatan internal yang lebih baik.

Pada tahap inilah, organisasi nirlaba, sebagaimana layaknya organisasi bisnis, melakukan pula “persaingan” antar organisasi nirlaba lainnya. Artinya mereka yang berani berkompetisi dengan inovasi yang berbeda dengan organisasi nirlaba lainnya-lah yang akan memenangkan persaingan. Terlebih mereka yang memanfaatkan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi, sehingga menjadi wajar pula manakala beberapa organisasi nirlaba memanfaatkan keberadaan media sosial untuk memperkenalkan keberadaan lembaga baik melalui kepemilikan alamat *website* maupun sosial media lainnya.

Hal tersebut didorong oleh kesadaran yang dimiliki oleh para penggerak organisasi sosial, yaitu bahwa jangkauan informasi melalui jejaring internet adalah tidak dibatasi ruang dan waktu. Mengutip pernyataan Friedman (2006) *The World Is Flat*. Dalam tulisannya Friedman menjelaskan bahwa Globalisasi versi 3.0 dimulai tahun 2000, yang menyusutkan dunia dari ukuran kecil menjadi sangat kecil dan mendatarkan lapangan permainan. Salah satu penciri globalisasi adalah arus informasi yang tidak mengenal batas negara (Friedman, 2006).

Dalam situasi kompetitif yang tercipta dan diiringi oleh perkembangan teknologi yang begitu cepat, hal tersebut merupakan tantangan bagi profesi pekerjaan sosial sebagai pelaku pemberi pelayanan sosial. Tanpa mengikuti perkembangan teknologi, maka akan semakin “tertinggal” dalam kancah kompetisi pasar di kalangan profesi pemberi pelayanan sosial lainnya. Castells (2011) mengungkapkan bahwa “*Dunia virtual menjadi dimensi mendasar dari realitas kita*”, pernyataan ini menunjukkan bahwa perubahan dunia virtual secara pasti mempengaruhi dalam berbagai sendi kehidupan manusia.

Nasrullah (2015) menyatakan “*Digital technologies have become integral parts of our everyday lives*”, merujuk pada realita kehidupan saat ini yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan perkembangan teknologi. Perangkat teknologi telah meremediasi ke dalam ruang dan waktu, tempat kerja dan rumah yang tidak bisa lagi secara sadar membedakan mana kehidupan nyata (*offline*) dan mana kehidupan yang tidak nyata (*online*). Demikian juga ketika aktifitas

pemberian pelayanan sosial yang semula bergerak dalam alur konvensional, akan berkelindan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seiring dengan perkembangan kebutuhan penyelesaian masalah sosial yang terjadi. Artinya perkembangan teknologi digital membawa pada sebuah ancaman manakala individu atau komunitas tidak mampu memanfaatkannya dengan baik.

Potensi perkembangan teknologi dapat dilihat juga sebagai sebuah ancaman atau peluang, bergantung bagaimana individu atau komunitas memandangnya. Kasali (2019) berpendapat internet mengubah peran publik dari sekedar konsumsi (pembaca) hingga menjadi *sharing-shaping (content creator)*. Situasi ini dapat menjadikan peluang setiap individu atau komunitas bertindak sebagai *creator* apapun. Jika aktivitas ‘berkreasinya’ memberi solusi baik, maka hasilnya akan menjadi baik. Namun jika tidak, maka hasilnya akan sebaliknya.

Bagaimana dengan profesi pekerjaan sosial? Seiring dengan perkembangan teknologi digital pula, sudah seharusnya bermetamorfosis menjadi profesi yang *update* dalam perkembangannya. Salah satu di antaranya telah dilakukan oleh sekumpulan pekerja sosial yang menamakan lembaganya *Kamu Cantik Project*. Lembaga ini berfokus pada persoalan kaum wanita yang mengalami *body shaming*, yang bertujuan menghilangkan stigma negatif terhadap bentuk tubuh seseorang. Bentuk tubuh yang kerap dikomentari tidak baik, bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman. Aktivitas yang dilakukannya tidak hanya berupa kegiatan kampanye sosial, melainkan juga memberikan jasa konsultasi atau konseling bagi klien yang mengalami situasi krisis kepercayaan diri karena persoalan bentuk tubuh yang dianggap tidak ideal atau mengalami *body shaming*. Aktifitas tersebut secara optimal dilakukan melalui *platform social media* yang awalnya hanya

menggunakan media Instagram @kamucantikproject, kemudian berkembang ke berbagai *social media* lainnya (Line, Twitter, dan Snapgram) (Elita, 2018).

Lesson Learned: Bidang Praktik Pekerjaan Sosial

Whitaker (2014) melihat bahwa dengan munculnya media sosial pada pertengahan 2000-an, kemampuan komunikasi semakin meningkat, banyak organisasi nirlaba mengambil keuntungan dari situasi ini. Jika penggalangan dana adalah salah satu tujuan organisasi non profit, Whitaker memandang sebuah gejala atau fenomena atas keraguan keberhasilan menggunakan sosial media, apakah seharusnya mengikuti *trend* tersebut, dan bahkan akankah mengubah perilaku dalam cara mengumpulkan dana?

Kondisi saat ini “memaksa” penyedia layanan sosial yang secara rutin telah memberikan pelayanan untuk melakukan perubahan baik pada aspek manajemen program maupun pada sisi manajemen pelayanan sosialnya. Saat ini beberapa lembaga pelayanan sosial banyak menggunakan media sosial untuk mendukung dan mengoptimalkan berbagai aktivitasnya, salah satunya terkait kegiatan penggalangan dana. *In today’s age of media sosial and interconnectedness, nonprofit organizations have the ability to be creative in their fundraising efforts (Whitaker, 2014)*. Media sosial, di era kekinian sekarang ini telah menjadi alternatif pilihan terbaik, ketika mencoba mendekati pemberi bantuan dengan penerima manfaat (*beneficiaries*). Misalkan saja proses penggalangan dana yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintahan, seperti kita ketahui bersama, keberlangsungan hidup dari lembaga sosial bergantung kepada kehadiran para donator, hal itu merupakan sebuah realita yang terjadi saat ini. Organisasi tidak dapat bekerja tanpa uang (Klein, 2007) dan krisis

keuangan atas arus kas yang kurang tepat memaksa organisasi nirlaba melakukan penggalangan dana (Zietlow and Seidner, 2007).

Proses metamorfosis penggalangan dana pun terjadi sebagai akibat positif perkembangan digitalisasi, dengan melakukan penggalangan dana melalui jejaring internet atau disebut dengan *crowdfunding*. Sebagai sebuah aktivitas, *crowdfunding* merupakan aktivitas penggalangan dana yang dilakukan melalui media internet dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam komunitas internet (Hemer, 2011). Dalam praktiknya aktifitas *crowdfunding* tersebut terdiri dari tiga aktor, yaitu pemilik situs berplatform *crowdfunding*, pemilik proyek sosial, dan donatur. Seluruh aktivitas tersebut dilakukan dalam jejaring internet dan di Indonesia sendiri telah banyak situs yang melakukan aktifitas ber-*platform crowdfunding*, salah satunya adalah *kitabisa.com*.

Platform kitabisa.com sebagai salah satu lembaga yang ber-*platform crowdfunding* di Indonesia, dimanfaatkan pula kekuatannya oleh salah seorang sosok pekerja sosial dengan mengorganisir lembaga Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN). Penelitian Ardiansah et al. (2016), ISBANBAN merupakan proyek sosial yang diinisiasi oleh anak-anak muda Banten dan dimotori oleh seorang pekerja sosial. Proyek sosial yang diusung oleh ISBANBAN dalam beberapa program sosialnya dilakukan bersama dengan *kitabisa.com*. *Isbanban* mengoptimalkan proyek sosial dalam kampanye sosial di *platform kitabisa.com* karena menyadari kekuatan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan dapat menjangkau relasi calon donatur tanpa dibatasi ruang dan waktu. Bagi ISBANBAN, *crowdfunding* bukan hanya semata melihat perolehan dana, namun juga ada penyampaian visi dan misi sebagai pedomannya, yang dapat

dilihat oleh seluruh pihak (*stakeholder*) secara luas.

Kontribusi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lain dirasakan pula oleh para generasi milenial (yang dipandang generasi yang “melek informasi”) dengan permasalahan yang dihadapinya, cenderung mencari solusi melalui berbagai *platform* sosial media. Beberapa pelayanan sosial melakukannya dengan memanfaatkan berbagai *platform* sosial media manakala, target *adopter* (klien) mereka adalah kalangan berusia muda atau para kaum milenial yang sangat “melek” teknologi informasi dan komunikasi, sehingga jika merujuk pernyataan sebelumnya dan memperkuat fenomena bahwa perkembangan pelayanan sosial pun memiliki berbagai peluang dan tantangan. Kontribusi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan beberapa bentuk pelayanan bermetamorfosis menjadi bentuk yang sesuai dengan zamannya. Sejalan dengan hal tersebut, maka hal ini merupakan tantangan bagi profesi pekerja sosial untuk selalu meng-*update* perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan profesinya.

Demikian juga dengan peluang yang ditangkap oleh beberapa bentuk lembaga pelayanan sosial lainnya yang bermetamorfosis sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi digitalisasi, yaitu di antaranya adalah beberapa lembaga yang melakukan pelayanan jasa konseling. Semisal kegiatan konseling yang dilakukan melalui media Instagram yang dimotori oleh para mahasiswa Kesejahteraan Sosial Fisip Unpad dengan nama akun Instagram *Ask A Pro*, yang bergerak atas dasar kepedulian terhadap perilaku *self-diagnose* di masyarakat, terutama perilaku yang keliru dalam mendiagnosis diri sendiri berdasar informasi kesehatan mental yang didapatkan dari internet. Pelayanan sosial sejenis yang dilakukan melalui Instagram yaitu *Sorai Tubuhku* yang berisi

edukasi seksual di kalangan remaja, khususnya mengenai perilaku *sexting* serta dampaknya dalam kehidupan. Tim ini bekerja sama dengan organisasi PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) untuk mengedukasi remaja seputar perilaku seksual dan kesehatan seksual (FISIP Unpad, 2019)

Begitupun dengan praktik pelayanan sosial pada ranah *primary setting* berupa panti, sebagaimana layaknya panti asuhan, maka pelayanannya ditujukan untuk melakukan asuhan dan pembinaan bagi anak yatim piatu dan anak terlantar. Secara umum, beberapa praktik pelayanan yang dilakukan “cenderung” masih tradisional. Namun, jika dapat dilakukan optimalisasi pelayanan secara inovatif, ketika beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka pola pelayanan yang diberikan sudah tidak dapat lagi dikatakan “tradisional dan konvensional”, seperti yang dilakukan oleh Panti Asuhan Al Qomariah yang berdomisili di Kota Bandung, di bawah naungan Yayasan Al Qomariah. Lembaga ini mengelola panti dengan “menggandeng” kekuatan teknologi informasi dan komunikasi, melalui upaya mempublikasikan informasi profil lembaga pada website yang dimiliki lembaga yaitu yayasanalqomariah.wordpress.com serta beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan Pinterest. Panti Asuhan Al Qomariah secara optimal memanfaatkan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media yang bukan hanya sekedar untuk menyampaikan profil lembaga, melainkan lebih memunculkan program-program yang dilakukan oleh lembaga, serta bidang-bidang usaha yang dimiliki lembaga (Kotler & Andreasen, 1995).

Jika menelisik Visi yang diusung oleh Yayasan Al Qomariah, yaitu: *Menjadi program yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berwirausaha, berbahasa internasional, serta cinta lingkungan*. Layaknya pengelolaan sebuah organisasi, maka berbagai upaya yang

dilakukan oleh Yayasan Al Qomariah adalah dalam rangka mewujudkan visi tersebut dan hal ini dilakukan oleh Yayasan Al Qomariah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dipandang mampu memberikan daya dukung dan percepatan bagi yayasan untuk mencapai visi tersebut. Hal ini sejalan dengan transformasi sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di era digital. Dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi, secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh yayasan dapat terekspos dan diakses oleh siapapun.

Dalam melaksanakan berbagai programnya, Yayasan Al Qomariah banyak melibatkan berbagai pihak untuk ikut berpartisipasi, hal ini ditujukan sebagai upaya pengembangan program, baik itu berupa pemberdayaan penghuni panti hingga melibatkan para relawan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan yang diinisiasi oleh yayasan.

Sumber daya manusia sebagai motor penggerak yayasan, terutama para relawan yang bergabung, didominasi oleh para generasi milenial yang dianggap “melek teknologi informasi dan komunikasi”, sehingga mereka mampu mengoptimalkan perkembangan yayasan melalui berbagai kegiatan wirausaha yang dilakukan dengan berbagai produk yang dihasilkan. Demikianpun dalam hal perolehan donasi yang didapat sebagai wujud partisipasi para donatur yang mengetahui berbagai program yayasan yang terekspos di media sosial, sehingga kegiatan fundraising yang dilakukan tidak melulu berdasarkan pada aktifitas “menunggu uluran tangan” dari para donatur.

Urgensi Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial

Lembaga pendidikan pekerjaan sosial dipercaya sebagai institusi yang dapat menciptakan sekaligus menjawab setiap tantangan dan peluang yang ditawarkan atas

nama perubahan. Dalam hal ini, dunia pendidikan diyakini dapat menjadi media untuk melakukan rekayasa sosial di tengah perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat (Santoso et al., 2019).

Melalui lembaga pendidikan pekerjaan sosial, upaya menciptakan perubahan secara terencana dapat dilakukan, seperti halnya beberapa aktivitas yang digagas oleh para mahasiswa pada program studi Kesejahteraan Sosial Fisip Unpad. Proses pendidikan dituntut secara langsung untuk tidak hanya melakukan *transfer of knowledge*, melainkan juga memastikan terjadinya *transfer of value* dan *transfer of attitude* kepada para peserta didiknya. Terkait hal tersebut, Maria et al. (2018) mengungkapkan bahwa dunia pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja pada dunia industri menjadi bidang yang mengalami tantangan berat, oleh karena itu perlu adanya revolusi dalam hal pendidikan sebagai upaya untuk menjawab tantangan permasalahan pada revolusi industri 4.0

Hecklau et al. (2016) mengutarakan tiga bidang fungsional utama dalam pengembangan sumber daya manusia, yang didefinisikan sebagai pengembangan pribadi (kompetensi), pengembangan tim (kolaborasi), dan pengembangan organisasi (struktur dan proses). Mengembangkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar saat ini dan masa depan menuntut identifikasi kompetensi yang diperlukan. Kompetensi didefinisikan sebagai seperangkat keterampilan, kemampuan, pengetahuan, sikap dan motivasi yang dibutuhkan individu untuk mengatasi tugas dan tantangan terkait pekerjaan secara efektif (Armstrong and Taylor, 2014; Solga et al., 2011).

Banyak penulis mengidentifikasi empat kategori utama untuk mengklasifikasikan kompetensi. Pertama, kompetensi teknis

mencakup semua pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan pekerjaan. Kedua, kompetensi metodologis mencakup semua keterampilan dan kemampuan untuk pemecahan masalah umum dan pengambilan keputusan. Ketiga, kompetensi sosial mencakup semua keterampilan dan kemampuan serta sikap untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Keempat, kompetensi pribadi mencakup nilai-nilai sosial, motivasi, dan sikap individu (Becker, 2013; Solga et al., 2011; Graßmann, 2015). Kualifikasi, di sisi lain, adalah proses mengembangkan seperangkat kompetensi yang dibutuhkan melalui pelatihan dan pendidikan (Graßmann, 2015).

Secara lebih terperinci, Hamlin dan Stewart (2011) serta Hecklau et al. (2016) mengungkapkan tujuan utama dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja individu / kelompok.
2. Meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi.
3. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi.
4. Meningkatkan potensi manusia dan pertumbuhan pribadi.

Sebagai sebuah strategi dalam menghadapi era 4.0, Prasetyo dan Trisyanti (2018) mengungkapkan dua jalan yang dapat ditempuh, yaitu: menyiapkan pelaksanaan pendidikan yang *link and match* antara sumber daya manusia dan kebutuhan zaman di era 4.0; selain menyiapkan pendidikan yang *link and match*, sumber daya manusia yang disiapkan juga harus dibekali dengan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh ilmu sosial humaniora.

Ketika ilmu-ilmu eksakta berperan dalam pengembangan teknologi secara empiris, maka ilmu-ilmu humaniora tetap berperan dalam menjaga kualitas manusianya (*software/users*).

Jika hal ini terjadi, maka kemajuan teknologi sebagai anak kandung ilmu pengetahuan dapat memberikan dampak positif bagi peradaban manusia itu sendiri. Tentunya pandangan ini sejalan dengan era masyarakat 5.0 di mana kemajuan teknologi diperuntukkan bagi terwujudnya masyarakat yang berpusat pada manusia guna menikmati hidup seutuhnya.

PENUTUP

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa dihindari dan telah menjadi media terciptanya perubahan sosial di tingkat global. Perkembangan teknologi yang terjadi dengan begitu cepat telah menciptakan proses transformasi yang mengusung daya kreasi dalam membangun kekuatan koneksitas dan memanfaatkan peluang tersebut sebagai sebuah pemikiran baru dalam praktek pekerjaan sosial. Untuk itu, profesi pekerjaan sosial perlu merevisi standar praktik yang dilakukan agar dapat sejalan dengan upaya menjawab tantangan yang muncul dan dalam rangka menangkap peluang yang tercipta dari perubahan sosial yang terus terjadi dengan cepat.

Kontribusi perkembangan teknologi membawa perubahan dalam berbagai pelayanan sosial. Di penghujung era 4.0 ini telah banyak dilakukan praktik bidang pekerjaan sosial dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat menjangkau lebih luas dan lebih banyak dengan waktu yang lebih cepat terhadap penerima manfaat. Tentunya hal ini sangat sejalan dengan perkembangan teknologi pada era 5.0 di mana teknologi diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kebermanfaatan manusia dalam mencapai kesejahteraan.

Pendidikan bidang pekerjaan sosial khususnya institusi pendidikan tinggi dipandang sebagai entitas penting dalam mempersiapkan calon-calon pekerja sosial sekaligus institusi

yang dapat menjawab tantangan dan peluang yang muncul di Era 4.0 (menuju Era 5.0).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Mulyana, N. dan Fedryansyah, M. (2016). Potensi *Crowdfunding* di Indonesia Dalam Praktik Pekerjaan Sosial. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.3 No.2
- Armstrong M, Taylor S. (2014). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. 13th ed. London: Kogan Page.
- Bachtiar, Amsal. (2012). *Filsafat ilmu edisi revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Becker M. (2013). *Personalentwicklung - Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und Praxis*. 6th ed. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
- Berzin, Stephanie Cosner, Jonathan Singer, Chitatan Chan. (2015). *Practice Innovation through Technology in the Digital Age: A Grand Challenge for Social Work* Working Paper No. 12. American Academy of Social Work and Social Welfare.
- Castells, M. (2011a). *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture (Kindle Ed., Vol. 1)*. Sussex, UK: Wiley Blackwell. Retrieved from <http://www.amazon.com/The-Rise-Network-Society-Information-ebook/dp/B005UQCXVI>
- Daryanto. (1997). *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Elita, L. (2018, Oktober 30). Retrieved Oktober 10, 2020, from <https://beritabaik.id/read?editorialSlug=gaya-hidup&slug=1544757904603-belajar-menghargai-diri-sendiri-bersama-kamu-cantik-project>

- FISIP Unpad. (2019, Desember 20). Retrieved Agustus 20, 2020, from <https://www.unpad.ac.id/2019/12/mendekatkan-pemasaran-sosial-lewat-seminar/>
- Friedman, Thomas. (2006). *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. New York: Published by Farrar, Straus and Giroux.
- Graßmann H. (2005). *Qualifikation, Kompetenz und Personalentwicklung - Zum Einfluss der Informations- und Kommunikationstechnik auf Bankmitarbeiter*. 1st ed. Mering: Rainer Hampp Verlag.
- Hecklau, F., Galeitzke, M., Flachs, S. & Kohl, H. (2016). *Holistic Approach for Human Resource Management in Industry 4.0*. 6th CLF - 6th CIRP. Conference on Learning Factories. Procedia CIRP 54. 1-6. doi: 10.1016/j.procir.2016.05.102
- Hemer, J. (2011). *A Snapshot On Crowdfunding*. Diambil kembali dari Karlsruhe:Franhoufer http://www.isi.fraunhofer.de/isiAssets/docs/p/de/arbapap_unternehmen_region/ap_r2_2011.pdf
- Hendarsyah, Decky. (2019). E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol.8, No.2 Hlm. 171-184 <https://yayasanalqomariyah.wordpress.com/> diunduh pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 15.00
- International Federation of Social Workers. (2000). *General Meeting in Montréal, Canada*. <http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/>
- Kasali, Rhenald. (2018). *Strawberry Generation*. Jakarta: Mizan.
- Kasali, Rhenald. (2019). *#MO; Sebuah Dunia Baru Yang Membuat Banyak Orang Gagal Paham*. Jakarta:Penerbit Mizan.
- Klein, Kim. (2007). *Fundraising for Social Change (5th Ed.)*. San Fransisco: Jossey-Bass
- Kondrat, Mary E. (2002). Actor-Centered Social Work: Re-visioning “Person-in-Environment” through a Critical Theory Lens. *Social Work*. Vol. 47 No. 4. Pp. 435-448.
- Kotler & Andreasen. 1995. *Strategi Pemasaran Untuk Organisasi Nirlaba*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Maria, M., Shahbodin, F & Pee, N.C. (2018). *Malaysia Higher Education System Towards Industry 4.0-Current Trends Overview*. AIP Conference Proceeding. Diunduh dari laman <https://doi.org/10.1063/1.5055483> pada 15 Agustus 2019
- National Association of Social Workers (NASW). (2013). <http://www.socialworkers.org> diakses tanggal 2 November 2013
- Nasrullah, Rully. (2015). *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*. Bandung:Simbiosis Rekatama Media
- Peláez, Antonio López & Chaime Marcuello-Servós .2018. E-Social Work And Digital Society: Re-Conceptualizing Approaches, Practices And Technologies, *European Journal of Social Work*, 21:6, 801-803, DOI: 10.1080/13691457.2018.1520475
- Perron, Brian E. et al. (2010). Information and Communication Technologies in Social Work. *Advances in Social Work Vol. 11 No. 1 (Spring)*.
- Prasetyo, B. & Trisyanti, U. (2018). *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0”*. Surabaya: Institut Teknologi Surabaya

- Raditya, D. (2019, Februari 18). Retrieved Oktober 8, 2020, from <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2019/02/18/society-5-0-tentang-tawaran-dari-jepang-dan-hal-hal-yang-harus-kita-perhatikan/>
- Ristekdikti. (2018). *Pengembangan Iptek dan Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0*. diunduh dari laman <https://www.ristekdikti.go.id/siaran-pers/pengembangan-iptek-dan-pendidikan-tinggi-di-era-revolusi-industri-4-0/> pada 25 Agustus 2018
- Santoso, M. B., Asiah, D. H. S., & Zainuddin, M. (2018). *Tantangan Praktik Pekerjaan Sosial Seiring Perubahan Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Modern*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 5 No. 3 Desember 2018. Hal. 272-280
- Santoso, M. B., Yurlan, A. M., & Fachry, R. S. (2019). *Rekonstruksi Pendidikan Profesi Pekerjaan Sosial yang Adaptif Terhadap Tantangan Era 4.0*. *Social Work Update – Kebijakan, Pendidikan, dan Praktik Pekerjaan Sosial Di Era Revolusi Industri 4.0*, (pp. 1-16). Bandung
- Solga M, Ryschka J, Mattenklott A. (2011) Personalentwicklung: Gegenstand, Prozessmodell, Erfolgsfaktoren. In: Ryschka J, Solga M, Mattenklott A, editors. *Praxishandbuch Personalentwicklung - Instrumente, Konzepte, Beispiele*. 3rd ed. *Wiesbaden: Springer Fachmedien*. p. 19–33.
- Stewart J. and Hamlin B. (2011). What is HRD? - A definitional review and synthesis of the HRD domain. *Journal of European Industrial Training* 35: 199-220.
- Tjandrawina, R.R. (2016). Industri 4.0: Revolusi industri abad ini dan pengaruhnya pada bidang kesehatan dan bioteknologi. *Jurnal Medicinus, Vol 29, Nomor 1, Edisi April*.
- Voshel & Wesala. (2015) Media Sosial & Social Work Ethics: Determining Best Practices in an Ambiguous Reality. *Journal of Social Work Values & Ethics. Vol. 12, No. 1*
- Whibawa. B., Raharjo, S. T., Santoso, M. B. (2015). *Pengantar Pekerjaan Sosial*. Sumedang: Unpad Press.
- Whitaker, Laura. (2014). *Nonprofit Organizations & Media sosial Fundraising; An Analysis of the Goodgiving Guide Challenge*. University of Kentucky. Martin School of Public Policy and Administration.
- Yahya, M. (2018). Era Industri 4.0: *Tantangan dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Profesor Tetap dalam Bidang Ilmu Pendidikan Kejuruan. Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar.
- Zastrow H. C. (2004). *Introduction to social work and social welfare*. USA: Thomson Books/Cole
- Zhou, K., Liu, T., & Zhou, L. (2015). Industry 4.0: Towards future industrial opportunities and challenges. *2015 12th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD)*, 2147-2152.
- Zietlow, J., Hankin, J.A., Seidner, A. (2007) *Financial Management for Nonprofit Organization*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Zorn, T. E., Flanagan, A. J., & Shoham, M. D. (2011). Institutional and noninstitutional influences on information and communication technology adoption and use among nonprofit organizations. *Human Communication Research, 37(1)*. Pp. 1–33. doi:10.1111=j.1468-2958.2010.01387.x

KESEJAHTERAAN PETANI DAN KETAHANAN PANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19: TELAAH KRITIS TERHADAP RENCANA MEGAPROYEK LUMBUNG PANGAN NASIONAL INDONESIA

SMALLHOLDERS WELFARE AND FOOD SECURITY IN TIMES OF COVID-19 PANDEMIC: A CRITICAL REVIEW OF INDONESIA'S MEGA FOOD ESTATES PLAN

Atmaezer H. Simanjuntak

Department of Anthropology, Northwestern University
Evanston, Illinois 60208, United States of America
Email: hariara.simanjuntak@u.northwestern.edu

Rudy G. Erwinsyah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Gd. Cawang Kencana Lt. 2, Jl. Mayjen Sutoyo, Kav. 22 Cawang, Jakarta Timur, Indonesia
E-mail: erwinsyah@kemsos.go.id

Abstrak

Pandemi COVID-19 yang melanda negara-negara di dunia memperlihatkan struktur “neokolonialisme” dan kebijakan “penyesuaian struktural” neoliberal berpengaruh buruk terhadap sistem kesehatan masyarakat dan memperparah kondisi krisis ketahanan pangan. Proses ini memperburuk malnutrisi akibat ancaman bencana keikliman global. Dalam rangka mengatasi krisis pangan, beberapa negara Global South memobilisasi petani kecil untuk mengamankan persediaan dan rantai pangan global melalui skema megaprojek kebun pangan skala luas. Ironisnya para petani semakin kesulitan mendapatkan makanan, memenuhi kebutuhan keluarga mereka, dan mengakses fasilitas kesehatan publik. Pada saat yang sama mereka dipaksa bekerja di lahan yang asing bagi mereka. Artikel ini menyoroti rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk membangun lumbung pangan nasional dengan mencetakan 2,2 juta hektar sawah dan memindahkan 300.000 petani kecil atas nama ketahanan pangan nasional. Hipotesis dalam hal ini adalah kegagalan pemerintah dalam membangun tiga megaprojek kebun pangan skala luas seperti pada masa lalu. Melalui studi literatur yang dieksplorasi ialah irisan antara marjinalitas ekonomi dan kondisi kesehatan serta gizi. Narasi krisis pangan yang didengungkan oleh pemerintah diprakirakan berhasil menggerakkan lembaga-lembaga negara mengembangkan korporasi agrobisnis sebagai sirkuit baru untuk akumulasi kapital. Namun, proses tersebut menempatkan petani kecil sebagai korban. Pada akhirnya, kesehatan dan kualitas gizi petani kecil tidak membaik, malahan menempatkan mereka dalam lingkaran setan kemiskinan generasional. Mereka terus berada di bawah sistem ekonomi kapitalistik, dengan kemiskinan direproduksi oleh dirinya sendiri yang ditandai kondisi kekurangan gizi.

Kata Kunci: COVID-19, gizi, kebun pangan skala luas, kemiskinan, ketahanan pangan.

Abstract

Across the Global South (GS), the COVID-19 pandemic has highlighted how structures of “neocolonialism” and neoliberal “structural adjustment” policies have undermined public health care and are rapidly exacerbating an on-going food security and nutrition crisis in an age of climate catastrophe. In buffering these compounded crises, several GS countries are mobilizing their smallholders to secure food stocks and keep the global food chain flowing by working on mega Food Estates. Ironically, smallholders are increasingly stripped of the means to procure food, provide intra-household care, and accessing public health

facilities while being forced to keep working. Reflecting on the Government of Indonesia's (GoI) recent plan to establish 2.2 million acres of rice fields and displacing 300,000 smallholders in the name of national and global food security and its' accompanying policies; this paper will hypothesize potential long-term health and nutritional issues for the smallholders following large-scale land labor re-arrangement. We will draw upon Indonesia's failures in establishing three Food Estates to solve past food crises and put them in dialogue with literatures that explores the intersection between economic marginality and generational health and nutritional status. We argue that the food crisis narrative echoed by the government successfully mobilized its' state institutions to enable agribusinesses to develop new circuits of capital accumulation while situating smallholders as a necessary sacrifice. Ultimately, smallholders' health and nutritional quality are severed, further entrenching them into a generational cycle of embodied poverty. Under a capitalistic economic system, poverty reproduces itself through conditions of malnutrition.

Keywords: COVID-19, food estates, food security, nutrition, poverty.

PENDAHULUAN

Krisis kesehatan *novel coronavirus disease 2019* (COVID-19) telah membawa dampak berkelanjutan di seluruh dunia. Menurut laporan World Health Organization (WHO) per 15 Agustus 2020, 21 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi virus ini sehingga memaksa banyak negara memberlakukan kebijakan *lockdown* (penguncian) parsial atau total. Akibatnya proses produksi terhenti, rantai pasokan barang dan jasa terganggu, sehingga menimbulkan lonjakan harga komoditas. Imbasnya ialah ketidakpastian lapangan pekerjaan di masa depan pasca COVID-19, di mana ILO (International Labor Organization, 2020) memperkirakan bahwa jam kerja global akan turun 10,7 persen relatif terhadap kuartal terakhir tahun 2019, yang setara dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masif terhadap sekitar 305 juta pekerja formal. Sementara krisis kesehatan dan ekonomi masih membawa malapetaka di seluruh dunia, gelombang krisis berikutnya sudah berlangsung: krisis pangan dan gizi karena sistem pangan yang goyah, ditambah lagi dengan bencana keikliman global yang terus berlangsung (Phillips et al., 2020; The Lancet Global Health, 2020).

Nkrumah (1974) beragumen bahwa struktur neokolonialisme yang dipaksakan oleh

suatu bentuk kekuatan global yang dibentuk oleh negara-negara *Global North*, perusahaan transnasional (misalnya Unilever, Kellogg's, dan P&G), dan lembaga keuangan internasional (misalnya IMF dan World Bank) ke negara-negara *Global South* telah menciptakan “bidang permainan” yang tidak setara dalam mengelola krisis. Melalui mekanisme utang, para penguasa global memperuncing penjarahan gaya kolonial dengan selubung baru neoliberalisme, memaksa negara-negara *Global South* jatuh ke dalam hubungan ketergantungan, kepatuhan, dan kewajiban finansial. Akibatnya, negara-negara *Global South* telah dimiskinkan dengan pola *accumulation by dispossession* (akumulasi melalui perampasan) (Harvey, 2017) yang makin mempersempit kemungkinan untuk mengembangkan ekonomi nasional, terlebih lagi aspek kesejahteraan sosial dan sistem kesehatan publik. Sementara praktik-praktik ini membiayai pembangunan negara-negara *Global North*, di negara-negara *Global South* ketahanan keluarga menjadi semakin rentan, fasilitas kesehatan yang layak sulit diakses, anak-anak kehilangan hak dasar atas pendidikan, dan sistem pangan lokal terobrak-abrik (Aginam, 2000; O’Laughlin, 2017). Ironisnya, kondisi eksploitasi semacam ini dianggap sebagai hal yang normal, lumrah, dan bahkan

diekspektasikan terjadi di negara-negara *Global South*.

Ancaman krisis pangan dan malnutrisi dalam kondisi yang sedemikian membatasi akan lebih berdampak buruk terhadap negara-negara *Global South* daripada negara-negara *Global North*. Terlebih jika mempertimbangkan ketimpangan spasial dalam proses akumulasi kapital yang dimotori oleh korporasi agrobisnis transnasional. Jauh sebelum narasi krisis pangan terkait COVID-19 muncul, negara-negara *Global South* sudah berada dalam posisi genting dalam rantai pasokan global. Rumah tangga termiskin di negara-negara ini dinarasikan selalu “berjarak satu hari dari kehilangan pendapatan, kerawanan pangan, biaya hidup yang tidak dapat diprediksi, dan migrasi paksa” (IPES-Food, 2020) meskipun mereka yang menjadi ujung tombak penghasil bahan pangan. Oleh karena itu, pembahasan tentang ketahanan pangan global perlu bertumpu pada kondisi penghidupan produsen pangan di negara-negara *Global South* yang juga merupakan populasi termiskin di dunia. Tanpa mempertimbangkan mereka, wacana “ketahanan pangan” sebagaimana didefinisikan oleh FAO akan luput dalam melihat dimensi penting tata kelola pangan, yaitu struktur sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan rantai pasokan makanan global untuk berjalan sebagaimana mestinya (Bernstein, 2010; White, 2020).

Petani kecil Indonesia, juga petani dari India dan Cina, merupakan 39 persen dari penduduk miskin ekstrem dunia (Castañeda et al., 2016). Namun, dengan “terhentinya dunia” akibat pandemi, mereka dijadikan orang-orang yang diandalkan untuk menyangga krisis pangan dengan mempertaruhkan kesehatan pribadi maupun keluarga untuk terus bekerja. Situasi ini jelas terlihat dalam rencana Pemerintah Indonesia baru-baru ini untuk membangun megaproyek lumbung pangan nasional dengan tujuan mengintensifkan dan mempercepat

produksi beras dalam negeri. Lumbung pangan nasional sendiri merupakan suatu bentuk dari *Food Estate*, yang dalam terjemahan bebasnya disebut kebun pangan skala luas, yakni budidaya tanaman skala luas (lebih dari 25 hektar) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern (Kementerian Pertanian RI, 2010).

Pemerintah Indonesia menekankan urgensi memulai proyek ini, beberapa lembaga negara dan LSM langsung menyuarakan keprihatinan mereka terutama terhadap isu kerusakan lingkungan. Akan tetapi belum ada pihak yang menyuarakan masalah kesejahteraan sosial petani kecil yang dibayangkan akan mengerjakan megaproyek kebun pangan skala luas ini. Oleh karenanya, penulis mencoba berhipotesis mengenai potensi masalah kesejahteraan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan malnutrisi petani setelah perpindahan mereka ke lahan kebun pangan skala luas di masa pandemi COVID-19. Kondisi krisis pangan yang muncul menjadi peluang untuk memasok lebih banyak tanah dan tenaga kerja ke sirkuit akumulasi kapital korporasi agrobisnis transnasional (Ito et al., 2014), sehingga petani kecil terancam ditumbalkan menjadi ujung tombak untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus, yakni untuk memastikan ketersediaan beras dalam negeri, lalu secara bersamaan mengakumulasi pendapatan (di bawah kategori PDB) untuk membayar utang internasional Indonesia.

Merujuk pada argumen bahwa jalan hidup petani terbebani tuntutan politik dan ekonomi dunia (McMichael, 2008). Dengan demikian, narasi krisis pangan yang digemakan oleh Presiden Joko Widodo pada akhirnya dapat mengoyak kondisi kesejahteraan dan kesehatan petani kecil. Mereka semakin bercokol dalam lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran ini

sangat kejam karena dalam sistem ekonomi kapitalistik, kemiskinan mereproduksi dirinya sendiri melalui kondisi kekurangan gizi (Wells, 2012). Begitu seorang anak dilahirkan di dalam lingkaran ini, kemungkinan besar ia akan memiliki gangguan kesehatan hingga dewasa, dan pada akhirnya meningkatkan risiko reproduksi kemiskinan generasional di kemudian hari (Conroy et al., 2010; Ratcliffe, 2015; Wagmiller Jr. & Adelman, 2009). Ironisnya, meskipun pertanian yang berorientasi pasar ini adalah masalah utama yang menyebabkan krisis pangan dan malnutrisi, bagi pemerintah hal ini justru dianggap sebagai solusi.

Tulisan ini akan dibagi ke dalam empat bagian. Bagian pertama akan dikhususkan untuk membahas konsep lingkaran setan kemiskinan dan keterkaitannya dengan kapitalisme dan malnutrisi. Pada bagian kedua, penulis memaparkan secara singkat rencana megaproyek lumbung pangan nasional dan dasar pemikirannya. Di bagian ketiga, penulis menguraikan sejarah krisis pangan Indonesia dengan ruang lingkup dinamika politik, sosial, ekonomi, dan kesehatan bangsa selama beberapa dekade terakhir. Penulis berpendapat bahwa krisis pangan dan malnutrisi, serta upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membangun megaproyek kebun pangan skala luas, bukanlah pola baru bagi Indonesia. Penulis merefleksikan kegagalan tiga megaproyek serupa yang pernah terjadi di masa lalu pada bagian keempat, kemudian membuat perbandingan untuk membedah alasan-alasan kegagalannya. Perbandingan tersebut kemudian digunakan untuk menghipotesakan potensi masalah kesejahteraan, kesehatan, dan malnutrisi serta politik-ekonomi jangka panjang, yang mungkin muncul di kalangan petani kecil jika mereka dipindahkan untuk mengerjakan megaproyek lumbung pangan nasional.

PEMBAHASAN

Lingkaran Setan Kemiskinan dan Malnutrisi

Kemiskinan dalam sistem perekonomian kapitalis-neoliberal kontemporer mereproduksi dirinya sendiri melalui kondisi malnutrisi (Wells, 2012). Sistem ekonomi ini rupanya tidak hanya mengekspos individu pada kondisi rendah nutrisi dan nutrisi berlebih, tetapi juga ke berbagai efek negatif sepanjang siklus daur hidupnya. Sebabnya sederhana saja: ketika seorang terlahir dalam keluarga yang miskin, kemungkinan besar ia akan tumbuh dalam lingkungan sosio-ekonomi-ekologi yang tidak kondusif untuk masukan nutrisi yang ideal—sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam masa awal pertumbuhan anak (usia tiga bulan sampai dengan tiga tahun, selama gizi utama anak masih dipenuhi oleh air susu ibu). Kondisi sosio-ekonomi yang rendah membuat pilihan makanan yang dikonsumsi anak tidak kaya nutrisi; pilihan tempat tinggal yang sering kali termarjinalkan ke lingkungan yang terekspos ke ragam polutan seperti di bantaran sungai, tempat pembuangan sampah, kolong jembatan; jam kerja orang tua yang tinggi, dimana keduanya sering kali bekerja dengan jam tak menentu sehingga tak sempat merawat anak dengan ideal; serta akses pelayanan kesehatan yang sangat terbatas.

Akibat langsung dari rendahnya masukan nutrisi kepada anak adalah melambatnya proses pertumbuhan fisik dan kapasitas kognitif anak, atau apa yang sering kali kita kenal sebagai *stunting* dan *wasting*. Kondisi malnutrisi ini sangat umum ditemukan di berbagai wilayah miskin Indonesia. Bahkan, kondisi ini pun sering kali terjadi dalam satu rumah tangga karena sang orang tua, sekalipun dengan pilihan makanan bernutrisi rendah, berusaha untuk tetap mengutamakan gizi baik sang anak ketimbang dirinya sendiri. Kondisi tersebut dinamakan “beban ganda gizi buruk”, dimana sang ibu mengalami obesitas karena terlalu banyak

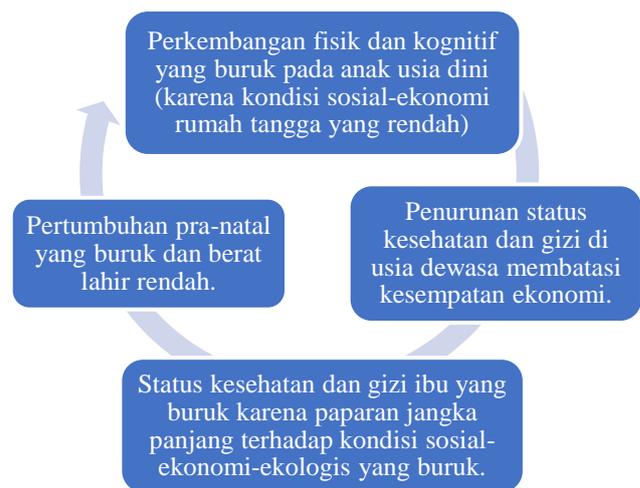
makan makanan bernutrisi rendah dalam kuantitas tinggi (sekedar agar cukup karbohidrat untuk mengerjakan pekerjaan fisik yang lebih menuntut), sedangkan sang anak *stunting* karena terlalu sedikit makan makanan yang lebih bergizi karena keterbatasan finansial.

Dampak jangka panjang dari kondisi malnutrisi sangat mengerikan. Berbagai penelitian (misal Hanandita & Tampubolon, 2015; Vaezghasemi, 2017) mengungkapkan bahwa individu yang masa awal pertumbuhannya terekspos gizi buruk akan memiliki kualitas kesehatan yang rendah kala dewasa, atau setidaknya, kualitas kesehatannya lebih cepat menurun seturut umur dibandingkan dengan orang dewasa yang masa kecilnya memiliki status gizi baik. Dampak lainnya adalah kesulitan mengikuti pendidikan di insitusi pendidikan formal berbagai jenjang karena terhambatnya perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak. Dalam sebuah sistem ekonomi yang menginsentifkan pendidikan tinggi untuk pekerjaan berbayar lebih tinggi, rendahnya pendidikan secara langsung berdampak pada merendahnya kapasitas sumber daya manusia untuk mengakses pekerjaan yang layak dan meningginya kemungkinan ia terjebak utang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alhasil, individu-individu tersebut akan semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kian sulit untuk membebaskan diri. Penelitian-penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa tekanan perekonomian ini sering membawa dampak tekanan mental yang parah bagi orang dewasa dan berkontribusi pada terganggunya kesehatan biologisnya (Sleet, 2020; Sweet et al., 2013).

Ketika individu tersebut beranjak dewasa dalam kemiskinan dan tiba saatnya untuk berkeluarga, siklus serupa akan terulang. Secara khusus ketika individu tersebut adalah perempuan. Seorang dewasa perempuan yang miskin sejak masa kanak-kanaknya akan

memiliki status kesehatan dan nutrisi yang buruk. Hal ini kemudian mempengaruhi rendahnya kualitas pertumbuhan pre-natal anaknya kala dalam kandungan dan rendahnya berat badan anak ketika lahir. Asi seorang ibu yang tumbuh dalam kemiskinan pun memiliki kualitas yang lebih rendah dibanding ibu yang tumbuh di lingkungan bernutrisi baik. Akibatnya, gizi awal mula yang diterima anaknya melalui asi pun sudah buruk.

Maka dari itu, kondisi malnutrisi menjadi sebuah siklus yang mematikan—sebuah lingkaran setan—yang terus mereproduksi dirinya sendiri selama individu terus berada dalam kondisi kemiskinan. Secara sederhana, gambaran siklus tersebut dapat dilihat di Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Lingkaran setan malnutrisi yang mempengaruhi kondisi kemiskinan.

Sumber: Grosse & Roy, 2008; Hadley et al., 2012; Hoddinott et al., 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Sementara itu perkara nutrisi dan kesehatan adalah salah satu

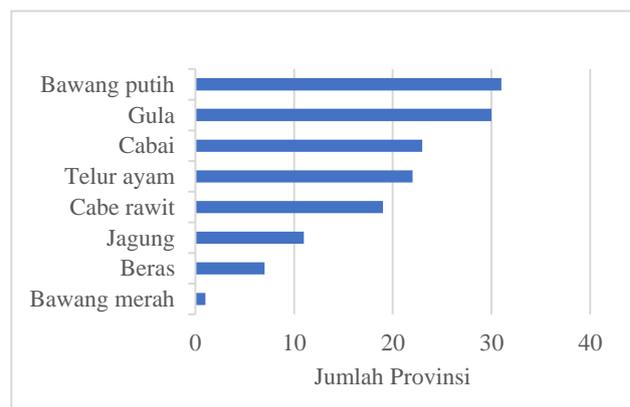
prasyarat pemenuhan kebutuhan material, spiritual, maupun sosial. Jelaslah bahwa isu-isu kesejahteraan sosial merupakan isu nutrisi dan kesehatan. Antara keduanya terdapat hubungan yang tak dapat terpisahkan dan akan terus saling mempengaruhi selama sang individu tak keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal ini bukan berarti tidak ada anak yang tumbuh dari keluarga miskin yang berujung keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup generasi di bawahnya. Namun demikian, dalam sistem ekonomi kapitalis-neoliberal yang kian menghilangkan jejaring pengamanan sosial, individu yang terlahir miskin memiliki kemungkinan lebih kecil untuk memajukan status sosio-ekonominya dibandingkan dengan individu yang terlahir dalam kondisi berkelimpahan.

Situasi Saat Ini: Persiapan Menghadapi Krisis Pangan dan Malnutrisi

Pandemi COVID-19 ini sangat berbeda dengan berbagai bencana serupa yang pernah terjadi di masa lalu karena sistem pangan tiba-tiba terkena dampak melalui beberapa dinamika yang saling terkait, antara lain: 1) terganggunya rantai pasokan pangan global; 2) terjadinya resesi global sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan secara besar-besaran sehingga berdampak pada kemiskinan; dan 3) faktor majemuk pada dinamika ketidakmerataan harga pangan yang menyebabkan bencana kelaparan di banyak tempat (Clapp & Moseley, 2020). Ketiga dinamika ini berkelindan menyebabkan krisis pangan dan ketenagakerjaan sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan masalah kemiskinan.

Pada tanggal 28 April 2020, masalah krisis pangan dan malnutrisi mencuat kembali di tengah kesadaran publik ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan mengalami krisis pangan menyusul defisit pada sebelas jenis komoditas pangan pokok sebagai

imbas rantai pasokan pangan yang terganggu akibat pandemi COVID-19. Defisit ini misalnya pada komoditas bawang putih, gula, cabai, dan telur ayam di lebih dari 20 provinsi, sementara itu beras—makanan pokok bagi sebagian besar orang Indonesia—mengalami defisit di tujuh provinsi (Rahman, 2020b). Grafik di bawah menunjukkan jumlah provinsi (n=34) yang menghadapi defisit terhadap delapan besar dari sebelas komoditas pangan utama.



Grafik 1. Jumlah provinsi yang mengalami defisit pasokan komoditas pangan pokok.

Sumber: disadur dari Rapat Terbatas Kabinet melalui konferensi video pada 28 April 2020

Data defisit pangan ini dibantah oleh lembaga negara lainnya. Kementerian Pertanian RI menyatakan bahwa stok pangan, terutama sebelas komoditas pokok, “aman” dan cukup untuk memenuhi peningkatan permintaan secara nasional. Sementara itu, Badan Ketahanan Pangan mengklaim adanya surplus pasokan pangan secara nasional dan apabila ada kekurangan itu adalah “situasi normal”. Badan Ketahanan Pangan telah menyarankan agar Presiden mempercepat impor gula, bawang putih, dan daging sapi untuk memastikan kecukupan pasokan untuk periode April sampai dengan Juni 2020.

Presiden Joko Widodo memperkuat poin urgensinya dengan mengutip kajian yang dilakukan oleh Food and Agriculture Organization (FAO), yang memprediksi bahwa

gangguan global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dapat menyebabkan defisit pangan di seluruh dunia. Dengan demikian, ada beberapa alasan bagi Presiden untuk mengambil tindakan segera terkait pasokan pangan nasional. Pertama, sebagai negara yang sangat bergantung pada impor komoditas pangan, gangguan berkepanjangan pada rantai pasokan global dan lokal akan menggoyahkan jaring keamanan nasional yang memenuhi permintaan dalam negeri (Tantau, 2020).

Kedua, beras menjadi makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi di negara ini dan merupakan indikator penting ketahanan pangan nasional (Dawe, 2012; Timmer, 2008), telah menurun sejak 2016 dengan penurunan 7,75 persen pada tahun 2018-2019 (Yuniartha & Laoli, 2020). Pada tahun 2019, produksi beras dalam negeri Indonesia mencapai 31,31 juta ton, yang mana hanya mencapai sedikit di atas permintaan 29,6 juta ton (Badan Pusat Statistik, 2019). Kesenjangan kecil antara penawaran dan permintaan ini menjadi sumber kekhawatiran, terutama karena Badan Urusan Logistik (BULOG) memperkirakan terjadinya sedikit defisit dalam produksi beras dalam negeri sejak musim panen Mei 2020 (Bhwana, 2020).

Ketiga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memproyeksikan bahwa lebih dari 30 persen pusat penghasil makanan pokok (termasuk Bali, Jawa, Sumatra, dan Sulawesi) mungkin menghadapi musim kemarau yang luar biasa (Banurea, 2020). Ketiga faktor tersebut akan merugikan masyarakat miskin perdesaan, karena panen mereka akan anjlok sementara harga makanan melambung tinggi.

Menyadari tantangan-tantangan ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan pengaturan ulang politik dan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas petani kecil selama pandemi COVID-19. Presiden menganggap

kondisi saat ini sebagai peluang untuk “reformasi besar-besaran di sektor pangan [Indonesia]” tanpa menguraikan detail rincian reformasinya. Sehubungan dengan melonjaknya harga pangan—khususnya beras—Presiden berencana memberikan subsidi kepada 2,4 juta petani Indonesia untuk membantu mereka mempertahankan capaian panen di masa depan, yakni sebesar Rp.300.000 per bulan dalam bentuk bantuan tunai dan subsidi produksi seperti pupuk dan benih (Rahman, 2020a). Dikutip dari CNN Indonesia, BULOG juga telah diperintahkan untuk membeli beras langsung dari petani kecil dengan tujuan memotong ongkos terkait dengan perantara dan tengkulak, sesegera mungkin mengamankan pasokan nasional sementara, dan membantu kebutuhan keuangan petani kecil (Anonim, 2020). Terakhir, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penataan dan Penyederhanaan Perizinan Impor untuk mempermudah dan menyederhanakan pembatasan impor untuk sebelas komoditas utama. Sehubungan dengan pembatasan mobilitas terkait pandemi COVID-19, Presiden telah memerintahkan jaringan distribusi makanan dibebaskan dari kebijakan pembatasan sosial regional, agar memastikan rantai pasokan terus bergerak (Hakim & Kuwado, 2020).

Sekarang, petani kecil secara struktural dibebankan untuk tetap bekerja sambil ditekan utang sosial-ekonomi yang sudah ada sebelumnya dan harus berpacu dengan risiko kesehatan untuk mengamankan pasokan pangan untuk negara tanpa dukungan kesehatan yang memadai. Memang, ini bukan hal baru karena petani kecil di negara-negara *Global South* selalu diposisikan sebagai korban yang diperlukan untuk menjaga rangkaian sistem akumulasi kapital tetap berjalan (Dandekar & Bhattacharya, 2017; Gerber, 2013; Mohanty, 2005).

Kebijakan utama Presiden Joko Widodo untuk mengurangi potensi kelaparan melalui rencana untuk membuka 2,2 juta hektar sawah. Rencana yang disebut sebagai megaprojek lumbung pangan nasional. Rencana ini dianggap sebagai “kartu as” Presiden dalam melindungi negara dari defisit pangan yang sedang berlangsung, diiringi dengan kebijakan lain untuk meningkatkan pasokan beras nasional. Salah satu lokasi lumbung pangan nasional terletak di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, bekas lokasi Mega Rice Project (MRP) yang dikenal sebagai proyek lahan gambut satu juta hektar pada masa Orde Baru (Jong, 2020).

Pemerintah mengklaim bahwa penanaman dapat dimulai sedini mungkin pada bulan Mei 2020. Penanaman akan dibagi menjadi beberapa tahap, yang pertama pada 405.000 hektar lahan gambut, di mana Kementerian Pertanian perlu mendatangkan 300.000 petani kecil dari pulau-pulau terpadat di Indonesia (Jong, 2020). Pemerintah memandang proyek ini perlu untuk menghindari beban defisit pangan yang dipicu oleh pandemi COVID-19.

Pengaturan ulang politik dan ekonomi ini dirancang agar membuat petani kecil lebih fleksibel dan siap untuk digerakkan mencapai ketahanan pangan melalui megaprojek lumbung pangan nasional. Meskipun begitu, kebijakan megaprojek seperti ini bukan hal yang baru di Indonesia. Pada bagian selanjutnya, penulis merefleksikan tiga megaprojek kebun pangan skala luas di masa lalu serta kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kesehatan yang mendasarinya.

Menilik ke Belakang: Uraian Sejarah Krisis Pangan Indonesia

Ketahanan pangan Indonesia telah lama menjadi wacana yang tak henti dibahas, bahkan sejak jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Hanya saja, pembahasan ini tidak selalu

mencuat ke keseharian publik kelas menengah-atas. Pada akhir dekade 1960-an, ketahanan pangan melalui swasembada beras adalah prinsip utama dalam proyek politik Indonesia. Untuk mencapai hal ini, Presiden Soeharto mengadopsi doktrin neoliberal International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, yaitu menghilangkan kontrol harga, melakukan deregulasi pasar pertanian, menurunkan hambatan perdagangan, dan meningkatkan privatisasi, untuk pada akhirnya melepaskan diri dari ketergantungan impor. Imbasnya ialah klaim “keajaiban ekonomi.” Indonesia mampu mencapai swasembada beras pada tahun 1984, kurang lebih 15 tahun setelah revolusi hijau pertama kali dimulai (Savitri & Prawirosusanto, 2015). Menimbang bahwa dunia baru saja mengalami krisis pangan skala global pada tahun 1972-1973 (Dawe, 2012), prestasi Indonesia layak diakui oleh FAO. Dari tahun 1987 hingga 1996, ada optimisme bahwa Indonesia mencapai ketahanan pangan seperti yang didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, mengikuti pertumbuhan ekonomi tahunan yang berkelanjutan sebesar 7 hingga 8 persen dan pendapatan per kapita yang hampir dua kali lipat (Soekirman, 2001).

Presiden Soeharto memutuskan untuk mendirikan sebuah budidaya tanaman pangan skala luas yang disebut Mega Rice Project (MRP) pada tahun 1996. MRP diharapkan untuk mencakup sejuta hektar perkebunan padi di lahan gambut dataran rendah Pulau Kalimantan. Proyek ambisius ini mengerahkan ribuan ekskavator dan puluhan ribu pekerja untuk menebangi hutan gambut. Pekerja juga ditugaskan untuk menggali 6.000 kilometer kanal-kanal drainase agar tanah tetap kering selama musim hujan dan tanaman dapat diairi di musim kemarau (Goldstein, 2016). Presiden Soeharto sangat optimis untuk mengubah tanah

gambut yang miskin nutrisi menjadi lahan pertanian subur.

Keadaan dengan cepat berubah ketika krisis ekonomi Asia mulai mempengaruhi Indonesia pada tahun 1997. Hal ini membuat keadaan menjadi lebih buruk, gagal panen di seluruh nusantara yang terjadi karena kekeringan yang disebabkan oleh El Nino, berulangnya kebakaran hutan yang meluas, dan gelombang demonstrasi yang menuntut turunnya presiden menyebabkan gangguan sosial di hampir semua wilayah Indonesia. Proyek MRP ditinggalkan tanpa sebutir beras pun yang dipanen, meninggalkan tanah kosong yang terus terbakar dalam skala besar hampir setiap tahun. Keadaan ini menjadikan satu dekade pertumbuhan ekonomi yang kuat berakhir secara dramatis (Studdert et al., 2001). Lebih dari setengah populasi Indonesia pada masa itu hidup dengan kurang dari Rp.10.000 sehari, sehingga krisis pangan menghantui masyarakat miskin perdesaan di Indonesia dan memaksa rumah tangga rata-rata menghabiskan 60 persen dari pendapatan bulanan mereka untuk makanan.

Lebih dari satu dekade kemudian setelah krisis pangan 2007-2008 yang dipicu oleh melonjaknya harga makanan, dua perkebunan didirikan pada tahun 2011 dan 2012, yakni Merauke Food and Energy Estate (MIFEE) di Provinsi Papua dan Ketapang Food Estate (KFE) di Provinsi Kalimantan Barat. Tujuannya antara lain untuk mengamankan stok pangan dalam negeri, dan untuk menghasilkan bahan pangan yang cukup untuk ekspor dan meningkatkan neraca perdagangan Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan jargonnya “memberi makan Indonesia, lalu memberi makan dunia”, merencanakan untuk membuka 1.282.833 hektar lahan untuk MIFEE, dan 886.969 hektar untuk KFE. Kedua megaprojek kebun pangan skala luas ini

membutuhkan ribuan pekerja dan gelombang besar modal dari investasi sektor swasta. Namun karena beragam masalah, KFE akhirnya ditinggalkan karena kegagalannya untuk memenuhi tujuan awalnya sementara MIFEE masih dalam proses penghentian.

Saat ini, dalam kondisi transisi ekonomi yang cepat di mana industrialisasi, urbanisasi, dan desentralisasi politik bersilangan dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan yang memperlebar kesenjangan regional dan peningkatan tingkat kemiskinan, Indonesia menghadapi beban ganda kekurangan gizi, (termasuk defisiensi mikronutrien) dan kelebihan gizi (kelebihan berat badan dan obesitas) di dalam daur hidup populasi yang sama (Hanandita & Tampubolon, 2015; Vaezghasemi, 2017). Menurut laporan World Bank (2013) peningkatan kekayaan nasional Indonesia disertai dengan peningkatan ketersediaan makanan, yang telah menggandakan jumlah lemak yang dikonsumsi per kapita. Namun harga makanan yang meroket memaksa masyarakat miskin di perdesaan untuk mengkonsumsi makanan yang lebih murah dan kurang bergizi. Hal ini mengarah pada kerentanan yang lebih tinggi terhadap malnutrisi. Makanan olahan juga dikonsumsi dalam tingkat yang lebih tinggi, khususnya di daerah perkotaan, yang menyebabkan penduduk kota yang makmur lebih rentan terhadap gizi berlebih. Sementara anak-anak yang lebih miskin lebih cenderung terhambat (48,4 persen), bahkan itu umum terjadi pada anak-anak yang lebih kaya pula (29 persen). Ini adalah realita lingkungan obesogenik Indonesia yang sedang berkembang dan secara langsung memengaruhi status nutrisi masyarakat. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah, masalah nutrisi utama di Indonesia adalah: 36 persen anak kecil mengalami *stunting*; satu dari sepuluh mengalami *wasting*; sedangkan satu dari lima orang dewasa kelebihan berat badan atau

obesitas. Kehadiran kekurangan gizi dan kelebihan gizi secara bersamaan mengarah pada peningkatan penyakit tidak menular (PTM), penurunan perkembangan mental dan fisik, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan (Sleet, 2020).

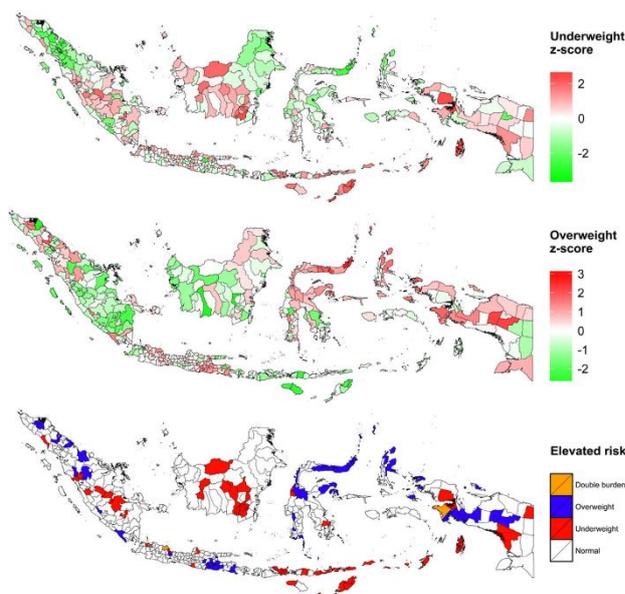
Tabel 1. Kategorisasi Malnutrisi di Indonesia berdasarkan Kelompok Umur

Kategori Malnutrisi	Kelompok Umur				
	<6	6-12	13-15	16-18	>18
Stunting	35,6	35,5	35,1	31,2	
Wasting	13,3	12,2	10,1	8,9	12,6
Obesitas	14,0	9,2	2,5	1,4	21,7

Sumber: World Bank, 2013

Kondisi tersebut konsisten dengan tren umum yang diamati di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah/ *Global South* lainnya (Lee et al., 2012; Popkin, 2001; Subramanian et al., 2009). Merujuk pada berbagai literatur di atas, kondisi gizi buruk bervariasi secara spasial, mengikuti distribusi kekayaan yang tidak merata antara daerah perdesaan dan perkotaan. Perubahan dalam pengaturan tata ruang (seperti wilayah urban baru yang bermunculan dan wilayah perdesaan yang menurun) dan pergeseran demografis karena urbanisasi yang cepat, walau telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tidak serta merta berdampak pada akses ke fasilitas layanan kesehatan yang lebih baik (Lu, 2010) atau makanan bergizi di daerah perdesaan (Satterthwaite et al., 2010). Khususnya untuk mengakses layanan kesehatan, penyebaran geografis yang tidak merata dari penyedia layanan kesehatan mengharuskan masyarakat miskin perdesaan untuk membayar lebih banyak ongkos untuk transportasi dan layanan, yang kerap kali membuat mereka tidak mau pergi walaupun merasa sakit (Laksono & Wulandari, 2020).

Gambar 2 menunjukkan distribusi spasial gizi buruk di 440 kabupaten di Indonesia, yang konsisten dengan diferensiasi daerah kaya-miskin. Kesenjangan antar provinsi menjadi masalah kesehatan masyarakat karena Survei Kesehatan Dasar 2013 menemukan bahwa tidak ada kemajuan yang dicapai dalam mengurangi prevalensi *stunting* dan obesitas di seluruh nusantara (Food Security Council et al., 2015).



Gambar 2. Distribusi spasial malnutrisi di 440 kabupaten di Indonesia.

Sumber: Hanandita & Tampubolon, 2015

Beban ganda gizi buruk juga lazim terjadi pada relasi gender dalam rumah tangga di Indonesia (Roemling & Qaim, 2013). Jumlah rumah tangga dengan beban ganda gizi buruk meningkat hampir dua kali lipat selama lima belas tahun terakhir, dari 11 persen (Doak et al., 2005) pada tahun 1993 menjadi 19 persen (Vaezghasemi et al., 2014) pada 2007. Namun situasi ini jauh lebih buruk bagi rumah tangga di perdesaan miskin. Sebuah studi pada tahun 2017 menemukan bahwa beban ganda pada ibu (kelebihan berat badan) dan anak (*stunting*) dialami 11 persen populasi perdesaan di seluruh Indonesia (Vaezghasemi, 2017). Lebih buruk lagi bagi rumah tangga perdesaan dengan kepala keluarga perempuan, di mana perempuan

umumnya menempati posisi marginal dalam semua aspek kehidupan dan tidak diberi peluang meskipun tanggung jawabnya meningkat dalam pekerjaan produktif dan reproduksi (Agarwal, 1997; White, 2020). Oleh karena harus berhadapan dengan status sosial ekonomi yang buruk, lingkungan yang mendukung pilihan makanan yang tidak sehat, dan harapan peran gender patriarkal, perempuan dipaksa untuk lebih kalkulatif dalam mengalokasikan sumber daya dalam rumah tangga. Seringkali mereka tidak menjadi penerima pertama surplus sumber daya rumah tangga (termasuk makanan bergizi), karena harus memprioritaskan suami dan anak-anak mereka dengan harapan potensi masa depan yang lebih baik.

Hal di atas adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kesehatan yang berada di bawah bayang-bayang megaproyek lumbung pangan nasional yang direncanakan Presiden Joko Widodo. Indonesia dihantui oleh momok krisis pangan dan malnutrisi, di mana Pemerintah khawatir akan gangguan ekonomi lainnya, dan penduduk miskin perdesaan nyaris selalu terancam kelaparan. Faktor-faktor ini bersama dengan ketergantungan yang tinggi pada impor makanan pokok, fluktuasi harga beras global, dan bencana keikliman global yang sedang berlangsung menciptakan kondisi ketahanan pangan Indonesia sangat rentan

walaupun terjadi peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data Global Hunger Index (GHI) tahun 2019, Indonesia menurunkan nilai GHI lebih dari 25 persen sejak tahun 2000. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, pada bagian selanjutnya penulis menyoroti alasan kegagalan tiga megaproyek kebun pangan skala luas di masa lalu dan menguraikan kemungkinan risiko kesehatan dan malnutrisi jangka panjang bagi petani yang berpengaruh pada kondisi kesejahteraannya.

Melihat ke Depan: Berharap Apa dari Megaproyek Lumbung Pangan Nasional?

Rencana Presiden Joko Widodo untuk membangun megaproyek lumbung pangan nasional pada pertengahan tahun 2020 ini dapat dibilang terburu-buru. Pandangan Presiden untuk memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai peluang reformasi sistem pangan, dapat dikritik dengan argumen bahwa penerapan kembali skema kebun pangan skala luas yang telah gagal di masa lalu tidak serta merta menghasilkan cara-cara baru untuk menciptakan rantai pangan yang berkelanjutan (Simanjuntak & Erwinsyah, 2020). Tabel 2 akan menyoroti faktor lahan, tenaga kerja, modal, dan alasan lainnya yang mengarah pada kegagalan MRP, MIFEE, dan KFE.

Tabel 2. Alasan komparatif kegagalan MRP (1996), MIFEE (2011), dan KFE (2012)

	Mega Rice Project (MRP) 1996	Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) 2011	Ketapang Food Estate (KFE) 2012
Lahan	Pemerintah menetapkan sasaran 1.000.000 hektar lahan siap ditanami padi.	Pemerintah mengklaim 1.282.833 hektar lahan siap ditanami.	Pemerintah mengklaim 886.969 hektar lahan siap ditanami. 100 hektar sebagai padi percobaan.
	Diperlukan pembangunan sekitar 4,000 km kanal gambut.	Diperlukan pembabatan hutan dan sabana, serta pengeringan rawa.	Diperlukan pembabatan hutan seluas 38.700 hektar.

	Perlu mengkonversikan rawa gambut menjadi lahan pertanian siap tanam.	Lahan diperoleh dari perampasan tanah.	Penduduk setempat secara kolektif menyewakan lahan seluas 1.400 hektar dengan skema kemitraan.
	Lahan didesain untuk pertanian monokultur tanaman padi.	Pembagian lahan: karet, kelapa sawit, tebu, kedelai, jagung, singkong, beras (95 persen lahan untuk tanaman komoditas ekspor).	Pembagian lahan: padi, jagung, ubi, sayur-mayur, kelapa sawit (dengan dukungan perusahaan swasta).
Tenaga Kerja	Diperlukan sekitar 4.000 petani, sebagian besar transmigran dari Jawa dan Bali.	Dibutuhkan 172.962 petani, sebagian besar transmigran dari Jawa dan Bali.	Dibutuhkan sekitar 4.000 petani, sebagian besar transmigran dari Jawa dan Bali.
	Petani kesulitan mengolah lahan karena tanah kurang subur, sehingga tanaman pangan sulit untuk tumbuh.	Petani secara umum mendapatkan sekitar Rp.60.000 per hari kerja tergantung dari luasan lahan yang dikerjakan.	Petani harus bekerja dalam satu kelompok yang terdiri dari lima orang. Mereka dibayar secara kolektif sebesar Rp.600.000 per hektar. Apabila dikurangi uang sewa dan utang maka tiap petani mendapat Rp.80.000 per hektar.
		Lahan yang dijanjikan kepada petani tidak cocok untuk pertanian tanaman pangan susbsisten.	Lahan yang dijanjikan kepada petani tidak cocok untuk pertanian tanaman pangan susbsisten. Lahan gambut rentan terbakar pada musim kemarau dan tanahnya kurang subur.
		Petani harus bekerja ekstra di sektor informal seperti pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan.	Kurang-lebih 11 jam kerja per hari menyebabkan kurangnya waktu untuk melakukan aktivitas lain, seperti aktivitas sosial.
		Penghasilan dan distribusi lahan tidak cukup untuk pemenuhan aktivitas reproduksi sosial.	Petani diharuskan bekerja ekstra di perkebunan kelapa sawit, tambang bauksit, atau menjadi kuli bangunan.
			Penghasilan dan distribusi lahan tidak cukup untuk pemenuhan aktivitas reproduksi sosial.
Modal	Pendanaan sebesar Rp.3 triliun dari Dana Restorasi. Dalam praktiknya, MRP disubkontrakkan ke banyak	44 perusahaan swasta, termasuk investor asing	Pendanaan oleh perusahaan badan usaha miliki negara

	perusahaan swasta milik kerabat Presiden Soeharto.	diberikan konsesi lahan selama 60 tahun.	dan perusahaan swasta (untuk kelapa sawit).
		Diproyeksikan menghasilkan Rp.3 triliun per tahun. Kenyataannya, hanya memperoleh Rp.200 milyar per tahun dan grafiknya tidak stabil. Belum ada kalakulasi pasti mengenai laba hingga saat ini.	Penduduk setempat dijanjikan skema bagi hasil 60:20, 60 persen untuk perusahaan dan 40 persen untuk petani. Akibat rendahnya produktivitas panen, perusahaan mengubah perjanjian menjadi 80:20.
Lainnya	Kegagalan MRP dikarenakan rusaknya kualitas tanah, bahkan hingga saat ini bekas lahan MRP menjadi salah satu kawasan titik kebakaran hutan terparah. Pada kebakaran tahun 1997 saja, 150 juta ton karbon dilepaskan dari MRP.	Tidak ada kontribusi yang jelas terhadap program ketahanan pangan nasional, karena sebagian besar lahan dialokasikan untuk industri kayu dan perkebunan kelapa sawit (sekitar 95 persen).	Pembukaan lahan dalam skala besar merusak lapisan tanah yang paling subur, menyebabkan naiknya tingkat keasaman. Sebaliknya, kualitas tanah yang rendah mempengaruhi jenis dan kualitas tanaman yang bisa ditanam. Juga memicu konflik sosial akibat kegagalan siklus tanam.
	Pemerintah Indonesia memobilisasi militer untuk membantu pembangunan MRP termasuk infrastrukturnya. Tentara juga ditugaskan untuk memastikan rantai pasokan tetap mengalir.	Berbagai konflik jangka panjang, relokasi, dan eksploitasi terhadap penduduk setempat dan transmigran karena alih fungsi lahan.	Pembukaan lahan menyebabkan hilangnya habitat, hewan liar makan tanaman padi. Hal ini mengakibatkan gagal panen.
	MRP terbengkalai sebelum adanya penanaman akibat krisis ekonomi yang melanda	Menghasilkan emisi gas rumah kaca hingga 737 juta ton. Belum lagi munculnya 11.000 titik api kebakaran hutan akibat memburuknya kualitas tanah gambut.	Kebakaran dan kabut asap di lahan gambut mengakibatkan masalah lingkungan transnasional dan berakibat buruk pada kesehatan.
	Sebagian besar petani yang telah dipindahkan ke lokasi MRP terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan dan rusaknya lahan pertanian	Pemerintah memobilisasi militer untuk mengamankan pengembangan MIFEE, produksi pangan, dan rantai pasokan dengan narasi untuk mengamankan keamanan pangan. Hal tersebut ditambah juga faktor Papua yang sudah sangat termiliterisasi karena kekerasan dari negara yang terus berlangsung terhadap di Papua.	Pemerintah memobilisasi militer untuk mengamankan pengembangan KFE, produksi pangan, dan rantai pasokan dengan narasi untuk mengamankan keamanan pangan. Juga, ketegangan berkepanjangan antara etnis Dayak dan Melayu (dua kelompok etnis utama di lokasi KFE) menjadikan aksi-aksi pengamanan menjadi lebih beringas.

Sumber: Limin, Jentha, and Ermiasi, 2007; Goldstein, 2016; Savitri and Prawirosusanto, 2015; Ito, Rachman, and Savitri, 2014; Savitri, 2013

Setidaknya ada empat masalah yang saling terkait yang menyebabkan gagalnya tiga megaprojek kebun pangan skala luas pada masa lalu. Pertama, kegagalan terjadi karena pemerintah menyediakan jalan atau bahkan membiarkan korporasi agrobisnis transnasional menangani krisis pangan nasional dengan mengintensifkan investasi modal dalam proyek-proyeknya. Pada tiga kebun pangan skala luas sebelumnya, Pemerintah Indonesia membiarkan korporasi agrobisnis mengendalikan proses hulu dan hilir rantai pasokan bahan pangan. Strategi ini mungkin paling lazim terjadi di MIFEE dan KFE pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana ia mengkonsolidasikan tujuh perusahaan di sektor pertanian ke dalam satu kelompok korporasi yang diberi nama “Korporasi Peduli Pangan” (Savitri & Prawirosusanto, 2015). Pengamanan stok pangan domestik tidak pernah menjadi misi utama korporasi agrobisnis. Sebagai sebuah bisnis, sudah tentu kebutuhannya ialah ekstraksi laba dan nilai lebih. Alhasil, sebagian besar tanah di lahan tanaman pangan digunakan untuk menanam tanaman komoditas ekspor seperti kelapa sawit, pohon kayu keras, dan kakao, daripada beras yang ditujukan untuk konsumsi dalam negeri. Masuknya modal besar-besaran juga merupakan lahan subur bagi korupsi karena banyak pemangku kepentingan dengan berbagai agenda terlibat. Pemerintah mengambil kebijakan yang sama dalam rencana megaprojek lumbung pangan nasional, yakni memobilisasi lembaga-lembaga negara seperti Kementerian Pertanian RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Tentara Nasional Indonesia, dan sekaligus juga berbagai korporasi agrobisnis.

Kedua, petani dalam tiga megaprojek kebun pangan skala luas menjadi terpuruk karena lahan tersebut hanya diberikan izin untuk

tanaman monokultur komersil, sehingga tidak memungkinkan petani untuk menanam tanaman pangan subsisten. Meskipun korporasi agrobisnis menjanjikan sebidang kecil tanah (biasanya sekitar 2 hektar atau kurang per rumah tangga) untuk perumahan dan penggunaan lahan pribadi kepada petani kecil, korporasi agrobisnis di MIFEE dan KFE menggerogoti teritori hidup para petani. Alhasil, desa menjadi satu-satunya ruang sirkulasi sah para petani. Hal ini adalah praktik umum “perampasan tanah” (Borras et al., 2011; Hall, 2011) yang dimungkinkan melalui berbagai peraturan perundang-undang yang saling bertentangan, tidak adanya peta kadaster atau peta hak milik yang resmi, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuan petani kecil untuk menyediakan varietas makanan. Dalam keadaan seperti itu, sebuah rumah tangga petani kecil terpaksa menyesuaikan pola makan mereka sesuai dengan ketersediaan pangan yang kian hari kian langka.

Ketiga, dalam tiga megaprojek masa lalu ini petani kecil dibayar sangat rendah sementara harus bekerja—secara akumulatif—lebih lama per harinya daripada yang dijanjikan sebelumnya. Seperti yang telah ditunjukkan oleh berbagai penelitian terkait waktu/hari kerja yang lebih panjang biasanya disebabkan oleh banyaknya kapling tanah yang dimiliki berbagai investor, tidak adanya kontrak kerja yang jelas, dan upah yang terlampau kecil (Li, 2018; Elmhirst et al., 2017; Julia and White, 2012). Untuk mengimbangi upah kecil, petani biasanya melakukan pekerjaan kontrak jangka pendek di luar megaprojek. Misalnya saja kontrak informal di perkebunan, pertambangan, atau menjadi kuli bangunan di kota kecil terdekat. Imbas utamanya adalah berkurangnya waktu kerja reproduktif, khususnya di rumah tangga. Perlu diingat bahwa rumah tangga petani kecil

adalah arena konsumsi, produksi, dan investasi, di mana keputusan yang berkaitan dengan alokasi tenaga kerja dan sumber daya dibuat (Agarwal, 1997). Oleh karena itu, ketidakmampuan untuk menyediakan perawatan keluarga yang memadai misalnya membesarkan anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya (termasuk dalam kategori “kerja reproduktif”) akan memperparah kondisi kesehatan dan gizi keluarga petani. Kondisi kesehatan dan gizi anak-anak yang terganggu, ditambah dengan upah orang tua yang rendah, juga akan menghambat akses mereka ke sistem pendidikan menengah dan tinggi. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kesehatan yang buruk dapat membawa dampak yang buruk pula bagi pendidikan, karena dapat mengurangi kehadiran murid di kelas, mengganggu konsentrasi, dan meningkatnya ketidakmampuan belajar; sementara pada gilirannya, pendidikan yang buruk berdampak pada pendapatan ke sumber daya masa depan, perilaku sehat, manfaat sosial-psikologis, dan lingkungan yang lebih sehat secara umum (Hanandita & Tampubolon, 2015; Laksono & Wulandari, 2020; Yu & Hannum, 2007).

Keempat, keterpurukan dan kemiskinan petani pada tiga megaproyek masa lalu terjadi sebagai akibat dari kondisi ekologis lahan di mana mereka ditempatkan. Dalam hal ini terjadi *slow violence* (kekerasan perlahan) (Nixon, 2011) yang menimpa petani kecil karena kerusakan ekologis yang tidak dapat dipulihkan. Akibat pembukaan lahan skala besar secara cepat, lapisan tanah paling atas lenyap, menyebabkan kadar pirit (FeS₂) dan tingkat keasamannya meningkat. Lebih buruk lagi MRP, MIFEE, maupun KFE semuanya dibangun di atas tanah gambut, yang sudah bersifat asam secara alami (rata-rata level 4,5 pH). Tanah yang asam merupakan tanda dari kurangnya mineral sehingga tanaman sulit untuk tumbuh. Akan tetapi, di bawah tekanan

korporasi agrobisnis dan rezim efisiensi kerja, solusi tercepat dan paling murah untuk masalah tersebut adalah dengan mengintensifkan penggunaan pupuk kimia. Logika ini bermasalah karena dapat melanggengkan siklus kegagalan panen; ketika panen gagal memenuhi tujuannya, petani kecil akan menambahkan lebih banyak pupuk kimia dengan harapan hasil yang lebih baik, yang selanjutnya malah meningkatkan tingkat keasaman tanah. Dengan demikian, degradasi tanah, meskipun diterima secara umum sebagai masalah alami di daerah dengan curah hujan tinggi, juga merupakan masalah sosial-ekonomi. Petani kecil harus menginvestasikan lebih banyak uang untuk pupuk kimia, sementara pada saat yang sama menerima lebih sedikit upah dari megaproyek karena tidak memenuhi target produksinya. Tidak mengherankan jika petani kemudian akan sangat mungkin terjebak dalam hubungan utang antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga mereka saat ini. Dalam kondisi serupa, biasanya muncul pula aktor-aktor rentenir dan pengijon baru yang senantiasa merugikan petani kecil sembari menawarkan ilusi peningkatan produktifitas. Akibatnya, membayar kembali utang dan menyesuaikan gaya hidup mereka akan menimbulkan tantangan bagi kesehatan mental dan fisik petani kecil (Sweet et al., 2013). Penyakit kardiovaskuler petani yang sudah ada sebelumnya karena paparan terhadap bahan kimia pertanian yang tinggi, ditambah dengan konsumsi alkohol dan rokok yang masif, dapat memperparah ancaman pandemi COVID-19 pada mereka. Pada akhirnya, sudah tentu kondisi ini akan berdampak pada status kesejahteraan petani.

PENUTUP

Pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa potensi dampak dari pembukaan lumbung pangan nasional Indonesia

terhadap petani kecil yang akan menjadi pekerja utama. Diprakirakan rencana lumbung pangan nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo akan lebih berpotensi menyakiti petani kecil ketimbang membawa kesejahteraan. Argumen ini didasari dari pembelajaran tiga pengalaman menyejarah Indonesia dalam membangun lumbung pangan nasional dalam kondisi “krisis” yang berbeda-beda. Sebagaimana sudah kami uraikan sebelumnya, terdapat setidaknya empat sumber permasalahan serupa yang kemungkinan akan dihadapi pula oleh pemerintah. Penulis menduga bahwa permasalahan yang sudah lalu akan kembali terjadi karena Presiden Joko Widodo kembali menggunakan pola pembangunan yang serupa untuk membangun lumbung pangan nasional pada tahun 2020 ini. Seruan Presiden untuk menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai momen “reformasi sistem pangan” Indonesia secara besar-besaran rupanya bukan pula sesuatu yang baru. Seruan serupa sudah diteriakkan oleh Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono namun pada akhirnya hanya semakin menyerahkan nasib ketahanan pangan nasional kepada perusahaan agrobisnis yang berorientasi pasar.

Keberhasilan rencana pembangunan lumbung pangan nasional disangsikan berhasil karena kegiatannya terkesan terburu-buru. Artikel ini tidak serta merta menjadi kritik tetapi juga saran hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah jika rencana ini akan benar-benar dijalankan. Pasalnya, memindahkan sekian banyak petani kecil dari Jawa dan Bali—yang secara menyejarah sudah dimiskinkan dan bergizi buruk—dalam situasi pandemi COVID-19 hanya akan meningkatkan status prekariat mereka. Ketika tiba di lokasi lahan lumbung pangan nasional, belum ada struktur pekerjaan dan distribusi lahan yang jelas untuk mereka kelola. Tanpa kedua hal utama ini, petani kecil akan termarginalkan di lokasi baru dan

dilemahkan kemampuannya untuk mengakses pangan. Gaji pun semakin menjadi misteri karena simpang siur kepemilikan lahan, pengatur kuota kerja, dan lain sebagainya. Sekalipun gaji secukupnya, struktur dan infrastruktur penunjang kehidupan sehari-hari petani pun belum pasti didirikan dengan baik. Belum ada pembicaraan mengenai penyediaan tempat tinggal yang memadai (melingkupi akses air, listrik, dan gas), akses kesehatan (seperti rumah sakit, puskesmas) dan akses pendidikan (SD, SMP, SMA). Sebaliknya, pemerintah hanya meyakinkan masyarakat bahwa korporasi agrobisnis, militer dan segala infrastruktur penunjangnya akan disediakan guna mempercepat proses produksi pangan.

Mempercayakan ketahanan pangan Indonesia ke tangan korporasi agrobisnis bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah bangsa. Produksi ekonomi kapitalis menciptakan kontradiksinya sendiri, di mana sistem ini membutuhkan tenaga kerja untuk menghasilkan nilai lebih (surplus) namun di saat yang sama membatasi proses reproduksi sosial yang dibutuhkan tenaga kerja untuk menjaga kualitas hidupnya. Dalam kata lain, kesejahteraan petani kecil dihancurkan untuk menjalankan roda bisnis perusahaan.

Indonesia perlu mengurangi ketergantungan impor komoditas pokok dan membenahi reforma agraria untuk mendistribusikan kembali kepemilikan tanah demi mencapai ketahanan pangan. Petani kecil harus bekerja di lahan mereka sendiri, antara lain untuk keuntungan ekonomi mereka, yang akan berkontribusi pada kesehatan dan status gizi jangka panjang sehingga mereka mampu terlepas dari jerat lingkaran setan kemiskinan. Upaya ini juga mendukung kemampuan Indonesia untuk secara bertahap mencapai kedaulatan pangan melalui sirkuit produksi dan distribusi pangan yang lebih lokal. Dalam usaha kesejahteraan sosial, program-program

pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial harus didasari pada penelitian yang tidak hanya memotret kondisi faktual kontemporer, namun juga latar belakang historis, sosial, budaya, dan politik yang membentuknya. Pemahaman secara holistik ini yang mampu memberi arah terhadap program pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menunjang penulisan artikel ini, Atmaezer H. Simanjuntak didukung oleh Arryman Scholars Initiative dengan pendanaan dari Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF), Rudy G. Erwinsyah didukung oleh In Search of Balance (ISB) Project Indonesia-Norway, dan para donor yang dermawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, B. (1997). “Bargaining” and Gender Relations: Within and Beyond the Household. *Feminist Economics*, 3(1), 1–51.
<https://doi.org/10.1080/135457097338799>
- Aginam, O. (2000). Global Village, Divided World: South-North Gap and Global Health Challenges at Century’s Dawn. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 7, 27.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2019* (No. 16).
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/04/1752/luas-panen-dan-produksi-padi-pada-tahun-2019-mengalami-penurunan-dibandingkan-tahun-2018-masing-masing-sebesar-6-15-dan-7-76-persen.html>
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Kumarian Press.
- Borras, S. M., Hall, R., Scoones, I., White, B., & Wolford, W. (2011). Towards a better understanding of global land grabbing: An editorial introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(2), 209–216.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559005>
- Castañeda, A., Doan, D., Newhouse, D., Nguyen, M. C., Uematsu, H., & Azevedo, J. P. (2016). *Who are the Poor in the Developing World?* The World Bank.
<https://doi.org/10.1596/1813-9450-7844>
- Clapp, J. & Moseley, W.G. (2020): This food crisis is different: COVID-19 and the fragility of the neoliberal food security order. *The Journal of Peasant Studies*, (2020), 1-25.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1823838>
- Conroy, K., Sandel, M., & Zuckerman, B. (2010). Poverty Grown Up: How Childhood Socioeconomic Status Impacts Adult Health: *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics*, 31(2), 154–160.
<https://doi.org/10.1097/DBP.0b013e3181c21a1b>
- Dandekar, A., & Bhattacharya, S. (2017). Lives in Debt: Narratives of Agrarian Distress and Farmer Suicides. *Economic and Political Weekly*, 13.
- Dawe, D. (Ed.). (2012). *The Rice Crisis: Markets, Policies and Food Security* (1st ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781849776684>
- Doak, C. M., Adair, L. S., Bentley, M., Monteiro, C., & Popkin, B. M. (2005). The dual burden household and the nutrition transition paradox. *International Journal of Obesity*, 29(1), 129–136.
<https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0802824>
- Elmhirst, R., Siscawati, M., Basnett, B. S., & Ekowati, D. (2017). Gender and

- generation in engagements with oil palm in East Kalimantan, Indonesia: Insights from feminist political ecology. *The Journal of Peasant Studies*, 44(6), 1135–1157.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1337002>
- Food Security Council, World Food Programme, & Ministry of Agriculture. (2015). *Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia 2015* (p. 196).
<https://www.wfp.org/publications/indonesia-food-security-and-vulnerability-atlas-2015#:~:text=The%202015%20Food%20Security%20and,as%20Indonesia%20has%20prioritized%20stunting.>
- Gerber, J.-F. (2013). The Hidden Consequences of Credit: An Illustration from Rural Indonesia: Hidden Consequences of Credit. *Development and Change*, 44(4), 839–860.
<https://doi.org/10.1111/dech.12045>
- Goldstein, J. (2016). Carbon Bomb: Indonesia's Failed Mega Rice Project. *Environment & Society Portal*.
<http://www.environmentandsociety.org/arcadia/carbon-bomb-indonesias-failed-mega-rice-project>
- Grosse, S. D., & Roy, K. (2008). Long-term economic effect of early childhood nutrition. *The Lancet*, 371(9610), 365–366. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60180-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60180-4)
- Hadley, C., Tessema, F., & Muluneh, A. T. (2012). Household food insecurity and caregiver distress: Equal threats to child nutritional status? *American Journal of Human Biology*, 24(2), 149–157.
<https://doi.org/10.1002/ajhb.22200>
- Hall, D. (2011). Land grabs, land control, and Southeast Asian crop booms. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 22.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607706>
- Hanandita, W., & Tampubolon, G. (2015). The double burden of malnutrition in Indonesia: Social determinants and geographical variations. *SSM - Population Health*, 1, 16–25.
<https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2015.10.02>
- Harvey, D. (2017). The “New” Imperialism: Accumulation by Dispossession. In B. Ollman & K. B. Anderson (Eds.), *Karl Marx* (1st ed., pp. 213–237). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315251196-10>
- Hoddinott, J., Maluccio, J. A., Behrman, J. R., Flores, R., & Martorell, R. (2008). Effect of a nutrition intervention during early childhood on economic productivity in Guatemalan adults. *The Lancet*, 371(9610), 411–416.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60205-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60205-6)
- International Labor Organization. (2020). *ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fourth edition* (p. 24).
<https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm>
- IPES-Food. (2020). *COVID-19 and the crisis in food systems: Symptoms, causes, and potential solutions*. http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/COVID-19_CommuniqueEN.pdf
- Ito, T., Rachman, N. F., & Savitri, L. A. (2014). Power to make land dispossession acceptable: A policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia. *The Journal of Peasant Studies*, 41(1), 29–50.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2013.873029>

- Julia, & White, B. (2012). Gendered experiences of dispossession: Oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan. *The Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 995–1016. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.676544>
- Laksono, A. D., & Wulandari, R. D. (2020). The barrier to maternity care in rural Indonesia. *Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.1007/s10389-020-01274-3>
- Lee, J., Houser, R. F., Must, A., de Fulladolsa, P. P., & Bermudez, O. I. (2012). Socioeconomic disparities and the familial coexistence of child stunting and maternal overweight in Guatemala. *Economics & Human Biology*, 10(3), 232–241. <https://doi.org/10.1016/j.ehb.2011.08.002>
- Li, T. M. (2018). After the land grab: Infrastructural violence and the “Mafia System” in Indonesia’s oil palm plantation zones. *Geoforum*, 96, 328–337. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.10.012>
- Limin, S. H., Jentha, & Ermiasi, Y. (2007). History of the Development of Tropical Peatland in Central Kalimantan, Indonesia. *Tropics*, 16(3), 291–301. <https://doi.org/10.3759/tropics.16.291>
- Lu, Y. (2010). Rural-urban migration and health: Evidence from longitudinal data in Indonesia. *Social Science & Medicine*, 70(3), 412–419. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.10.028>
- McMichael, P. (2008). Peasants Make Their Own History, But Not Just as They Please. . . *Journal of Agrarian Change*, 8(2–3), 205–228. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2008.00168.x>
- Mohanty, B. (2005). ‘We are Like the Living Dead’: Farmer Suicides in Maharashtra, Western India. *Journal of Peasant Studies*, 32(2), 243–276. <https://doi.org/10.1080/03066150500094485>
- Nixon, R. (2011). *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Harvard University Press.
- Nkrumah, K. (1974). *Neo-colonialism: The Last Stage of Imperialism*. Panaf.
- O’Laughlin, B. (2017, April). *Capital, Labour and the Politics of Inequality in Global Public Health*. Global Labour Column. <http://column.global-labour-university.org/>
- Phillips, C. A., Caldas, A., Cleetus, R., Dahl, K. A., Declet-Barreto, J., Licker, R., Merner, L. D., Ortiz-Partida, J. P., Phelan, A. L., Spanger-Siegfried, E., Talati, S., Trisos, C. H., & Carlson, C. J. (2020). Compound climate risks in the COVID-19 pandemic. *Nature Climate Change*. <https://doi.org/10.1038/s41558-020-0804-2>
- Popkin, B. M. (2001). Nutrition in transition: The changing global nutrition challenge. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 10, 13–18.
- Ratcliffe, C. (2015). *Child Poverty and Adult Success* (p. 15). The Urban Institute.
- Roemling, C., & Qaim, M. (2013). Dual burden households and intra-household nutritional inequality in Indonesia. *Economics & Human Biology*, 11(4), 563–573. <https://doi.org/10.1016/j.ehb.2013.07.001>
- Satterthwaite, D., McGranahan, G., & Tacoli, C. (2010). Urbanization and its implications for food and farming.

- Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 365(1554), 2809–2820.
<https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0136>
- Savitri, L. A. (2013). *Korporasi dan Politik Perampasan Tanah*. INSISTPress.
- Savitri, L. A., & Prawirosusanto, K. M. (2015). Kebun Pangan Skala Luas di Ketapang: Menggambar Angan-Angan tentang Surplus Produksi. *Jurnal Analisis Sosial*, 19(1).
https://www.academia.edu/21785901/Kebun_Pangan_Skala_Luas_di_Ketapang_Menggambar_Angan-Angan_tentang_Surplus_Produksi
- Simanjuntak, A. H., & Erwinsyah, R. G. (2020). Who Really Feeds the World?: Indonesia's Mega Food Estates Plan and Peasants' Welfare in Times of COVID-19 Pandemic. *20th Northeast Conference on Indonesia: Public Health and Well-Being in Indonesia, COVID-19 and Beyond*. Cornell University.
- Sleet, P. (2020). *The State of Indonesian Food Security and Nutrition* (p. 5). Independent Strategic Analysis of Australia's Global Interest.
- Soekirman. (2001). Food and nutrition security and the economic crisis in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 10, 57–61.
- Studdert, L. J., Frongillo, E. A., & Valois, P. (2001). Household Food Insecurity Was Prevalent in Java during Indonesia's Economic Crisis. *The Journal of Nutrition*, 131(10), 2685–2691.
<https://doi.org/10.1093/jn/131.10.2685>
- Subramanian, S., Perkins, J. M., & Khan, K. T. (2009). Do burdens of underweight and overweight coexist among lower socioeconomic groups in India? *The American Journal of Clinical Nutrition*, 90(2), 369–376.
<https://doi.org/10.3945/ajcn.2009.27487>
- Sweet, E., Nandi, A., Adam, E. K., & McDade, T. W. (2013). The high price of debt: Household financial debt and its impact on mental and physical health. *Social Science & Medicine*, 91, 94–100.
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.05.009>
- The Lancet Global Health. (2020). Food insecurity will be the sting in the tail of COVID-19. *The Lancet Global Health*, 8(6), e737.
[https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30228-X](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30228-X)
- Timmer, P. (2008). Food Security in Indonesia: Current Challenges and the Long-Run Outlook. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1112807>
- Vaezghasemi, M. (2017). *Nutrition transition and the double burden of malnutrition in Indonesia: A mixed method approach exploring social and contextual determinants of malnutrition*. Umeå Universiteit, Dept. of Public Health and Clinical Medicine.
- Vaezghasemi, M., Öhman, A., Eriksson, M., Hakimi, M., Weinehall, L., Kusnanto, H., & Ng, N. (2014). The Effect of Gender and Social Capital on the Dual Burden of Malnutrition: A Multilevel Study in Indonesia. *PLoS ONE*, 9(8), e103849.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0103849>
- Wagmiller Jr., R. L., & Adelman, R. M. (2009). *Childhood and Intergenerational Poverty: The Long-Term Consequences of Growing Up Poor* (p. 7). National Center for Children in Poverty.
- Wells, J. C. K. (2012). Obesity as malnutrition: The role of capitalism in the obesity global epidemic. *American Journal of*

Human Biology, 24(3), 261–276.
<https://doi.org/10.1002/ajhb.22253>

White, B. (2020). *Agriculture and the Generation Problem* (p. 155 Pages). Fernwood Publishing.

World Bank. (2013). *The Double Burden of Malnutrition in Indonesia* (No. 76192-ID).
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17007> License: CC BY 3.0 IGO.”

Yu, S., & Hannum, E. (2007). Food for Thought: Poverty, Family Nutritional Environment, and Children’s Educational Performance in Rural China. *Sociological Perspectives*, 50(1), 53–77.
<https://doi.org/10.1525/sop.2007.50.1.53>

DUKUNGAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL (DKJPS) DALAM PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT (MHPSS) IN ELDERLY SOCIAL SERVICES DURING THE PANDEMIC OF COVID-19

Aris Tristanto

Program Doktorat Studi Pembangunan
Program Pascasarjana Universitas Andalas
Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25175, Indonesia
E-mail: tristanto_aris@yahoo.com

Abstrak

Pandemi COVID-19 berdampak pada aspek fisiologis, psikologis, dan sosial lanjut usia. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) dalam pelayanan sosial lanjut usia pada masa pandemi COVID-19. Analisis dalam artikel ini dilakukan melalui kajian pustaka. Instrumen penulis dalam artikel ini adalah daftar check list, skema penulisan dan format catatan penulisan. Teknik analisis dalam artikel ini adalah metode analisis isi. DKJPS kepada lanjut usia dapat dilakukan melalui pelayanan sosial lanjut usia berbasis institusi (*institutional based*), pelayanan sosial lanjut usia berbasis komunitas (*community based*), dan layanan berbasis rumah tangga (*home-based*). Bentuk DKJPS kepada lanjut usia berbasis institusi adalah pengoptimalan kegiatan bimbingan mental, agama, dan sosial bagi lanjut usia kategori mandiri. Sedangkan untuk lanjut usia yang tidak memiliki kemandirian (*bedridden*), bentuk DKJPS yang dapat diberikan adalah pelayanan yang lebih intensif terutama dalam hal kesehatan. Terkait bentuk DKJPS kepada lanjut usia berbasis komunitas adalah pendamping lanjut usia oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Dalam melakukan pendampingan sosial terkait DKJPS pendamping dapat mengajarkan kepada lanjut usia dan keluarganya tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Bagi lanjut usia yang terlantar karena tinggal sendiri di rumah, pendamping sosial harus mampu menggerakkan kelompok dukungan sosial di lingkungannya. Sedangkan bentuk DKJPS kepada lanjut usia berbasis rumah tangga adalah mengatur aktifitas yang tepat tanpa mengurangi kemandirian dari lanjut usia. Implikasi teoritis dari penulisan artikel ini yaitu lanjut usia dikatakan sehat secara mental bukan hanya terhindar dari gejala gangguan dan penyakit jiwa, tetapi berkaitan dengan penyesuaian diri yang aktif dalam menghadapi dan mengatasi masalah dengan kondisi baru.

Kata Kunci: lanjut usia, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS), COVID-19.

Abstract

The COVID-19 pandemic has an impact on the physiological, psychological and social aspects of the elderly. This article aims to describe the form of mental and psychosocial health support (MHPSS) in social services for the elderly during the COVID-19 pandemic. The analysis in this article was carried out through a literature review. The writer's instruments in this article are the check-list, writing scheme and writing notes format. The analysis technique in this article is the content analysis method. MHPSS for the elderly can be done through institutional-based elderly social services, community-based elderly social services, and home-based services. The form of MHPSS for the institution-based elderly is the optimization of mental, religious and social guidance activities for the elderly in the independent category. Meanwhile, for the elderly who do not have independence (bedridden), the form of MHPSS that can be provided is more intensive services, especially in terms of health. Related to the form of MHPSS for community-based seniors is elderly companion by the Elderly Social Welfare Institution. In providing social assistance related to MHPSS, the

facilitator can teach the elderly and their families about Clean and Healthy Living Behavior. For elderly people who are neglected because they live alone at home, social assistants must be able to mobilize social support groups in their environment. Meanwhile, the household-based form of MHPSS for the elderly is to organize appropriate activities without reducing the independence of the elderly. The theoretical implication of writing this article is that the elderly are said to be mentally healthy, not only avoiding symptoms of mental disorders and illnesses, but related to active adjustment in dealing with and overcoming problems with new conditions..

Keywords: *elderly, mental health and psychosocial support (MHPSS), COVID-19.*

PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers terkait perkembangan penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* mengajak masyarakat Indonesia untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan membiasakan diri melakukan kegiatan bekerja, belajar, hingga ibadah dari rumah. Ajakan presiden direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti himbauan untuk hidup bersih dan sehat, penerapan *sosial distancing* dan *physical distancing* hingga aturan terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penerapan *sosial distancing* dan *physical distancing* hingga aturan terkait dengan PSBB tersebut, dapat mengganggu kesehatan mental seseorang karena adanya perubahan dalam keseharian. Realitas ini sejalan dengan asumsi dasar dari teori disonansi kognitif (Festinger, 1957, dalam Cooper, 2007) bahwa manusia pada dasarnya tidak menyukai ketidakkonsistenan atau ketidakserasian antara apa yang selama ini diyakini dengan perilaku yang dihasilkannya. Hal ini akan menimbulkan ketidaknyamanan atau yang disebut Festinger sebagai keadaan disonan. Semakin kuat ketidakkonsistenan yang dihadapi, akan semakin menggelisahkan, sehingga mendorong seseorang untuk bertindak guna mengurangi ketidakkonsistenan tersebut.

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) melakukan survei mengenai kesehatan mental

selama pandemi COVID-19 melalui swaperiksa yang dilakukan secara daring. Pemeriksaan dilakukan terhadap 1.552 responden dengan usia minimal 14 tahun dan maksimal 71 tahun. Hasil survei menunjukkan, sebanyak 63 persen responden mengalami cemas dan 66 persen responden mengalami depresi akibat pandemi COVID-19 (PDSKJI, 2020). Data tersebut menggambarkan bahwa permasalahan kesehatan mental, seperti cemas dan depresi, akibat pandemi COVID-19 dirasakan secara nyata oleh masyarakat Indonesia pada saat ini.

Salah satu kelompok masyarakat yang rentan mengalami permasalahan kesehatan mental dan fisik selama pandemi COVID-19 adalah lanjut usia. Hal tersebut disebabkan karena lanjut usia mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan asing dengan lingkungan sosialnya (Tristanto, 2020). Padahal Salah satu tugas lanjut usia adalah membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia dan menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luwes. Lanjut usia sebagai kelompok masyarakat yang paling rentan dan memiliki resiko paling tinggi dibandingkan yang lainnya, karena adanya perubahan kondisi fisik, sosial dan psikologis, serta penurunan produksi hormon dalam tubuh yang berakibat pada menurunnya fungsi organ-organ di dalam tubuhnya. Menurut pakar geriatri UGM, Dr. dr Probosuseno, Sp.PD., K-Ger., S.E., kapasitas fungsional organ-organ tubuh pada lanjut usia telah mengalami penurunan akibat penuaan sehingga rentan terhadap berbagai macam

infeksi bakteri, virus maupun penyakit termasuk COVID-19 (Ika, 2020).

Penurunan produksi hormon yang dialami oleh lanjut usia merupakan masalah pada aspek fisiologis yang menyebabkan kualitas hidup lanjut usia terganggu dan berakibat pada penyakit kronis. Pada masa pandemi COVID-19, WHO mengatakan bahwa lanjut usia yang telah memiliki penyakit tertentu seperti kanker, paru-paru, dan diabetes, lebih rentan tertular karena kekebalan tubuh yang mereka miliki terus menurun. Hal senanda juga disampaikan oleh Kemenkes RI (2020) yaitu sistem imun yang sudah melemah ditambah adanya penyakit kronis pada lanjut usia dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi virus corona maupun risiko virus untuk menimbulkan gangguan yang parah lainnya.

Selain masalah di aspek fisiologis, pada masa pandemi COVID-19 lanjut usia juga harus dihadapkan pada masalah di aspek psikologis. Menurut Hooyman (2011), aspek psikologis yang dihadapi usia lanjut pada umumnya meliputi: kecemasan, keterasing dari lingkungan, perasaan tidak berguna karena menurunnya kemampuan kognitif, ketidakberdayaan, dan sindrom sarang kosong (Siti Partini, 2011). Kecemasan, pada lanjut usia di masa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan informasi yang salah mengenai pandemi COVID-19 sehingga menimbulkan kecemasan atau stres pada lanjut usia. Menurut Qiu (2020) dalam hasil studinya mengatakan bahwa banyaknya informasi yang salah terutama mengenai tingkat kematian tinggi pada lanjut usia berdampak pada psikologis mereka.

Penerapan *sosial distancing* dan *physical distancing*, merupakan pemicu timbulnya masalah keterasingan pada lanjut usia di masa pandemi. Hal tersebut karena lanjut usia mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. Padahal salah satu tugas

lanjut usia adalah membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia dan menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luwes (Hurlock, 2006). Menurut dr. Zulvia Oktanida Syarif, SpKJ, *physical distancing* menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan aktivitas rutin yang biasa dilakukan dan harus menjaga jarak dengan keluarga, teman, atau kerabat. Kondisi ini dapat menimbulkan perasaan keterasingan, kesepian, bosan, cemas karena tidak dapat bertemu atau berdekatan fisik dengan orang yang disayang sehingga berakibat pada masalah psikologis seseorang (Novka, 2020).

Selain itu, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan larangan mudik 2020 yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, namun dapat memicu terjadinya masalah pada aspek psikologis terkait dengan sindrom sarang kosong. Menurut Direktur Pusat Kajian Keluarga dan Kelanjutusiaan (Cefas) Universitas Respati Indonesia, Sudibyo Alimoeso, penerapan PSBB dan larangan mudik dapat memicu atau memperburuk sindrom sarang kosong (Zaid, 2020). Sindrom sarang kosong banyak dialami oleh lanjut usia yang tinggal jauh dari anaknya. Momen lebaran merupakan hal yang sangat ditunggu oleh lanjut usia karena kunjungan dari anak dan keluarga. Sementara pada masa pandemi COVID-19 anak dan cucu tidak dapat bertemu dengan orang tua (lanjut usia) karena ada penerapan PSBB

Perasaan tidak berguna karena menurunnya kemampuan kognitif juga dialami oleh lanjut usia di tengah pandemi. Hal tersebut dapat berakibat pada sulitnya lanjut usia untuk dapat mencerna beberapa imbauan yang diberikan pemerintah terkait upaya menjaga diri, seperti menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), *sosial distancing* dan *physical distancing* dalam melakukan kegiatan sehari-hari serta

mengurangi aktivitas di luar rumah agar tidak terpapar virus corona.

Di sisi lain, lanjut usia juga mengalami masalah pada aspek sosial terkait dengan finansial. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Howell (2020) dalam tulisannya menyatakan bahwa selama masa pandemi COVID-19, masalah finansial dan akses layanan kesehatan lanjut usia di Amerika Serikat semakin meningkat. Hal ini disebabkan berkurangnya kesempatan untuk berusaha, dan minimnya uang pensiun atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Menurut Iswara (2020) fenomena serupa pun terjadi di Indonesia, dimana sebanyak 1.400 lanjut usia yang tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional. Bahkan lebih dari 80 persen lanjut usia di Indonesia tidak memiliki jaminan pendapatan, dengan hanya sekitar 12 persen dari sekitar 24 juta warga yang ditanggung melalui program dana pensiun.

Hal senanda juga disampaikan oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pungky Sumadi, (2020) mengatakan bahwa pembatasan beraktivitas di luar rumah juga berdampak besar bagi ekonomi lanjut usia. Terlebih, hanya 10,5 persen lanjut usia yang punya tabungan pensiun. Sementara itu, biaya hidup lanjut usia biasanya meningkat untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan perawatan apabila sakit.

Dengan berkurangnya pendapatan, kedudukan lanjut usia akan beralih dari orang yang “berpenghasilan” menjadi orang yang “tergantung” pada anak-anak mereka. Karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada aspek ekonomi dengan menurunnya ataupun hilangnya penghasilan, sehingga pemberian yang didapat lanjut usia dari anak-anak di rantau juga berkurang. Demikian halnya menurut Adhi Santika, (2020), menyatakan bahwa ada 32 persen lanjut usia yang bergantung dan dapat

kiriman dari anak serta menantu dan itu pun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Meski tak semua bantuan dari keluarga itu akan konsisten, terutama terkait besaran nilai bantuan. Namun hal tersebut berakibat pada pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia menjadi terganggu.

Jika seorang lanjut usia mampu memenuhi tugas perkembangannya dengan baik, maka lanjut usia tersebut akan merasakan kesejahteraan dalam hidupnya. Begitu pula sebaliknya, jika seorang lanjut usia tidak dapat memenuhi tugas perkembangannya maka kesejahteraan lanjut usia tersebut akan menurun sehingga berdampak pada masalah kesehatan jiwa dan gangguan psikologis pada diri lanjut usia. Oleh sebab itu perlu adanya penanganan lebih lanjut yang tidak hanya menasar pada penyembuhan fisik, tetapi juga kesejahteraan. Hal tersebut dapat berbentuk Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS).

DKJPS digunakan oleh sistem kemanusiaan global sebagai istilah untuk berbagai pihak yang menanggapi kedaruratan seperti wabah COVID-19. Dalam melaksanakan DKJPS pekerja sosial dan berbagai profesi lain dapat mengacu pada panduan *Inter Agency Standing Committee* (IASC). Di dalam panduan tersebut menganjurkan agar berbagai tingkatan intervensi diintegrasikan dalam kegiatan respons wabah. Tingkatan-tingkatan ini disesuaikan dengan spektrum kebutuhan kesehatan jiwa dan psikososial yang tergambar dalam piramidi intervensi.

DKJPS mengintegrasikan pendekatan biologis, psikologis, dan sosiokultural di bidang kesehatan, sosial, pendidikan dan komunitas, serta untuk menekankan perlunya pendekatan-pendekatan yang beragam dan saling melengkapi dari berbagai profesi dalam memberikan dukungan yang sesuai. Prinsip utama yang paling penting untuk diterapkan

dalam melaksanakan DKJPS adalah tidak menyakiti, menjunjung hak asasi manusia dan kesetaraan, menggunakan pendekatan partisipatif, meningkatkan sumber daya dan kapasitas yang sudah ada, menjalankan intervensi berlapis dan menjalankan tugas dengan sistem dukungan terintegrasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba menggambarkan bentuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) dalam pelayanan sosial lanjut usia pada masa pandemi COVID-19. Analisis dalam artikel ini dilakukan melalui kajian pustaka dengan cara menelaah sumber terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan tanpa turun langsung kelapangan. Menurut Sugiyono (2012) kajian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial.

Adapun langkah-langkah dalam kajian pustaka ini adalah: pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data, dan penyusunan laporan. Sedangkan instrumen penulisan dalam artikel ini adalah daftar *check list* klasifikasi bahan tulisan, skema/peta penulisan dan format catatan penulisan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1993). Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan (Sabarguna, 2005).

Tulisan ini diharapkan memberikan manfaat dan masukan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam rangka mengkaji dan menetapkan

berbagai kebijakan terkait pelayanan kepada lanjut usia di tengah pandemi COVID-19.

PEMBAHASAN

Lanjut Usia

Menurut WHO, lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lanjut usia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lanjut usia ini akan terjadi suatu proses yang disebut *aging process* atau proses penuaan. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan tersebut pada umumnya mengaruh pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia. Sehingga secara umum akan berpengaruh pada *activity of daily living* (Fatmah, 2010).

Batasan umur pada lanjut usia dari waktu ke waktu berbeda. Menurut WHO lanjut usia meliputi:

- 1) Usia pertengahan (*middle age*) antara usia 45 sampai 59 tahun.
- 2) Lanjut usia (*elderly*) antara usia 60 sampai 74 tahun.
- 3) Lanjut usia tua (*old*) antara usia 75 sampai 90 tahun.
- 4) Usia sangat tua (*very old*) di atas usia 90 tahun.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan Mapiere (1983) berpendapat lanjut usia merupakan suatu proses alam yang tidak dapat dihindarkan dan merupakan ketentuan dari Allah, sehingga setiap

orang pada saatnya akan mengalaminya. Selain itu, pada masa ini akan tampak kelemahan seseorang karena mengalami masalah pada aspek fisiologis, psikologis, dan sosial.

Hal senada juga disampaikan oleh Rita (2008) yaitu menjadi tua ditandai oleh kemunduran biologis yang terlihat dari gejala kemunduran fisik, di antaranya adalah tumbuhnya uban, kulit yang mulai keriput, penurunan berat badan, tanggalnya gigi sehingga mengalami kesulitan makan, penglihatan dan pendengaran berkurang, mulai lelah dan terjadi timbunan lemak terutama di bagian perut dan pinggul. Selain itu juga muncul perubahan yang menyangkut kehidupan psikologi lanjut usia, seperti perasaan tersisih, tidak dibutuhkan lagi, ketidakikhlasan menerima kenyataan baru, misalnya penyakit yang tidak kunjung sembuh atau kematian pada pasangan.

Pengertian Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS)

Merujuk pada masalah yang dihadapi lanjut usia di tengah pandemi COVID-19, hendaknya ada sebuah penanganan holistik oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial (Kesos) dan berbagai profesi lain yang terkait. Penanganan tersebut tidak hanya menasar pada penyembuhan fisik, tetapi juga kesejahteraan lanjut usia. Dalam mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dalam berbentuk Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS).

DKJPS atau *Mental Health and Psychosocial Support* (MHPSS) digunakan oleh Sistem kemanusiaan global sebagai istilah payung untuk berbagai pihak dalam merespons kondisi kedaruratan, salah satunya adalah pandemi COVID-19. Merujuk pada modul Pendampingan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Situasi Kedaruratan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI, pada tahun 2014,

ke daruratan adalah situasi darurat baik yang diakibatkan oleh bencana maupun bukan bencana yang menyebabkan kerugian harta benda, pengungsian, terbatasnya akses terhadap bantuan kemanusiaan, rusaknya struktur keluarga dan sosial, terkikisnya nilai-nilai tradisional, terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan perlindungan yang dapat menyebabkan kegagalan dalam memberikan perlindungan terhadap lanjut usia dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, serta ketidakberdayaan.

Inter-Agency Standing Committee (IASC) atau forum antar-lembaga mitra kemanusiaan PBB, mengeluarkan panduan DKJPS dalam situasi kedaruratan. Di dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa dukungan jenis apa pun dari luar atau lokal yang bertujuan melindungi atau meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mencegah serta menangani kondisi kesehatan jiwa dan psikososial. DKJPS dalam situasi kedaruratan mengedepankan berbagai tingkatan intervensi agar diintegrasikan dalam kegiatan respons pandemi. Tingkatan-tingkatan ini disesuaikan dengan spektrum kebutuhan kesehatan jiwa dan psikososial dan digambarkan dalam piramida intervensi.

Piramida intervensi, DKJPS memiliki empat level yaitu: Level pertama, adalah promotif berupa pertimbangan sosial dalam layanan dasar dan keamanan yang dilakukan sebelum ada potensi masalah. Level kedua, adalah preventif yaitu memperkuat komunitas dan dukungan sosial. Level ketiga, dalam intervensi itu adalah pemantauan, identifikasi dan pelayanan psikososial yaitu dukungan tidak terspesialisasi yang berfokus pada individu. Level keempat, adalah intervensi yang dilakukan oleh tenaga spesialis. Dari piramida intervensi terlihat bahwa DKJPS mengintegrasikan pendekatan biologis, psikologis, dan sosiokultural di bidang kesehatan, sosial, pendidikan dan komunitas,

serta untuk menekankan perlunya pendekatan-pendekatan yang beragam dan saling melengkapi dari berbagai profesi dalam memberikan dukungan yang sesuai.

Prinsip dalam Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS)

Secara umum prinsip-prinsip inti dalam DKJPS adalah tidak menyakiti, menjunjung hak asasi manusia dan kesetaraan, menggunakan pendekatan partisipatif, meningkatkan sumber daya dan kapasitas yang sudah ada, menjalankan intervensi berlapis dan menjalankan tugas dengan sistem dukungan terintegrasi.

Terkait dengan respon atas wabah COVID-19, DKJPS memiliki sejumlah prinsip yang komprehensif yaitu:

1) Konteks yang lebih luas.

Respons DKJPS harus didasarkan pada konteks, maksudnya dalam setiap konteks, perlu untuk memahami kebutuhan kelompok tertentu, seperti populasi yang mungkin mengalami hambatan dalam mengakses informasi, mendapatkan perawatan dan dukungan atau paling rentan terkena risiko infeksi. Dukungan DKJPS harus dapat diakses disesuaikan dengan tepat untuk kebutuhan anak-anak, orang dewasa, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

2) Memperkuat aspek DKJPS dalam respon COVID-19.

DKJPS harus menjadi komponen inti dari setiap respon kesehatan masyarakat. Intervensi kesehatan mental harus dilakukan dalam layanan kesehatan umum (termasuk layanan kesehatan primer), selain itu juga dapat diselenggarakan dalam struktur layanan lain yang sudah ada sebelumnya di masyarakat.

3) Penekanan pada koordinasi. Mekanisme koordinasi yang jelas dan pelibatan keahlian teknis DKJPS adalah hal yang paling penting. Berbagi informasi dan perangkat DKJPS antara semua sektor/aktor kunci dalam situasi darurat sangat penting selama wabah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.

4) Layanan yang tersedia.

Penting untuk memetakan keahlian dan struktur DKJPS yang ada di setiap wilayah, termasuk layanan kesehatan untuk umum yang disediakan oleh sektor swasta, kesejahteraan sosial dan layanan pendidikan. Pemetaan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengumpulkan, memobilisasi dan mengoordinasikan sumber daya.

5) Membangun struktur layanan di tingkat lokal.

Aktor-aktor lokal, seperti tokoh masyarakat yang dipercaya dan dihormati dan mungkin sudah berperan sebagai penyedia layanan di lini depan di dalam komunitas mereka. Para aktor ini perlu didukung dengan memberikan pengetahuan COVID-19 serta keterampilan DKJPS seperti dukungan psikologis awal (DPA) dan bagaimana cara merujuk individu yang mungkin memerlukan dukungan lebih khusus.

6) Lingkungan yang melindungi.

Layanan *hotline* lewat telepon dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mendukung orang-orang di komunitas yang merasa khawatir atau tertekan. Penting untuk memastikan bahwa staf/relawan *hotline* dilatih dan disupervisi tentang DKJPS, misalnya dukungan psikologis awal dan memiliki informasi terkini tentang wabah COVID-19 untuk menghindari

bahaya yang tidak semestinya bagi penelepon.

7) Pendekatan untuk seluruh masyarakat.

Pendekatan untuk seluruh masyarakat memerlukan penanganan kebutuhan DKJPS dari seluruh populasi yang terkena dampak terlepas dari hal-hal terkait kontak langsung atau tidak langsung dengan virus, ras/etnis, usia jenis kelamin, pekerjaan atau hubungan tertentu.

8) Perspektif jangka panjang.

Keadaan darurat dapat menyebabkan munculnya atau adanya sumber daya, yang menciptakan peluang penting untuk memperkuat perangkat kesehatan mental, perawatan sosial dan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.

Implementasi Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS) dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial. Menurut Muhidin (1992) pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial dan sebagainya.

Pengertian pelayanan sosial lanjut usia secara khusus dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor. 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, pada pasal 1 dijelaskan bahwa pelayanan sosial lanjut

usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Arah kebijakan pelayanan dan perlindungan lanjut usia pada saat ini mengacu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu memperkuat skema perlindungan bagi penduduk lanjut usia.

Skema tersebut lebih diarahkan pada penyediaan layanan *long term care (LTC)* bagi lanjut usia. Layanan tersebut dianggap perlu karena lanjut usia mengalami kondisi kronis, penurunan fungsional, dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari (*Activities of Daily Living* atau ADL), sehingga mereka memiliki ketergantungan tinggi. Layanan LTC melibatkan tiga komponen, yaitu pemerintah melalui pelayanan sosial lanjut usia berbasis institusi (*institutional based*), masyarakat melalui pelayanan sosial lanjut usia berbasis komunitas (*Community based*), dan layanan berbasis rumah tangga (*Home-Based*) (Kementerian PPN dan Bappenas, 2015).

Pelayanan sosial lanjut usia berbasis institusi di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk *Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU)* ataupun *Panti Sosial Tresna Werha (PSTW)*. Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 pasal 7 menjelaskan bahwa pelayanan dalam panti dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia. Pelayanan sosial berbasis institusi umumnya melayani lanjut usia yang mengalami tingkat kerentanan sangat tinggi yaitu: 1) Lanjut usia yang masih mandiri dan mengalami keterlantaran dijalanan 2) Lanjut usia yang sudah tidak memiliki kemandirian yang tidak mungkin dilayani melalui pelayanan sosial berbasis rumah tangga dan berbasis komunitas.

Adapun jenis pelayanan yang diberikan dalam panti, meliputi: 1) pemberian tempat tinggal yang layak; 2) jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan; 3) pengisian waktu luang termasuk rekreasi; 4) bimbingan mental, sosial, keterampilan, agama; dan 5) pengurusan pemakaman atau sebutan lain.

Di tengah pandemi COVID-19 pelayanan yang diberikan oleh panti kepada lanjut usia perlu ditingkatkan, peningkatan pelayanan tersebut dapat ditekankan kearah DKJPS seperti pelayanan kesehatan rutin dan pemberian obat-obatan yang dibutuhkan. Hal tersebut perlu untuk dilakukan mengingat lanjut usia rentan terhadap penyakit terutama bagi mereka yang menderita demensia sedang dan lanjut. Selain itu, hal yang tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan lanjut usia yang tinggal di dalam panti pada masa pandemi COVID-19 adalah berjemur di pagi hari. Manfaat dari kegiatan ini adalah agar tubuh memperoleh asupan vitamin D dari paparan sinar UV. Kegiatan tersebut berguna untuk kesehatan dan mencegah penyakit. Waktu yang baik untuk berjemur adalah di pagi hari pukul 10.00 dengan rentang waktu 10-15 menit.

Selain pelayanan kesehatan, DKJPS kepada lanjut usia yang berada di panti dapat dilakukan melalui pengoptimalan kegiatan bimbingan mental, agama dan sosial. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah psikologis lanjut usia. Sebagaimana telah diketahui bahwa kondisi kejiwaan lanjut usia yang tinggal di dalam panti berbeda dengan lanjut usia yang tinggal di luar panti.

Dalam bimbingan mental lanjut usia diajak untuk melupakan hal-hal yang membuat sedih, putus asa, kesepian, bosan dan selalu diajak untuk mengingat hal-hal yang sangat berarti selama hidup. Fokus bimbingan mental adalah mengarahkan lanjut usia untuk mengingat masa lalu yang menyenangkan,

terutama sebagai kekuatan diri sehingga dapat meningkatkan *self-esteem* lanjut usia, dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mencegah serta menangani kondisi kesehatan jiwa dan psikososial lanjut usia.

Selain itu, untuk menekan masalah psikologis lanjut usia akibat dari diberlakukannya aturan PSBB, dan larangan mudik 2020 sehingga berimplikasi pada memperburuk sindrom sarang kosong (*empty nest syndrome*) karena peluang lanjut usia untuk berjumpa saat lebaran semakin kecil, maka hendaknya pihak panti memfasilitasi dan mempertahankan komunikasi lanjut usia dengan anggota keluarga melalui berbagai media.

Bimbingan psikologis kurang optimal apabila tidak diimbangi dengan bimbingan agama. Menurut Musnamar (1992) tujuan bimbingan agama yaitu : Pertama, membantu individu atau kelompok mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan keagamaan antara lain yaitu dengan membantu individu menyadari fitrah manusia. Kedua, membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan keagamaannya, antara lain yaitu dengan cara: membantu individu memahami problem yang dihadapi, membantu individu memahami situasi dan kondisi dirinya dan lingkungannya, membantu individu memahami dan menghayati berbagai cara untuk mengatasi berbagai problem kehidupan. Ketiga, membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan yang dihadapinya.

Metode yang dapat digunakan dalam bimbingan agama adalah bimbingan secara individu maupun kelompok. Bimbingan agama secara individu memungkinkan lanjut usia mendapatkan layanan langsung dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah yang sifatnya pribadi. Bimbingan ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik percakapan pribadi

melalui dialog langsung dan tatap muka dengan lanjut usia. Bimbingan agama secara kelompok dapat dilakukan dengan teknik-teknik diskusi kelompok, dan sosiodrama dengan tetap memperhatikan jarak fisik.

Dalam memberikan bimbingan agama harus sejalan dengan bimbingan sosial. Menurut Gunarsa (2007) bimbingan sosial bertujuan untuk membantu individu mengatasi berbagai masalah dan kesulitan dalam kehidupan sosialnya, sehingga ia mampu mengadakan hubungan-hubungan sosial dengan baik. Ditengah pandemi COVID-19 bimbingan sosial kepada lanjut usia dapat dilakukan melalui kegiatan psikoedukasi.

Kegiatan psikoedukasi dapat dilakukan dalam bentuk memberikan pendidikan, informasi, dan pemahaman kepada para lanjut usia seputar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait situasi yang terjadi saat ini dengan cara sederhana dan mudah dimengerti. Selain itu dalam psikoedukasi juga dapat dilakukan melalui pengajaran kepada lanjut usia terkait dengan pentingnya *sosial distancing* dan *physical distancing*, serta cara Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti, mencuci tangan yang benar, menggunakan masker yang benar, etika yang benar pada saat batuk atau bersin.

Untuk lanjut usia yang tinggal di dalam panti dan tidak memiliki kemandirian (*bedridden*), bentuk DKJPS yang dapat diberikan adalah pelayanan yang lebih intensif terutama dalam kesehatan. Untuk itu diperlukan tenaga pelayanan profesional seperti Dokter Spesialis Geriatri untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan; Psikolog atau Psikiater untuk mengidentifikasi kondisi emosional dan psikologis; dan pekerja sosial untuk mengidentifikasi masalah terkait interaksi sosial dengan lingkungannya. Dalam tahap treatment besar kemungkinan setiap jenis layanan harus

diberikan secara individual, karena masalah yang dihadapi lanjut usia kemungkinan berbeda-beda. Oleh karenanya, jumlah tenaga pelayanan yang diperlukan akan lebih banyak. Dalam melakukan perawatan kesehatan dan bantuan untuk kegiatan sehari-hari, maka tenaga pelayanan harus selalu mencuci tangan sebelum dan setelah membantu lanjut usia beraktivitas. Selain itu tenaga pelayanan harus selalu menggunakan masker selama berada di dekat lanjut usia. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko penularan virus corona kepada lanjut usia.

Peningkatan jumlah lanjut usia yang diikuti dengan beragam permasalahan sosial menuntut aneka ragam dan kualitas pelayanan sosial kepada lanjut usia. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat melalui pelayanan sosial lanjut usia berbasis komunitas (*Community based*) sangat diperlukan. Pelayanan sosial lanjut usia berbasis komunitas, dapat berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 38 ayat 2 yang berbunyi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat diantaranya adalah melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Organisasi Sosial. Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang asistensi sosial melalui lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia, pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang selanjutnya disingkat LKS LU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. LKS LU berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

LKS LU hadir dan diperlukan karena bertambahnya jumlah lanjut usia yang

mebutuhkan pelayanan. Menurut data Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial (2014), jumlah LKS yang bergerak dalam pelayanan sosial lanjut adalah 282 LKS dengan melayani 8.500 lansia, jumlah ini masih belum sebanding dengan populasi lanjut usia yang semakin meningkat. Kehadiran LKS dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia, sejatinya lebih diarahkan pada model pelayanan berbentuk program *day care services* atau Program Pelayanan Harian Lanjut Usia (PHLU).

Pelayanan tersebut merupakan suatu model pelayanan sosial dimana lanjut usia datang ke LKS LU sesuai dengan waktu yang ditentukan. PHLU ini diharapkan sebagai alternatif pelayanan yang tepat dalam mempertahankan dan mengembangkan keberfungsian sosial lanjut usia, serta merespon kebutuhan dan permasalahan guna mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia. Di samping itu, PHLU juga diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan lanjut usia yang tidak dapat diberikan oleh keluarganya seperti perawatan jiwa dan psikososial lanjut usia di tengah pandemi.

Perawatan lanjut usia di LKS LU dilakukan melalui pendampingan oleh seorang pendamping sosial. Menurut Direktorat Bantuan Sosial (2007) Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan. Pendampingan lanjut usia di LKS LU dapat dilakukan oleh pendamping sosial yang berlatar belakang pekerja sosial, atau pramu sosial, pengasuh, dan relawan sosial dengan syarat mempunyai kompetensi terkait bimbingan dan perawatan lanjut usia.

Pada masa pandemi COVID-19, pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sosial di LKS LU harus lebih diarahkan kepada DKJP lanjut usia. Dalam melakukan DKJP lanjut usia, pendamping dapat mengacu pada buku pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada masa pandemi COVID-19 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI. Pada buku tersebut, disampaikan bahwa untuk mencegah COVID-19, pendamping sosial dapat mengajarkan kepada lanjut usia dan keluarganya tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan fisik lanjut usia. PHBS yang dapat diajarkan oleh pendamping sosial dapat berupa seperti:

- 1) Mengonsumsi makanan yang sehat dan gizi cukup secara teratur.
- 2) Istirahat yang cukup (6-8 jam/hari).
- 3) Melakukan olahraga/aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kemampuan fisik lanjut usia.
- 4) Cara mencuci tangan yang benar.
- 5) Cara menggunakan masker yang benar.
- 6) Etika yang benar pada saat batuk atau bersin.

Hal lain yang tidak kalah penting dan perlu untuk diajarkan oleh pendamping sosial kepada lanjut usia dan keluarga terkait dengan PHBS adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pentingnya hal tersebut bagi lanjut usia karena lingkungan yang bersih dapat menimbulkan rasa nyaman, dan meningkatkan taraf kesehatan serta mencegah berbagai penyakit. Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat pendamping sosial dapat mengajarkan kepada lanjut usia dan keluarganya terkait kebersihan rumah (kamar lanjut usia, kamar mandi, ruang keluarga, dapur dll), ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup, serta tidak merokok di dalam rumah.

Bagi lanjut usia yang terlantar karena tinggal sendiri dirumah, pendamping sosial harus mampu menggerakkan kelompok dukungan sosial di lingkungannya untuk membantu lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, agar tidak muncul sindrom sarang kosong yang akan berdampak pada psikologis dan kejiwaan, maka pendamping sosial dapat memfasilitasi lanjut usia melakukan panggilan lewat *chat* atau *video call* dan menganjurkan kepada lanjut usia untuk saling berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat secara teratur melalui virtual. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan komunikasi lanjut usia dengan anggota keluarga dan kerabatnya sehingga relasi lanjut usia tetap terjaga.

Jika lanjut usia yang memerlukan perawatan medis dan rehabilitasi psikososial, para pendamping dapat melakukan rujukan ke rumah sakit atau trauma *center* untuk mendapat perawatan medis dan rehabilitasi psikososial dari dokter dan ahli psikososial. Selain itu pendamping mengunjungi secara berkala, selama lanjut usia menjalani perawatan dari dokter dan ahli psikoterapi sebagai bentuk dukungan moral. Apabila lanjut usia telah selesai proses pengobatan medis dan rehabilitasi psikososial maka pendamping dapat membantu dalam mengurus keputusannya.

Pelayanan sosial lanjut usia berbasis komunitas akan lebih optimal apabila ada peran serta dari keluarga lanjut usia. Hal tersebut disebabkan karena LKS hanya sebagai bagian dari sistem dukungan dalam melakukan pelayanan lanjut usia. Sedangkan pelayanan utama berasal dari rumah tangga (*home-based*) yaitu keluarga lanjut usia. Hal tersebut karena pranata sosial pertama dan utama dalam mewujudkan lanjut usia sejahtera adalah keluarga.

Menurut Chan (2005) keluarga yang merupakan dukungan informal menjadi pihak yang paling penting dan diandalkan ketika dukungan formal yaitu negara kesulitan bahkan tidak dapat menjamin dengan baik kehidupan lanjut usia. Hal senada juga dikemukakan oleh Harris dalam Baroroh dan Irafayani (2015) bahwa keluarga merupakan orang terdekat yang secara spontan akan mengambil bagian menjadi *care giver*, ketika keluarga yang dicintainya membutuhkannya.

Layanan lanjut usia berbasis rumah tangga adalah bentuk pelayanan pendampingan dan perawatan lanjut usia di rumah yang dilakukan oleh keluarga inti. Pelayanan lanjut usia di rumah dapat dilakukan dalam bentuk membantu lanjut usia yang mempunyai hambatan fisik, mental dan sosial, termasuk memberikan dukungan dan pelayanan untuk lanjut usia hidup mandiri.

Pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia berbasis rumah tangga sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Program ini telah diperkenalkan sejak tahun 1974 oleh almarhum Ibu Jenderal A.H. Nasution yang ketika itu lebih berfokus pada pemberian makanan bergizi kepada lanjut usia. Setelah itu, Pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di rumah mulai berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Perkembangan ini diikuti dengan keberagaman pelayanan dan perawatan seperti fisik, jiwa dan psikososial lanjut usia. Pentingnya perawatan fisik dan jiwa karena apabila lanjut usia mengalami sakit fisik maka akan berdampak pada perubahan dalam aktifitas, bekerja, dan gaya hidup. Ketidakmampuan lanjut usia terhadap perubahan yang dialami akan menimbulkan kondisi distress. Hal tersebut akan berimplikasi pada kondisi psikososial lanjut usia seperti sulit untuk merespon situasi dan kondisi yang dialami.

Dalam melakukan pelayanan dan perawatan lanjut usia di tengah pandemi COVID-19 maka keluarga perlu memberikan DKJPS kepada lanjut usia. Dukungan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) Anggota keluarga tetap menghormati, menghargai, memperhatikan dan mengikutsertakan lanjut usia dalam aktivitas keluarga dengan tetap memperhatikan jarak fisik dan sosial.
- 2) Memfasilitasi lanjut usia untuk mengenang masa lalu yang menyenangkan dengan menceritakannya kepada anggota keluarga dengan tetap memperhatikan jarak fisik dan sosial agar kebahagiaan tetap dipertahankan.

Bagi keluarga yang memiliki lanjut usia dengan masalah kognitif sehingga lanjut usia sulit untuk mencerna kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah maka keluarga perlu untuk memberikan informasi yang benar dengan cara sederhana dan mudah dimengerti oleh lanjut usia tentang wabah COVID-19. Selain itu karena perbedaan generasi sehingga lanjut usia tidak terbiasa dengan penggunaan alat pelindung atau melakukan metode pencegahan yang disarankan bahkan menolak untuk melalukannya, oleh sebab itu maka keluarga perlu untuk mengkomunikasikan dengan cara yang jelas, singkat, sopan dan sabar.

Lantaran penerapan PSBB berakibat pada terbatasnya mobilitas dan aktifitas lanjut usia di luar rumah. Oleh sebab itu untuk mengurangi kebosanan maka keluarga perlu memberikan latihan fisik sederhana yang dapat dilakukan di rumah sehingga mampu mengurangi kebosanan pada diri lanjut usia. Selain itu, penerapan *sosial distancing* dan *physical distancing* berakibat pada terbatasnya komunikasi juga berimplikasi pada masalah relasi lanjut usia dengan teman-teman seusianya. Padahal salah satu tugas lanjut usia adalah

membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia dan menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luwes. Apabila hal tersebut tidak telaksana dengan baik maka akan menimbulkan masalah relasi yang akan mengurangi kesejahteraan lanjut usia. Oleh sebab itu keluarga dapat memfasilitasi lanjut usia untuk berkomunikasi dengan teman-temannya melalui panggilan lewat *chat* atau *video call*.

Apabila lanjut usia memiliki penyakit kronis maka keluarga perlu untuk memastikan agar lanjut usia tidak lupa minum obat bahkan putus obat. Selain itu keluarga juga perlu untuk memiliki stok obat yang mencukupi di rumah serta konsultasikan ke dokter terpercaya sebelum mengkonsumsi obat jangka panjang. Bagi keluarga yang memiliki lanjut usia penderita diabetes maka pastikan keluarga selalu untuk mengecek secara berkala tekanan darah dan kadar gula tubuh lanjut usia tersebut dengan test mandiri di rumah. Sedangkan bagi keluarga yang memiliki lanjut usia yang hanya mampu terbaring di tempat tidur (*bedridden*) maka keluarga dapat berperan sebagai *caregiver* dalam perawatan jangka Panjang (PJP) lanjut usia.

Menurut Kemenkes RI (2019) *caregiver* adalah tenaga yang berasal dari keluarga, relawan, dan kader yang memberikan bantuan dan pendampingan kepada lanjut usia. Sedangkan PJP menurut Kemenkes RI (2019) merupakan perawatan yang diberikan kepada lanjut usia yang memerlukan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari yang disebabkan adanya ketidakmampuan baik secara fisik maupun mental. PJP bertujuan untuk mengurangi keluhan lanjut usia akibat penyakit, mencegah komplikasi dan kecelakaan, dan mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup yang lebih optimal dan bermartabat hingga akhir hayatnya.

Dalam melakukan PJP, *caregiver* yang merawat lanjut usia juga harus menjaga kesehatan diri sendiri, termasuk kesehatan fisik dan mental, agar lebih mampu merawat lanjut usia dengan baik, mengingat memberikan asuhan pada lanjut usia merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketahanan fisik, ketelitian dan kesabaran. Selain itu di tengah pandemic COVID-19, sebagai orang yang merawat atau kontak langsung dengan lanjut usia, keluarga harus lebih berhati-hati dalam melindungi diri dari virus corona. Oleh sebab itu *caregiver* yang merawat lanjut usia harus selalu mencuci tangan sebelum dan setelah membantu lanjut usia beraktivitas. Apabila keluarga yang merawat lanjut usia sehabis beraktivitas di luar rumah, maka sebelum menemui atau merawat lanjut usia harus mengganti pakaian terlebih dahulu. Bila perlu, gunakan masker selama berada di dekat lanjut usia

Selain itu, apabila lanjut usia mengalami masalah terkait dengan kesehatan jiwa dan psikososial akibat adanya kejadian yang tak terduga dari pandemi COVID-19, maka keluarga harus mampu untuk membantu lanjut usia menyelesaikan masalahnya. Hal yang dapat dilakukan oleh keluarga adalah:

- 1) Periksa kepada dokter dan ahli yang berkompeten di bidang terapi psikososial, untuk mendapat diagnosis dan pengobatan yang sesuai.
- 2) Memberikan obat untuk diminum sesuai dosis yang telah ditetapkan.
- 3) Membimbing agar dapat mengikuti aturan dan larangan yang dianjurkan dokter dan ahli yang berkompetensi dibidang terapi psikososial.
- 4) Mendampingi dengan cara memberikan motivasi agar timbul rasa optimisme.

- 5) Memberikan bantuan perawatan diri apabila yang bersangkutan tidak atau belum dapat melakukannya sendiri.

Hal penting lainnya yang perlu dilakukan oleh keluarga kepada lanjut usia adalah mengajak lanjut usia untuk berjemur di pagi hari dengan rentang waktu 10-15 menit. Selain itu, keluarga juga harus membiasakan PHBS dan menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa nyaman bagi lanjut usia. Lingkungan yang bersih juga dapat meningkatkan taraf Kesehatan dan mencegah berbagai penyakit. Terkait hal tersebut yang dapat dilakukan oleh keluarga adalah menjaga kebersihan rumah, ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup dan tidak merokok di dalam rumah.

Implikasi teoritis dari tulisan ini adalah kesehatan mental diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan masyarakat serta lingkungan dimana ia hidup. Dengan demikian, lanjut usia dapat dikatakan sehat secara mental bukan hanya terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa (*neurose*) dan gejala-gejala penyakit jiwa (*psychose*), tetapi berkaitan dengan kemampuan penyesuaian diri secara aktif dalam menghadapi dan mengatasi masalah dengan mempertahankan stabilitas diri ketika berhadapan dengan kondisi baru. Memiliki penilaian nyata baik tentang kehidupan maupun keadaan diri sendiri. Semua hal tersebut dapat terwujud apabila tercipta keseimbangan diri, dalam memandang keberadaan diri dan juga lingkungan sosial di sekitarnya. Kesehatan mental lanjut usia pada masa pandemi COVID-19 ini sangat erat kaitannya dengan perubahan kebiasaan dalam masyarakat, sehingga lanjut usia tidak mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya sehingga DKJPS pada lanjut usia sangat diperlukan.

PENUTUP

Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial (DKJPS) kepada lanjut usia pada masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan melalui pelayanan sosial lanjut usia berbasis institusi (*institutional based*), pelayanan sosial lanjut usia berbasis komunitas (*community based*), dan layanan berbasis rumah tangga (*home-based*). DKJPS kepada lanjut usia mandiri yang berada di panti dan dapat dilakukan melalui pengoptimalan kegiatan bimbingan mental, agama dan sosial. Sedangkan kepada lanjut usia yang tinggal di dalam panti dan sudah tidak memiliki kemandirian (*bedridden*), bentuk DKJPS yang dapat diberikan adalah pelayanan yang lebih intensif terutama dalam kesehatan.

Perawatan lanjut usia berbasis komunitas (*community based*) dapat dilakukan melalui pendampingan oleh seorang pendamping sosial. Dalam melakukan DKJPS pendamping sosial dapat mengajarkan kepada lanjut usia dan keluarganya tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Bagi lanjut usia yang terlantar karena tinggal sendiri dirumah, pendamping sosial harus mampu menggerakkan kelompok dukungan sosial di lingkungannya untuk membantu lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Terkait dengan pelayanan lanjut usia layanan berbasis rumah tangga (*home-based*), bentuk DKPJS yang dapat diberikan oleh keluarga adalah mengatur aktifitas lanjut usia dengan tepat tanpa mengurangi kemandirian dari lanjut usia sehingga dapat memenuhi tujuan perawatan lanjut usia yaitu mencapai kondisi kesehatan yang optimal, mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri sehingga meningkatkan kualitas hidup lansia. Selain itu, keluarga perlu untuk membantu lanjut usia untuk menyesuaikan dirinya terhadap tugas perkembangan yang harus dilakukan.

Apabila lanjut usia memiliki penyakit kronis maka keluarga perlu untuk memastikan agar lanjut usia tidak lupa minum obat bahkan putus obat. Sedangkan bagi keluarga yang memiliki lanjut usia yang hanya mampu terbaring di tempat tidur (*bedridden*) maka keluarga dapat berperan sebagai caregiver dalam perawatan jangka Panjang (PJP) lanjut usia.

Berbagai DKJPS melalui pelayanan sosial tersebut sangat dibutuhkan oleh lanjut usia terutama pada masa pandemi COVID-19. Namun sayangnya Indonesia tidak mempunyai kebijakan khusus terkait penanganan DKJPS pada masa pandemi COVID-19. Padahal menurut Dr. dr. Hervita Diatri, SpKJ(K), setidaknya ada empat masalah kesehatan mental yang berhasil diidentifikasi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Masalah tersebut merupakan masalah baru maupun lanjutan masalah yang semakin berat (Adit, 2020). Empat masalah tersebut yaitu:

1. Tingginya proporsi depresi, kecemasan, dan distres di masyarakat, termasuk pada kelompok petugas di layanan kesehatan.
2. Banyaknya orang dalam usia produktif yang mengalami masalah kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ditambah dengan kelompok rentan lainnya (perempuan, anak dan remaja, serta orang lanjut usia).
3. Semakin terbatasnya jangkauan pelayanan kesehatan mental di masyarakat.
4. Terputusnya layanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa dan meningkatkan risiko kekambuhan.

Oleh sebab itu kebutuhan akan perlindungan dan pelayanan publik yang mendorong terciptanya kesehatan mental bagi warga Negara Indonesia terutama lanjut usia sangat diperlukan. Berdasarkan hasil kajian pustaka ini, selanjutnya penulis memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, hendaknya membuat kebijakan khusus terkait penanganan kesehatan mental pada masa pandemi.
2. Kepada pihak panti, hendaknya melaksanakan pembekalan dan peningkatan kapasitas perkerja sosial terkait dengan DKPJS di tengah pandemi COVID-19 secara berkelanjutan sehingga pelayanan lanjut usia di dalam panti lebih optimal.
3. Kepada masyarakat, hendaknya ikut serta dalam pemberian DKPJS kepada lanjut usia yang berada dilingkungannya.
4. Kepada keluarga yang memiliki lanjut usia, hendaknya keluarga berperan penuh dalam upaya perawatan kepada lanjut usia sehingga akan memberikan dampak yang baik pula kepada lanjut usia karena merasa diperhatikan, mendapatkan kasih sayang, merasa bahagia, dan terpenuhi kepuasan dalam menjalani kehidupan. Kondisi tersebut akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus, Adit. (2020). *Ini 4 Kebijakan Kesehatan Mental Selama Pandemi Hasil Rekomendasi*. UI. <https://edukasi.kompas.com/read/2020/08/28/134553271/ini-4-kebijakan-kesehatan-mental-selama-pandemi-hasil-rekomendasi-ui?page=all>. Diakses 16 November 2020
- Baroroh, D. B., & Irafayani, N. (2015). Peran Keluarga Sebagai Care Giver Terhadap Pengelolaan Aktifitas Pada Lanjut usia Dengan Pendekatan Nic (Nursing Intervention Classification) Dan Noc (Nursing Outcome Classification). *Jurnal Keperawatan*, 3(2).
- Buckle, P. (1998/99). Re-defining community and vulnerability in the context of emergency management, *Australian Journal of Emergency Management* (Summer 1998/99), pp 21-26
- Chan, Angelique. (2005). *Aging in Southeast and East Asia: Issues and Policy Directions. J Cross Cult Gerontol* (2005), Volume 20, pp. 269–284.
- Central Disease Control and Prevention (CDC). (2020). *Social Distancing*. *Data.cdc.com*. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html> . Diakses 10 Oktober 2020
- Cooper, Joel. (2007). *Cognitive Dissonance: Fifty Years of a Classic Theory*. London: SAGE Publications
- Departemen Sosial RI. (2007). *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Direktorat Bantuan Sosial.
- Fatmah . (2010). *Gizi Usia Lanjut*. Erlangga. Jakarta
- Gunarsa, S. D., & Singgih D. G. (2007). *Psikologi Untuk Membimbing*. Jakarta: PT. BPK. Gunung Mulia.
- Hurlock, E. B. (2006). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Edisi kelima. Jakarta: Erlangga.
- Hooyman, N. & H. Asuman Kiyak. (2014). *Social Gerontology: A Multidisciplinary Perspective*. Amerika: Pearson.
- IASC (2020). *Catatan tentang aspek kesehatan jiwa dan psikososial wabah COVID-19 Versi 1.0*. Februari 2020
- Ika. (2020). *Pakar UGM Paparkan Penyebab Lanjut usia Rentan Terinfeksi COVID-19*. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/19320-pakar-ugm-paparkan-penyebab-lansia-rentan-terinfeksi-covid> . Diakses 02 Juni 2020.

- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Hindari Lanjut usia dari COVID-19*. Diakses dari <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>. Diakses 1 Oktober 2020.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Panduan Praktis Untuk Caregiver Dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga.
- Kemntrian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Pada Pandemi COVID-19*. Jakarta: Direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
- Kementerian PPN/Bappenas. (2015). *Perlindungan Sosial Lanjut Usia*. Jakarta: Direktorat Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. <http://cas.ui.ac.id/wpcontent/uploads/seminar27052015/Perlindungan-SosialLANZIA-CAS.pdf> . Diakses 04 Juni 2020.
- Kementrian Sosial RI. (2012). Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 tahun 2012 tentang *Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia*.
- Kementrian Sosial RI. (2013). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang *Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*.
- Kementrian Sosial RI. (2014). *Pendampingan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Situasi Kedaruratan*. Jakarta: Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial.
- Kementrian Sosial RI. (2014). *Pedoman Asistensi Sosial Lanjut Usia Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
- Krippendoff, Klaus. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.
- Mapiere, Andi. (1983). *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Morrow-Howell, Nancy, Natalie Galucia, dan Emma Swinford.(2020)."*Recovering from the COVID-19 Pandemic: A Focus on Older Adults*".*Journal of Aging & Social Policy*, 32:4-5, 526-535, DOI: 10.1080/08959420.2020.1759758.
- Muhidin, Syarif. (1992). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: STKS press
- Musnamar, Tohari. (1992). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press. Masalah Psikologis di Era
- PDSKJI. (2020). 5 Bulan Pandemi COVID-19 Di Indonesia. <http://pdskji.org/home>. Diakses 16 November 2020
- Pungky, Sumadi. (2020). *Elderly Life and Care Post COVID-19*. Bahan tayang pada Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Ke 24, pada tanggal 29 Mei 2020.
- Rita, Ekka. (2008). *Perkembangan Peserta Didik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Republik Indonesia.(2009).Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*
- Sabarguna, B.S. (2005). *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Santika, Adhi. (2020). *Kelompok Rentan Lanjut usia dalam Episentrum Penanganan COVID-19*. Bahan tanyang pada webinar series INFID SDGs COVID-19, 20 Mei 2020.
- Santoso, M. B. (2016). Kesehatan Mental Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. Share : *Social Work Journal*, 6(1).

<https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13160>

Siti Partini Suardiman. (2011). *Psikologi Usia Lanjut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Tristanto, Aris. (2020). *Masalah Kesehatan Jiwa dan Psikososial Lanjut Usia Ditengah Pandemi COVID-19*.
<https://www.rancah.com/berita-opini/68168/masalah-kesehatan-jiwa-dan-psikososial-lanjut-usia-di-tengah-pandemi-covid-19/>

Qiu, Jianyin, Bin Shen, Min Zhao, Zhen Wang, Bin Xie, Yifeng Xu. (2020), "A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations", *General Psychiatry* 2020;33:e100213.
doi:10.1136/gpsych-2020-100213.

Zaid, Wahyudi (2020). *Warga lanjut usia (lansia) makin tersisih*.
<https://kompas.id/baca/humaniora/kesehatan/2020/05/29/lansia-makin-tersisih/>.
Diakses 03 Juni 2020

Wisnubrata. (2020), *Penyebab Lanjut usia Rentan Terhadap Virus Corona dan cara Melindunginya*.
<https://lifestyle.kompas.com/read/2020/03/26/163814320/penyebab-lansia-rentan-terhadap-virus-corona-dan-cara-melindunginya?page=all>. Diakses 2 Juni 2020

PEDOMAN BAGI PENULIS

PROSEDUR

1. Artikel berupa karya ilmiah dengan ranah hasil kajian, konseptual dan pemikiran bidang permasalahan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan belum pernah dipublikasikan di majalah ilmiah lain.
2. Artikel merupakan karya orisinal (bukan plagiat), tidak sedang diproses dalam majalah ilmiah lain dan belum pernah dipublikasikan
3. Mencantumkan biodata penulis yang berisi : nama lengkap, nama instansi, alamat instansi dan email.
4. Penulis wajib mengisi formulir pernyataan orisinalitas KTI, *ethical statement*, *copywrite transfer* dan *proof reading*.
5. Tulisan menggunakan format A4, *times new roman (12)*, spasi 1.5 dan minimal 10 halaman.
6. Sistematika Penulisan sebagai berikut
 - a. **Judul** (dua bahasa; Indonesia dan Inggris dengan huruf Kapital)
 - b. **Abstrak** (dua bahasa) terdiri dari :
Pembukaan, masalah & tujuan, materi, hasil dan kesimpulan.
Abstrak ditulis dalam satu paragraf, 150-250 kata.
Kata Kunci: (diketik miring) kata-kata dalam kata kunci diketik tegak.
 - c. Batang Tubuh Naskah :
PENDAHULUAN
PEMBAHASAN
(sub judul)
(sub judul)
PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
7. **Pengutipan kutipan (sitasi)** menggunakan gaya penulisan **APA Style**, contoh :
Satu Penulis (Walker, 2007)
Dua Penulis (Walker & Allen, 2004)
Tiga Penulis (Bradley et al., 1999)
Lembaga sebagai penulis
(University of Pittsburgh, 2005)
Sitasi sumber tidak langsung
Johnson berpendapat bahwa
(Smith, 2003, h. 102)
Sumber elektronik
(Kenneth, 2003) menjelaskan ..
Penulis dan Tahun tidak diketahui
(Author/Penulis, n.d.)
8. Penulisan daftar pustaka **APA Style** ;
Buku Satu Penulis
Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Buku Lebih dari Dua Penulis

Victor, C., Scambler, S., & Bond, J. (2009). *The Social World of Older People*. UK : Mc Graw Hill

Penulis berupa Tim atau Lembaga

American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (4th ed.)*. Washington, DC : Author

Jurnal

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 55, 893-896.

Majalah

Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. *Time*, 135, 28-31.

Surat Kabar

Santosa, I. (2015, Januari 26). Penggawa dari Masa ke Masa. *Kompas*

Makalah Seminar, Konferensi & sejenisnya

Sitepu, A. (November, 2014). *Evaluasi Kebijakan Program Raskin*. Makalah dipresentasikan dalam konferensi hasil penelitian kebijakan sosial Puslitbangkesos, Jakarta

Surat Kabar Elektronik

Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. *The New York Times*. Diakses dari <http://well.blogs.nytimes.com>

Jurnal Publikasi Elektronik

Lodewijkx, H. F. M.(2001, May 23). Individual Group Continuity in Corporation and Competition Undervarying Communication Conditions. *Current Issues in Social Psychology*, 6(12), 166-182. September 14,2001. <http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.12.htm>

Undang-Undang

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Jakarta : Republik Indonesia

Sumber :

http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?__utma
Online Writing Lab (OWL) Purdue University.
<https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/>
Pedoman Teknis Penulisan ;
<http://www.fe.ui.ac.id/index.php>



ISSN
2442-8094